



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2023-2026 KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Bupati Parosil Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Gedung Surian



dibawah naungan Gunung Pesagi





**BERMIMPILAH  
SETINGGI LANGIT...  
JIKA ENKAU JATUH,  
ENKAU AKAN JATUH  
DI ANTARA BINTANG-  
BINTANG.**

*Soekarno*

find more inspiring quotes @akinini.com



**“JANGANLAH MELIHAT KE MASA DEPAN DENGAN MATA BUTA  
MASA YANG LAMPAU SANGAT BERGUNA SEBAGAI KACA BENGGALA  
DARIPADA MASA YANG AKAN DATANG”**

*Ir. Soekarno*





**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD	KABAG HUKUM

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

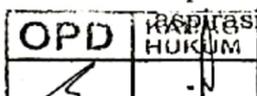
Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

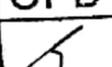
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

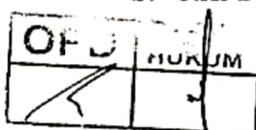
OPD	KABUPATEN HUKUM
	

19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2023-2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN UMUM
  - BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
  - BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
  - BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
  - BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
  - BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
  - BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
  - BAB IX : PENUTUP
- (3) RPD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan :
  - a. Renstra perangkat daerah; dan
  - b. RKPD.



- (5) RPD disusun dengan memperhatikan :
  - a. Penyelarasan target kinerja indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
  - b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD sampai dengan Tahun 2025;
  - c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2017-2022;
  - d. RPJMD Provinsi;
  - e. Isu-isu strategis yang berkembang;
  - f. Regulasi yang berlaku;
  - g. Kebijakan nasional.
- (6) Penentuan tujuan dan sasaran pada RPD didasarkan pada visi, misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis aktual.
- (7) Penyusunan program dalam RPD memperhatikan :
  - a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
  - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021;
  - c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
  - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
  - e. Kebijakan nasional;
  - f. Regulasi yang berlaku;
  - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.
- (8) Penyusunan RPD dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 3

- (1) RPD digunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 4

- (1) RPD dapat dilakukan perubahan apabila :
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun

	KABUPATEN
	MUKOMUKOM
/	/

- c. Terjadinya perubahan yang mendasar;
- d. Perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Perubahan RPD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 5**

Sebelum RPJMD atau RPD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan RKPD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada RPD ini.

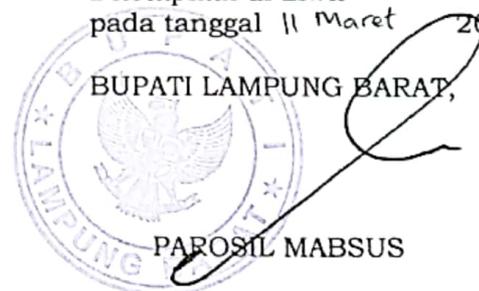
**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 11 Maret 2022



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 11 Maret 2022



Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 14

OPD	KABAG HUKUM



## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-1
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-2
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-2
1.5. Sistematika Penulisan .....	I-3
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-7
2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-12
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-100
2.5. Evaluasi RPJMD 2017-2022.....	II-103
<b>BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b>	
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-10
3.3. Kerangka Pendanaan .....	III-11
<b>BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
4.1. Permasalahan Pembangunan .....	IV-1
4.2. Isu Strategis .....	IV-4
<b>BAB V. TUJUAN, DAN SASARAN</b>	
6.1. Tujuan dan Sasaran .....	V-5
<b>BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN</b>	
6.1. Strategi Pembangunan Daerah.....	VI-1
6.2. Arah Kebijakan .....	VI-9
6.3. Program Prioritas.....	VI-9
<b>BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>VII.1</b>
<b>BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>VIII.1</b>
<b>BAB IX. PENUTUP.....</b>	<b>IX.1</b>



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

---



## Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Tahun 2021 .....	ii-6
Tabel 2.2.	Perkembangan TPT .....	ii-7
Tabel 2.3.	Perbandingan rasio perubahan persentase penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian nasional ..	ii-7
Tabel 2.4.	PDRB Kabupaten Lampung Barat.....	ii-8
Tabel 2.5.	Tingkat Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Barat .....	ii-9
Tabel 2.6.	Angka Melek Huruf .....	ii-10
Tabel 2.7.	Angka Partisipasi Kasar .....	ii-10
Tabel 2.8.	Angka Partisipasi Murni .....	ii-11
Tabel 2.9.	Rata-Rata Lama Sekolah .....	ii-11
Tabel 2.10.	Harapan Lama Sekolah .....	ii-11
Tabel 2.11.	Angka Putus Sekolah (jumlah kasus) .....	ii-11
Tabel 2.12.	Perkembangan TPT Kabupaten Lampung Barat .....	ii-12
Tabel 2.13.	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini .....	ii-13
Tabel 2.14.	Jumlah Sekolah PAUD Formal (TK) .....	ii-14
Tabel 2.15.	Jumlah Sarpras Pendidikan Sekolah Dasar .....	ii-14
Tabel 2.16.	Jumlah Sarpras Pendidikan Menengah Pertama .....	ii-14
Tabel 2.17.	Jumlah Sarpras Pendidikan Non Formal .....	ii-16
Tabel 2.18.	Rasio jumlah sekolah terhadap jumlah siswa .....	ii-17
Tabel 2.19.	Tenaga Pendidik Bersertifikat Tahun 2021 .....	ii-17
Tabel 2.20.	Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019 – 2021 .....	ii-18
Tabel 2.21.	Angka Kematian Ibu .....	ii-19
Tabel 2.22.	Perbandingan AKI dan jumlah kasus kematian ibu.....	ii-19
Tabel 2.23.	Angka Kematian Bayi.....	ii-20
Tabel 2.24.	Angka Kematian Bayi dan Jumlah Kasus Kematian Bayi .....	ii-20
Tabel 2.25.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan .....	ii-21
Tabel 2.26.	Data stunting di Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2018 – 2021 .....	ii-21
Tabel 2.27.	Angka Penemuan BTA (+) di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2021.....	ii-23
Tabel 2.28.	Jumlah Penderita HIV Kabupaten Lampung Barat .....	ii-23
Tabel 2.29.	Jumlah Penderita DBD Kabupaten Lampung Barat TAHUN 2014 – 2021.....	ii-23
Tabel 2.30.	Angka Insidens Malaria Per Diobati Per Mil Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017– 2021.....	ii-24
Tabel 2.31.	Capaian Pelaksanaan Popm Kecacingan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 – 2021 .....	ii-24
Tabel 2.32.	Kasus Kesakitan Penyakit Tidak Menular (20 besar penyakit) .....	ii-25
Tabel 2.33.	Data Fasilitas Kesehatan .....	ii-25
Tabel 2.34.	Jumlah tenaga medis di fasilitas kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 .....	ii-26
Tabel 2.35.	Capaian SDGs Sektor Kesehatan .....	ii-27
Tabel 2.36.	Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2021.....	ii-30
Tabel 2.37.	Kondisi Jalan dan Jembatan .....	ii-31



Tabel 2.38.	Kondisi Jaringan Irigasi/Pengairan .....	ii-33
Tabel 2.39.	Kondisi Sempadan Sumber Air .....	ii-34
Tabel 2.40.	Data Potensi Sungai untuk Pembangkit Listrik .....	ii-36
Tabel 4.41.	Potensi Energi Panas Bumi di Lampung Barat .....	ii-38
Tabel 4.42.	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga .....	ii-39
Tabel 2.43.	Jumlah Perumahan .....	ii-40
Tabel 2.44.	Jumlah Rumah Tangga Memiliki Air Bersih .....	ii-40
Tabel 2.45.	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh .....	ii-41
Tabel 2.46.	Akses sanitasi .....	ii-41
Tabel 2.47.	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) .....	ii-42
Tabel 2.48.	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2021 .....	ii-42
Tabel 2.49.	Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum ..	ii-43
Tabel 2.50.	Capaian Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat .....	ii-44
Tabel 2.51.	Kejadian Bencana .....	ii-45
Tabel 2.52.	Jumlah PMKS Kabupaten Lampung Barat .....	ii-45
Tabel 2.53.	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) .....	ii-46
Tabel 5.54	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Sosial Tahun 2019 – 2021 .....	ii-47
Tabel 2.55.	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas .....	ii-48
Tabel 2.56.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	ii-49
Tabel 2.57.	Persentase Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2021 .....	ii-49
Tabel 2.58.	Data Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun s.d Tahun 2021 ...	ii-49
Tabel 2.59.	Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Eksekutif dan Legislatif Tahun 2019-2021 .....	ii-50
Tabel 2.60.	Perkembangan IPG dan IDG Tahun 2018 – 2021 .....	ii-51
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2019 – 2021 .....	ii-53
Tabel 2.62	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 2021 .....	ii-53
Tabel 2.63.	Data Kelompok Tani/Gapoktan Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 .....	ii-54
Tabel 2.64.	Konsumsi Energi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 .....	ii-56
Tabel 2.65.	Konsumsi Energi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 .....	ii-56
Tabel 2.66.	Tingkat Konsumsi Protein .....	ii-57
Tabel 2.67.	Pola Pangan Harapan Aktual Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 .....	ii-58
Tabel 2.68.	Jumlah Jenis Hak Atas Tanah .....	ii-59
Tabel 2.69.	Jumlah Kasus Sengketa Tanah .....	ii-59
Tabel 2.70.	Kinerja Lingkungan Hidup 2019 s.d 2021 .....	ii-59
Tabel 2.71.	Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 .....	ii-61
Tabel 2.72.	Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d 2021 .....	ii-61
Tabel 2.73.	Pengukuran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa ....	ii-63
Tabel 2.74.	Data Keluarga Berencana .....	ii-63
Tabel 2.75.	Pencapaian Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	ii-64



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

Tabel 2.76.	Jumlah Transportasi Darat s/d 2021 .....	ii-65
Tabel 2.77.	Data telekomunikasi.....	ii-65
Tabel 2.78.	Data statistik sektoral .....	ii-66
Tabel 2.79.	Data Persandian .....	ii-66
Tabel 2.80.	Kondisi keberadaan Koperasi dan UMKM .....	ii-67
Tabel 2.81.	Pencapaian Kinerja Penanaman Modal .....	ii-68
Tabel 2.82.	Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Barat .....	ii-68
Tabel 2.83.	Kinerja OLAHRAGA.....	ii-68
Tabel 2.84.	Atlit binaan IPSI .....	ii-69
Tabel 2.85.	Atlit binaan IPSI .....	ii-69
Tabel 2.86.	Atlit binaan IPSI .....	ii-70
Tabel 2.87.	Atlit binaan PORKI .....	ii-70
Tabel 2.88.	Atlit binaan .....	ii-70
Tabel 2.89.	Atlit binaan PBSI .....	ii-70
Tabel 2.90.	Jumlah Pemuda Lampung Barat Yang Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional .....	ii-70
Tabel 2.91.	Jumlah Penggiat Seni dan Budaya .....	ii-74
Tabel 2.92.	Jumlah Cagar Budaya.....	ii-75
Tabel 2.93.	Jumlah Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya.....	ii-76
Tabel 2.94.	Jenis Perpustakaan .....	ii-77
Tabel 2.95.	Kinerja Kearsipan.....	ii-79
Tabel 2.96.	Realisasi Produksi Usaha Perikanan Tahun 2019-2021.....	ii-80
Tabel 2.97.	Kinerja Perikanan Budidaya Tahun 2019-2021 .....	ii-80
Tabel 2.98.	Jumlah Benih, Industri dan Nilai Perikanan Tahun 2019-2021 .....	ii-80
Tabel 2.99.	Data Kunjungan Wisatawan Nusantara.....	ii-82
Tabel 2.100.	Rekapitulasi Obyek Wisata .....	ii-86
Tabel 2.101.	Jumlah Kunjungan Wisatawan .....	ii-86
Tabel 2.102.	Capaian Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	ii-87
Tabel 2.103.	Kinerja Tanaman Pangan .....	ii-88
Tabel 2.104.	Kinerja Perkebunan .....	ii-89
Tabel 2.105.	Produksi Ternak (Dalam Ekor) .....	ii-90
Tabel 2.106.	Produksi Ternak (Dalam Kg).....	ii-90
Tabel 2.107.	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat .....	ii-91
Tabel 2.108.	Jumlah Sarana Perdagangan.....	ii-92
Tabel 2.109.	Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman.....	ii-92
Tabel 2.110.	Jumlah Penjualan Cenderamata .....	ii-93
Tabel 2.111.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Barat Atas Dasar Harga Berlaku (AdHB) Tahun 2017-2021.....	ii-93
Tabel 2.112.	Jumlah Jenis Industri Kecil.....	ii-94
Tabel 2.113.	Kinerja Kelitbangan .....	ii-96
Tabel 2.114.	Kinerja Kesbangpol.....	ii-98
Tabel 2.115.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2019-2021.....	ii-100
Tabel 2.116.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2019-2021.....	ii-100



Tabel 2.117.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2019-2021 .....	ii-101
Tabel 2.118.	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2019-2021.....	ii-102
Tabel 2.119.	Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah .....	ii-103
Tabel 3.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2021.....	iii-1
Tabel 3.2.	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2021.....	iii-3
Tabel 3.3.	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2021 .....	iii-4
Tabel 3.4.	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Barat .....	iii-5
Tabel 3.5.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Barat .....	iii-5
Tabel 3.6.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lampung Barat.....	iii-6
Tabel 3.7.	Proyeksi APBD Tahun 2022.....	iii-6
Tabel 3.8.	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2021.....	iii-7
Tabel 3.9.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.....	iii-11
Tabel 3.10.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.....	iii-11
Tabel 3.11.	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.....	iii-12
Tabel 3.12.	Proyeksi Defisit Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 .....	iii-12
Tabel 3.13.	Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.....	iii-13
Tabel 3.14.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat .....	iii-14
Tabel 5.1	Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025.....	v-6
Tabel 5.2	Formulasi dan Sumberdata Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026.....	v-8
Tabel 5.3	Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026.....	v-11
Tabel 5.4	Sandingan Sasaran pokok, indikator dan target pembangunan pada Tahap Lima Tahun ke-4 RPJPD Lampung Barat dengan Target RPD .....	v-13
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi.....	vi-5
Tabel 6.2	Arah Kebijakan .....	vi-9
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat.....	vi-10
Tabel 7.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat.....	vii-2
Tabel 8.1	Keterkaitan indikator makro.....	viii-1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat.....	viii-2
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat.....	viii-3



**Infrastruktur Mantap  
Peresmian Jalan Suka Banjar - Tawan**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR :14 TAHUN 2022  
TANGGAL :11 MARET 2022

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan akan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dimana untuk penyusunan dokumen perencanaan pada tahun 2023 perlu disusun suatu acuan guna memastikan proses perencanaan tetap berjalan dan selaras dengan dokumen perencanaan lainnya.

Sejalan dengan itu, sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 disebutkan bahwa Bupati yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat pada minggu ke 2 Bulan Maret Tahun 2022.

RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka

menengah yang memuat Gambaran Umum, Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Kerangka Pendanaan serta Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dimana RPD merupakan Tujuan dan Sasaran pada level Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijabarkan ke Renstra sebagai Tujuan dan Sasaran Kepala Perangkat Daerah.

### **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 harus memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Tahun 2025.
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.
4. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
5. Isu-isu strategis yang berkembang.
6. Kebijakan nasional.
7. Regulasi yang berlaku.

### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud enyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah secara sinergis pada periode tahun 2023-2026.



Adapun tujuan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menyusun perumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu empat tahun.
2. Menyediakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan, dan sasaran RPD.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program, kegiatan dan subkegiatan beserta target dan pagu sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPD disusun dengan sistematika :

#### BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Dasar Hukum Penyusunan
- Hubungan Antar Dokumen
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- Aspek Geografi dan Demografi
- Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- Aspek Pelayanan Umum
- Aspek Daya Saing Daerah

#### BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- Kinerja Keuangan Masa Lalu
- Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- Kerangka Pendanaan

#### BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- Permasalahan Pembangunan
- Isu Strategis

#### BAB V TUJUAN, DAN SASARAN

- Tujuan dan Sasaran

#### BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

- Strategi Pembangunan Daerah
- Arah Kebijakan
- Program Prioritas

#### BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

#### BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

#### BAB IX PENUTUP





Kota Liwa Kota Budaya

## BAB II GAMBARAN UMUM

### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### Karakteristik Lokasi dan Wilayah

#### Aspek Geografi

Kabupaten Lampung Barat terletak antara koordinat  $04^{\circ}51'26'' - 05^{\circ}20'26''$  LS dan  $103^{\circ}50'13'' - 104^{\circ}33'49''$  BT dengan luas 2.064,40 km<sup>2</sup> atau sebesar 6,0% dari luas Provinsi Lampung, dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) dan Kabupaten Way Kanan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Tengah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar 2.1.  
Peta Administrasi Lampung Barat



Sumber : RTRW Lampung Barat, 2019

Posisi Kabupaten Lampung Barat secara geografis merupakan wilayah penghubung ke daerah-daerah di Pulau Sumatera. Di sebelah utara jalan lintas tengah menuju Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, lintas barat menuju pesisir barat ke arah Bengkulu Selatan. Keberadaan jalan lintas ini membuat Kabupaten Lampung Barat menjadi daerah lintasan yang menunjang lalu lintas barang dan orang dari dan ke daerah-daerah di Pulau Sumatera.

Gunung yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat antara lain Gunung Seminung (1.804 m), Gunung Kawit Kerambai (1.777 m), Gunung Subhanallah (1.744 m), Gunung Pematang Beringin (1.680 m), Gunung Sekincau (1.718 m), Gunung Pesagi (2.127 m) dan Gunung Tanjung Jati (1.658 m). adapun bentuk wilayah Kabupaten Lampung Barat bervariasi, mulai dari daerah datar di sebelah selatan hingga daerah bergunung di sebelah utara dengan kemiringan lahan mulai dari relatif landai (0 – 15%) hingga curam (> 40%).

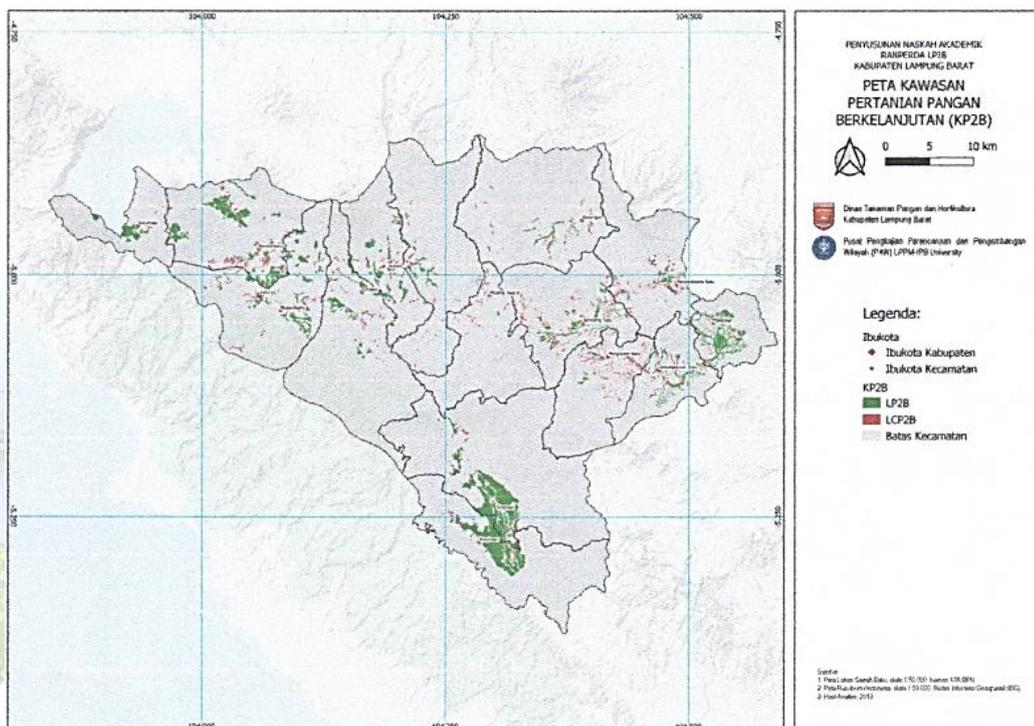
Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah tangkapan air (catchment area) dari sungai-sungai besar yang mengalir ke arah timur yaitu Way Besai dan Way Semangka yang mengalir ke arah selatan.

Proses erosi yang sudah lanjut, besarnya material yang terangkut (sediment load) menyebabkan makin cepatnya daerah ini mengalami kemiskinan unsur hara tanah. Hal ini praktis mengakibatkan daya simpan air daerah ini sangat kecil, ini menyebabkan fluktuasi aliran permukaan (run off) makin besar, sungai – sungai yang mengalir ke sebelah timur dan selatan menjadi terganggu kestabilannya.

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah daerah perbukitan dan pegunungan yang terletak di ujung selatan Bukit Barisan. Secara keseluruhan daerah ini merupakan hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, daerah ini memegang peranan penting dalam sistem hidrologi Provinsi Lampung, yaitu sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dari sungai-sungai besar dan mempengaruhi keadaan iklim secara keseluruhan. Sungai-sungai tersebut diantaranya adalah Way Besay (DAS Tulang Bawang), Way Semangka (DAS Semangka), dan Way Warkuk (DAS Musi).

Gambar 2.2.  
PETA LUAS SEBARAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN



Gambar 2.3.  
Peta Daerah Aliran Sungai



Sumber : RTRW Lampung Barat, 2019

b. Sungai dan Danau

Lampung Barat dialiri dua sungai yaitu Way Besay dan Way Semangka serta memiliki salah satu danau besar di Pulau Sumatera yaitu Danau Ranau. Danau ranau administratif terbelah menjadi dua, sebagian masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat, sebagian lagi menjadi bagian dari Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Luas danau ranau yang masuk ke dalam Kabupaten Lampung Barat sekitar 2.792,2 Ha atau 22,12% dari total luas keseluruhan Danau Ranau. Selain itu terdapat juga 3 danau kecil di Kecamatan Suah yaitu Danau Belibis, Danau Asam dan Danau Minyak.

Curah hujan Lampung Barat berdasarkan data iklim yang terdapat di Stasiun Klimatologi Balik Bukit dan Belau, diketahui berkisar antara 2.500 – 3.000 mm per tahun. Regim kelembaban tergolong basah (udic), dengan kelembaban berkisar antara 50 – 80%. Regim suhu berkisar sejuk sampai dingin (isomesic) di daerah perbukitan, dengan persentase penyinaran matahari berkisar 37,9 – 50,0%.

Lahan pertanian dan perkebunan merupakan pemanfaatan lahan terbesar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat. Seiring dengan perkembangan pembangunan daerah, luas

pemanfaatan lahan pemukiman dan sarana prasarana umum mengalami peningkatan terutama di wilayah-wilayah perkotaan (ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan).

Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan RTRW merupakan Kawasan Rawan Bencana Longsor ; Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor adalah suatu jenis gerakan tanah, umumnya gerakan tanah yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (debris avalanches) dan nendatan (slumps/rotational slides). Gaya-gaya gravitasi dan rembesan (seepage) merupakan penyebab utama ketidakstabilan (instability) pada lereng alami maupun lereng yang di bentuk dengan cara penggalian atau penimbunan.

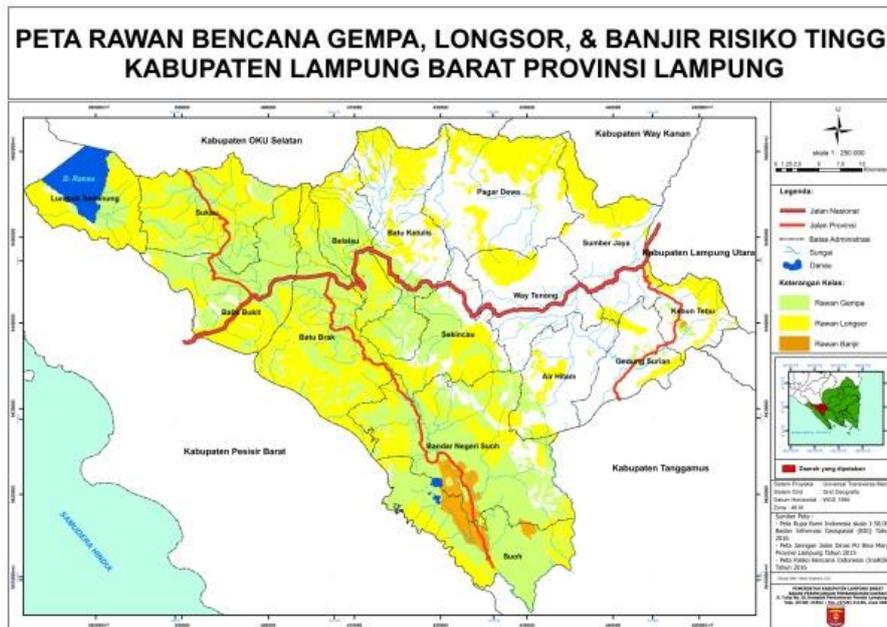
Secara geologi Lampung Barat dilalui oleh Sesar Semangka yang merupakan salah satu sesar utama di Pulau Sumatera. Adanya patahan ini mengakibatkan hampir seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang memiliki potensi rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir.

Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain :

- Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi dan gunung api.
- Iklm : curah hujan yang tinggi.
- Keadaan topografi : lereng yang curam.

- Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika.
- Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah kritis.
- Dari seluruh kecamatan yang ada hanya Gedung Surian saja yang relatif tidak terdapat kawasan rawan longsor.

Gambar 2.4.  
Peta Rawan Bencana



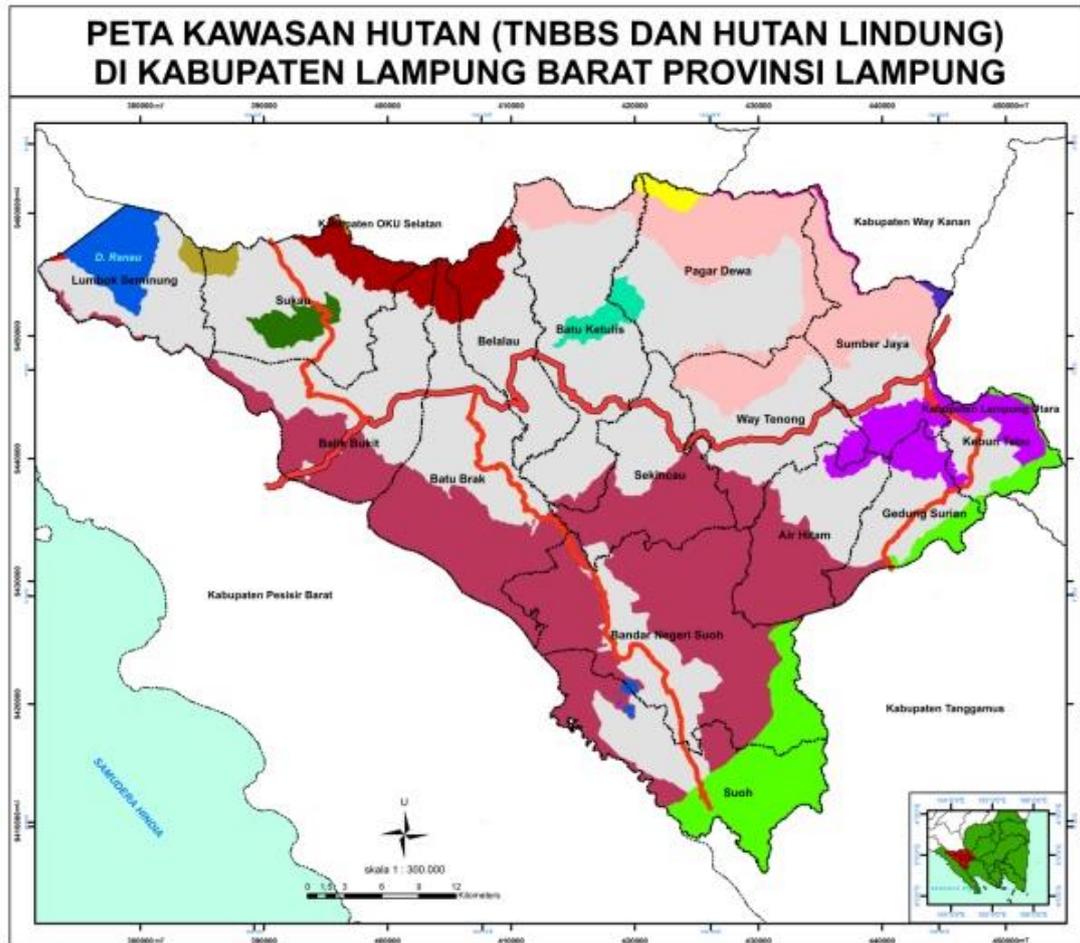
Sumber : RTRW Lampung Barat, 2019

Wilayah Rawan Banjir; banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat

dikatakan sebagai faktor “bakat” atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu.

Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir.

Gambar 2.5.  
Peta Kawasan Hutan



Sumber : RTRW Lampung Barat, 2019

Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Penyebab utama dari banjir pada kawasan tersebut adalah karena kerusakan kawasan tangkapan air, sehingga terjadi surface run off (limpasan) yang tinggi sehingga badan sungai tidak mampu menampung limpasan dan menggenang pada wilayah cekungan/datar.

Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi; Wilayah Kabupaten Lampung Barat secara regional terletak pada Zona Sumber Gempabumi Samudera Indonesia. Lajur penunjaman (Palung Samudera

Indonesia) yang terletak di sebelah barat wilayah Lampung Barat menjadikan wilayah ini rawan bencana gempabumi. Analisis regional menunjukkan kemungkinan akumulasi energi yang terjadi pada jalur penunjaman dapat menjadi pemicu terjadinya gempa bumi akibat pelepasan energi akumulatif tersebut. Selanjutnya energi ini akan merambat lebih cepat melalui patahan-patahan yang terletak pada satu sistem dengan episentrum. Pola struktur di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang berarah tenggara-baratlaut dan timurlaut-baratdaya sangat berpotensi menjadi zona lemah. Untuk itu zona sepanjang patahan-patahan dalam sistem ini harus diwaspadai sebagai daerah bahaya gempabumi merusak. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu variabel utama dalam menentukan tingkat kerawanan bencana di wilayah ini. Sistem patahan dan kondisi litologi merupakan



media yang mampu menghantarkan gelombang gempa ke wilayah-wilayah di sekitar titik episentrum. Daerah-daerah yang harus diwaspadai terkait dengan bencana gempa bumi adalah daerah-daerah pada sistem patahan terutama pada daerah yang ditutupi oleh batuan yang bersifat lepas (unconsolidated), yang pada umumnya berumur Kuarter. (Peta Seismotektonik Indonesia).

Gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan gempa dangkal (dengan hiposenter 0-90 kilometer) dengan kekuatan 5 dan 6 skala Richter. Sejarah terjadinya gempa bumi menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk wilayah gempa bumi yang merusak (Wilayah /Samudera Indonesia). Pusat-pusat gempa berada pada arah barat dan barat daya wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Wilayah yang merupakan daerah resiko gempa bumi di Kabupaten Lampung Barat yaitu :

- Daerah di sekitar zona patahan, seperti di sepanjang Sesar Semangko dari Teluk Karang berak sampai Liwa,
- Daerah pada sebaran litologi berupa aluvial dan batuan berumur Kuarter,
- Daerah pemukiman padat penduduk,
- Daerah dengan bangunan-bangunan permanen ataupun bangunan yang tidak tahan gempa,

Rencana Kawasan Strategis berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 adalah :

- Kawasan Agropolitan; mempunyai nilai strategis ekonomi dan merupakan kawasan strategis kabupaten
- Kawasan Kebun Raya Liwa; mempunyai nilai strategis lingkungan dan merupakan kawasan strategis provinsi
- Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; mempunyai nilai strategis lingkungan dan merupakan kawasan strategis provinsi
- Kawasan PLTP Suoh; mempunyai nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yang merupakan kawasan strategis kabupaten.

### Aspek Demografi

Kependudukan saat ini erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk.

Secara lengkap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.1.  
Jumlah Penduduk Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Lk	Pr	Jumlah
1	Balik Bukit	21.703	20.456	42.159
2	Sumber Jaya	12.545	11.801	24.436
3	Belalau	6.487	6.063	12.550
4	Way Tenong	17.821	17.092	34.913
5	Sekincau	9.931	9.134	19.065
6	Suoh	9.783	8.852	18.635
7	Batu Brak	7.892	7.309	15.201
8	Sukau	13.153	12.304	25.457
9	Gedung Surian	8.820	8.300	17.120
10	Kebun Tebu	10.705	10.204	20.909
11	Air Hitam	6.462	5.849	12.311
12	Pagar Dewa	9.187	8.145	17.332
13	Batu Ketulis	7.116	6.388	13.504
14	Lumbok Seminung	4.426	3.931	8.357
15	Bandar Negeri Suoh	13.521	11.914	25.435
	Jumlah	159.552	147.742	307.294

Sumber data : Data Kependudukan Bersih (DKB) semester Tahun 2021

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Lampung Barat pada tahun 2021 mulai mengalami kenaikan setelah sebelumnya pada tahun 2020 terkontraksi sebesar -1,14%. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 2,58% dengan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp.7.482,44 milyar rupiah.

Selanjutnya Perbandingan rasio perubahan TPT dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.  
Perkembangan TPT

No	Uraian	Lampung Barat		Nasional	
		Pertumbuhan Ekonomi	TPT	Pertumbuhan Ekonomi	TPT
1	Tahun 2018	5,14	2,74	5,17	5,34
2	Tahun 2019	5,20	1,66	5,02	5,28
3	Tahun 2020	-1,14	2,13	-1,67	7,07
4	Tahun 2021	2,58	2,83	2,58	6,49
5	Rasio Perubahan 2 Tahun terakhir	144,19%	24,73%	164,73%	-8,94%

Selanjutnya Perbandingan rasio perubahan persentase penduduk miskin dan pertumbuhan

ekonomi daerah dengan rata-rata capaian nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Perbandingan rasio perubahan persentase penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian nasional

No	Uraian	Lampung Barat		Nasional	
		Pertumbuhan Ekonomi	persentase penduduk miskin	Pertumbuhan Ekonomi	persentase penduduk miskin
1	Tahun 2018	5,14	13,54	5,17	9,66
2	Tahun 2019	5,20	12,92	5,02	9,22
3	Tahun 2020	-1,14	12,52	-1,67	9,78
4	Tahun 2021	2,58	12,82	2,58	9,71
3	Rasio Perubahan 2 Tahun terakhir	144,19%	2,34%	164,73%	-0,72%



### PDRB PERKAPITA

Pada tahun 2021, PDRB Per kapita Lampung Barat ADHB mencapai 24,61 juta rupiah bertambah 1,20 juta rupiah lebih dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 23,41 juta rupiah lebih.

Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan perkapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan segala keterbatasannya, indicator PDRB perkapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

### Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2021 sebesar RP.5,05 triliun rupiah, meningkat tahun 2020 yang sebesar Rp.4,92 triliun rupiah, atau meningkat sebesar 2,58%. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2021 sebesar RP.7,48 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp.7,13 triliun rupiah, atau meningkat sebesar 4,92%.

Kontribusi terbesar pembentukan PDRB ADHB tahun 2021 disumbangkan melalui sektor / Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 47,23% dan sektor / lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,85%. Sedangkan sektor / lapangan usaha terendah adalah Pengadaan listrik dan gas sebesar 0,01%.

Tabel 2.4.  
PDRB Kabupaten Lampung Barat (dalam miliar rupiah)

Sektor PDRB	PDRB ADHK		PDRB ADHB	
	2020	2021	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.379,61	2.383,04	3.405,56	3.533,85
B. Pertambangan dan Penggalian	117,48	113,80	186,12	182,10
C. Industri Pengolahan	237,72	250,46	377,07	400,61
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,87	0,93	1,01	1,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,59	5,71	8,22	8,46
F. Konstruksi	205,68	224,08	284,75	320,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	610,86	665,11	870,03	961,79
H. Transportasi dan Pergudangan	130,40	131,40	187,84	192,89
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56,38	56,15	96,06	96,23
J. Informasi dan Komunikasi	193,54	205,69	229,66	238,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	87,27	91,21	132,83	146,09
L. Real Estate	229,13	232,58	317,70	324,00
M,N. Jasa Perusahaan	8,67	8,78	13,23	13,40
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	300,66	316,68	485,22	509,35
P. Jasa Pendidikan	212,18	216,60	320,95	334,24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75,03	77,45	110,89	116,42
R, S, T, U. Jasa lainnya	75,24	73,65	104,75	103,20



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.926,30	5.053,32	7.131,89	7.482,44
Laju		2,58%		4,92%
JUMLAH PENDUDUK	302.139	303.931	302.139	303.931
PDRB PERKAPITA	16.304.747	16.626.537	23.604.665	24.618.877

Sumber : BPS Lampung Barat, Tahun 2022

## INFLASI

Indeks harga konsumen pada bulan Januari 2019 sebesar 137,77 persen dan pada bulan Desember 2019 sebesar 142,28 persen. Dengan kata lain, selama tahun 2019, terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 3,53 persen.

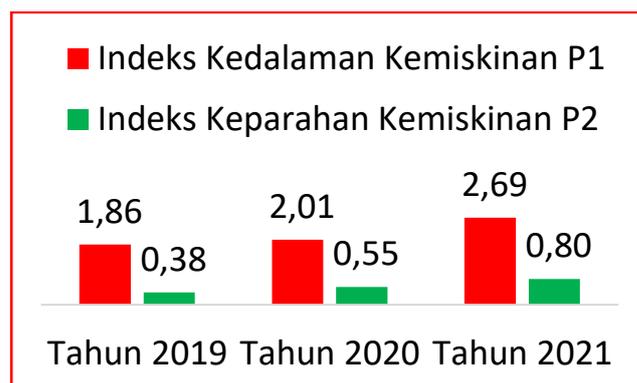
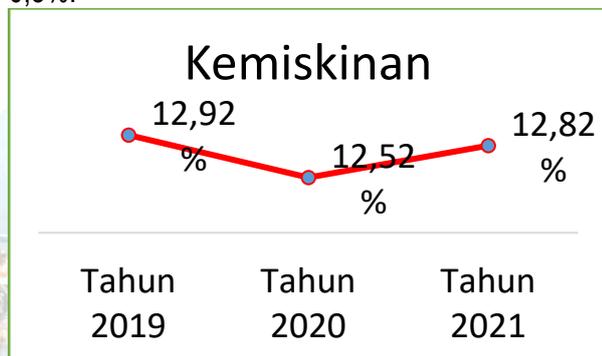
Tabel 2.5.  
Tingkat Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Barat

Indikator	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Tingkat Inflasi Tahunan	3,14	2,92	3,53	-

Sumber : BPS, 2020

## KEMISKINAN

Salah satu indikator yang penting adalah tingkat kemiskinan, pada tahun 2021 di Kabupaten Lampung Barat tingkat kemiskinan sebesar 12,82% sedangkan Untuk jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 39.360 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 sebesar 12,52% setara dengan 38.120 Jiwa, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan sebanyak 0,3%.



Tingkat perubahan indeks kedalaman kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan Lampung Barat tahun 2020 sebesar 2,01 menjadi 2,69 pada tahun 2021, atau bertambah sebesar 0,68.

Secara umum, angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020, namun dampak pandemic *covid19* berpengaruh terhadap meningkatnya angka kemiskinan, yaitu pada tahun 2021 menjadi 12,82%. Hal ini disebabkan dengan banyaknya masyarakat yang harus kehilangan mata pencaharian sebagai akibat banyaknya sector lapangan kerja yang berhenti beroperasi ataupun harus mengalami kebangkrutan akibat pandemic, hal ini juga berdampak pada sector lapangan kerja informal dimana banyak pelaku



usaha harus kehilangan usahanya dikarenakan terjadinya penurunan konsumsi masyarakat secara ekstrem. Rangkaian permasalahan tersebut menyebabkan kemampuan ekonomi masyarakat secara ekonomi menurun secara drastis.

Upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan melalui 4 (empat) strategi: (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan (4) Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Keempat strategi tersebut diimplementasikan dalam program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah terkait. Pada tahun 2021, Kabupaten Lampung Barat ditetapkan sebagai salah satu kabupaten yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem, dengan nilai angka kemiskinan ekstrem pendataan tahun 2020 sebesar 5,38% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 16.770 jiwa. Penanganan kemiskinan ekstrem akan menjadi bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lampung Barat namun dengan berfokus pada pekon-pekon yang menjadi lokus penanganan melalui upaya spesifik dan terintegratif antar lintas sector terkait yang berfokus pada strategi: (1) menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, dan (2) meningkatkan penghasilan dan produktivitas warga miskin, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Presiden RI yaitu kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.

### INDEKS GINI

Indeks gini Lampung Barat pada tahun 2020 sebesar 0,295, menurun sebesar -0,001 dari tahun 2019. Dimana indeks gini Lampung Barat pada tahun 2019 adalah 0,296.

Indeks gini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat, indeks gini yang mendekati angka 0 (nol) mengindikasikan bahwa semakin kecil ketimpangan yang terjadi. Rendahnya indeks gini di Lampung Barat dapat disebabkan karena mayoritas mata pencaharian masyarakat di Lampung Barat adalah pada sector pertanian, dengan kontribusi sector pertanian terhadap PDRB Lampung Barat sebesar 47.23%

(Tahun 2021) dan masyarakat yang bekerja pada sector pertanian sebanyak 74,32% (Tahun 2021). Kondisi ini berpengaruh pada keseragaman tingkat pendapatan di masyarakat.

### 2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

#### ANGKA MELEK HURUF

Tabel 2.6.  
Angka Melek Huruf

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Angka Melek Huruf			
	Laki-Laki	98,01	98,26	-
	Perempuan	98,67	96,77	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis. Angka melek huruf (AMH) merupakan indicator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Berdasarkan data susenas BPS angka melek huruf kabupaten lampung barat yang terakhir yaitu pada tahun 2020 sebesar 97,58% dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa dari 100% penduduk ada sekitar 2,42% penduduk lampung barat yang buta huruf. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna memberantas buta huruf, antara lain adalah dengan adanya Program Pendidikan Non Formal (Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C) yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya yang tinggal di daerah perdesaan.

#### ANGKA PARTISIPASI KASAR

Tabel 2.7.  
Angka Partisipasi Kasar

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	APK SD	98,68	107,90	108,86
2	APK SMP	99,12	87,40	85,84
3	APK SMA	95,50	74,56	72,59

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022



Angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan dari aplikasi APK dan APM Kemdikbud, pada tahun 2019 APK SD sebesar 98,68 persen, APK SMP sebesar 99,12 persen dan APK SMA sebesar 95,50 persen. Pada tahun 2020 APK SD sebesar 107,90 persen, APK SMP sebesar 87,40 persen dan APK SMA sebesar 74,56 persen. Sedangkan pada tahun 2021 APK SD sebesar 108,86 persen, APK SMP sebesar 87,40 persen dan APK SMA sebesar 72,59 persen.

### ANGKA PARTISIPASI MURNI

Tabel 2.8.

#### Angka Partisipasi Murni

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	APM SD	88,55	99,39	99,41
2	APM SMP	79,12	79,36	78,99
3	APM SMA	59,45	62,28	61,22

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Angka partisipasi murni menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka partisipasi murni akan selalu lebih rendah dibanding angka partisipasi kasar karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Angka partisipasi murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya sehingga angkanya lebih kecil. Indikator angka partisipasi murni dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada angka partisipasi kasar karena indikator ini memberikan gambaran konsistensi antara umur penduduk dengan pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan.

### RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Tabel 2.9.

#### Rata-Rata Lama Sekolah

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	RLS	7,85 tahun	8,06 tahun	8,07 tahun

Sumber: BPS, 2022

### HARAPAN LAMA SEKOLAH

Tabel 2.10.

#### Harapan Lama Sekolah

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	HLS	12,24	12,25	12,26

Sumber: BPS, 2022

### ANGKA PUTUS SEKOLAH

Tabel 2.11.

#### Angka Putus Sekolah (jumlah kasus)

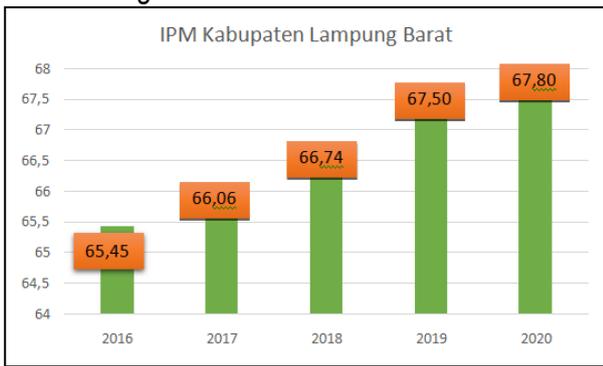
NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Usia 7 – 12 Tahun (SD) (orang)	66	8	106
2	Usia 13 - 15 Tahun (SMP) (orang)	16	3	165

Data pada tabel di atas jumlah yang dihitung adalah jumlah anak putus sekolah pada masing-masing jenjang usia (jenjang sekolah). Jumlah anak putus sekolah tertinggi ada pada jenjang usia 13-15 Tahun (SMP).

### INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM di Kabupaten Lampung Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pencapaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa kualitas manusia di Kabupaten Lampung Barat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menunjukkan indikasi yang semakin membaik. Berdasarkan skala internasional, pencapaian IPM dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu kategori sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ), kategori tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ), kategori sedang ( $60 \leq IPM < 70$ ), dan kategori rendah ( $IPM < 60$ ). Berdasarkan kategori tersebut, IPM Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2020 yang mencapai angka 67,80 masih termasuk dalam kategori sedang.

### Perkembangan IPM



Sumber : BPS, 2021

IPM Lampung Barat tahun 2021 sebesar 67,90 poin menempati urutan ke 8 dari 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung. Pencapaian AHH Lampung Barat tahun 2020 adalah 67,58 tahun bertambah sebesar 0,07 tahun menjadi 67,65 pada tahun 2021.

Pada tahun 2020, RLS Lampung Barat adalah 8,06 tahun bertambah sebesar 0,01 tahun menjadi 8,07 tahun pada tahun 2021.

Pada tahun 2020, HLS Lampung Barat adalah 12,25 tahun bertambah sebesar 0,01 tahun menjadi 12,26 tahun pada tahun 2021.

Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita Lampung Barat adalah Rp.9.929.000 bertambah sebesar Rp.40.000 menjadi Rp.9.969.000 pada tahun 2021.

### TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Tabel 2.12.  
Perkembangan TPT Kabupaten Lampung Barat

Tahun	TPT (%)
2017	0,96
2018	2,74
2019	1,66
2020	2,13
2021	2,83

Sumber : BPS, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 sebesar 2,83% atau sebesar 5.453 Jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Jumlah pengangguran di Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan yang sebelumnya sebesar 2,13%.

Pencapaian TPT Lampung Barat tahun 2020 yaitu 2,13% merupakan TPT paling rendah artinya pengangguran terbuka di Lampung Barat merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung.

### TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lampung Barat berjumlah 192.567 jiwa atau sekitar 83,23% dari jumlah keseluruhan penduduk usia 15 tahun keatas. Ini berarti jumlah angkatan kerja di Lampung Barat jauh lebih besar daripada bukan angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Lampung Barat 83,48% dari jumlah keseluruhan penduduk usia 15 tahun keatas. Ini berarti jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebesar - 0,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun untuk Penyerapan Tenaga Kerja terbesar masih ada di Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan. Pada tahun 2021 sebesar 43,03%.

### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

#### Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

#### 1. Urusan Pendidikan

Pembangunan Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembangunan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga

swasta dan masyarakat. Negara sebagai penyelenggara pembangunan di bidang pendidikan harus memiliki semangat kerja keras dan dedikasi tinggi dalam semangat pengabdian, untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan partisipasi dari berbagai pihak termasuk masyarakat dengan sikap jujur, integritas dan penuh keteladanan dalam membangun pendidikan.

Pemerintah kabupaten Lampung Barat telah melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan maupun penyediaan fasilitas pendidikan yang ada. Hal ini seiring dengan adanya program wajib belajar 9 tahun yang semakin memacu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Diharapkan, upaya yang ada ini dapat mengarah pada perbaikan pendidikan penduduk. Beberapa indikator pendidikan yang akan digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan di bidang pendidikan adalah angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang ada.

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Tabel 2.13.  
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Jumlah Peserta PAUD	5.931	5.835	5531	Orang
2. Jumlah Bangunan PAUD	224	391	399	Unit
3. Jumlah Tenaga Pendidik PAUD	386	556	498	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri dari TK, Kober, SPS, TPA. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak usia tiga sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Keadaan PAUD Kabupaten Lampung

Barat pada tahun 2019 dengan jumlah peserta didik sejumlah 5.931 orang mengalami penurunan jumlah siswa menjadi 5.835 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi 5.531 orang. Dari tabel data diatas menandakan penurunan minat masyarakat Lampung Barat untuk menyekolahkan anak-anaknya dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).

Tabel 2.14.  
Jumlah Sekolah PAUD Formal (TK)

Sekolah Taman Kanak-Kanak	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Jumlah Siswa	4.173	4.027	3.792	Orang
2. Jumlah Bangunan Sekolah TK				Unit
1. Bangunan Baik	95	257	266	Unit
2. Bangunan Tidak Baik	0	2	0	Unit
3. Jumlah Pengelola Sekolah TK				Unit
1. Negeri	18	18	18	Unit
2. Swasta	82	83	85	Unit
4. Jumlah Ruang Kelas Sekolah TK	224	259	266	Ruang Kelas

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Sejalan dengan perkembangan jenjang pendidikan usia dini, data sekolah taman kanak-kanak menunjukkan ketidak stabilan jumlah siswa yang selalu mengalami penurunan dari tahun 2019 ketahun 2021. Jika dilihat pada kondisi bangunan sekolah, bangunan sekolah TK dengan kondisi baik di tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Upaya untuk merehabilitasi

bangunan sekolah merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dibiayai baik melalui APBD Kabupaten Lampung Barat maupun melalui sumber anggaran lainnya sebagai langkah penyediaan bangunan sekolah yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan.

- PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Tabel 2.15.  
Jumlah Sarpras Pendidikan Sekolah Dasar

Pendidikan Dasar	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Jumlah Siswa SD	28.789	28.669	28.064	Orang
2. Jumlah Bangunan SD	1572	1631	1.664	Unit
1. Bangunan Baik	1205	1620	1656	Unit
2. Bangunan Rusak	367	11	8	Unit
3. Jumlah Pengelola SD	213	215	216	Unit
1. Negeri	177	178	179	Unit
2. Swasta	36	37	37	Unit
4. Jumlah Ruang Kelas SD	1572	1631	1664	Ruang
5. Jumlah Tenaga Pendidik SD/MI/Sederajat	1938	2.339	2.148	Orang
1. < S1	331	555	404	Orang
2. ≥ S1	1607	1784	1744	Orang
6. Rasio Siswa dengan Tenaga Pendidik	1:15	1:13	1:13	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Dari tabel diatas perkembangan siswa SD pada tahun 2019 sejumlah 28.789 orang dan tahun 2020 sejumlah 28.669 orang, pada tahun 2021 sejumlah 28.064 siswa. Dari data ini dapat diartikan bahwa perkembangan siswa SD Menurun. Perkembangan bangunan SD Pada Tahun 2019 sejumlah 1.572, pada tahun 2020 sejumlah 1.631 unit dan pada tahun 2021 sebesar 1.664 unit. Dari data bangunan SD sampai dengan ruang kelas SD meningkat hal ini dikarenakan komitmen pemerintah daerah maupun pusat dalam mendukung pembangunan Pendidikan. Perkembangan Tenaga Pendidik

berijasah  $\geq$  S1 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sejumlah 1.607 menjadi 1.744 pada tahun 2021 dan jumlah tenaga pendidik mengalami peningkatan dari tahun 2019 sejumlah 1938 menjadi 2.148 pada tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari rasio siswa per tenaga pendidik pada tahun 2019 dengan rasio 1 orang guru mengajar 15 siswa dan pada tahun 2021 dengan rasio 1 orang guru mengajar 13 siswa, hal ini dapat diartikan bahwa guru SD dilampung barat sudah terpenuhi berdasarkan jumlah.



Tabel 2.16.  
Jumlah Sarpras Pendidikan Menengah Pertama

Pendidikan Menengah Pertama	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Jumlah Siswa SMP	10467	10525	10.586	Orang
2. Jumlah Bangunan SMP	443	452	472	
1. Bangunan Baik	339	449	464	Unit
2. Bangunan Tidak Baik	104	3	8	Unit
3. Jumlah Pengelola SMP	55	57	60	Unit
1. Negeri	46	48	48	Unit
2. Swasta	9	9	12	Unit
4. Jumlah Ruang Kelas SMP	443	459	472	Ruang
5. Jumlah Tenaga Pendidik SMP	913	1.305	1.117	Orang
1. < S1	48	254	116	Orang
2. $\geq$ S1	865	1051	1001	Orang
6. Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik	1:12	1:8	1:11	
7. Jumlah Sekolah SMP Sederajat Memiliki Fasilitas Laboratorium	52	56	56	Unit
1. Negeri	44	48	48	Unit
2. Swasta	8	8	8	Unit
8. Jumlah Sekolah SMP Sederajat Memiliki Fasilitas Komputer	55	57	60	Unit
1. Negeri	46	48	48	Unit
2. Swasta	9	9	12	Unit



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

Pendidikan Menengah Pertama	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
9. Jumlah Sekolah SMP Sederajat Memiliki Fasilitas Internet				Unit
1. Negeri	-	-	-	Unit
2. Swasta	-	-	-	Unit

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Dari tabel diatas perkembangan siswa SMP mengalami peningkatan dari tahun 2019 sejumlah 10467 dan pada tahun 2021 sejumlah 10.586, Jumlah bangunan pada tahun 2019 sejumlah 443 dan pada tahun 2021 sejumlah 472. Dilihat dari

jumlah pembangunan SMP dilampung barat selalu meningkat setiap tahunnya hal ini dikarenakan komitmen kabupaten lampung barat dalam peningkatan mutu Pendidikan.

- PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL

Tabel 2.17.  
Jumlah Sarpras Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja				
1. Jumlah Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja	3	3	3	Unit
2. Jumlah Kelas Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja	3	3	3	Ruang
3. Jumlah Siswa Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja				Orang
4. Jumlah Tenaga Pengajar Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja	6	6	6	Orang
2. Pendidikan Kesetaraan				
1. Pendidikan Kesetaraan Paket A				
1. Jumlah Siswa	124	124	106	Orang
2. Jumlah Tenaga Pengajar	12	12	12	Orang
2. Pendidikan Kesetaraan Paket B				
1. Jumlah Siswa	444	393	362	Orang
2. Jumlah Tenaga Pengajar	23	23	23	Orang
3. Pendidikan Kesetaraan Paket C				
1. Jumlah Siswa	600	909	787	Orang
2. Jumlah Tenaga Pengajar	29	29	29	Orang
3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)				
1. Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat				



Pendidikan Non Formal			Tahun			Satuan
			2019	2020	2021	
		1. Jumlah Peserta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	1168	1326	1255	Orang
		2. Jumlah Tenaga Pengajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	64	64	64	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Pendidikan non formal adalah langkah yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah ataupun masyarakat yang akan meningkatkan kompetensinya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan ataupun untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya pendidikan non formal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

- Rasio Sekolah dan Siswa

Tabel 2.18.

Rasio jumlah sekolah terhadap jumlah siswa

JENJANG	2020	2021
SD	1:134	1:130
SMP	1:185	1:177

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Sesuai dengan Permendikbud nomor 23 Tahun 2013, Pasal 2 Poin 2 dengan perbandingan rasio siswa dengan rombongan belajar untuk jenjang SD/MI minimal 20, dan tidak lebih dari 32 orang, untuk SMP/MTs minimal 20, dan tidak melebihi 36 orang maka jika di ansumsikan jumlah rombel SD/MI sebanyak 6 tingkat maka standar rasio sekolah terhadap jumlah siswa 1:120 dan untuk SMP/MTs sebanyak 3 tingkat maka standar rasio sekolah terhadap jumlah siswa per sekolah adalah 1:60. Berdasarkan data tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel maka untuk rasio sekolah terhadap jumlah siswa di Kabupaten Lampung Barat sudah terpenuhi .

- Data Tenaga Pendidik Bersertifikat

Tabel 2.19.

Tenaga Pendidik Bersertifikat Tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru Penerima	Golongan per Jenjang Pendidikan	Jumlah Penerima per Golongan
1	TK	32	III IV	27 5
2	Pengawas	24	IV	24
3	SD	830	II III IV	1 402 427
4	SMP	316	II III IV	1 176 139
Jumlah				1.202

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total guru PNS sejumlah 1.796 orang yang sudah bersertifikat pendidik sejumlah 1.202 orang atau 66,93% guru sudah memiliki sertifikat sertifikasi.

## CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Bidang urusan Pendidikan yang menjadi urusan wajib Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh Kabupaten Lampung Barat yaitu :

- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Kesetaraan
- Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 2.20.  
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019 - 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	85,92 %	100%	92,43 %	100%	88,98 %
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	15%	100%	45,98 %	100%	31,01 %
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	64%	100%	86.45 %	100%	40%

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

## 2. Urusan Kesehatan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja urusan Kesehatan Tahun 2021. Indikator pencapaian pembangunan urusan Kesehatan pada tahun 2021 tertuang pada penjelasan di bawah ini



### Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera (WHO, 2014).

AKI menunjukkan kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Target Angka Kematian Ibu pada tahun 2020 AKI di Indonesia saat ini masih berada pada angka 305/100.000 KH dan Provinsi Lampung pada angka 210/100.000 KH. AKI Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2017 – 2021 tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.21.  
Angka Kematian Ibu

Tahun	Angka Kematian Ibu
2017	104,5 /100.000 KH
2018	88,7 /100.000 KH
2019	69,1/100.000 KH
2020	72,4/100.000 KH
2021	145,6/100.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Adapun perbandingan AKI dan jumlah kasus kematian Ibu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni Tahun 2017 – 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.22.

Perbandingan AKI dan jumlah kasus kematian ibu

Target 2021	Realisasi				
	2021	2020	2019	2018	2017
121	145,6	72,4	69,1	88,7	> 102
	8 kasus	4 kasus	4 kasus	5 kasus	6 kasus

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Capaian AKI di tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus kematian ibu di tahun 2021 sebanyak 8 kasus dengan AKI 145,6/100.000 KH jika dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai AKI ini menjadi perhatian serius mengingat target akhir RPJMD yaitu AKI 110 per 100.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian terhadap target tahun 2022 sebesar 152,91%.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan ibu yang berdampak pada terjadinya kasus kematian ibu secara garis besar :

- Kematian yang terjadi akibat dari 3 keterlambatan: terlambat mengambil keputusan, terlambat untuk mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat untuk mendapatkan penanganan.
- Adat budaya yang masih melekat di masyarakat sehingga menghambat upaya promotif dan preventif yang berakibat masih kurangnya masyarakat memahami masalah kesehatan di lingkungannya.
- Masih terjadi disparitas akses pelayanan kesehatan ibu antara kabupaten dan provinsi terkait dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah.
- Keterbatasan kepemilikan jaminan pemeliharaan Kesehatan
- Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terkendalanya akses pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dan menyumbang 3 kasus kematian Ibu



Faktor - faktor yang berkontribusi untuk menurunkan kasus kematian ibu :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan kesehatan masyarakat
- Adanya pendanaan APBD untuk masyarakat miskin di luar kuota.
- Perekrutan tenaga bidan melalui pengangkatan PNS ataupun melalui program Bidan PTT merupakan pendukung keberhasilan program,



dengan adanya tenaga bidan yang terdistribusi sampai dengan di daerah sulit menjadikan pemberian pelayanan kesehatan dalam hal ini untuk ibu hamil/bersalin jadi lebih mudah terjangkau.

- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga bidan.
- e. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah & pusat terhadap program kesehatan ibu dan anak, antara lain melalui program BOK dan Jampersal yang digunakan untuk pemberian akses bagi ibu hamil yang akan melakukan persalinan.
- f. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten terutama bagi ibu hamil yang rumah tinggalnya jauh dari fasyankes dan meningkatkan jumlah persalinan di fasyankes serta menurunkan kasus

komplikasi yang bias menimbulkan kematian baik bagi ibu , bayi baru lahir & Ibu Hamil yang rumah tinggalnya jauh dari faskes.

- g. Peningkatan sarana dan ketersediaan tenaga Spesialis Obstetri dan Gynecology pada fasyankes rujukan ( RSUD Alimuddin Umar)

Angka Kematian Bayi (AKB)

Tabel 2.23.

Angka Kematian Bayi

Tahun	Angka Kematian Bayi
2017	2.96/1.000 KH
2018	3,02/1.000 KH
2019	3.63/1.000 KH
2020	2.90/1.000 KH
2021	4,55/1.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Tabel 2.24.

Angka Kematian Bayi dan Jumlah Kasus Kematian Bayi

Target 2021	Realisasi				
	2021	2020	2019	2018	2017
4,1	4,55 25 kasus	2,9 /1000KH 16 kasus	3,6/1000KH 21 kasus	3,02/1000KH 17 kasus	2,96/1000KH 17 kasus

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Pada tahun 2021 jumlah kelahiran hidup sebanyak xx dengan kasus kematian bayi sebanyak 25 kasus sehingga secara statistik AKB tercatat sebesar 4,5 / 1.000 KH . Angka ini melampaui jika dibandingkan dengan target AKB pada RPJMD Tahun 2021 yakni 4,1/1000 KH. Kasus kematian bayi di Lampung Barat secara keseluruhan terjadi pada periode neonatus atau usia 0-28 hari dengan antara lain Asfiksi, BBLR, kelainan kongenital, aspirasi dan pneumonia sebagai penyebab kematian.

Faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan ibu & anak yang berdampak pada meningkatnya kasus kematian secara garis besar:

- a. Adat budaya yang masih melekat di masyarakat sehingga menghambat upaya promotif dan preventif yang berakibat masih kurangnya masyarakat memahami masalah kesehatan di lingkungannya.

- b. Masih terjadi disparitas akses pelayanan kesehatan anak antara kabupaten dan provinsi terkait dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah.
- c. Masih rendahnya pengetahuan & kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan bayinya.

Faktor - faktor yang berkontribusi untuk menurunkan kasus kematian bayi:

- a. Adanya kegiatan kemitraan bidan dan dukun yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.
- b. Adanya pendanaan APBD untuk masyarakat miskin luar kuota.
- c. Perekrutan tenaga bidan melalui pengangkatan PNS ataupun melalui program Bidan PTT merupakan pendukung keberhasilan program, dengan adanya tenaga bidan yang terdistribusi sampai dengan di daerah sulit menjadikan

- pemberian pelayanan kesehatan jadi lebih mudah terjangkau.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga bidan seperti pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR.
  - e. Meningkatnya komitmen pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap program kesehatan ibu dan anak, antara lain melalui program BOK dan adanya kegiatan DAK Jampersal yang memberikan kemudahan akses untuk ibu hamil yang akan melakukan persalinan.
  - f. Peningkatan sarana dan ketersediaan tenaga Spesialis Obstetri & Gynecology pada fasilitas

pelayanan kesehatan rujukan ( RSUD Alimuddin Umar)

Upaya yang dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah antara lain:

- a. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan program KIA secara memadai, peningkatan jumlah tenaga dan pemerataan pendistribusian tenaga kesehatan.
- b. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam program kesehatan ibu baik di tingkat puskesmas maupun di pekon.
- c. Perbaiki sistem pencatatan & pelaporan program KIA (PWS KIA)

- Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Tabel 2.25.  
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021
Kasus Balita Gizi Buruk	6	2	2	1	1
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	6	2	2	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Berdasarkan jumlah kasus Balita Gizi Buruk pada tahun 2021 yakni sebanyak 1 kasus dan telah mendapatkan perawatan, maka capaian cakupan

Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan telah mencapai 100% sesuai target RPJMD Tahun 2021

Tabel 2.26.  
Data stunting di Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2018 – 2021

No	Tahun	Prosentase Stunting	Target Nasional	Keterangan
1	2018	32,96%	28%	Hasil Riskesdas Kementerian Kesehatan Tahun 2018
2	2019	22,23%	27,7%	Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2019
3	2020	-	-	Tidak ada Survei Status Gizi (SSGI) di Tahun 2020
4	2021	22,7%	24,4%	Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat selisih yang signifikan antara data stunting tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya, data prevalensi stunting Tahun 2020 adalah hasil input data kasus stunting oleh petugas

gizi di setiap puskesmas ke dalam aplikasi EPPBGM, dikarenakan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Upaya penanganan untuk percepatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Lampung



Barat telah dimulai di tahun 2022 ini, dengan telah ditetapkan 12 (dua belas) pekon lokus yang menjadi prioritas penanganan di tahun 2022. Rencana penanganan stunting dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait terutama untuk mengintervensi persoalan yang menjadi berkontribusi pada tingginya kasus stunting baik yang menjadi persoalan gizi spesifik (pada sector kesehatan) ataupun persoalan gizi sensitif terutama pada cakupan layanan yang terhitung masih sangat rendah, antara lain: pelaksanaan BKB, ketahanan pangan keluarga melalui program KRPL di pekon, Family Development Service (FDS) bagi KPM PKH, dan program lainnya

Faktor yang menentukan keberhasilan dan penghambat keberhasilan upaya meningkatnya gizi masyarakat, antara lain:

- 1) Faktor penunjang keberhasilan
  - a. Adanya program & kegiatan dari pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan status gizi masyarakat
  - b. Berjalannya program perbaikan gizi antara lain pemberian obat gizi (tabelt tambah darah pada ibu hamil, tambah darah remaja putri, pemberian kapsul vitamin A serta balita dan ibu nifas dan pemberian mineral mix untuk balita gizi buruk ) serta pemberian PMT untuk balita KEP dan ibu hamil KEK.
  - c. Adanya dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang memberikan daya ungkit terhadap program gizi dalam pemberian dan dukungan terhadap kegiatan penyediaan dana transportasi untuk kegiatan luar gedung Puskesmas seperti penyuluhan gizi di posyandu, sekolah kelas ibu hamil & pemberian PMT lokal dan bahan baku lokal.
  - d. Kabupaten Lampung Barat memiliki 260 posyandu.
- 2) Faktor penghambat keberhasilan
  - a. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai gizi keluarga dan diperburuk dengan status ekonomi masyarakat sehingga meskipun ada kesadaran namun secara pembiayaan tidak mampu.
  - b. Jumlah posyandu yang masih sangat kurang dibandingkan target yang harusnya

ada berpengaruh terhadap daya jangkau petugas kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk balita.

- c. Peran aktif masyarakat masih rendah dalam mengakses pelayanan kesehatan untuk balita di posyandu.
- d. Pengetahuan, keterampilan dan kesanggupan beberapa tenaga masih kurang dalam tata laksana gizi buruk.
- e. Terbatasnya dana operasional, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program gizi di Lampung Barat.
- f. Peran lintas sektor yang masih sangat kurang, pemahaman yang ada selama ini adalah bahwa masalah gizi di masyarakat adalah semata-mata tanggung jawab Dinas Kesehatan.

3) Upaya yang dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah antara lain:

- a. Melaksanakan pelatihan Tata Laksana Anak Gizi Buruk bagi petugas kesehatan di puskesmas.
- b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, & kekurangan zat gizi mikro lainnya.
- c. Melakukan pelacakan balita gizi buruk.
- d. Pemberian subsidi pangan bagi penduduk miskin.
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi pelayanan posyandu.
- f. Pelayanan gizi bagi ibu hamil (berupa tabelt besi) dan balita (berupa makanan pendamping ASI) dari keluarga miskin.

#### • Angka Kesakitan

Angka Kesakitan adalah insidensi dari suatu penyakit yang terjadi pada populasi dalam kurun waktu tertentu. Morbiditas berhubungan dengan terjadinya atau terjangkitnya penyakit di dalam populasi.

#### A. PENYAKIT MENULAR

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator program masing-masing jenis penyakit menular yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan, capaian indikator tersebut secara rinci dalam uraian di bawah ini



- TBC

Tabel 2.27.

Angka Penemuan BTA (+) di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2021

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS BARU YANG DITEMUKAN	TARGET KASUS	CDR (%)	SR (%)
1	2017	237	380	62,37	
2	2018	281	1.267	22,18	
3	2019	279	996	28,01	92%
4	2020	207	980	20,9	91,47%
5	2021	230	530	43,39%	23,14%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Capaian CDR TBC pada Tahun 2021 adalah sebesar 43,39% artinya sebanyak 230 kasus baru

yang ditemukan dan diobati dari 530 target kasus yang harus ditemukan. Masih rendahnya CDR ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah sebagian besar petugas pengelola program TBC di Puskesmas merangkap sebagai petugas surveilan dan laboratorium, dimana pada tahun 2021 ini lebih banyak terfokus pada upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Untuk Succes Rate (SR) pada tahun 2020 adalah sebesar 91,47 % sudah mencapai target yaitu 90%. Sedangkan untuk Succes Rate pada tahun 2021 baru mencapai 23,14% dikarenakan belum semua kasus belum dapat dievaluasi keseluruhan. Hal tersebut disebabkan kasus yang ditemukan oleh petugas pada TW II sampai IV masih belum dapat dievaluasi keseluruhan dikarenakan masih dalam masa pengobatan.

- HIV

Tabel 2.28.

Jumlah Penderita HIV Kabupaten Lampung Barat

TAHUN	KASUS BARU (ORG)	KOMULATIF (ORG)	MENINGGAL (ORG)	KET
2016	0	34	5	-
2017	0	29	7	17 Pindah
2018	0	5	0	-
2019	1	6	0	-
2020	3	9	0	0
2021	1	10	0	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

- DBD

Tabel 2.29.

Jumlah Penderita DBD Kabupaten Lampung Barat TAHUN 2014 – 2021

No	Puskesmas	Tahun							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sumber Jaya	0	1	5	0	5	0	16	0
2	Gedung Surian	0	0	2	0	0	2	1	0
3	Fajar Bulan	0	2	0	0	0	7	8	0
4	Sekincau	0	0	0	0	0	1	6	0
5	Srimulyo	0	0	0	2	0	0	2	0
6	Kenali	0	1	1	0	1	3	1	0
7	Batu Brak	0	0	5	0	0	8	4	0
8	Liwa	0	24	50	5	5	22	29	6
9	Buay Nyerupa	0	3	11	0	0	25	15	1
10	Lombok	0	0	1	0	0	7	2	0
11	BNS	0	0	0	0	1	0	0	0



No	Puskesmas	Tahun							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Pagar Dewa	0	0	0	0	2	3	4	0
13	Kebun Tebu	0	0	0	0	3	5	5	1
14	Air Hitam	NA	NA	0	1	0	2	0	0
15	Batu Ketulis	NA	NA	1	0	0	10	3	0
Kabupaten		0	31	76	8	18	95	96	8

Sebagai salah satu penyakit zoonosis yang terkait dengan kualitas lingkungan mengakibatkan upaya promotif dan preventif yang dilakukan di tatanan rumah tangga melalui upaya penyehatan lingkungan maupun intervensi pada keluarga dengan resiko masalah kesehatan menjadi upaya kunci keberhasilan program pengendalian DBD di masyarakat.

Penyediaan regimen obat maupun laboratorium obat akan meningkatkan kemungkinan deteksi dan penanggulangan menjadi lebih akurat.

#### - MALARIA

Tabel 2.30.

Angka Insidens Malaria Per Diabati Per Mil Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017– 2021

No	TAHUN	API
1.	2017	0,03
2.	2018	0,017
3.	2019	0,015
4.	2020	0
5.	2021	0

API malaria Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah 0, dimana selama tahun 2021 tidak ada kasus malaria di Kabupaten Lampung Barat baik kasus import maupun kasus indigenious/local.

Keberhasilan eliminasi malaria pada tahun 2018 berdampak pada tidak ditemukannya kasus positif malaria. Keterlibatan aktif masyarakat untuk menjaga kondisi tersebut menjadi kunci tidak terjadinya penularan local malaria di Kabupaten Lampung Barat

#### - PENYAKIT KECACINGAN

Tabel 2.31.

Capaian Pelaksanaan Popm Kecacingan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 – 2021

NO	PUSKESMAS	2018	2019	2020	2021
1	SUMBER JAYA	98,7	100,00	100,00	100%
2	BUNGIN	101,3	73,28	100,00	100%
3	FAJAR BULAN	104,9	100,00	100,00	100%
4	SEKINCAU	97,5	100,00	100,00	101,86%
5	SRIMULYO	92,7	99,64	99,69	99,69%
6	KENALI	97,7	99,01	98,99	98,84%
7	BATU BRAK	96,0	100,00	100,00	100%
8	LIWA	98,2	133,18	103,31	100%
9	B. NYERUPA	100,8	100,00	100,00	100%
10	LOMBOK	78,8	86,14	106,13	89,69%



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

11	B.N.SUOH	99,5	100,00	100,00	100%
12	PAGAR DEWA	96,8	100,64	100,00	100%
13	KEBUN TEBU	102,2	100,00	97,33	99,71%
14	BATU KETULIS	99,2	99,84	100,00	99,01%
15	AIR HITAM	99,2	100,00	100,00	100%
KABUPATEN		98,8	101,77	99,94	99,26%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

- PENYAKIT TIDAK MENULAR

Tabel 2.32.

Kasus Kesakitan Penyakit Tidak Menular (20 besar penyakit)

Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Hipertensi	8.036	Hipertensi	4.210	Hipertensi	18.864
Obesitas	3.641	Obesitas	1.017	Diabetes Mellitus	3.022
Diabetes Mellitus	2.106	Diabetes Mellitus	758	Obesitas	1.891
Asma Bronkiale	1.338	Asma Bronkiale	644	Asma Bronkiale	676
Kecelakaan Lalin	753	Osteoporosis	336	Kecelakaan Lalin	623
Gagal jantung	326	Kecelakaan Lalin	269	Osteoporosis	222
Osteoporosis	291	Penyakit jantung coroner	66	Penyakit jantung coroner	122
Stroke	279	PPOK	64	PPOK	97
PPOK	185	Gagal jantung	61	Stroke	80
Penyakit jantung coroner	120	Stroke	23	Gagal jantung	64
Penyakit tiroid	83	Penyakit tiroid	15	Cedera Lain	27
Tumor payudara	63	Tumor payudara	14	Penyakit tiroid	20
Ginjal kronik	31	Retinoblastoma	8	Cedera akibat KDRT	9
Retinoblastoma	16	SLE	7	Tumor payudara	6
SLE	14	Ginjal kronik	7	Ginjal kronik	3
Thalassemia	8	Thalassemia	5	Kanker serviks	2
Leukimia	4	Kanker serviks	2	Leukimia	2
Kanker serviks	4	Leukimia	1	SLE	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

- Sumber Daya Kesehatan

Tabel 2.33.

Data Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2019		2020		2021	
		Milik Pemda	Milik Swasta	Milik Pemda	Milik Swasta	Milik Pemda	Milik Swasta
1	Rumah Sakit Umum	1	0	1	0	1	0
2	RSIA	1	0	1	0	1	0
3	Apotek	0	18	0	18	0	28
4	Laboratorium Kesehatan	0	0	0	0	0	0
5	Puskesmas Rawat Inap	12	0	15	0	15	0
6	Puskesmas Non Rawat Inap	3	0	0	0	0	0



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

7	Puskesmas Pembantu	37	0	37	0	37	0
8	Puskesmas keliling	21	0	21	0	21	0
9	Ambulance	13	0	13	0	13	0
10	Klinik Pratama	0	0	0	4	0	4
Jumlah		88	18	88	22	88	32

Tabel 2.34.

Jumlah tenaga medis di fasilitas kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Unit Kerja	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Perawat	Bidan	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Ahli Teknologi	Tenaga Teknik	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Tenaga Teknis	Apoteker
1	Lombok	0	2	0	0	8	21	1	1	1	0	0	0	1	1
2	Buay Nyerupa	0	2	0	0	17	26	4	0	1	0	0	0	1	1
3	Liwa	0	2	1	0	24	35	3	2	2	0	0	0	2	1
4	Batu Brak	0	2	0	0	28	27	0	2	1	0	0	0	0	2
5	Kenali	0	1	0	0	15	26	1	1	1	0	0	0	0	1
6	Bandar Negeri Suoh	0	2	0	0	17	34	0	1	1	0	0	0	1	1
7	Srimulyo	0	2	1	0	15	27	3	1	1	0	0	0	0	2
8	Batu Ketulis	0	2	0	0	10	23	1	2	1	0	0	0	0	1
9	Sekinjau	0	2	0	0	10	35	1	1	1	0	0	0	0	2
10	Pagar Dewa	0	2	1	0	8	22	0	1	2	0	0	0	1	2
11	Fajar Bulan	0	2	1	0	25	45	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Air Hitam	0	2	0	0	18	32	0	1	3	0	0	0	1	1
13	Bungin	0	2	0	0	22	28	0	1	2	0	0	0	1	1
14	Kebun Tebu	0	2	1	0	21	28	1	1	1	0	0	0	0	1
15	Sumber Jaya	0	3	0	0	22	28	3	2	2	0	0	0	1	1
16	RSUD Alimudin Umar	12	9	1	1	111	34	37	17	10	0	0	0	6	7
17	RSIA Bunda	1	3	0	0	12	28	2	2	0	0	0	0	0	1
Jumlah		13	42	5	1	383	499	57	37	31	0	0	0	15	27

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

**Data Capaian SDGs**

Tabel 2.35.  
Capaian SDGs Sektor Kesehatan

Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target (2021)	Realisasi 2021
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun					
2.1.1(a)	Prevalensi Balita Kurang Gizi (Underweight)	Dinas Kesehatan	Persen	15 %	16,1 %
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula					
2.2.1*	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	Dinas Kesehatan	Persen	24 %	22,7 %
2.2.1(a)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	Dinas Kesehatan	Persen	24 %	5,57%
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	Persen (Wasting)	7,8 %	7,5 %
			Persen (Obesitas)	-	-
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	Persen	42 %	14,78%
2.2.2(b)	Persentase remaja yang mengkonsumsi Fe (zat besi)	Dinas Kesehatan	Persen	52 %	92,20%
2.2.2(c)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	Persen	40 %	79,31%

Wahana Edukasi Lumbok Semu



Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target (2021)	Realisasi 2021
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup					
3.1.1(a)	Kasus Kematian Ibu	Dinas Kesehatan	Kasus	6 kasus	8 kasus
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Persen	95%	94,29%
3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	93%	94,03%
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000)					
3.2.1(a)	Kasus Kematian Balita	Dinas Kesehatan	Kasus	23 kasus	25 kasus
3.2.2(a)	Kasus Kematian Neonatal	Dinas Kesehatan	Kasus	20 kasus	20 kasus
3.2.2 (b)	Kasus Kematian Bayi	Dinas Kesehatan	Kasus	23 kasus	25 kasus
3.2.2(c)	Persentase kab/kota yang mencapai 80 Persen imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	Persen	95%	95,3%
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya					
3.3.1(a)	Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia >dari 15 tahun	Dinas Kesehatan	Persen		
3.3.2(a)	Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/case notification rate) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Persen	172	74,8
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	API per 1000 pddk	<1	0
3.3.3(a)	Angka kesakitan positif malaria (API) per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	API per 1000 pddk	0	0
3.3.4*	Insiden hepatitis B per 100.000 populasi.	Dinas Kesehatan	Persen		



Laporan Data Pemantauan Covid-19 Di Lampung Barat Tahun 2021  
(Laporan Berdasarkan Buku Pedoman Revisi 5, Kemenkes )  
Data tanggal 31 Desember 2021

NO	PUSKESMAS	KASUS SUSPEK		KASUS PROBABLE			KASUS KONFIRMASI					SELESAI ISOLASI		KONTAK ERAT		PELAKU PERJALANAN		DISCARD	KEMATIAN
		BARU	DALAM	BARU	LAMA	TOTAL	KASUS BARU			KASUS LAMA	TOTAL	KONFIRMASI	KASUS BARU	DALAM PANTAU	KASUS BARU	SCREENING	TOTAL	JUMLAH KASUS	KONFIRMASI
							BER SIMPAN	TIDAK SIMPAN	JUMLAH										
1	Liwa	0	0	0	1	1	0	0	0	805	805	772	0	0	0	6327	6.327	2410	33
2	Pagar Dewa	0	0	0	0	0	0	0	0	196	196	190	0	0	0	3665	3.665	444	6
3	Batu Ketulis	0	0	0	0	0	0	0	0	143	143	137	0	0	0	2604	2.604	453	6
4	Kenali	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105	101	0	0	0	1933	1.933	291	4
5	Batu Brak	0	0	0	0	0	0	0	0	204	204	192	0	0	0	3629	3.629	797	12
6	Buay Nyerupa	0	0	0	1	1	0	0	0	134	134	124	0	0	0	2524	2.524	249	10
7	Lombok	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	51	0	0	0	4421	4.421	421	1
8	sumberjaya	0	0	0	0	0	0	0	0	172	172	167	0	0	0	2991	2.991	680	5
9	Sekincau	0	0	0	0	0	0	0	0	228	228	207	0	0	0	4436	4.436	905	21
10	Air Hitam	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61	58	0	0	0	2505	2.505	425	3
11	Kebun Tebu	0	0	0	0	0	0	0	0	302	302	293	0	0	0	3085	3.085	1011	9
12	G. Surian	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101	93	0	0	0	1886	1.886	566	8
13	Srimulyo	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155	152	0	0	0	5400	5.400	309	3
14	BN Suoh	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77	70	0	0	0	3743	3.743	162	7
15	Fajar Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187	177	0	0	0	3953	3.953	535	10
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>2784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.102</b>	<b>53.102</b>	<b>9658</b>	<b>138</b>

Pada Tahun 2021 terjadi lonjakan kasus Covid 19 yang cukup tinggi terutama pada periode bulan Juni sampai dengan September 2021 dan menurun pada bulan Oktober hingga pada bulan Desember tidak lagi terdapat kasus Covid 19 positif terkonfirmasi. Tingginya kasus Covid 19 terjadi di seluruh kabupaten di Indonesia. Vaksinasi, tracing, testing dan treatment serta penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat menjadi kunci keberhasilan penurunan kasus Covid

Tabel 2.36.  
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 - 2021

No.	Indikator	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	98,9 %	100%	87.5 %	100%	92,44%
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	92,3 %	100%	85.1 %	100%	93,33%
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	96,7 %	100%	86.6 %	100%	92,04%
4	Setiap balita mendapatkan yankes sesuai standar	100%	55,3 %	100%	82.5 %	100%	50,32%
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	96,6 %	100%	52.9 %	100%	88,39%
6	Setiap masyarakat Lampung Barat usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	19,5 %	100%	8.3 %	100%	24,5%
7	Setiap masyarakat Lampung Barat usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	56,01%	100%	27.1%	100%	58,05%
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	34,9%	100%	19.1 %	100%	28,1%
9	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	29,9%	100%	74.2 %	100%	124,95%
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	71,2%	100%	92.5 %	100%	98,85%
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	100%	36.3 %	100%	71,06%
12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	100%	100%	76.4 %	100%	83,69%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2022

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pencapaian target SPM Bidang Kesehatan antara lain: (1) keterbatasan jenis SDM Kesehatan pada 14

puskesmas dari total 15 UPT Puskesmas yang ada berdampak terhadap capaian program yang dijalankan oleh puskesmas sehingga

mempengaruhi capaian kinerja SPM secara keseluruhan; (2) Keterbatasan anggaran masih menjadi persoalan yang paling pokok terlebih lagi

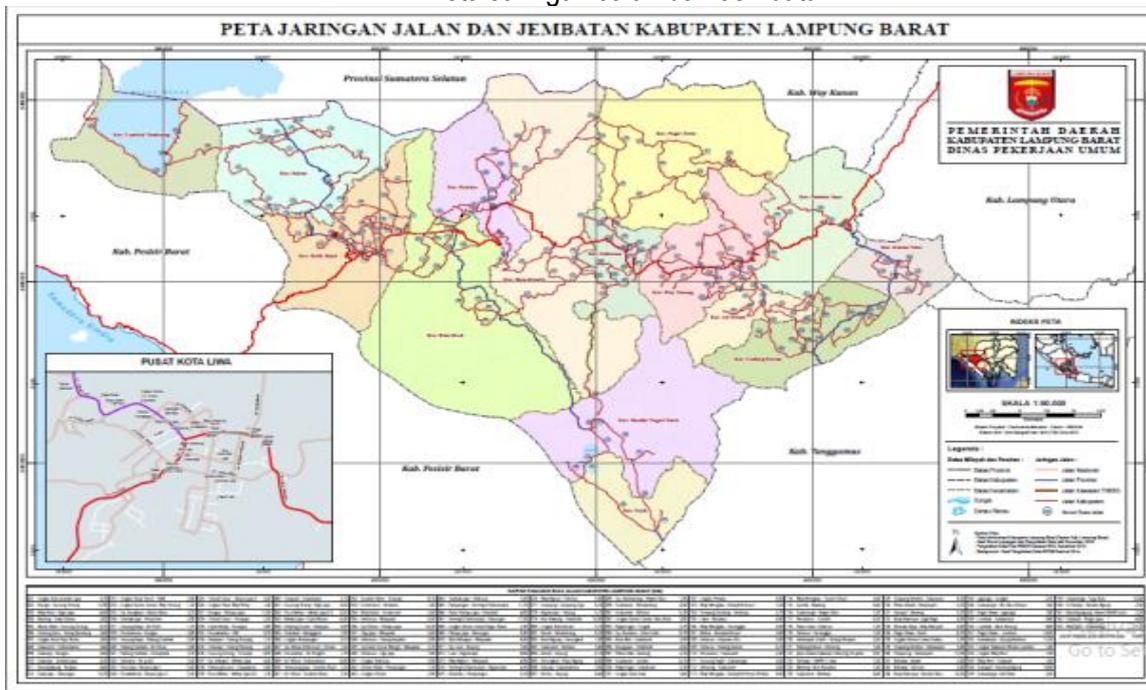
3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

pada tahun 2020 dan 2021 yang dipengaruhi oleh dampak pandemic covid19 di mana terdapat realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran. Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 5 sasaran.

Jalan dan Jembatan  
Jaringan jalan dan jembatan penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang.

Gambar 2.6.  
Peta Jaringan Jalan dan Jembatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat, 2020

Tabel 2.37.  
Kondisi Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan				
1. Panjang Jalan Kabupaten/Kota	724	724	724	Km
1. Kondisi Baik	331,82	338,542	354,04	Km
2. Kondisi Sedang	118,40	116,447	124,52	Km
3. Kondisi Rusak Ringan	63,68	109,667	133,68	Km
4. Kondisi Rusak Berat	210,10	159,827	111,76	Km
2. Panjang Jalan Desa	382,46	382,46	382,46	Km



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

Jalan dan Jembatan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Kondisi Baik	129,761	141,391	151,528	Km
2. Kondisi Sedang	26,91	26,91	26,91	Km
3. Kondisi Rusak Ringan	28,1	28,1	28,1	Km
4. Kondisi Rusak Berat	197,689	186,059	175,922	Km
2. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan				
1. Panjang Jalan Kabupaten/Kota				Km
1. Di Aspal	313,13	325,087	338,855	Km
2. Di Beton	180,11	182,344	199,959	Km
3. Kerikil	70,14	83,618	61,781	Km
4. Tanah	140,61	132,951	121,066	Km
3. Jembatan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan				
1. Jumlah Jembatan Kabupaten/Kota	180	180	180	Unit
1. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Baik	109	111	144	Unit
2. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Sedang	58	58	26	Unit
3. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Rusak Ringan	5	3	3	Unit
4. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Rusak Berat	8 energi baru	8	7	Unit
2. Jumlah Jembatan Desa	3	3	3	Unit
1. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Baik	2	2	3	Unit
4   Kondisi Jalan Mantap	62,18	62,84	66,10	%

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jalan kabupaten Lampung Barat dengan total panjang 724 km dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk tahun 2021 kondisi jalan mantap ditargetkan 66,09 persen terealisasi sebesar 66,10 persen. Total panjang jalan desa 382,46 km, jalan desa kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 2,65 persen pada tahun 2021. Dan untuk target jalan mantap pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,01 persen.

#### Irigasi

Pada bidang pertanian, air merupakan faktor utama penentu kelangsungan produksi pertanian, guna menjamin keberlanjutan peningkatan produksi pertanian tentunya sumber daya air melalui jaringan irigasi dengan pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS) sangatlah penting. Data jaringan irigasi/pengairan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2019 sampai tahun 2021 sebagaimana tabel berikut ini:

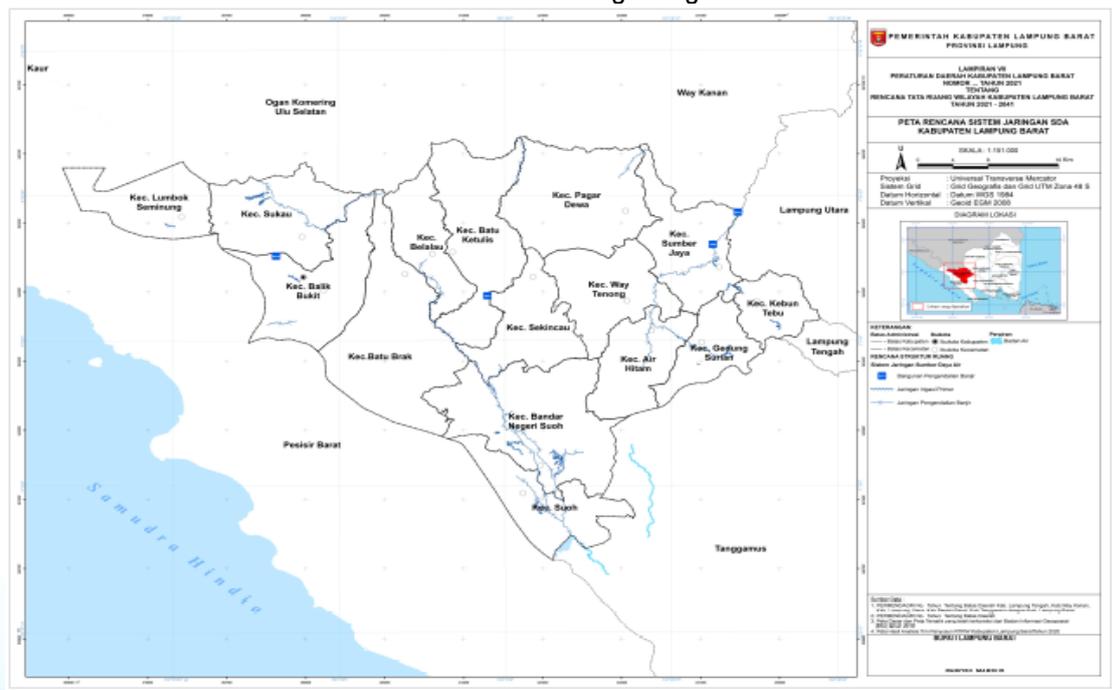


Tabel 2.38.  
Kondisi Jaringan Irigasi/Pengairan

Jaringan Irigasi/Pengairan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Panjang Jaringan Irigasi Teknis	126.371	126.371	126.371	Meter
1. Panjang Saluran Irigasi Primer				
1. Saluran Kondisi Baik	62.447	67.910	70.368	Meter
2. Saluran Kondisi Sedang	27.897,35	24.346,40	18.752,5	Meter
3. Saluran Kondisi Rusak Ringan	15,021,65	13.109,60	10.097,5	Meter
4. Saluran Kondisi Rusak Berat	21.005	21.005,	27.153,5	Meter
2. Jumlah Bangunan Irigasi	118	118	118	Unit
3. Luas Sawah Beririgasi Non Teknis	5.425,2	5425,2	5425,2	Ha
4. Luas Daerah Irigasi Teknis	11.442,51	11.442,51	11.442,51	Ha

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Gambar 2.7.  
Peta Jaringan Irigasi



Total daerah irigasi adalah 11.442,51 ha dengan area tanam 5.307 ha dengan indeks pertanaman sebesar 121,02 persen dengan rata-rata produksi panen 5,25 ton per hektar. Faktor produksi ini sangat dipengaruhi oleh sistem pengairan irigasi yang ada. Dari data diatas menunjukkan bahwa tahun 2021 panjang saluran irigasi teknis 126.371 meter dan pada tahun 2021 panjang saluran teknis tetap sedangkan saluran dengan kondisi baik pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,95 persen.

Sumber daya air Lampung Barat dialiri dua sungai yaitu Way Besay dan Way Semangka serta memiliki danau terbesar kedua di Pulau Sumatera yaitu Danau Ranau. Panjang sungai Way Semaka ± 95,47 km, dengan hulu sungai berada di gunung Pesagi dan gunung Sekincau (Kabupaten Lampung Barat), dan bermuara di Teluk Semaka (Kabupaten Tanggamus). Beberapa anak sungai yang mengalir menuju sungai Semaka yang berada di Kabupaten Lampung Barat antara lain: Way Kegeringan, Way



Lebuy, Way Hantatai, Way Haru, Way Maraman, Way Meneng, Way Ngarip, Way Melembui Balak, Way Andarumon, Way Pampangan, Way Bumbon, Way Bata, Way Laga, dan Way Pasir. Sedangkan beberapa anak sungai bermuara ke Way besai. Anak-anak sungai tersebut berpotensi untuk

pengembangan mikrohidro (kapasitas <10 MW), pemanfaatan air baku untuk irigasi, dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Adapun data sempadan sungai dan danau sebagai berikut :

Tabel 2.39.  
Kondisi Sempadan Sumber Air

Sempadan Sumber Air		Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Nama Sungai					
1	Way. Semangka	48,63	48,63	48,63	Meter
2	Way. Giham	15,6	15,6	15,6	Meter
3	Way. Samang	11,36	11,36	11,36	Meter
4	Way. Pahayu	11,13	11,13	11,13	Meter
5	Way. Uluhan	10,86	10,86	10,86	Meter
6	Way. Laai	9,97	9,97	9,97	Meter
7	Way. Warkuk	19,07	19,07	19,07	Meter
8	Way. Tenung	17,5	17,5	17,5	Meter
9	Way. Kelahok	7,14	7,14	7,14	Meter
10	Way. Campang	15,71	15,71	15,71	Meter
11	Way. Pepuk	12,57	12,57	12,57	Meter
12	Way. Penjaringan	12,46	12,46	12,46	Meter
13	Way. Kejadian	12,33	12,33	12,33	Meter
14	Way. Sepanas	12,31	12,31	12,31	Meter
15	Way. Subukau	11,68	11,68	11,68	Meter
16	Way. Panas	10,86	10,86	10,86	Meter
17	Way. Cawang Kiri	11,01	11,01	11,01	Meter
18	Way. Anderlung	10,22	10,22	10,22	Meter
19	Way. Simpang Balak	9,67	9,67	9,67	Meter
20	Way. Mayus	9,33	9,33	9,33	Meter
21	Way. Haru	8,23	8,23	8,23	Meter
22	Way. Ramelai	6,18	6,18	6,18	Meter
23	Way. Setunggau	6,01	6,01	6,01	Meter
24	Way. Penayuhan	5,18	5,18	5,18	Meter
25	Way. Besai	5	5	5	Meter
26	Way. Menterang	4,33	4,33	4,33	Meter
27	Way. Malbui Lunik	4,04	4,04	4,04	Meter
28	A. Simpang Balak	3,96	3,96	3,96	Meter
29	Way. Hantatai	3,92	3,92	3,92	Meter
30	Way. Bunguyan	3,63	3,63	3,63	Meter
31	Way. Tembilang	3,57	3,57	3,57	Meter
32	Way. Buyuk	3,47	3,47	3,47	Meter



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

Sempadan Sumber Air		Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
33	Way. Simpang Kanan	2,53	2,53	2,53	Meter
34	Way. Besay	2,17	2,17	2,17	Meter
35	Way. Laga	11,81	11,81	11,81	Meter
36	Way. Haru	11,12	11,12	11,12	Meter
37	Way. Simpang Balak	17,82	17,82	17,82	Meter
38	Way. Kabul	17,06	17,06	17,06	Meter
39	W. Campang Limau	15,08	15,08	15,08	Meter
40	W. Simpang Balak	14,83	14,83	14,83	Meter
41	W. Simpang Lunik	11,97	11,97	11,97	Meter
42	W. Siring Gading	10,32	10,32	10,32	Meter
43	W. Hitam	10,04	10,04	10,04	Meter
44	W. Mayus	9,33	9,33	9,33	Meter
45	W. Seburas	18,02	18,02	18,02	Meter
46	W. Baru Lunik	8	8	8	Meter
47	W. Robok	6,82	6,82	6,82	Meter
48	W. Sanyir	16,48	16,48	16,48	Meter
49	W. Labuhan Baringin	6,3	6,3	6,3	Meter
50	W. Haru	16,2	16,2	16,2	Meter
51	W. Petay	6,2	6,2	6,2	Meter
52	W. Campang	6,06	6,06	6,06	Meter
53	W. Buyuk Lunik	5,99	5,99	5,99	Meter
54	W. Keruh	5,75	5,75	5,75	Meter
55	Way. Kelat	4,78	4,78	4,78	Meter
56	W. Panas	4,42	4,42	4,42	Meter
57	W. Panas	4,05	4,05	4,05	Meter
58	W. Pihiton Lunik	4,04	4,04	4,04	Meter
59	W. Kabul	13,57	13,57	13,57	Meter
60	W. Pematang Hening	13,53	13,53	13,53	Meter
61	W. Ngingi	13,43	13,43	13,43	Meter
62	W. Lirikan	12,52	12,52	12,52	Meter
63	W. Tangkuluk	12,34	12,34	12,34	Meter
64	W. Ringkih	12,32	12,32	12,32	Meter
65	W. Buyuk	11,69	11,69	11,69	Meter
<b>2. Panjang Sungai**</b>					
	1. Panjang Sungai Berturap	8.800	9.510	9.910	Meter
	2. Panjang Sungai Tidak Berturap	454.720	454.010	453.610	Meter
<b>3. Lebar Sungai</b>					
		12	12	12	Meter
<b>4. Nama Danau/Situ</b>					
1.	Danau Ranau	30.000.000	30.000.000	30.000.000	m2
2.	Danau Lebar	1.323.000	1.323.000	1.323.000	m2

Sempadan Sumber Air		Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
3.	Danau Belibis	705.000	705.000	705.000	m2
4.	Danau Asam	135.000	135.000	135.000	m2
5. Keliling Danau		27.560	27.560	27.560	Meter
	1. Keliling Danau Berturab (M)	2.010	2.111	2.233	Meter
	2. Keliling Danau Tidak Berturab (M)	25.550	25.439	25.317	Meter
6. Nama Rawa					
1.	Rowo Rejo	5.106	5.106	5.106	m2
2.	Rawa Kalong	3.106	3.106	3.106	m2

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022



Tabel 2.40.  
Data Potensi Sungai untuk Pembangkit Listrik

NO	NAMA SUNGAI	LOKASI		ELEVASI (mdpl)	PRAKIRAAN DEBIT (m3/detik)	PRAKIRAAN DAYA LISTRIK
		KECAMATAN	PEKON			
1	2	3	4	5	6	7
1	Way Besai	Sumber Jaya	di seluruh pekon di sumber jaya	700 - 1600	8	90,4 Mw
2	Way Petai	Sumber Jaya	Sp. Sari	-		
3	Way Semangka	Belalau - Batubrak- Suoh		200 - 1800		
4	Way Warkuk	Sukau	Pagar Dewa			
5	Way Basongan	Pagar Dewa	Basongan			



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

NO	NAMA SUNGAI	LOKASI		ELEVASI (mdpl)	PRAKIRAAN DEBIT (m3/detik)	PRAKIRAAN DAYA LISTRIK
		KECAMATAN	PEKON			
1	2	3	4	5	6	7
6	Way Labuhan Balak	Batubrak	Sukabumi	350 - 1700		
7	Way Giham	Belalau - Sekincau	Sidomulyo, Hujung, Luas, Pampangan, Mabar Jaya, Giham, Sekincau	200 - 700		
8	Way Umpu	Pagar Dewa	Basungan	700 - 800		
9	Way Canggung	Batubrak	Canggung	0 - 400		
10	Way Pahiton	Belalau	Waspada, Turgak	120 - 200		
11	Way Bunbum	Batubrak	Kenali, Sukarame, Sukabumi, Pekon Balak	200 - 800		
12	Way Randayan	Belalau		700 - 800		
13	Way Mabuibalak	Belalau		300 - 800		
14	Way Pilla	Belalau		700 - 1700		
15	Way Labuhan Baringin	Belalau		400 - 1700		
16	Way Rebangan	Belalau		300 - 400		
17	Way Hamtatai	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	400 - 700		
18	Way Panas	Suoh	Suoh, Banding Agung, Sukamarga	700 - 900		
19	Way Hitam	Sumber Jaya	Seluruh Desa di Sumber Jaya	1000 - 1700		
20	Way Kutai China	Bandar Negeri Suoh				86.08 KW
21	Way Laga	Suoh				35.87 KW
22	Way Lebhon	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	298	5,8	258 KW
23	Way Besai	Air Hitam	Gunung Terang- Semarang Jaya	814-824	16,1	1.183 MW
24	Way Haru	Suoh	Tugu Ratu	241-242	10,8	423 KW
25	Way Seburas	Belalau	Serungkuk	806-774	6	1 MW



NO	NAMA SUNGAI	LOKASI		ELEVASI (mdpl)	PRAKIRAAN DEBIT (m3/detik)	PRAKIRAAN DAYA LISTRIK
		KECAMATAN	PEKON			
1	2	3	4	5	6	7
26	Way Beringin	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya			19.13 Kw

Tabel 2.41.  
Potensi Energi Panas Bumi di Lampung Barat

No	Nama Lapangan	Lokasi	Potensi Lapangan ( MWe )				Klasifikasi Temperatur
			Sumber Daya			Cadangan Terduga	
			Spekulatif	Hipotetis	Mungkin		
1	DANAU RANAU (Kec. Lumbok Seminung)	Lampung Barat	-	-	210	-	Tinggi
2	PURUNAN (Kec. Air Hitam)	Lampung Barat	25	-	-	-	Tinggi
3	G. SEKINCAU (Kec. Sekincau)	Lampung Barat	-	-	-	-	Tinggi
4	BACINGOT (Kec. Sekincau)	Lampung Barat	-	-	378	-	Tinggi
5	PAJAR BULAN (Kec. Way Tenong dan Kec. Sumber Jaya)	Lampung Barat	100	-	-	-	Tinggi
<b>Total Potensi Panas Bumi Kab. Lampung Barat = 713 MWe</b>			<b>125</b>	<b>-</b>	<b>588</b>	<b>-</b>	





Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggu, bahkan terhenti. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata, terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi sarana publik yang rusak. Dari tabel diatas dapat dilihat kenaikan dalam segi pengendalian banjir.

Tabel 2.42.

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Rumah  
Tangga

Sumber air baku untuk SPAM IKK	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2021	Satuan
1. Kapasitas Terpasang	225	225	225	Liter/detik
1. Produksi	130	172	196	Liter/detik
2. Idle capacity	95	53	29	Liter/detik

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum. Sistem penyediaan air minum digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku yang meliputi kebutuhan air bersih penduduk (domestik), fasilitas umum, dan kebutuhan air di sektor pariwisata. Oleh karena itu, maka perlu diperhitungkan beberapa faktor yang dapat menunjang atau menyebabkan bertambahnya kebutuhan air bersih. Faktor tersebut antara lain :

1. Pertambahan jumlah penduduk.
2. Tingkat sosial ekonomi penduduk.
3. Keadaan sosial ekonomi dari daerah setempat.
4. Rencana daerah pelayanan dan kemungkinan perluasannya.
5. Keadaan sistem penyediaan air minum eksisting.

Proyeksi kebutuhan air bersih dihitung berdasarkan beberapa komponen sebagai berikut. a. Kebutuhan air untuk rumah tangga (Domestik) Penyediaan air baku untuk keperluan rumah tangga dihitung berdasarkan :

1. Jumlah penduduk
2. Persentase jumlah penduduk yang akan dilayani
3. Cara pelayanan air
4. Konsumsi pemakaian air (Lt/orang/hari)

Dalam setiap penyediaan air bersih, sangat sulit untuk menghindari terjadinya kemungkinan kehilangan air dari sistem. Kehilangan air dapat disebabkan oleh faktor teknis maupun faktor non teknis. Faktor teknis meliputi kebocoran pipa, kerusakan meter air, dan lain-lain (faktor alat). Sedangkan faktor non teknis meliputi kesalahan pencatatan/pembacaan alat, kesalahan perhitungan, dan lain-lain (faktor manusia).

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

UUD 1945 pasal 28H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hunian yang sehat, aman dan serasi. Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.



Tabel 2.43.  
Jumlah Perumahan

Perumahan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi				
1. Jumlah Rumah Layak Huni	82.980		83.410	Unit
2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	6.724	6.246	6.294	Unit

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan air bersih yang layak dan sanitasi yang memadai saat ini masih terus diupayakan. Ketersediaan air bersih dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar adalah tanggung bersama agar kebutuhan dasar tersebut dapat dirasakan. Ketersediaan sistem penyediaan air bersih merupakan bagian yang selayaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang tepat untuk suatu rumah tangga, harus direncanakan dengan benar agar distribusi air dalam rumah berjalan lancar dan efisien. Untuk Kabupaten Lampung Barat data rumah tangga memiliki air bersih tahun 2021 sebagaimana data di bawah ini :

Tabel 2.44.  
Jumlah Rumah Tangga Memiliki Air Bersih

Rumah Tangga Memiliki Air Bersih	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Sistem Perpipaan	48.870	70.375	73.736	Rumah Tangga
2. Persentase Rumah Tangga Terlayani Sistem Perpipaan	81,26	83,75	87,75	%

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Sistem distribusi air bersih merupakan sistem pemipaan yang disiapkan di dalam bangunan maupun di luar bangunan guna mengalirkan air bersih dari sumbernya hingga menuju outlet (keluaran). Sistem distribusi air bersih dibuat guna memenuhi kebutuhan akan air bersih yang layak konsumsi. Dalam sistem penyediaan air bersih terdapat hal penting yang harus diperhatikan yaitu kualitas air yang akan didistribusikan, sistem penyediaan air yang akan digunakan, pencegahan pencemaran air dalam sistem, laju aliran dalam pipa, kecepatan aliran dan tekanan air. Komponen utama dari sistem distribusi air bersih adalah sistem jaringan pipa. Adapaun kemungkinan terjadinya permasalahan pada jaringan pipa seperti kebocoran, terjadinya kerusakan pipa atau komponen lainnya, besarnya energi yang hilang dan penurunan tingkat pelayanan penyediaan air bersih untuk konsumen.

Tabel 2.45.  
Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan Permukiman Kumuh	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	13	13	12	Kawasan
2. Luas Kawasan Permukiman Kumuh	28	28	15,498	Ha
3. Jumlah Bangunan Rumah	89.704	89.704	89.694	Unit

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Penataan Kawasan Kumuh masuk dalam tujuan global kesebelas, yaitu: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan, dengan sasaran global hingga tahun 2030 adalah menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. Kawasan kumuh di Kabupaten Lampung

Barat sampai dengan tahun 2021 adalah seluas 15,498 Ha, yang tersebar di 12 kawasan pada 8 Kecamatan.

Tabel 2.46.  
Akses sanitasi

Uraian	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi Layak	90,20	90,89	91,26	%
Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi Aman	0	0,43	0,43	%

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Akses sanitasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu akses sanitasi dasar, akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik

atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat, pada target rumah dengan sanitasi tahun 2021 yaitu 90,82% jika dibandingkan dengan realisasi 100% yang terdiri dari akses sanitasi aman 0,43%, akses sanitasi layak 91,26 dan akses sanitasi dasar/belum layak 8,31%. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 97,04% maka kenaikannya 2,96%. Sedangkan target renstra PUPR tahun 2022 adalah 92,30%.

#### 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung dengan tingkat keamanan dan angka kriminalitas yang rendah dibandingkan daerah lainnya, namun demikian Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Lampung Barat.

Tabel 2.47.  
Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Jumlah Pelanggaran K3	592	532	2.231	Kasus

Sumber : Data Kantor Sat Pol PP 2022

Secara umum jenis pelanggaran yang dilakukan antara lain: (a) kasus pelanggaran terkait pajak restoran; (b) kasus pelanggaran terkait pemeliharaan dan penertiban hewan ternak; (3) kasus pelanggaran terkait IMB; (4) kasus pelanggaran terkait perijinan usaha; (5) kasus pelanggaran terkait pembuangan sampah; (6) kasus pelanggaran terkait penerapan Perda KTR; dan (7) kasus pelanggaran terkait penerapan protocol kesehatan di masyarakat. Terdapat peningkatan kasus pelanggaran K3 yang sangat signifikan di tahun 2021, hal ini disebabkan

banyaknya kasus pelanggaran oleh masyarakat terkait dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perbup Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan pengawasan dalam rangka penerapannya di masyarakat pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini, terdapat 1.532 kasus pelanggaran oleh masyarakat.

Tabel 2.48.  
Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2021

NO	JENIS PERDA / PERBUP	JUMLAH KASUS	PROSES PENYELESAIAN KASUS					DALAM PROSES (BELUM P21/SP3)	KET.
			NON YUSTISI (PEMBINAAN)	LIDIK	SIDIK	P-21	SP-3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	0	0	-	-	-	-	-	Pajak Restoran
2.	Perda No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010	0	0	-	-	-	-	-	
3.	Perda No 2 Tahun 2012 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak	3	3	-	-	-	-	-	Kec. Balik Bukit dan Sukau
4	Perda No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	0	0	-	-	-	-	-	
5	Perda No 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	0	0	-	-	-	-	-	
6	Perda NO 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum	434	434	-	-	-	-	-	
7.	Perda No 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	28	28	-	-	-	-	-	IMB
8.	Perda No 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok	234	234	-	-	-	-	-	Iklan rokok, poster, banner, baliho dan merokok pada wilayah KTR
9.	Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perbup Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penengakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19	1.532	1.532	-	-	-	-	-	Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
<b>Jumlah</b>		<b>2.231</b>	<b>2.231</b>						

Tabel 2.49.  
Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum

Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum	2.799	2.462	2.462	Orang
1. Jumlah Aparat Pamong Praja	123	158	158	Orang
2. Jumlah Aparat Linmas	372	-	-	Orang
3. Jumlah Petugas Patroli Satpol PP	10	10	10	Orang
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	2.294	2.294	2.294	Orang
2. Jumlah Sarana Keamanan dan Ketertiban Umum	1.170	1.170	1.170	Unit
1. Jumlah Pos Keamanan	15	15	15	Unit
2. Jumlah Pos Kamling	1.155	1.155	1.155	Unit
3. Jumlah Kendaraan Operasional	16	16	16	Unit
1. Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2	5	5	5	Unit
2. Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4	11	11	11	Unit

Sumber : Data Kantor Sat Pol PP 2022

#### Pencapaian SPM

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi urusan wajib Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Lampung Barat yaitu:

Berikut adalah capaian pelayanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, realisasi pelaksanaan masih perlu ditingkatkan khususnya pada indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat agar dapat mencapai realisasi sesuai target nasional.

Tabel 2.50.  
Capaian Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	-	-
3.	Pelayanan pencegahan dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	100%	100%	100%	100%	-	-



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kesiapsiagaan terhadap bencana	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	-	-
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol.PP 2021

Tabel 2.51.  
Kejadian Bencana

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Kebakaran	48	14	22
2	Longsor	11	24	14
3	Banjir	6	15	13
4	Angin Kencang	2	4	5
5	Abrasi Pantai	-	-	-
6	Korban tenggelam	1	1	2
7	Jembatan rusak/putus	1	-	-
8	Gempa Bumi	-	3	12
9	Pohon Tumbang	5	4	6
10	Serangan Gajah	1	1	1
11	Orang Hilang	2	1	2

Sumber : Data Sat PolPP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan BPBD

## 5. Urusan Sosial

Penanganan kemiskinan merupakan salah satu isu penting yang menjadi agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Upaya penanganan yang diberikan dalam upaya untuk pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat terentaskan dari status kemiskinannya, untuk itu dibutuhkan kerjasama terintegrasi antar sector terkait. Sasaran dari program penanggulangan kemiskinan adalah

masyarakat yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), adapun dalam penanganannya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bekerja sama dengan lembaga ataupun individu dalam hal ini yang tercatat sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).



Tabel 2.52.  
Jumlah PMKS Kabupaten Lampung Barat

No.	PMKS	Tahun (Orang)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Anak				
a.	Anak balita terlantar	30	18	18	1
b.	Anak terlantar	209	38	38	4
c.	Anak Jalanan	0	0	0	1
d.	Anak yang berhadapan dengan hukum	10	0	0	0
e.	Anak dengan kedisabilitas	99	144	144	98
f.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	2	12	12	0
g.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	12	12	10
2.	Wanita				
a.	Wanita rawan sosial ekonomi	473	204	204	915
3.	Lanjut Usia Terlantar	0	0	0	3
4.	Penyandang Cacat				
a.	Penyandang disabilitas	398	493	493	665
5	Tuna Sosial	0	0	0	0
a.	Tuna Susila	0	0	0	0
b.	Gelandangan	0	0	0	0
c.	Pengemis	0	0	0	0
d.	Pemulung	16	0	0	1
e.	Bekas warga binaan	12	0	0	1
6	Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya				
a.	Korban penyalahgunaan napza	4	0	0	3
7	Keluarga				
a.	Fakir miskin	18,565 (RT)	34,384 (RT)	34,384 (RT)	151,517 (jiwa)
b.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	2	0	0	
8	Masyarakat				
a.	Korban Trackfiking	0	0	0	0
b.	Korban tindak kekerasan	1	0	0	1
c.	Pekerja migran bermasalah sosial	1	0	0	0
d.	Korban bencana alam	10	3	825	10
e.	Korban bencana sosial	3	20	20	861
f.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1	0	0	0
g.	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0
h.	Kelompok minoritas	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial Lampung Barat, 2022

Tabel 2.53.  
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No.	PSKS	Tahun (Org)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Pekerja sosial professional	98	-	-	19
2.	Pekerja sosial masyarakat	142	136	136	136
3.	Taruna Siaga Bencana	157	120	120	120

4.	Lembaga kesejahteraan sosial	26	12	12	36
5.	Karang Taruna	73	95	95	136
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	0	0	0	1
7.	Keluarga Pioner	70	0	0	0
8.	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	21	0	0	55
9.	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial	52	0	0	36
10.	Penyuluh Sosial	31	0	0	0
11.	Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	15	15	15	15
12.	Dunia usaha	203	125	125	380

Sumber: Dinas Sosial Lampung Barat, 2021



Tabel 2.54.  
Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Sosial Tahun 2019 - 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	4,08%	100 %	89,25 %	100 %	20,30 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	21,05 %	100%	0%	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		rehabilitasi sosial diluar panti						
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	-	100%	100%	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	77,16 %	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Lampung Barat, 2022

Terkait dengan realisasi pencapaian hasil pelaksanaan SPM sampai dengan tahun 2021, berdasarkan data pada tabel di atas, dibandingkan dengan indikator lainnya hanya pada indikator pertama yaitu jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, yang memiliki tingkat capaian yang kecil.

Pada beberapa penyandang disabilitas telah diupayakan upaya rehabilitasi yang berfokus pada pemberian alat bantu berupa kursi roda dan fasilitas untuk kemandirian dalam perekonomian dengan pemberian bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat.

## 6. Urusan Tenaga kerja

Capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat untuk urusan tenaga kerja diukur dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sederhananya penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja ialah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel 2.55.  
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas

URAIAN	2019	2020	2021
ANGKATAN KERJA	179.361	190.632	192.567
- BEKERJA	176.375	186.579	187.114
- PENGANGGURAN	2.986	4.053	5.453
BUKAN ANKATAN KERJA	46.236	37.717	38.808
- SEKOLAH	12.750	12.899	14.309
- MENGURUS RUMAH TANGGA	28.816	19.608	19.791
- LAINNYA	4.670	5.210	1.472

Sumber : Dinas PM PTSP Naker 2022 ( BPS Lampung Barat)

Berdasarkan tabel diatas Angkatan Kerja di Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah Angkatan kerja tanpa diikuti perluasan dan penciptaan lapangan kerja pada berbagai sektor mengakibatkan adanya peningkatan jumlah pengangguran .



Tabel 2.56.  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

URAIAN	2019	2020	2021
TPT	1,66 %	2,13%	2,83%

Sumber : Dinas PM PTSP Naker 2022 ( BPS Lampung Barat)

Berdasarkan tabel diatas tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan hal ini dipengaruhi oleh berbagai factor diantaranya adanya pandemic covid-19, adanya kesenjangan jumlah Angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

Tabel 2.57.

Persentase Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2021

STATUS PEKERJAAN	JUMLAH
BERUSAHA SENDIRI	32.029
BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP	55.014
BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP	3.526
BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI	18.272
PEKERJA BEBAS	15.419
PEKERJA TIDAK DIBAYAR	62.854
BUKAN ANGKATAN KERJA	38.808
TOTAL	225.922

Sumber : Dinas PM PTSP Naker 2022 (BPS Lampung Barat)

## 7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.58.  
Data Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun s.d Tahun 2021

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A. Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum	Kasus				4	24
1. Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum		6	-	-	2	7
(a) Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku	Orang	1	-	-	0	0
(b) Jumlah Perempuan Sebagai Korban	Orang	5	-	-	2	7
2. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum	Orang	12	9	16	4	17
(a) Jumlah Anak Sebagai Pelaku	Orang	2	4	0	0	4
(b) Jumlah Anak Sebagai Korban	Orang	10	5	16	4	13
(c) Jumlah Anak Sebagai Saksi	Orang	-	-	-	0	0
B. Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		15	5	20	6	20
1. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan		5	-	-	2	7
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	5	-	-	2	1
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Kasus	-	-	-	0	6
2. Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan		10	5	20	4	13



Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	10	5	20	4	13
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Kasus	-	-	-	0	0
C. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak	Unit	1	1	1	1	3
1. Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)/ P2TP2A	Unit	1	1	1	1	1
2. LPAI ( Lembaga perlindungan anak Indonesia)		-	-	-	-	1
3. KPAI ( Komisi Perlindungan anak Indonesia)		-	-	-	-	1

Sumber Data: Dinas KBPP&PPPA Tahun 2022

Tabel di atas menjelaskan tentang data kondisi terkait upaya perlindungan perempuan dan anak berdasarkan laporan pengaduan kasus yang diterima oleh pemerintah daerah. Jumlah kasus dari tahun ke tahun menunjukkan perubahan secara fluktuatif, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan kasus yang tercatat dalam tabel di atas dapat disebabkan adanya kesadaran masyarakat di Kabupaten Lampung Barat untuk melaporkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ada di masyarakat. Namun juga dapat diartikan bahwa telah terjadi peningkatan kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan serta meningkatnya persoalan perempuan dan anak yang harus berhadapan dengan hukum. Menumbuhkan dan mendorong kesadaran peran serta masyarakat untuk dapat lebih berperan dalam pencegahan dan mendukung upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak sampai dengan saat ini masih harus terus dilakukan secara intensif dan terintegratif dengan pihak-pihak terkait mengingat masih banyak ditemui adanya ketidakpahaman masyarakat mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.59.

Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Eksekutif dan Legislatif Tahun 2019 – 2021

Tahun	Jumlah Perempuan sebagai anggota DPRD		Jumlah Perempuan sebagai Aparat Negeri Sipil (ASN)	
	Jumlah (org)	%	Jumlah (org)	%
2019	5	14,28	1.938	50,54
2020	5	14,28	1.992	52,35
2021	6	17,14	2.017	53,32

Sumber: Data Dinas PPKBPPPA, Tahun 2022

Sampai dengan tahun 2021, jumlah perempuan yang berpartisipasi di lembaga legislatif masih rendah yaitu hanya 6 orang dari total 35 orang anggota legislatif Kabupaten Lampung Barat, jumlah ini hanya 17,14% belum memenuhi kuota minimal perempuan di lembaga legislatif yaitu 30%. Sedangkan untuk partisipasi di lembaga eksekutif, perempuan di Lampung Barat sudah mencapai 53,32% dari total ASN di Lampung Barat.

Tabel 2.60.

Perkembangan IPG dan IDG Tahun 2018 – 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
IPG (%)	92,74	92,55	92,95	93,00
IDG (%)	63,84	68,21	68,24	-



Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan capaian indikator pembangunan manusia (IPM) antara IPM Perempuan dan IPM laki-laki. Perhitungan dilakukan dengan menghitung komponen IPM yang terdiri dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi (pengeluaran per kapita). IPG Lampung Barat mencapai 93,00% di tahun 2021, capaian ini menunjukkan bahwa untuk perbandingan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki sudah hampir mendekati setara.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur terlaksananya kesetaraan gender dengan melihat partisipasi politik dan ekonomi. Partisipasi pada sector ekonomi dengan mengukur partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan. Data terakhir dirilis BPS, IDG Kabupaten Lampung Barat sebesar 68,24%. Ketercapaian ini sejalan dengan data yang disajikan sebelumnya khususnya pada partisipasi perempuan dalam politik, dimana jumlah perempuan dalam Lembaga legislatif baru mencapai 17,14% di tahun 2021.

## 8. Urusan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, salah satunya memprioritaskan peningkatan ketahanan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah yakni dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal. Dalam rangka

meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan tersebut, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

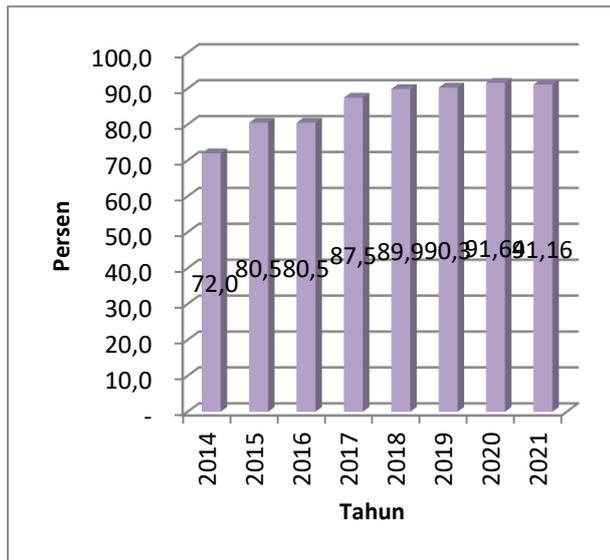
Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat beranekaragam. Potensi sumberdaya alam tersebut sangat menunjang pembangunan ekonomi, termasuk sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan di Lampung Barat yang merupakan faktor utama penggerak ekonomi masyarakat terutama dalam rangka mencukupi kebutuhan termasuk pangan.

Potensi sumber daya alam tersebut dapat diptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, dimana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan berperan secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii)

keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi

Gambar 2.8.  
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)  
Ketersediaan



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2022

Bila dilihat dari prosentase AKE bahwa ketersediaan pangan berdasarkan pola pangan harapan (kualitas) di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 Mengalami penurunan sebesar 0.48 Point Tahun 2020 (91,64 Point).

Dengan memiliki ketersediaan energi sebesar 3.900 kalori/kapita/hari dari angan kecukupan gizi (2.400 kalori/kapita/hari) dengan skor PPH 91,62 yang menyatakan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Lampung Barat belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa ketersediaan pangan didominasi oleh kelompok padi-padian (1708 kalori), kelompok Gula (84 kalori), kelompok sayur/buahan ( 420 kalori ), Pangan hewani ( 333

kalori), minyak dan lemak ( 952 kalori), kelompok umbi-umbian (25 kalori) serta diikuti kelompok kacang-kacangan dengan kontribusi energi sebesar ( 48 kalori). Sedangkan kelompok pangan yang memiliki skor dibawah skor maksimal PPH yaitu kelompok umbi umbian sebesar 0,5 (skor maksimal 2,50), kelompok pangan hewani sebesar 27,8 (skor maksimal 24), kelompok kacang-kacangan sebesar 4,0 (skor maksimal 10) dan kelompok buah biji berminyak sebesar 0 ( skor maksimal 1).

Meskipun ketersediaan energi berdasarkan NBM (kuantitas) telah mencapai 3.900 kalori/kapita/hari dari angka kecukupan gizi (2.400 kalori/kapita/hari) namun secara kualitas (skor PPH 96,62) belum ideal. Penyebab belum idealnya ketersediaan pangan tersebut disebabkan karena Komposisi skor PPH untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut belum mencapai skor maksimal hal ini berakibat tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan.

1. Kelompok pangan yang terlalu melebihi skor maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang. Faktor penyebab utama lebih didominasi dari ketersediaan/produksi lokal padi-padian (beras), gula (gula Pasir) dan buah (pisang dan pepaya) Meskipun menurut catatan BPS Kabupaten Lampung Barat ( Lampung Barat dalam angka 2019 )
2. Penyebab belum idealnya kualitas ketersediaan pangan ini juga disebabkan pada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimal, yaitu kelompok umbi-umbian ( 0,5 ), serta diikuti kelompok kacang – kacang an dengan kontribusi energi sebesar ( 4,0 ). Kondisi ini dikarenakan produksi untuk masing-masing kelompok pangan tersebut relaif masih rendah. Berkaitan dengan capaian kinerja untuk Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pada kurun waktu 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61.  
Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan  
Tahun 2019 - 2021

	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Skor PPH Ketersediaan	89,1	90,29	90,1	91,62	91,1	91,16

Berdasarkan target yang ditetapkan, realisasi skor PPH ketersediaan telah melebihi target yang ditetapkan, namun jika dibandingkan capaian tahun 2021 terhadap tahun 2020 terdapat penurunan skor PPH yaitu dari 91,62 menjadi 91,16. Pada tabel berikut ini akan dijelaskan terkait dengan pencapaian skor PPH Ketersediaan di Tahun 2021 beserta penjelasan terkait tantangan yang dihadapi.



Aktifitas Mas,  
Lumbok Senun

Tabel 2.62.  
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 2021

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	2.559	106,6	0,5	53,32	25,00	25,0	+
2.	Umbi-umbian	137	5,7	0,5	2,85	2,50	2,5	+
3.	Pangan Hewani	190	7,9	2,0	15,87	15,87	24,0	-
4.	Minyak dan Lemak	231	9,6	0,5	4,80	4,80	5,0	-
5.	Buah/biji berminyak	49	2,0	0,5	1,02	1,00	1,0	+
6.	Kacang-kacangan	114	4,7	2,0	9,49	9,49	10,0	-
7.	Gula	491	20,5	0,5	10,23	2,50	2,5	+
8.	Sayuran dan buah	229	9,6	5,0	47,76	30,00	30,0	+
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	4.000	166,7		145,35	91,16	100,0	

AKE = 2400 kkal/kap/hari

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan didominasi oleh kelompok padi-padian (2.559 kalori), kelompok gula (491 kalori), minyak dan sayur (231 kalori) serta sayuran dan buah (229 kalori). Sedangkan kelompok pangan yang memiliki skor dibawah skor maksimal PPH Ketersediaan, yaitu kelompok pangan hewani (15,87) dengan skor maksimal 24,0, kelompok minyak dan lemak (4,80) dengan skor maksimal 5,0 dan kelompok kacang-kacangan (9,49) dengan skor maksimal 10,0.

Meskipun ketersediaan energi berdasarkan NBM (kuantitas) telah mencapai 4.000 kalori/kapita/hari dari Angka Kecukupan Gizi (2.400 kalori/kapita/hari), namun secara kualitas (skor PPH Ketersediaan 91,16) belum ideal. Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Beberapa komposisi skor PPH Ketersediaan untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut belum mencapai skor maksimal. Hal ini berakibat tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan.
2. Kelompok pangan yang terlalu melebihi skor maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang. Faktor penyebab utama lebih didominasi dari ketersediaan/produksi lokal padi-padian (beras), gula (gula pasir) dan buah (pisang dan pepaya) meskipun menurut catatan

BPS Kabupaten Lampung Barat (Lampung Barat Dalam Angka Tahun 2020).

3. Penyebab belum idealnya kualitas ketersediaan pangan ini juga disebabkan pada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimal. Kondisi ini dikarenakan produksi untuk masing-masing kelompok pangan tersebut relatif masih rendah.

Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata individu memperoleh bahan pangan. Total ketersediaan energi yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 mencapai 4.000 kalori/kapita/hari dari Angka Kecukupan Energi di tingkat ketersediaan sebesar 2.400 kalori. Dari total ketersediaan energi, sumbangan terbesar berasal pangan nabati yaitu sebesar 79,06 kalori/kapita/hari dan sisanya berasal dari pangan hewani.

Total ketersediaan protein adalah sebesar 95,54 gram/kapita/hari dari angka yang dianjurkan yakni 63 gram/kapita/hari. Sedangkan ketersediaan lemak sebesar 59,57 gram/kapita/hari dari angka yang dianjurkan yakni 48,88 gram/kapita/hari.



Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Tabel 2.63.  
Data Kelompok Tani/Gapoktan Lumbung Pangan Masyarakat  
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Pekon	Nama Lumbung Kelompok Tani Gapoktan	Tahun Berdiri
1	Sukau	Suka Mulya	Talang Jawa	2013
2	Sumberjaya	Sukajaya	Cinta Karya	2014
3	Gedung Surian	Mekar Jaya	Kerawang Kuning	2014
4	BNS	Bandar Agung	Sumber Barokah	2013
5	Kebun Tebu	Tribudisyukur	Gumelan Jaya	2009
6	Kebun Tebu	Purajaya	Jaya Bersama	2010
7	BNS	Suoh	Pertani Jaya 4	2010
8	Sukau	Suka Mulya	Sinar Kukusan	2013
9	Sukau	Buay Nyerupa	Lembah Pesagi	2015
10	Balik Bukit	Bahway	Lembah Pesagi	-
11	Kebun Tebu	Tribudisyukur	Dwi Tunggal	2014
12	Kebun Tebu	Tribudisyukur	Triguna 45	2014
13	Kebun Tebu	Tribudisyukur	Triguna 6	2014
14	Kebun Tebu	Tribudisyukur	Purwa Mandiri	2014
15	Kebun Tebu	Tribudisyukur	Triguna 9	2014
16	Kebun Tebu	Tribudisyukur	Mekar Makmur 2	2014
17	Kebun Tebu	Cipta Mulya	Mekar Arum	2014
18	Gedung Surian	Cipta Waras	Sri Rahayu	2013
19	Gedung Surian	Cipta Waras	Tri Mukti	2014
20	Gedung Surian	Cipta Waras	Daya Guna	2014
21	Gedung Surian	Cipta Waras	Setia Karya I	2013
22	Gedung Surian	Cipta Waras	Setia Karya II	2013
23	Gedung Surian	Cipta Waras	Mandiri	2014
24	Gedung Surian	Cipta Waras	Tani Abadi	2014
25	Gedung Surian	Tri Mulyo	Mekar Sari	2014
26	Gedung Surian	Gedung Surian	Karya Mekar	2014
27	Suoh	Rowo Rejo	Sri Karya Makmur	2003
28	Pagar Dewa	Sumber Agung	Karya Bakti	2010



No	Kecamatan	Pekon	Nama Lumbung Kelompok Tani Gapoktan	Tahun Berdiri
29	Air Hitam	-	-	-
30	Way Tenong	-	-	-
31	Lumbok Seminung	-	-	-
32	Batu Brak	-	-	-
33	Batu Ketulis	-	-	-
34	Sekincau	-	-	-
35	Belalau	-	-	-

Sasaran kelompok bantuan gabah pengisian gabah sampai dengan tahun 2021 sebanyak 37 kelompok penerima bantuan pengisian lumbung pangan masyarakat dari 41 target remstra di tahun 2022.

Selain penyaluran gabah untuk pengisian lumbung pangan masyarakat, pada tahun 2021 ini Kabupaten Lampung Barat juga melaksanakan kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pertanian (Ketahanan Pangan) untuk Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya di Wilayah Sentra Produksi Padi yang terdiri dari 4 komponen yaitu:

1. Pembangunan Lumbung Pangan Kapasitas 30-60 ton
2. Lantai Jemur dengan luas minimum 100m<sup>2</sup>
3. Rice Milling Unit (RMU) dengan kapasitas >0,5 ton/jam
4. Rumah RMU

Selain dana DAK tersebut pemerintah daerah juga menyediakan dana sebagai pendamping untuk pengisian lumbung pangan untuk pembelian:

1. Gabah sebanyak 7.000 kg
2. Timbangan duduk sebanyak 1 unit
3. Alat ukur kadar air sebanyak 1 unit

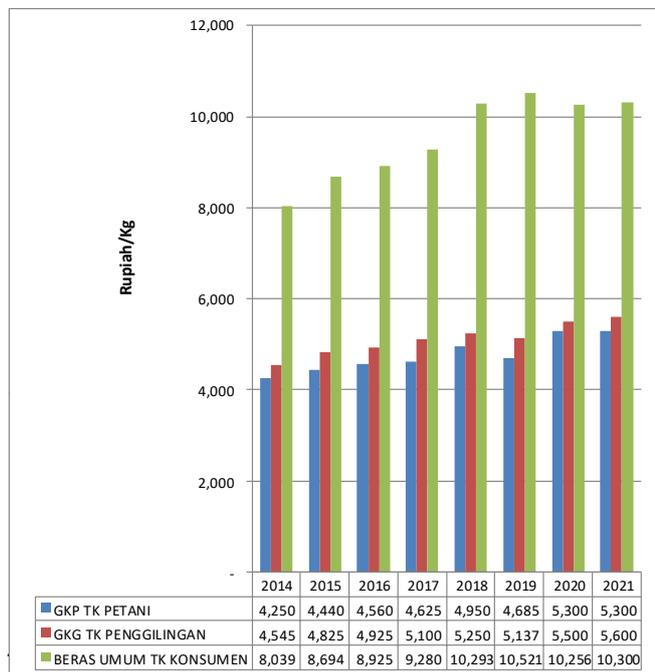
Kelompok penerima manfaat dari kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian T.A. 2021 ini adalah GAPOKTAN AL-HIDAYAH Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit sesuai Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/349/KPTS/III.09/2020 tanggal 4 September 2020.

#### Aspek Akses Pangan

Pada aspek ini memberikan gambaran tentang kemudahan akses pangan bagi masyarakat, hal tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat

daya beli masyarakat akan komoditi pangan Kesetabilan harga pada tingkat konsumen tidak terlepas dari kestabilan pasokan pangan baik yang bersumber dari produksi dalam daerah dan yang berasal dari luar daerah. Jika dilihat dari tingkat produksi beras lampung barat selama tahun 2021 yang mencapai 129.556. Ton, dengan jumlah beras yang masuk ke lampung barat sebesar 3.600 Ton maka tingkat pasokan pangan pokok (beras) sebesar 132.556 Ton. Pada tahun 2021 di lampung barat harga rata – rata beras medium ditingkat konsumen sebesar Rp.10.521/kg, dengan tingkat koefisien variasi (CV) di 1,1 %, Tingkat kesetabilan harga gabah ditingkat petani merupakan vaktor penentu dari tingkat kesetabilan harga dan daya beli masyarakat, dikarenakan mayoritas penduduk lampung barat berprofesi sebagai petani (baik petani Sawah maupun perkebunan ) pada tahun 2021 harga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani yang ditargetkan Rp.5.300/kg (sesuai dengan HPP Pemerintah ) mencapai Rp. 4.856/kg . hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan harga pangan pokok (beras) dan gabah pada tabel berikut:

Gambar 2.9.  
Perkembangan harga gabah dan beras di tingkat petani



Selanjutnya diikuti oleh kelompok minyak dan lemak dengan jumlah konsumsi energi rata-rata 423,1 Kkal/kap/hr dan pangan hewani sebesar 155,6 Kkal/kap/hr). Meskipun konsumsi pangan hewani menurun dibandingkan tahun 2020 namun kontribusi total energi meningkat karena konsumsi bahan pangan lainnya meningkat. Kontribusi terkecil berasal dari kelompok lainnya yang menyumbang energi rata-rata sebesar 20,4 Kkal/kapita/hari.

Tabel 2.64.  
Konsumsi Energi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari) aktual	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari) Ideal	Tingkat Kecukupan Energi (%)
Padi- padian	1076,4	1075	100,1
Umbi-umbian	167,7	129	130,0
Pangan Hewani	160,0	258	62,0
Minyak dan Lemak	400,0	215	186,0
Buah Biji Berminyak	47,1	64,5	73,0
Kacang-kacangan	93,8	107,5	87,3
Gula	47,5	107,5	44,2

Sayur dan buah	144,3	129	111,9
Lain-lain	20,2	64,5	31,3
Jumlah	2156,9	2150	100,3

Tabel 2.65.  
Konsumsi Energi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari) aktual	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari) Ideal	Tingkat Kecukupan Energi (%)
Padi- padian	1196,3	1.075	111,3
Umbi-umbian	129,1	129	100,1
Pangan Hewani	155,6	258	60,3
Minyak dan Lemak	423,1	215	196,8
Buah Biji Berminyak	22,6	64,5	35,0
Kacang-kacangan	103,3	107,5	96,1
Gula	92,6	107,5	86,1
Sayur dan buah	145,8	129	113,0
Lain-lain	20,4	64,5	31,6
Jumlah	2.288,7	2150	106,5

Jika dibandingkan dengan standar konsumsi energi kualitatif ideal sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari maka konsumsi energi aktual Lampung Barat secara rata-rata 2.288,7 Kkal/kapita/hari sudah melebihi. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 (2.156,9 Kkal/kapita/hari) terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan. Kontribusi energi dari kelompok padi-padian telah melampaui standar ideal sebesar 1.075,0 Kkal/kapita/hari. Begitu juga dengan sumbangan energi dari kelompok minyak dan lemak yang telah melampaui standar ideal sebesar 215,0 Kkal/ kapita/hari. Kelompok pangan umbi-umbian dan kacang-kacangan hampir mencapai standar ideal yaitu umbi 129,0 Kkal/kapita/hari dan kacang-kacangan 107,5 Kkal/kapita/hari. Meskipun konsumsi energi seluruh kelompok pangan hampir mencukupi bahkan melebihi standar ideal namun masih sama seperti tahun yang lalu beberapa kelompok lain seperti pangan hewani, buah biji berminyak dan kacang-kacangan belum mencapai standar ideal yang diharapkan.

Dari Tabel tersebut dapat digambarkan bahwa kecukupan energi melebihi angka 100% yaitu 106,5%. Jadi tingkat kecukupan energi di seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Barat telah melebihi 100%. Walaupun secara kuantitatif sudah melebihi 100% namun secara kualitatif masih belum mencapai standar ideal. Hal itu dapat dilihat dari komposisi tingkat kecukupan antar kelompok pangan.

Selain energi, protein merupakan zat gizi yang penting bagi tubuh. Protein hewani dan nabati merupakan zat pembangun dalam tubuh untuk membentuk sel-sel baru. Untuk itu konsumsi protein rumahtangga harus mendapatkan perhatian agar tercukupi sehingga setiap anggota rumahtangga dapat hidup sehat. Konsumsi protein aktual pada Wilayah Perikanan adalah 88,5 gr/kapita/hari, Wilayah Pertanian 53,8 gr/kapita/hari dan Wilayah Lainnya sebesar 67,9 gr/kapita/hari dengan konsumsi rata-rata adalah 59,4 gr/kapita/hari.

Tabel 2.66.  
Tingkat Konsumsi Protein

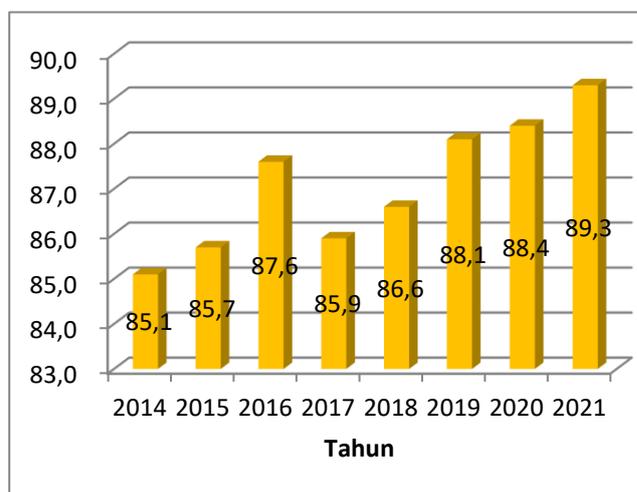
Karakteristik Agroekologi	Protein	Ideal (57 gr/kap/hari)	SPM (46.8 gr/kap/hari)
Wilayah	53,8	57	51,3
Wilayah	88,5	57	51,3
Wilayah Lainnya	67,9	57	51,3
Rata-rata	59,4	57	51,3

### Pola Pangan Harapan

Untuk mengetahui situasi mutu konsumsi pangan dilakukan perhitungan skor Pola Pangan Harapan. Terwujudnya pola pangan ideal sangat penting karena pola konsumsi yang bermutu gizi seimbang yang dapat menyediakan zat tenaga (energi), zat pembangun (protein) dan zat pengatur (vitamin dan mineral) dalam jumlah yang cukup yang terdiri atas aneka ragam pangan. PPH merupakan standar untuk dapat mencapai pola konsumsi pangan yang beragam atas dasar proporsi sumbangan energi. Skor PPH beserta komposisi konsumsi pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.10.

Pola Pangan Harapan Aktual Kabupaten Lampung Barat



Tabel 2.67.

Pola Pangan Harapan Aktual Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap	Skor PPH 2021
1.	Padi-padian	1196,3	52,3	55,6	0,5	26,1	27,8	25,0	2,8	25,0
2.	Umbi-umbian	129,1	5,6	6,0	0,5	2,8	3,0	2,5	0,5	2,5
3.	Pangan Hewani	155,6	6,8	7,2	2,0	13,6	14,5	24,0	-9,5	14,5
4.	Minyak dan Lemak	423,1	18,5	19,7	0,5	9,2	9,8	5,0	4,8	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	22,6	1,0	1,1	0,5	0,5	0,5	1,0	-0,5	0,5



No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap	Skor PPH 2021
6.	Kacang-kacangan	103,3	4,5	4,8	2,0	9,0	9,6	10,0	-0,4	9,6
7.	Gula	92,6	4,0	4,3	0,5	2,0	2,2	2,5	-0,3	2,2
8.	Sayur dan Buah	145,8	6,4	6,8	5,0	31,8	33,9	30,0	3,9	30,0
9.	Lain-lain	20,4	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	2.288,7	100,0	106,5	11,5	95,2	101,0	100,0		89,3

Keterangan = \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2150,0 Kkal/Kap/Hari

## 9. Urusan Pertanahan

Sejak dilakukannya reformasi atas tanah tahun 1960-an (Landreform), yaitu dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia terdiri dari:

Hak Milik, yaitu hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia. Pada prinsipnya suatu badan hukum tidak dapat menjadi pemegang Hak Milik atas tanah, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah dapat menetapkan badan-badan hukum tertentu untuk dapat mempunyai Hak Milik. Selain badan hukum, orang asing (WNA) juga tidak dapat mempunyai Hak Milik atas tanah.

Hak Guna Usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan. Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk tanah yang luasnya minimal 5 hektar. Namun jika luasnya 25 hektar atau lebih maka untuk mengusahakannya harus menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun. Jika Hak Guna Usaha tersebut habis jangka waktu berlakunya maka hak tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 25 tahun.

Hak Guna Bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu maksimal 30 tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 tahun.

Hak Pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak Pakai memberikan wewenang dan kewajiban kepada pemegangnya sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat pertanahan atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah. Perjanjian tersebut bukan merupakan sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.

Tabel 2.68.  
Jumlah Jenis Hak Atas Tanah

Jenis Hak Atas Tanah	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Hak Milik	88.304	88.304	101.229	Sertifikat
2. Jumlah Hak Guna Bangunan	36	36	115	Sertifikat
3. Jumlah Hak Pakai	242	242	314	Sertifikat
4. Jumlah Hak-Hak Lain (Hak Wakaf)	85	85	135	Sertifikat

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Tabel 2.69.  
Jumlah Kasus Sengketa Tanah

Kasus Sengketa Tanah	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Kasus Sengketa Tanah Selesai	-	-	-	Kasus
2. Jumlah Kasus Sengketa Tanah Belum Selesai	-	2	2	Kasus

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011 sengketa tanah atau yang biasa dikatakan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Pada tahun 2021 terdapat 2 kasus Sengketa tanah yang yang ditangani oleh Bidang Pertanahan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat.

#### 10. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaan unsur hayati maupun unsur fisik yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Menjaga agar lingkungan tetap lestari merupakan hal yang vital bagi manusia. Hal ini dikarenakan bahwa manusia membutuhkan sumber daya alam untuk berkembang biak dan hidup. Semua sumber daya tersebut tersedia di alam. Jika alam rusak maka kehidupan manusia tertanggung. Berdasarkan data lingkungan di Kabupaten Lampung Barat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.70.  
Kinerja Lingkungan Hidup 2019 s.d 2021

NO	LINGKUNGAN HIDUP	SATUAN	TAHUN			KET
			2019	2020	2021	
1	Jumlah Lokasi Pencemaran Kronis					
	1. Jumlah Lokasi Pencemaran Tanah	Lokasi	-	-	-	
	2. Jumlah Lokasi Pencemaran Air	Lokasi	-	-	-	
2	3. Jumlah Lokasi Pencemaran Udara	Lokasi	-	-	-	
	Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik					
	1. Memiliki Pengolahan Limbah	Perusahaan	1	1	1	Industri Tahu Pekon Kubu Perahu
	2. Tidak Memiliki Pengolahan Limbah	Perusahaan	145	145	145	Industri Kecil dan Menengah

#### Catatan :

1. Belum pernah melakukan pemeriksaan kualitas tanah yang ada di Kabupaten Lampung Barat
2. Kualitas Air masih dibawah baku mutu yang ditetapkan oleh PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air
3. Pemeriksaan Udara dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat di 4 titik zona sampling yaitu perkotaan, pemukiman, transportasi (terminal) dan industri yang hasilnya masih dibawah baku mutu.
4. Lampung Barat belum ada Perusahaan Industri/Pabrik dalam Skala Besar yang dapat merusak lingkungan akan tetapi pada tahun 2013 pabrik tahu di Pekon Kubu Perahu membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk limbah tahu
5. Industri Kecil dan Menengah bergerak dibidang Industri Pengolahan Kopi, Industri Tempe/Tahu



Kedelai, Industri Batu Bata dari Tanah Liat dan Industri Konsentrat makanan hewan  
Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup, 2022

#### 11. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk

dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan Penduduk, atau dengan kata lain Penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

##### a. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Persebaran Penduduk/ Geografis

Penduduk Kabupaten Lampung Barat tersebar di 15 kecamatan, jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Balik Bukit sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Lumbok Seminung. Jika dibandingkan antara jumlah penduduk antara jenis kelamin, maka secara umum perbedaan antara jumlah perempuan dengan jumlah laki-laki hanya sedikit demikian juga dengan sebarannya secara geografis perbandingan antara penduduk perempuan dan laki-laki dapat dikatakan seimbang antar wilayah.

Kartu keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga, Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut, oleh karena itu informasi mengenai jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari jumlah kartu keluarga. Pada tabel berikut di sajikan jumlah penduduk dan kepala keluarga pada tahun 2021

Tabel 2.71.

Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Lk	Pr	Jumlah	
1	Balik Bukit	21.703	20.456	Jumlah	11.559
2	Sumber Jaya	12.545	11.801	42.159	7.247
3	Belalau	6.487	6.063	24.436	3.545



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Lk	Pr	Jumlah	
4	Way Tenong	17.821	17.092	12.550	10.314
5	Sekincau	9.931	9.134	19.065	5.798
6	Suoh	9.783	8.852	18.635	5.643
7	Batu Brak	7.892	7.309	15.201	4.284
8	Sukau	13.153	12.304	25.457	7.107
9	Gedung Surian	8.820	8.300	17.120	5.257
10	Kebun Tebu	10.705	10.204	20.909	6.336
11	Air Hitam	6.462	5.849	12.311	3.998
12	Pagar Dewa	9.187	8.145	17.332	5.565
13	Batu Ketulis	7.116	6.388	13.504	4.073
14	Lumbok Seminung	4.426	3.931	8.357	2.500
15	Bandar Negeri Suoh	13.521	11.914	25.435	7.676
	Jumlah	159.552	147.742	307.294	90.902

Sumber data: Data DKB semester I Tahun 2021

Berkaitan dengan sistem pencatatan administrasi kependudukan, pada tabel berikut dapat dijelaskan Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dari mulai tahun 2018. Sampai dengan tahun 2021,

capaian kepemilikan dokumen kependudukan mulai dari KTP-el, kepemilikan KIA dan akta kelahiran 0-18 tahun pada setiap tahun selalu mengalami kenaikan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.72.  
Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d 2021

NO	URAIAN	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	Jumlah Penduduk	304.197		305.972		307.190		307.294	
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP-EI	214.961		214.051		215.890		220.270	
3	Jumlah Penduduk Memiliki KTP-EI	212.744	98,97	219.828	102.69	225.240	104.33	231.838	105.25
4	Jumlah Penduduk Belum Memiliki KTP-EI	2.217	1,03	5.777		9.350		11.568	
5	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	103.183		103.185		100.650		100.352	
6	Jumlah Penduduk Memiliki Akta	95.113	92.17	96.903	93.91	97.757	97.12	106.786	106.41



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

NO	URAIAN	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
	Kelahiran 0-18 Tahun								
7	Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun	8.070	7.82	6.282	6.08	2.893	2.87	6.434	
8	Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga	86.761	100	86.704	100	90.170	100	90.902	100
9	Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga	-		-		-		-	
10	Jumlah Penduduk Wajib Kartu Identitas Anak (KIA)	92.191		93.724		91.300		87.024	
11	Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	15.000	16.27	39.276	42	60.929	67	69.251	80
12	Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	77.191	83.73	54.448	58	30.371	33	17.773	20

Sumber Data: Disdukcapil DKB I 2021

Untuk data capaian yang realisasinya lebih besar dari 100% dapat dikarenakan jumlah KTP-EL dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan melebihi dari jumlah target anak 0-18 tahun (data target direkap per semester), sedangkan akta kelahiran diterbitkan

setiap hari sesuai dengan permohonan dari masyarakat, sehingga melebihi target data yang ada, selain itu masih ada tambahan penerbitan akta kelahiran terhadap penduduk pindah datang yang membawa anak berusia 0 – 18 tahun.

## 12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan desa menggunakan pendekatan partisipatif dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa.



Tabel 2.73.  
Pengukuran Partisipasi Masyarakat Dalam  
Pembangunan Desa

Partisipasi Masyarakat Desa	Tahun 2021
Persentase Peningkatan Status Pekon	100%
Persentase Kelembagaan Pekon Aktif	100%
Persentase Pekon yang Menyampaikan Dokumen APB Pekon yang Sesuai Pedoman	65%
Persentase Pekon yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban yang Sesuai Pedoman Dan Tepat Waktu	75%
Persentase Anggota LHP Dan LPMP Aktif Dalam Perencanaan Pembangunan	80%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP), 2022

### 13. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Keberhasilan pelaksanaan program keluarga berencana merupakan salah indikator pengukuran dalam hal pengendalian penduduk, berikut adalah capaian pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.74.  
Data Keluarga Berencana

Keluarga Berencana	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
1. Jumlah Pasangan Usia Subur		79124	87.111	93.824
1. Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB	Pasang	58.627	64.810	69.078
2. Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode				
1. Suntik KB	Orang	22188	24852	26.048
2. Obat/Pil KB	Orang	11859	13735	15.211
3. IUD/Spiral	Orang	8527	8527	8.719
4. Susuk/implant	Orang	14.799	15731	16.764
5. Kondom	Orang	840	1194	1.528
6. Vagina Diafragma	Orang	0	0	0
7. Spermatisida	Orang	0	0	0
8. Vasektomi/MOP	Orang	137	137	137
9. Tubektomi /MOW	Orang	347	634	671
3. Sarana Dan Prasarana KB				
1. Jumlah Alat Peraga KB / genre kit	Kit	6	2	0
2. Jumlah Balai KB	Balai Penyuluh KB	15	15	15
3. Unit Pelayanan KB		60	60	91
4. Jumlah Tenaga Klinik KB**	Orang			
5. Jumlah Petugas KB**	Orang	18	19	17
6. Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan**	Institusi	136	136	136



Keluarga Berencana	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
7. Jumlah Kelompok Bina Keluarga**	Kelompok			
BKB	Kelompok	112	74	85
BKR	Kelompok	53	42	40
BKL	Kelompok	62	69	33

Sumber: Dinas PPKBPPPA Tahun 2021

Tabel 2.75.  
Pencapaian Indikator Kinerja Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021
1	Laju pertumbuhan penduduk	0,93
2	Angka kelahiran total (TFR)	2.39
3	Persentase peserta KB Aktif	73,6
4	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	73,6
5	Angka usia kawin pertama	19 th
6	Persentase Pengetahuan PUS tentang/Cara Kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	
7	Persentase Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB - Posyandu-PAUD)	1
8	Persentase Peserta KB Mandiri dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	39%
9	Persentase Remaja yang dibina tentang Kesehatan Reproduksi	100%

10	Jumlah Pusat Informasi Konseling - Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-RR) yang aktif	18 kelompok
----	--	-------------

Sumber: Dinas PPKBPPPA Tahun 2021

#### 14. Urusan Perhubungan

Semua kegiatan apakah itu mengimpor bahan baku, memasarkan hasil produksi, menyediakan tenaga kerja, membutuhkan sistem transportasi yang baik, sistem tersebut adalah sistem transportasi yang menjamin keamanan, keselamatan, kecepatan dan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap perlu dicapai keseimbangan antara penyediaan dan permintaan jasa transportasi di seluruh wilayah Lampung Barat. Jika penyediaan jasa transportasi lebih kecil daripada permintaannya, akan terjadi kemacetan arus barang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga pasaran. Dibawah ini ditampilkan data transportasi darat sebagai berikut:

Tabel 2.76.  
Jumlah Transportasi Darat s/d 2021

NO	MODA TRANSPORTASI DARAT & SDP	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	SATUAN
1	Jumlah Moda Angkutan Barang	840	1618	1722	1927	Unit
2	Jumlah Moda Angkutan Umum	38	261	105	309	Unit
3	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum	10	12	60	61	Perusahaan
4	Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum	1	1	1	1	Unit
5	Jumlah Terminal	2	2	2	2	Unit



NO	MODA TRANSPORTASI DARAT & SDP	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	SATUAN
6	Penumpang melalui terminal Tipe C	1031	1000	1250	1300	Orang
7	Jumlah Moda Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan (ASDP)	44	41	41	45	Unit
8	Jumlah Dermaga	3	3	3	3	Unit
9	Jumlah Penumpang melalui Dermaga	32	25	25	31	Orang

Sumber Data : Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tahun 2021

Keterangan :

1. Moda angkutan bertambah dari kendaraan yang KIR
2. Penambahan moda dari angkutan ojek
3. Penambahan perusahaan dari jasa angkutan
4. Tempat Gedung uji tetap 1 unit
5. Jumlah terminal type C tetap 2 unit
6. Bertambah penumpang dari angkutan barang, ojek dan penumpang
7. Moda angkutan sungai bertambah dari peternak ikan kerambah
8. Dermaga tetap 3 unit
9. Bertambah penumpang dari peternak ikan kerambah

#### 15. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Perangkat genggam seperti ponsel, smartphone, tablet adalah contoh yang paling umum dari jaringan informasi dan telekomunikasi. Dalam jaringan ini masing-masing disajikan atau diatur oleh setidaknya satu situs pemancar tetap, yang dikenal sebagai BTS. Setiap perangkat pada jaringan nirkabel menggunakan satu set frekuensi yang berbeda dari ponsel lainnya, untuk menghindari gangguan terhadap bandwidth, memungkinkan sejumlah besar perangkat mobile dapat berkomunikasi satu sama lain. layanan komunikasi dan informasi saat ini menjadi kebutuhan baik kota maupun desa/pekon. Berikut disajikan data telekomunikasi di Lampung Barat sebagai berikut.

Tabel 2.77.

Data telekomunikasi

Uraian	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Pekon terhubung jaringan internet	133	134	134	Pekon
2. Jumlah Tower Komunikasi	99	99	101	Unit
3. Jumlah Smartvillage			7	Pekon/ Kel

Sumber : Data Dinas Komunikasi dan Informatika 2022

Pada Indikator sasaran Persentase Desa yang terhubung dengan jangkauan Telekomunikasi dan Internet realisasi kinerja sudah mencapai angka 98.5% dari Jumlah 131 Desa dan 5 Kelurahan di Kabupaten Lampung Barat, Desa yang sudah terjangkau Internet dan Telekomunikasi sebanyak 134 Desa dan Kelurahan, Sedangkan Batu Api Kec. Pagar dewa, Tembelang Kec. BNS belum ada menara Telekomunikasi (Blank Spot), namun pada Pekon Ujung Rembum Kec. Lumbok Seminung dan Pekon Rigis Jaya Kec. Air hitam terdapat beberapa spot/ area-area tertentu dalam pekon tersebut yang belum terdapat sinyal Telekomunikasi dan Internet

#### 16. Urusan Statistik

Tabel 2.78.

Data statistik sektoral

Uraian	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah data Statistik sektoral	500	450	150	Buku

Sumber : Data Dinas Komunikasi dan Informatika 2022

## 17. Urusan Persandian

Tabel 2.79.  
Data Persandian

Uraian	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	45	30	0	
2. Jumlah Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber DayaKeamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 kec	15 kec	15 Kec	
3. Jumlah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		3 ruang	3 Ruang	
4. Jumlah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	

## 18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Sektor Koperasi dan UKM merupakan urusan wajib pelayanan dasar, dimana perekonomian Kabupaten Lampung Barat selain sektor pertanian didominasi oleh Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, baik itu pada sektor Perdagangan, Industri Pengolahan maupun sektor Jasa dan lainnya. Oleh karena itu ketiga urusan pemerintahan diatas harus dibangun secara sinergi, berkaitan dan berkelanjutan. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional. Keberadaan usaha koperasi sebagai Badan Hukum resmi yang diakui negara merupakan bukti keseriusan pemerintah membangun ekonomi kerakyatan

berbasis gotong royong. Pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah bagaimana koperasi yang ada tumbuh menjadi koperasi yang tidak hanya aktif secara administrasi yakni rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi, melainkan juga mendorong produktivitas usaha koperasi, sehingga tujuan dibentuknya koperasi yaitu meningkatnya pendapatan anggota bisa tercapai.

Selanjutnya pada sektor UMKM, Permasalahan paling krusial dalam pengembangan Usaha bagi UMKM adalah pertumbuhan UMKM, akses permodalan, pengembangan produk dan pemasaran. Pemerintah dan swasta melalui Bank yang ditunjuk telah mengucurkan bantuan kredit bagi UMKM yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Mikro lainnya yang menasar pelaku UMKM dalam target kinerjanya. Akan tetapi dilapangan kerap ditemukan kesulitan yang dialami UMKM dalam mengakses program KUR tersebut. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan menghadirkan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Kondisi keberadaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Barat bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80.  
Kondisi keberadaan Koperasi dan UMKM  
Kabupaten Lampung Barat.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021
1.	Jumlah Koperasi sehat	KOP	17	22	27
2.	Jumlah Koperasi Aktif	KOP	42	49	52
3.	Persentase Peningkatan UMKM	%	11,04	10,80	14.08%
4.	Persentase UMKM yang mengakses permodalan	%	510	67	45.37

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Jumlah total koperasi di Lampung Barat sebanyak 165 unit dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 7.796 orang. Pada tabel diatas terlihat bahwa ada peningkatan jumlah koperasi sehat dari tahun 2019

hingga tahun 2021. Koperasi sehat adalah koperasi yang usahanya tumbuh dan berkembang serta kelembagaan koperasi yang juga baik, administrasi yang akuntabel dan tertib. Peningkatan jumlah koperasi sehat di Kabupaten Lampung Barat saat ini baru mencapai 16,67% dari total seluruh koperasi yang ada. Sementara itu koperasi aktif adalah koperasi yang tertib secara administrasi dan aktivitas usahanya, dibuktikan dengan tingkat kepatuhan koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan forum tertinggi dalam kelembagaan koperasi, pada tahun 2021 jumlah koperasi yang telah melakukan RAT sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) koperasi. Hingga tahun 2021 koperasi aktif di Kabupaten Lampung Barat mencapai 32,09% dari keseluruhan jumlah koperasi di Kabupaten Lampung Barat. Kondisi diatas masih menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan dan perlindungan Koperasi di masa yang akan datang.

Pada sektor UMKM, sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, permasalahan krusial yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah masalah pertumbuhan UMKM dan permodalan bagi UMKM. UMKM adalah sektor usaha yang sangat penting dan cenderung “survive” dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi dunia, karena UMKM selama ini terbukti cukup resisten terhadap krisis ekonomi. Oleh karenanya perlu sebuah upaya bagaimana masyarakat terbuka untuk menghasilkan pendapatan dari produk pertanian yang dihasilkan dengan mengolah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Lampung Barat juga mengalami fluktuasi sejak tahun 2019 Pertumbuhan UMKM mencapai 11,04%, mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi sebesar 10,80% dan meningkat kembali di tahun 2021 yakni sebesar 14,08%

Adapun permasalahan permodalan yang dihadapi UMKM juga merupakan hal penting untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan UMKM. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan pendampingan dan fasilitasi akses pembiayaan melalui program KUR dan kredit lunak lainnya. Pada tahun 2019 Persentase UMKM yang mengakses permodalan mencapai angka 510%, pada tahun 2020 mencapai 67% dan ditahun 2021

sebanyak 45,37% UMKM tercatat mengakses kredit yang disediakan pemerintah.

Mengingat kopi adalah produk unggulan di Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah produksi 43,715 ton pada tahun 2021, maka dari seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Barat, UMKM pengolahan komoditas kopi merupakan bidang usaha UMKM yang paling berkembang di Lampung Barat hamper di seluruh kecamatan memiliki IKM pengolahan kopi yang terus bertumbuh hingga di tahun 2021 jumlah IKM pengolahan kopi mencapai 146 unit IKM.

#### 19. Urusan Penanaman Modal

Pengembangan Investasi di Kabupaten Lampung Barat merupakan implementasi komitmen Kabupaten Lampung Barat sebagai wilayah konservasi, literasi dan tangguh bencana . Sebagai wilayah konservasi , pembangunan ekonomi harus memberi dukungan terhadap pelestarian lingkungan baik alam maupun budaya hal ini tercermin dari peluang investasi yang dapat dikembangkan berupa potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi serta sektor pariwisata.

Tabel 2.81.  
Pencapaian Kinerja Penanaman Modal

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021
Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	220	624	282
Nilai Investasi PMDN/PMA	Rp.	142.671.845.207,-	113.483.975.551,-	112.921.542.189,-
Jumlah Unit Usaha	Perusahaan	220	624	282

Sumber: Dinas PM PTSP Naker, 2022



Tabel 2.82.

Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Barat

Tahun	Realisasi Investasi ( Rp.)
2017	3.167.204.246,-
2018	25.947.491.049,-
2019	142.671.845.207,-
2020	113.483.975.551,-
2021	112.921.542.189,-

Sumber: Dinas PM PTSP Naker, 2022

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Investasi di Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dengan semakin kondusifnya iklim Investasi di Indonesia secara umum, namun sejak tahun 2020, dengan mulai terdampaknya Covid – 19 yang dialami hampir seluruh Negara, termasuk wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Lampung Barat, nilai Investasi juga mengalami penurunan karena terhambatnya operasional pembangunan, yang diakibatkan tidak sedikit tenaga kerja yang terlibat dalam proyek–proyek investasi terpapar oleh Covid–19, hingga dapat menghentikan kelanjutan kegiatan pembangunan, contoh berhentinya Proyek PLTMH yang dilaksanakan oleh PT. Lampung Hidro Energy pada tahun 2021.

## 20. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Pembangunan bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan Nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu upaya pembentukan generasi yang tangguh adalah Olahraga yang merupakan salah satu media strategis bagi pembentukan karakter bangsa, karena dalam olahraga selalu ditanamkan semangat kerjasama dan sportivitas. dua karakter inilah yang menjadi dasar utama dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan

bangsa. Dengan olahraga dapat membentuk karakter Bangsa karena Bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat dan produktif.

Sektor Pariwisata sebagai salah satu aset Ekonomi Kabupaten Lampung Barat merupakan sektor yang dipandang memiliki prospek sangat menjanjikan sekaligus mampu memberikan kontribusi pendapatan yang sangat signifikan baik secara makro (ekonomi regional) maupun mikro dikaitkan dengan dampak multiganda yang mampu menciptakan lapangan kerja yang luas dan pendapatan bagi masyarakat dan usaha- usaha skala kecil dan menengah.

Tabel 2.83.  
Kinerja OLAHRAGA

Olahraga	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Prasarana Olahraga				
1. Jumlah Lapangan Bola Voli	80	86	86	Unit
2. Jumlah Lapangan Bola Basket	100	125	125	Unit
3. Jumlah Lapangan Tennis	7	7	7	Unit
4. Jumlah Lapangan Futsal	55	77	77	Unit
5. Jumlah Stadion Sepak Bola	5	5	5	Unit
6. Jumlah Stadion Atletik	49	56	56	Unit
7. Jumlah Lapangan Bulu Tangkis	1	1	1	Unit
8. Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	Unit
9. Jumlah Kolam Renang	4	4	4	Unit
13. Jumlah Rumah Billiard	9	9	9	Unit
14. Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka	3	3	3	Unit
2. Kondisi Prasarana Olahraga				
1. Jumlah Lapangan Bola Voli	80	86	86	Unit/ Rusa k
2. Jumlah Lapangan Bola Basket	100	125	125	Unit/ Rusa k
3. Persentase Wirausaha Muda Mandiri				



Olahraga	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
4. Jumlah/Persentase Pelatih Bersertifikasi				%
5. Jumlah Atlet Berprestasi	71	128	26	Atlit
6. Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	21	3	6	Cabor

Sumber : Dinas Pora Pariwisata 2022

Pemerintah daerah pada tahun 2021 telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana Olahraga dan memaksimalkan pembinaan untuk Atlit-atlit yang ada di Lampung Barat tetapi dikarenakan keterbatasan Anggaran dan Pandemi Covid-19 sehingga hasil kurang maksimal. Pada tahun 2021 Cabang Olahraga berprestasi ada 6 Cabang Olahraga dan Atlit berprestasi sebanyak 26 Orang.

Cabang Olahraga berprestasi antara lain :

a. IPSI

Tabel 2.84.  
Atlit binaan IPSI

Iqbal Dafa	Poin 3 Kejuaraan Sirkuit Daerah Pencak Silat Pengprov IPSI Lampung 2021 Zona 3
Nur Kholis	Poin 3 Kejuaraan Sirkuit Daerah Pencak Silat Pengprov IPSI Lampung 2021 Zona 3
Tofa	Poin 1 Kejuaraan Sirkuit Daerah Pencak Silat Pengprov IPSI Lampung 2021 Zona 3
Bijai Abdi Guna	Poin 4 Kejuaraan Sirkuit Daerah Pencak Silat Pengprov IPSI Lampung 2021 Zona 3 Juara Tryout Pencak Silat LAMPUNG vs BEKASI, Bandar Lampung 27-29 Agustus 2021
Endang Sari	Poin 2 Kejuaraan Sirkuit Daerah Pencak Silat Pengprov IPSI Lampung 2021 Zona 3
Siti Khotijah	Poin 4 Kejuaraan Sirkuit Daerah Pencak Silat Pengprov IPSI Lampung 2021 Zona 3

b. PELTI

Tabel 2.85.  
Atlit binaan IPSI

Mustika Oliver	Juara II Sirkuit Tenis Junior KU-16 Putri Lampung Seri 1 Tahun 2021
Deto Rais Ahdan	Juara III Sirkuit Tenis Junior KU-12 Putri Lampung Seri 1 Tahun 2021 Juara III, KU-12 Sirkuit Tenis Junior Seri 2, Lampung Selatan 22-24 Oktober 2021
BD. Elio Gatie	Peringkat 6, KU-14 Sirkuit Tenis Junior Seri 2, Lampung Selatan 22-24 Oktober 2021
Rizki Amanullah	Peringkat 8, KU-14 Sirkuit Tenis Junior Seri 2, Lampung Selatan 22-24 Oktober 2021

c. PASI

Tabel 2.86.  
Atlit binaan IPSI

Novera	Juara II Lari Cepat 100m, Kejuaraan Daerah Atletik U-16 dan U-18 Provinsi Lampung 2021 Juara III, Lompat Jauh, Kejuaraan Daerah Atletik KU_16 dan KU-18 Provinsi Lampung 2021
M. Yafi Jawat	Juara II Lempar Cakram Kejuaraan Daerah Atletik KU-16 dan Ku-18 Provinsi Lampung 2021

d. PORKI

Tabel 2.87.  
Atlit binaan PORKI

Wisnu Prayoga	Atlit PON XX 2021
Ida Seridevi	Juara 3 (Medali Perunggu) Cabor Karate pada PON Papua 2021

e. PERTINA

Tabel 2.88.  
Atlit binaan PERTINA

Nico	Juara I, Kejuaraan Provinsi Tinju Amatir Lampung Tahun 2021
Jovin	Juara I, Kejuaraan Provinsi Tinju Amatir Lampung Tahun 2021
Edwin	Juara II, Kejuaraan Provinsi Tinju Amatir Lampung Tahun 2021



Setyo	Juara II, Kejuaraan Provinsi Tinju Amatir Lampung Tahun 2021
Dewa	Juara III, Kejuaraan Provinsi Tinju Amatir Lampung Tahun 2021

f. PBSI

Tabel 2.89.  
Atlit binaan PBSI

Andika Azhar Permana	Kejuaraan Bulu Tangkis GLOMPONG CUP I Tahun 2021 Kategori Anak-anak
Andika Pratama	
Bahdum	

Tabel 2.90.  
Jumlah Pemuda Lampung Barat Yang Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional

No	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
1.	Pertukaran Pemuda Antar Provinsi		Paskibraka Tingkat Provinsi		Seleksi Muhibah Budaya Dan Festival Jalur Rempah Provinsi Lampung Tahun 2021	
	1.	Dona Utari	1	Riko Pirmansyah	1	Nili Roslina
	2.	Lingga Saputra	2	Heditya Dwi Mustika	2	Aldo Patmara
2.	Paskibraka Tingkat Provinsi		3	Muhammad Yafi J.R		
	1.	Riko Pirmansyah	Predikat Pemenang Busana Terbaik Duta Bahasa		Paskibraka Tingkat Provinsi	
	2.	Heditya Dwi Mustika	1	Vina Qurrota Akyuningrum	1	Mojes Wijaya
	3.	Selvia Hestiana	Predikat Peserta Terpilih Kategoti Pantomim Pada Jejak Virtual		2	Citra Ayu Septina
3.	Pertukaran Pemuda Antar Negara		1	Yosep Darusman	3	Ayu Marisa
	1.	Andi Hilman Fahmi				
4.	Cabang Olahraga Berprestasi Tingkat Provinsi		Pertukaran Pemuda Antar Provinsi		Pertukaran Pemuda Antar Provinsi	
	1.	Bijai Abdi Guna (Ipsi)	1	Bella Neta Fitri	1.	Monika Tri Audina
	2	Muhammad Iqbal Ridzaldi (Taekwondo)			2.	Ahmad Sumantri
5	3	Adia Tirta ( Pasi )				
	Pbsi Perorangan Dan Kelompok		Juara 3 Sains Nasional		Sirkuit Tenis Junior	
	1	Krisna Surya Ardian	1	Wahyuda Pratama	1.	Mustika Olivera (Juara 2)
	2	Wahyu Ramadan			2.	Okto Akhdan Rais (Juara 3)



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
3	Rapi Aditia		
4	Andika Azhar Perman		Kejuaraan Atletik Usia 16-18 1. Novera (Juara 2)
5	Agil Prasetyo		
6	M.Hanip		2. M. Yafi Jawad (Juara 3)
7	M.Sapik.I.S		
8	Ma'rup		
9	Ilham Dinnuklis		Peraih Mendali Perak Olimpiade Pendidikan Agama Islam Tingkat Nasional
10	Bahdum		1. Wahyuda Pratama
11	Amalinda Gustriliya		
12	Suryaningtiyas Sabda Pratiwi		
13	Yeni Astuti		Duta Museum Lampung Tahun 2021
14	Nisaul Laliy F		1. Monika Tri Audina
	Penampilan Terbaik Iii Personil Lampung Culture And Tapis Carnaval Festival Kerakatau Th 2019		2. Ahmad Rivando
1	Dio Praja Kamova		Duta Kopi Indonesia Tahun 2021
2	Andika Jaya Gusnanda		1. Maulia Noor Faried
3	Een Firmansyah		
4	Faisal Hardinata		
5	Asrul Yuda Pratama		Juara I Duta Pelajar Putra Dan Putri 2021
6	Irawan		
7	Nasyiruddin Firdaus		1. Riki Maynaki (Ma Nurul Iman Skincau)
8	Nabil Saputra		2. Dinda Nurul Meidianti
9	Agra Datama		(Sma 1 Belalau)
10	Farel Pratama		
11	Muhammad Rayhan Gibran A		
12	Tika Fitriaoktaliza		
13	Puspa Damar Pinasti		
6.	14	Julia Indiana	
	15	Nayla Oktaria	
	16	Cindi Adelia	
	17	Mega Aulia	
	18	Nadya Nuruzz Alfatya	
	19	Indah Lestari	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
20	Nayla Alisya Azzahra		
21	Metalia Relida		
22	Bagas Kurnia		
23	Rengga Agroiantama		
24	Bentar Zamzami		
25	M Dersi Ispa		
26	Rizaldi Yosep Kurniawan		
27	Yandi Rianto		
28	M Nadia Azka		
29	Amri		
30	Satya Firnando		
31	Yudi Agriyansyah		
32	Sapringga Winata		
33	Indah Mutiara Zurian		
34	Bella Nata Fitri		
35	Febiola		
36	Erika		
37	Erik Sanjaya		
38	Febi Mahendra Puspa Negara		
39	Edwarsyah Maas		
40	Harun Hasan		
41	Mamak To		
42	Oka Restu Dinata		
43	Damro		
44	Qodri Febriansyah		
45	Neno Melta Yulendra		
46	Dhea Adinda		
47	Rara Firanti		
48	Ratu Restu Melania		
49	Ricard Sambera		
50	Ogi Pratama		
51	Dedi Edwin		
52	Seldatri Hairani		
53	Ari Widodo		
54	Jevi Narsita Lestari		
55	Zairi		
56	Wenny Oktavia		
	Mahasiswa Penerima Bea Siswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2019	Mahasiswa Penerima Bea Siswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2020	Mahasiswa Penerima Bea Siswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2021
7.	1. Angga Febriyanto		1. Syafana Oktianti



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
2.	Dwi Karni		2. Syafira Hasna 'Apipah
3.	Delva Sevtia		3. Indira Chaerani Tria Fhadlika
	Mahasiswa Penerima Bea Siswa Pendidikan Kesenian Tahun 2019	Mahasiswa Penerima Bea Siswa Pendidikan Kesenian Tahun 2020	Mahasiswa Penerima Bea Siswa Pendidikan Kesenian Tahun 2021
			1. Ahmad Rifanza
			2. Holmes Sinaga
			3. Refi Adesa Dewi
			4. Rully Nurdagidsu
			5. Roberto Alfiano
			6. M. Dimazz R Langga Hernawan
			7. Bilqis Dwina Adinda
			8. Putri Novia Anastasya
			9. Muhammad Desri Izpa
			10. Aluna Refita Ayu
			11. Raben Anggara Dewandika
			12. Cindy Adella
	Jumlah : 80 Orang	Jumlah : 7 Orang	Jumlah : 32 Orang

Sumber : Dinas Pora Pariwisata 2022

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Pelopor adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Pelopor ini menjadi kegiatan wajib tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta sebagai upaya mendukung program Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam upaya meningkatkan Pemuda yang berdaya saing.

Kegiatan Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Propinsi /JPI adalah kegiatan rutin tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta sebagai upaya mendukung program pemerintah

dalam upaya meningkatkan kesadaran putra dan putri akan kecintaanya kepada NKRI dan Khususnya Kabupaten Lampung Barat.

Selain itu sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan dan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di seluruh Indonesia.

Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka adalah kegiatan rutin tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran putra dan putri akan kecintaanya kepada NKRI dan Khususnya Kabupaten Lampung Barat.

Selain itu sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan Paskibraka tentang baris berbaris di Kabupaten Lampung Barat. Untuk mendukung Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021.



21. Urusan Kebudayaan

Lampung Barat dapat dikatakan istimewa dengan latar sejarahnya pernah menjadi lokasi transmigrasi BRN (Biro Rekonstruksi Nasional) dan terdapat Tugu Soekarno sebagai tanda Perjalanan Bung Karno ke Lampung Barat. Selain Tugu Soekarno juga meninggalkan naskah sejarah "PERJALAN SERIBU MIL PUN HARUS DI MULAI DENGAN

SATU LANGKAH PERTAMA" Ir. Soekarno Presiden RI di Sumberjaya, 14 November 1952. Selain itu juga Lampung Barat memiliki komoditas kopi yang sangat penting bagi Indonesia yang tentunya sarat dengan nilai-nilai sejarah. Dengan mempelajari sejarah Lampung Barat kita dapat melihat bagaimana sejarah tidak hanya digerakkan oleh Politik tetapi juga ekonomi.

Tabel 2.91.  
Jumlah Penggiat Seni dan Budaya

Penggiat Seni Dan Budaya	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
<b>Seni Rupa</b>				
Jumlah Kelompok Seni Lukis	2	2	3	Kelompok
Jumlah Kelompok Seni Kriya/Kerajinan Tangan	10	10	5	Kelompok
Jumlah Kelompok Seni Patung	3	3	3	Kelompok
Jumlah Kelompok Seni Dekorasi		3	3	Kelompok
Jumlah Kelompok Seni Reklame				Kelompok
<b>2. Seni Tari/Gerak</b>				
<b>Tari Kreasi Baru</b>				
Jumlah Kelompok		15	16	Kelompok
Jumlah Anggota Tari Kreasi Baru		300	330	Orang
<b>Tari Tradisional</b>				
Jumlah Kelompok		10	10	Kelompok
Jumlah Anggota Tari Tradisional		400	400	Orang
<b>3. Seni Suara/Vocal</b>				
Jumlah Kelompok Seni Suara/Vocal	2	2		Kelompok
Jumlah Anggota Seni Suara/Vocal	30	30		Orang
<b>4. Seni Musik Tradisional</b>				
Jumlah Kelompok Seni Musik Tradisional		41	70	Kelompok
Jumlah Anggota Seni Musik Tradisional		287	490	Orang
<b>5. Seni Sastra</b>				
1. Jumlah Kelompok Seni Sastra	2	3	3	Kelompok
2. Jumlah Anggota Seni Sastra	50	75	75	Orang
<b>6. Seni Teater/Drama</b>				
Jumlah Kelompok Seni Teater/Drama	2	3	3	Kelompok
Jumlah Anggota Seni Teater/Drama	50	75	75	Orang
<b>7. Pagelaran/Pameran Seni Budaya</b>				



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

Pegiat Seni Dan Budaya		Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
Pagelaran Seni Budaya					
	Jumlah Pagelaran	3	3	3	Kali
	Jumlah Pengunjung				Orang
8. Celugam					
Kerajinan Celugam					
	Jumlah pengrajin	5	5	5	IKM Aktif

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

Lampung Barat memiliki beragam seni budaya yang harus dilestarikan dan berkembang sehingga bisa lebih dikenal masyarakat. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel diatas perkembangan data seni dan budaya di Kabupaten Lampung Barat

Tabel 2.92.  
Jumlah Cagar Budaya

Cagar Budaya	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jenis Cagar Budaya				
Jumlah Situs Cagar Budaya	45	45	45	
Milik Pemerintah Pusat	9	9	9	Unit
Milik Pemerintah Daerah	2	2	2	
Milik Masyarakat	31	31	34	
Milik Swasta				Unit
Jumlah Pengunjung		15.000	12.500	Orang
Jumlah Benda Cagar Budaya				
Milik Pemerintah Pusat				Unit
Milik Pemerintah Daerah				
Milik Masyarakat	287	287	287	
Milik Swasta				Unit
Jumlah Bangunan Cagar Budaya				
Milik Pemerintah Pusat	1	1	1	Unit
Milik Pemerintah Daerah	1	1	1	
Milik Masyarakat	6	6	6	
Milik Swasta				Unit
2. Penetapan Cagar Budaya				
Jumlah Cagar Budaya Milik Pemerintah Pusat/Daerah				
Sudah Ditetapkan				Unit
Belum Ditetapkan				Unit
Jumlah Cagar Budaya Milik Masyarakat/Swasta				
Sudah Ditetapkan				Unit
Belum Ditetapkan				Unit

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa situs cagar budaya dilampung barat terdata sejumlah 45 unit dengan jumlah pengunjung 15.000 pada tahun 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi sekitar 12.500.

Tabel 2.93.  
Jumlah Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Sanggar Kesenian		144	183	Organisasi
2. Jumlah Gedung Kesenian	1	1	2	Unit
3. Jumlah Museum				Unit
4. Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya				Unit

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022  
Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan sarana dan prasarana seni dan budaya yang terdiri dari jumlah sanggar kesenian semakin meningkat dari total 144 organisasi pada tahun 2020 menjadi 183 organisai pada tahun 2021 dan jumlah Gedung kesenian berjumlah 1 pada tahun 2019 menjadi 2 ditahun 2021, hal ini dikarenakan adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap seni dan budaya dikabupaten lampung barat.

## 22. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pengunjung atau pemustaka. Perpustakaan mempunyai fungsi yang strategis sebagai wahana pemustaka. Sedangkan fungsi perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, kewajiban pemerintah adalah menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, layanan perpustakaan secara merata, pusat sumber belajar masyarakat, promosi gemar membaca dengan memanfaatkan

perpustakaan untuk pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Konsekuensi dari fungsi –fungsi tersebut berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik melalui program peningkatan sarana dan prasarana maupun peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan baik tingkat desa, sekolah maupun pengelola perpustakaan daerah. Ketersediaan perpustakaan yang representatif baik dari sisi kelengkapan sarana prasarana dan dukungan sumber daya manusia/pustakawan yang kompeten dalam pengelolaan perpustakaan menjadi suatu keharusan untuk menjalankan fungsi perpustakaan secara optimal. Kabupaten Lampung Barat sudah memiliki perpustakaan daerah walaupun masih nyatu dengan kantor, namun masih perlu ditingkatkan kondisi gedung dan kelengkapan fasilitas perpustakaan.

Kabupaten Lampung Barat telah mencanangkan sebagai Kabupaten Literasi, upaya yang dilakukan antara lain dengan mengembangkan perpustakaan daerah sebagai perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang bisa memberikan akses kepada seluruh masyarakat dengan keterbatasan social yang ada. Kebijakan yang diambil diantaranya dengan melaksanakan penyediaan perpustakaan keliling dengan mobil perpustakaan keliling dari kabupaten dan bentor perpustakaan keliling di kecamatan-kecamatan yang berkeliling ke pekon-kekon di wilayahnya, perpustakaan keliling ini memberikan kemudahan akses untuk masyarakat di pekon yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber informasi. Selain itu juga, telah terbentuk perpustakaan pekon di 12 pekon dan Lamban Baca di seluruh Pekon dan Kelurahan se-Kabupaten Lampung Barat. Dimulai di tahun 2021, telah tersedia perpustakaan online di Lampung Barat yaitu e-Pusda yang dapat diunduh secara gratis dan diakses setiap saat dengan menggunakan gadget berbasis Android, koleksi judul buku yang tersedia di e-Pusda sebanyak 1.878 judul buku.

Tabel 2.94.  
Jenis Perpustakaan

No	JENIS PERPUSTAKAAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	SATUAN
1	Jumlah Perpustakaan Umum	137	137	138	Unit
2	Jumlah Perpustakaan Sekolah	330	331	332	Unit
3	Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi	1	1	1	Unit
4	Judul buku	27.981	29.947	30.841	Judul
	Perpustakaan Umum	27.981	29.947	30.841	Judul
5	Pustakawan Dan Tenaga Teknis Perpustakaan	14	14	16	Orang
	Perpustakaan Umum	14	14	16	Orang
6	Jumlah Perpustakaan memenuhi standar	33	36	40	Unit
	a. Perpustakaan Umum	1	1	1	Unit
	Perpustakaan sekolah	30	33	37	Unit
	Perpustakaan Pekon	2	2	2	Unit
7	Jumlah pemustaka ke perpustakaan	7.558	2.631	7.154	Orang
	Jumlah pemustaka ke perpustakaan umum	7.558	2.631	7.154	Orang
8	Jumlah Anggota Perpustakaan	4.407	6.277	6.868	Orang
	Jumlah anggota Perpustakaan Umum	4.407	6.277	6.868	Orang

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan tahun 2022

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat telah berkomitmen untuk mendukung Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi. Dan berusaha untuk meningkatkan pelayanan minat baca kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat dengan berbagai kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Kegiatan tersebut diantaranya adalah menyediakan ruang khusus untuk anak-anak dengan fasilitas buku-buku untuk anak-anak, Alat Peraga Edukasi untuk anak-anak dan fasilitas audio visual untuk anak-anak. Selain itu juga menyediakan buku-buku referensi untuk anak sekolah, mahasiswa maupun untuk masyarakat umum (baik buku cetak maupun buku digital atau e-book).

Untuk mengembangkan bakat minat anak-anak usia pra-sekolah maupun usia sekolah, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat setiap tahun mengadakan kegiatan berkenaan dengan hari kunjung perpustakaan diantaranya; Lomba mewarnai untuk anak

TK/Paud, lomba bercerita rakyat Lampung untuk anak Sekolah Dasar, Lomba berpidato Bahasa Lampung untuk anak Sekolah Lanjutan tingkat pertama dan story telling untuk anak SLTA. Selain lomba yang diikuti oleh peserta orang tua juga ikut mendampingi pada saat anak-anak kegiatan lomba dimaksud, Dengan demikian orang tua dapat menjadi sasaran sosialisasi minat baca untuk dapat membimbing anak-anaknya belajar buku, karena seperti yang kita ketahui bersama orang tua adalah guru pertama dalam lingkungan keluarga.

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan mengutamakan pelayanan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah cara yang efektif untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Lampung Barat terbukti dengan pelayanan mobil perpustakaan keliling berjumlah 3 mobil, khusus bentor perpustakaan keliling berjumlah 15 unit untuk pelayanan di tingkat kecamatan Balik Bukit, Belalau, Sekincau, Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, Sumber Jaya, Kebun Tebu, Bandar Negeri Suoh, Lumbok



Seminung, Balik Bukit, Batu Brak, Batu Ketulis, Pagar dewa, Suoh

Pelayanan Perpustakaan Keliling dapat menyumbangkan tercapainya minat baca masyarakat, karena dapat meningkatkan budaya baca masyarakat sekaligus sosialisasi e-b-book di wilayah Kecamatan Se- Lampung Barat.

Sasaran strategis Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Gemar Membaca adalah meningkatnya jumlah pengunjung dan meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat.

Sedangkan pada indikator meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan, setiap tahun mengalami kenaikan atau penambahan, kecuali saat pandemi covid 19 mengalami penurunan dratis, karena stop pelayanan untuk pengunjung, akan tetapi dengan adanya e- book atau buku digital pemustaka bisa mengakses buku digital dari rumah masing masing menggunakan android.

Keterangan Tabel di atas:

- 1 Jumlah Perpustakaan Umum  
Jumlah perpustakaan Pekon/Kelurahan dan perpustakaan daerah
- 2 Jumlah Perpustakaan Sekolah  
Perpustakaan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA.
- 3 Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi  
STIT Al Mutazam memiliki perpustakaan yang belum berstandar
- 4 Judul Buku  
Perpustakaan Umum  
Data khusus jumlah buku perpustakaan Daerah, tidak termasuk Perpustakaan Pekon/Kelurahan
- 5 Pustakawan Dan tenaga Teknis Pustakawan  
Perpustakaan Umum  
Data khusus Jumlah pustakawan di Perpustakaan Daerah, tidak termasuk perpustakaan Pekon/Kelurahan
- 6 Jumlah Perpustakaan memenuhi Standar  
Perpustakaan Umum  
Perpustakaan Daerah

Perpustakaan sekolah  
Data untuk sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang memenuhi standar  
Perpustakaan Pekon  
Pekon Padang Tambak dan Pekon Pura mekar

- 7 Jumlah Pemustaka ke perpustakaan  
Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Umum  
Khusus pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan daerah, tidak termasuk perpustakaan Pekon/Kelurahan
- 8 Jumlah Anggota Perpustakaan  
Jumlah anggota Perpustakaan Umum  
Khusus pemustaka yang memiliki KTA (kartu Tanda Anggota) perpustakaan Perpustakaan daerah, tidak termasuk perpustakaan Pekon/Kelurahan

## 23. Urusan Kearsipan

Kearsipan adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip (file) mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu.

Ruang lingkup kegiatan kearsipan meliputi:

- a. Penciptaan, penerimaan, pengumpulan arsip
- b. pengendalian, pemeliharaan dan perawatan arsip
- c. penyimpanan dan pemusnahan arsip

Pengelolaan arsip berpedoman kepada aturan Pemerintah yaitu UU nomor 43 tahun 2009 mulai dari menerima warkat, mencatat, mendistribusikan, menyimpan, menata/menemukan kembali arsip, mengadakan perawatan /pemeliharaan, mengadakan atau pun merencanakan penyusunan arsip. Dengan peningkatan SDM pengelola kearsipan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM pengelola kearsipan.



Tabel 2.95.  
Kinerja Kearsipan

Kearsipan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan				-
Pengelola Kearsipan Pada Perangkat Daerah	49	49	49	orang
Arsip Vital Dan Arsip Statis*				
Jumlah Arsip Vital	-	-	-	-
Jumlah Arsip Statis	895	1.012	1.045	Dokumen

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2022

### 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

#### 1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selalu berusaha untuk mencapai program/kegiatan yang telah direncanakan dengan teralisasinya semua program/kegiatan seperti Kegiatan usaha di bidang perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat antara lain kegiatan penangkapan ikan di perairan umum, budidaya ikan di perairan umum, budidaya ikan di kolam dan mina padi (budidaya ikan di sawah). Kegiatan usaha penangkapan ikan perairan umum di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari penangkapan ikan di danau, sungai, rawa, cekdam dan genangan air lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan.

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Potensi tersebut terdiri dari perikanan budidaya yang meliputi budidaya darat dan perairan umum serta penangkapan ikan perairan umum yang tersebar di 15 kecamatan. Sedangkan Potensi lahan darat di Kabupaten Lampung Barat yang dapat dikembangkan untuk budidaya kolam seluas 5.584,7 Ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 2.349,4 Ha,

sementara untuk budidaya mina padi potensi lahan 13.710 Ha dengan tingkat pemanfaatan 342,39 Ha. Potensi pengembangan perikanan budidaya di darat didominasi 2 (dua) kecamatan, yaitu Sumberjaya dan Kebun Tebu.

Potensi perairan umum di Kabupaten Lampung Barat yang menjadi fokus untuk pengembangan perikanan budidaya adalah Perairan Umum Danau Ranau dengan luas potensi 141,60 Ha yang terletak di Kecamatan Lumbok Seminung. Untuk pengembangan perikanan budidaya di perairan umum Danau Ranau difokuskan untuk pengembangan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang terletak di 3 (tiga) pekon/desa yaitu kagungan, sukabanjar dan tawan sukamulya. Hingga saat ini potensi perairan Danau Ranau yang dimanfaatkan baru mencapai 15,13 Ha dari potensi lahan yang bisa dikembangkan untuk budidaya KJA sebesar 141,60 Ha berdasarkan perencanaan zonasi Dinas Perikanan Lampung Barat. Hingga saat ini jumlah KJA yang ada di perairan umum Danau Ranau yaitu ± 192 (seratus sembilan puluh dua) unit.

Untuk kegiatan penangkapan ikan di perairan umum di Kabupaten Lampung Barat meliputi perairan danau, sungai, waduk, rawa dan galian air lainnya (GAL). Berikut disampaikan data capaian urusan Perikanan Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.96.  
Realisasi Produksi Usaha Perikanan Tahun 2019-2021

No.	Indikator Kinerja	Realisasi (tahun)		
		2019 (ton)	2020 (ton)	2021 (ton)
1.	Produksi penangkapan perairan umum	443,6	475,3	586,2
2.	Budidaya Perairan Umum	5.195	5.509,54	6.209,42
3.	Budidaya di kolam	3.837	3.208,70	3.355,98
4.	Mina Padi	306	132,60	370,01

Sumber : Dinas Perikanan 2022



Tabel 2.97.  
Kinerja Perikanan Budidaya Tahun 2019-2021

Perikanan Budidaya	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Budidaya Air Tawar				
a) Jumlah Pembudidaya Air Tawar	5.318	5.424	5.496	Orang
b) Jumlah Produksi	9.338	8.850	9.935	Ton

Sumber : Dinas Perikanan 2021

Tabel 2.98.  
Jumlah Benih, Industri dan Nilai Perikanan Tahun 2019-2021

Benih, Industri dan Nilai Perikanan	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
1. Balai Benih Ikan				
a) Jumlah Balai Benih Ikan	1	1	1	Balai
2. Pembenihan Ikan Rakyat				
a) Jumlah Pembenihan Ikan Rakyat	246	298	356	Unit
b) Jumlah Produksi Benih Ikan Rakyat	53.027.800	62.750.500	72.078.250	Ton
c) Nilai Produksi Benih Ikan Rakyat	9.245.635.000	11.164.475.000	13.482.560	Rp.
3. Budidaya Perikanan				
a) Jumlah Pembudidaya	5.318	5.424	5.496	RTP
b) Jumlah Produksi Budidaya	9.338	8.850,84	9.935,41	Ton
c) Nilai Produksi Budidaya (Rpx1.000)	229.085.500	213.148.864,00	252.240.225	Rp
4. Perikanan Tangkap				
a) Jumlah Nelayan	2.390	2.388	2.388	RTP
b) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	443,6	475,3	586,2	Ton
c) Nilai Produksi Perikanan tangkap	10.121.280	11.236.420,00	14.021.450	Rp
4. Nilai Tukar Pembudidaya Air Laut				
a) Jumlah Pembudidaya	0	0	0	Orang
5. Nilai Tukar Pembudidaya Air Tawar				



Benih, Industri dan Nilai Perikanan	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
a) Jumlah Pembudidaya	5.564	5.722	5.852	Orang
b) Penerimaan Pembudidaya	238.331.135.000	224.313.339.000	265.722.785.000	Rp
c) Pengeluaran Pembudidaya				
(a) Biaya Konsumsi	360.000.000	380.000.000	395.010.000	Rp
(b) Biaya Produksi	178.748.351.250	154.851.749.800	147.783.125.000	Rp
(c) Keuntungan per thn	59.582.783.750	69.461.589.200	117.544.650.000	Rp
6. Volume dan Nilai Ekspor Perikanan				
a) Volume Ekspor	5.602,50	5.882,63	5.366,24	Ton
b) Nilai Ekspor (Rp x 1000)	137.451.300	141.667.326	123.490.040	Rp
7. Volume dan Nilai Ekspor Rumput Laut				
a) Volume Ekspor	0	0		Ton
b) Nilai Ekspor	0	0		Rp

Sumber : Dinas Perikanan 2022

## 2. Urusan Pariwisata

Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan pariwisata. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut akan ikut menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Pasal 1 angka 3 secara normatif memberikan batasan, bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Lampung merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki sektor unggulan di bidang Pariwisata. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) potensi wisata Kabupaten Lampung Barat berjumlah 77 destinasi wisata yang terdiri dari 14 objek Wisata Religi, 6 objek Wisata Budaya, 4 objek Wisata Danau, 23 objek Wisata Alam, 18 objek Wisata Sejarah, 5 objek Wisata Agro, 3 objek Wisata Buatan, 5 objek Wisata Cagar Alam.

Sampai dengan saat ini destinasi wisata yang dikelola oleh kelompok Sadar Wisata sebanyak 37 destinasi. Dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mulai dari penambahan amenities, perbaikan aksesibilitas dan pembinaan atraksi. Maka dalam 3 (tiga) tahun terakhir angka kunjungan pariwisata terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Angka kunjungan pariwisata Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 700% yaitu sebesar 110.782 kunjungan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 27.624. Dengan adanya Pandemi Covid-19 maka terjadi penurunan angka kunjungan wisata mencapai 70%. Hal tersebut berdampak terhadap geliat ekonomi pada masyarakat yang saat ini sedang bergiat mengembangkan pariwisata. Namun demikian dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya penurunan aktivitas sektor pariwisata masih dapat ditangani oleh masyarakat mengingat kegiatan di sektor pariwisata bukan merupakan mata pencaharian utama. Pada masa pandemi digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pembenahan-pembenahan internal dan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

penataan destinasi wisata, sehingga diharapkan pada saat pandemi berakhir masyarakat telah bersiap menyambut kunjungan wisatawan dengan

mempersiapkan destinasi wisatanya menjadi lebih baik.

Tabel 2.99.  
Data Kunjungan Wisatawan Nusantara

No	Nama Pokdarwis / Pengelola	Potensi Wisata	Alamat	2019	2020	2021	Peningkatan / Penurunan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pinus Ecopark	Wisata Alam Pohon Pinus	Sukapura Sumberjaya	0	19125	11782	-70	Destinasi Baru
2	Air Terjun Curup Cengkaan	Wisata Air Terjun Cengkaan	Way Petai Sumberjaya	2859	3061	9856	90	
3	Area Jaya	Wisata Alam Puncak Rest Area	Sindang Pagar Sumberjaya	2842	21717	12784	-87	
4	Way Besay Rafting	Wisata Arung Jeram	Sukajaya Sumberjaya	3375	405	761	-88	
5	Bumdes Tirtajaya	Wisata Arung Jeram	Sukajaya Sumberjaya	0	365	981	89	Destinasi Baru
6	Upt. Situs Megalitik Batu Brak	Wisata Sejarah Situs Megalitik Batu Brak	Purawiwitan Kebun Tebu	0	10709	730	-95	Destinasi Baru
7	Puncak Bintang	Wisata Alam Puncak Bukit	Purajaya Kebun Tebu	0	0	529	100	Destinasi Baru
8	Cadas	Wisata Air Terjun Cipta Mulya	Cipta Mulya Kebun Tebu	0	958	1289	3	Destinasi Baru
9	Temiangnan Hill	Wisata Alam Negeri Diatas Awan	Trimulyo Gedung Surian	0	10163	6869	-42	Destinasi Baru
10	Kampung Kopi Rigis	Wisata Agro Kampung Kopi	Rigis Jaya Air Hitam	3824	7352	16417	100	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Nama Pokdarwis / Pengelola	Potensi Wisata	Alamat	2019	2020	2021	Peningkatan / Penurunan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Taman Wisata Tri Hita Karana	Wisata Budaya Kampung Bali	Sri Menanti Air Hitam	0	23874	7255	100	Destinasi Baru
12	Maju Jaya	Wisata Bumi Perkemahan Mabar Jaya Dan Air Panas	Sukaraja Way Tenong	3420	1374	7576	50	
13	Curup Tirtomoyo	Wisata Air Terjun	Tambak Jaya Way Tenong	2451	148	2886	100	
14	Cinta Laksana	Wisata Agro Strawberi	Puralaksana Way Tenong	2124	0	572	5	
15	Puralaksana Indah	Wisata Agro Kopi	Puralaksana Way Tenong	3620	0	568	50	
16	Awet Siaga	Wisata Agro Kopi	Sekincau	2429	344	1095	86	
17	Agro Wisata Alam Segar Sari	Wisata Agro Jeruk	Giham Sukamaju Sekincau	0	6097	3901	-30	Destinasi Baru
18	Pampangan Mandiri	Wisata Air Terjun Tresno	Pampangan Sekincau	2247	1070	1774	52	
19	Puncak Jaya Menggala	Wisata Alam Puncak Jaya Menggala	Bakhu Batu Ketulis	0	1654	3460	100	Destinasi Baru
20	Way Sebuga	Wisata Air Terjun Sebuga	Sukarame Belalau	2729	166	284	-94	
21	Way Segening	Wisata Air Terjun Way Segening	Turgak Belalau	3672	194	1765	-80	
22	Hambekhos	Wisata Alam Taman Hambekhos	Kenali Belalau	2994	1709	22	-95	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Nama Pokdarwis / Pengelola	Potensi Wisata	Alamat	2019	2020	2021	Peningkatan / Penurunan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Pesagi Jaya Sakti	Wisata Gunung Pesagi Dan Budaya	Hujung Belalau	0	2288	2690	100	Destinasi Baru
24	Desa Adat Puncak Dalam	Wisata Budaya Kepaksian Buay Bejalan Di Way	Kembahang Batu Brak	0	200	1585	100	Destinasi Baru
25	Bukit Bawang Bakung	Wisata Alam Bukit Bawang Bakung	Negeri Ratu Batu Brak	0	7512	5831	-60	Destinasi Baru
26	Upt. Kebun Raya Liwa	Wisata Kebun Raya Liwa	Kubu Perahu Balik Bukit	56750	45026	7676	21	
27	Kubu Perahu Tnbbs	Wisata Alam Bumi Perkemahan Dan Air Terjun	Kubu Perahu Balik Bukit	2431	489	1260	70	
28	Berlian Muda	Wisata Alam Buatan	Pagar Dewa Sukau	0	6847	9768	100	Destinasi Baru
29	Sukabanjar	Wisata Danau Ranau	Suka Banjar Lumbok Seminung	2824	130	2593	90	
30	Sai Betik	Wisata Danau Ranau Dan Gunung Seminung	Keagungan Lumbok Seminung	2892	4229	5487	50	
31	Jagat Endah Lestari	Wisata Geotermal Kawah Keramikan, Nirwana Dan Danau Lebar	Sukamarga Suoh	2821	3592	2463	-60	
32	Tunas Harapan	Wisata Danau Asam	Gunung Bandar Negeri Suoh	3100	1610	4458	50	



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Nama Pokdarwis / Pengelola	Potensi Wisata	Alamat	2019	2020	2021	Peningkatan / Penurunan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Curup Padae	Curup Padae Dan Kolam Renang	Mutar Alam Way Tenong	0	0	5350	100	Destinasi Baru
34	Lowista	Danau	Lumbok Seminug	0	0	3550	100	
35	Rumah Adat Kepaksian Pernong Dan Lembah Sekala Bekhak Saluy Pitu	Rumah Adat Kepaksian Pernong Dan Lembah Sekala Bekhak Saluy Pitu	Pekon Balak Batu Berak	0	0	4350	100	
36	Peduli Seminung	Pendakian Gunung Seminung	Teba Pering Raya Sukau	0	0	870	80	Destinasi Baru
37	Lamban Pesagi	Rumah Tradisional Lamban Pesagi	Kenali Belalau	0	0	827	60	
38	Serege Pulau Manggis	Wisata Alam Dan Agro	Sinar Luas Kebun Tebu	0	0	1500	100	Destinasi Baru
Jumlah Total				109404	182408	153414	50	

Catatan

Tahun 2019 terdapat 19 Destinasi Wisata yang telah dikelola oleh Pokdarwis / Pengelola

Tahun 2020 terdapat 32 Destinasi Wisata yang telah dikelola oleh Pokdarwis / Pengelola

Tahun 2021 terdapat 38 Destinasi Wisata yang telah dikelola oleh Pokdarwis / Pengelola

Tabel 2.100.  
Rekapitulasi Obyek Wisata

Obyek Wisata	THn 2019	THn 2020	THn 2021	Satuan
1. Obyek Wisata Budaya	2	2	6	Objek
2. Obyek Wisata Bahari	3	3	0	Objek
3. Obyek Wisata Cagar Alam	-	-	5	Objek
4. Obyek Wisata Pertanian/ Perkebunan	4	4	4	Objek
5. Obyek Wisata Buru	5	13	-	Objek



6. Objek Wisata Alam	7	17	23	Objek
7. Objek Wisata Sejarah	1	1	31	Objek
8. Objek Wisata Religi	-	-	13	Objek
9. Objek Wisata Pendidikan	-	-	-	Objek
10. Objek Wisata Kuliner	589	1980	1984	Objek
11. Objek Wisata Belanja	-	-	-	Objek
12. Objek Wisata Buatan	1	1	6	Objek

Sumber : Dinas Pora Pariwisata 2022

Tabel 2.101.  
Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah Kunjungan Wisatawan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Wisatawan Domestik	109404	180428	55448	Orang
2. Wisatawan Mancanegara	881	5	0	Orang
TOTAL	110285	180433	55448	Orang

Sumber : Dinas Pora Pariwisata 2022

Berdasarkan Rencana Induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 s.d 2013 sesuai dengan Perda No.2 Tahun 2016. Tentang REPPDA sebanyak 77 spot destinasi Pariwisata terkait dengan pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Barat mulai berkembang dengan peningkatan dari tahun ke tahun dilihat dari kunjungan wisata yang berkunjung ke Lampung Barat dan jumlah Komunitas Pendukung Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), sebagai Mitra Dinas Pariwisata yang ada dari mulai Tahun 2016 ada 4 Destinasi yang dikelola sampai Tahun 2022 sudah ada 37 Destinasi Pariwisata yang ada Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Lampung Barat.

### 3. Urusan Pertanian

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.. Kewenangan yang ditangani oleh Dinas adalah kewenangan teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tanaman Pangan meliputi Padi (padi sawah dan padi ladang) dan Palawija (jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar,

kacang hijau). Hortikultura meliputi Hortikultura Semusim (Bawang merah, cabe, kubis, tomat dan lain-lain) dan Hortikultura Tahunan (Durian, alpukat, jeruk, pisang, jambu, duku, nangka, petai, jengkol dan lain-lain)

Tabel 2.102.  
Capaian Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		
			2019	2020	2021
1	Jumlah produksi padi per tahun	Ton	166.481	136.784	111.641
2	Jumlah produksi sayuran per tahun	Ton	54.946	58.839	45.187
3	Jumlah produksi buah-buahan per tahun	Ton	26.928	28.722	42.861

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2022

Komoditas padi terdiri dari padi sawah dan padi ladang (lahan kering). Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum produksi padi mengalami penurunan dari 136.784 ton pada tahun 2020 menjadi 111.641 ton. Produksi padi mengalami penurunan dikarenakan adanya berkurangnya baku lahan sawah sebagai prasarana lahan produksi. Pada tahun 2021 diterapkan baku lahan sawah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 seluas 10.464 Ha. Baku lahan sawah tersebut merupakan hasil dari dilakukannya pemetaan lahan sawah secara geospasial berdasarkan citra satelit yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Pemetaan dilakukan secara mendetail dengan melakukan verifikasi luas lahan baik dengan kabupaten dan kecamatan. Diharapkan data yang sudah tersedia sekarang ini dapat seterusnya sebagai data baku lahan yang pasti sehingga menjamin kepastian dalam penyusunan perencanaan selanjutnya. Pencapaian produksi padi tahun 2021 di dukung oleh:

1. Menjamin tersedianya infrastruktur irigasi yang semakin memadai yang menjamin ketersediaan air untuk budidaya padi baik melalui pembangunan infrastruktur baru dan rehabilitasi infrastruktur irigasi yang sudah ada. Pada tahun 2021 dilakukan melalui pembangunan dam parit 3 unit, embung 4 unit, pembangunan irigasi tanah dangkal/irigasi perpompaan 3 Unit dan perbaikan jaringan irigasi untuk 12 kelompok tani.
2. Dalam rangka memperlancar mobilisasi sarana produksi, alat mesin pertanian dan hasil produksi dilakukan pembangunan jalan usahatani di kawasan tanaman pangan sebanyak 3 unit, dimana masing-masing unit sepanjang 1 km.
3. Penyediaan alat mesin pertanian dalam rangka mendukung mempercepat waktu pengolahan tanah dan mempercepat penanaman secara serempak, melalui bantuan Traktor R2 sebanyak 25 Unit.
4. Pelaksanaan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi, baik melalui gerakan massal pengendalian bersama-sama

dengan petani, melakukan pembinaan peningkatan pengetahuan petani melalui Sekolah Lapang dan mengadakan stock pestisida dalam rangka pengamanan produksi.

5. Pengembangan pupuk organik untuk tanaman padi dengan tujuan menjaga dan mengembalikan unsur hara tanah yang dibutuhkan tanaman dan mengantisipasi kelangkaan pupuk an organik. Dalam rangka pengembangan pupuk organik dilakukan melalui Sekolah Lapang Pengembangan Pupuk Organik skala kelompok di 3 kelompok tani.

Produksi hortikultura secara keseluruhan mengalami peningkatan 0,56%, dimana produksi pada tahun 2020 sebesar 87.561 ton menjadi 88.048 ton pada tahun 2021. Produksi Tanaman Hortikultura Semusim mengalami penurunan - 23,20%, dimana pada tahun 2020 produksi sebesar 58.839 ton menjadi 45.187 ton pada tahun 2021. Produksi Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya mengalami peningkatan sebesar 49,23%, dimana produksi tahun 2020 sebesar 28.722 ton menjadi 42.861 ton pada tahun 2021. Secara umum pencapaian produksi hortikultura didukung oleh :

1. Pengembangan kawasan buah untuk komoditas pisang seluas 40 Ha
2. Pengembangan kawasan sayuran (cabe besar) seluas 25 Ha
3. Pengembangan kawasan bawang merah seluas 15 ha.
4. Pengenalan dan pengembangan penggunaan benih unggul buah (durian, manggis dan alpukat) dengan luasan 58 Ha.
5. Pemasyarakatan dan Pengembangan kawasan buah-buahan melalui bantuan bibit buah-buahan yang tersebar di 15 kecamatan.
6. Bantuan sarana produksi cabe rawit dengan budidaya tumpang sari seluas 45 Ha.

Tabel 2.103.  
Kinerja Tanaman Pangan

Tanaman Pangan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Luas Lahan Pertanian				
Lahan Sawah	13.443	11.692	10.464,64	Ha
Beririgasi	11.119	9.180	8.660,64	Ha
Tadah Hujan	2.324	2.512	1.804	Ha
Lahan Kering				Ha



	Tegal/Kebun	21.800	21.965	21.965	Ha
	Ladang/Huma	-	-	-	Ha
2. Jumlah Produksi Tanaman Pangan					Ton
	Jumlah Produksi Padi	166.481	136.784	111.641	Ton
	Jumlah Produksi Jagung	676	791	629	Ton
	Jumlah Produksi Kedelai	750	1.667	413	Ton
	Jumlah Produksi Ubi	9.071	9.354	8.323	Ton
	Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnya	275	283	248	Ton

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2022

Potensi penggunaan lahan di kabupaten Lampung Barat yang merupakan wilayah budidaya untuk lahan sawah seluas 10.464,64 hektar pada tahun 2021. Rincian dari baku lahan sawah adalah lahan sawah yang beririgasi seluas 8.660,64 hektar dan tadah hujan seluas 1.804 hektar. Potensi pertanaman yang ada di lahan sawah adalah padi. Untuk peningkatan Indeks Pertanaman dan perbaikan pola tanam dalam rangka memutuskan mata rantai hama dan penyakit dapat dilakukan pertanaman palawija seperti jagung dan kedelai. Sentra pertanaman padi di kabupaten Lampung Barat adalah kecamatan Bandar Negeri Suoh, Suoh, Sukau, Lumbok Seminung, Kebun Tebu dan Balik Bukit.

Lahan pertanian bukan sawah terdiri dari lahan untuk Tegal/Kebun, Ladang/Huma, Perkebunan, Hutan Rakyat, Padang Penggembalaan, Hutan Negara dan Lainnya (tambak, kolam dan empang). Potensi lahan pertanian bukan sawah yang dapat dikembangkan untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura adalah lahan tegal/kebun. Komoditas yang sebagian besar dikembangkan adalah hortikultura baik sayuran dan buah-buahan. Sayuran yang dibudidayakan sebagian petani di Lampung Barat antara lain Kubis, Wortel, Cabe

Merah Besar, Cabai Rawit, Tomat, Sawi dan Labu Siam. Sentra sayuran di Lampung Barat adalah kecamatan Balik Bukit, Sekincau, Sukau dan Way Tenong. Buah-buahan yang dibudidayakan di Lampung Barat dan mulai dikembangkan adalah pisang, jeruk, alpukat, salak dan durian. Pisang merupakan komoditas yang sudah lebih intensif dibudidayakan. Sentra pisang di Lampung Barat adalah kecamatan Sumberjaya, Suoh, Kebun Tebu, Air Hitam dan Way Tenong.

Selain dari komoditas padi, dari sub sektor tanaman pangan berasal dari palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan tanaman sumber karbohidrat lainnya. Palawija tidak termasuk komoditas tanaman pangan yang prioritas untuk dibudidayakan. Palawija difungsikan untuk menjadi tanaman selingan, khususnya untuk petani yang membudidayakan hortikultura semusim. Budidaya palawija dilakukan untuk rotasi tanaman di lahan hortikultura semusim dengan tujuan memutus rantai pertumbuhan hama dan penyakit. Pada tahun 2020 produksi palawija sebesar 12.095 Ton. Terdiri komoditas kedelai sebesar 1.667 Ton, jagung 791 Ton, Ubi 9.354 ton dan Tanaman Pangan Lainnya 283 Ton.

Tabel 2.104.  
Kinerja Perkebunan

Perkebunan	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Satuan
1. Luas Areal Perkebunan				Ha
Luas Areal Tanaman Tahunan				Ha
Luas Areal Kelapa Sawit	30	35	36	Ha
Luas Areal Karet	106	107	107	Ha
Luas Areal Kelapa	512,1	512	511	Ha
Luas Areal Kopi	53.878,1	54.100	54.106	Ha



Perkebunan	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Satuan
Luas Areal Teh	0	0	0	Ha
Luas Areal Lada	7.531,9	7.582	7.582	Ha
Luas Areal Kakao	1.476,3	1.608	1.698	Ha
Luas Areal Jambu Mede	0	0	0	Ha
Luas Areal Cengkeh	863,6	896	897	Ha
Luas Areal Kapas	0	0	0	Ha
Luas Areal Tanaman Semusim				Ha
Luas Areal Tembakau	24	10	10	Ha
Luas Areal Tebu	0	0	0	Ha
Jumlah Produksi Perkebunan				Ton
Jumlah Produksi Tanaman Tahunan				Ton
Jumlah Produksi Kelapa Sawit	14	17	19	Ton
Jumlah Produksi Karet	34	41	42	Ton
Jumlah Produksi Kelapa	631,1	631	628	Ton
Jumlah Produksi Kopi	52.572,3	57.815	57.930	Ton
Jumlah Produksi Teh	0	0	0	Ton
Jumlah Produksi Lada	3.216,6	3.320	3.325	Ton
Jumlah Produksi Kakao	1.083,5	1.875	2.053	Ton
Jumlah Produksi Jambu Mede	0	0	0	Ton
Jumlah Produksi Cengkeh	73,0	82	85	Ton
Jumlah Produksi Kapas	0	0	0	Ton
Jumlah Produksi Tanaman Semusim				Ton
Jumlah Produksi Tembakau	2	4	6,8	Ton
Jumlah Produksi Tebu	0	0	0	Ton

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, produksi kopi robusta merupakan komoditas terbesar yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 1.138 kg/ha/th.

Peningkatan produksi dan produktivitas produk unggulan Kopi Robusta dilaksanakan melalui langkah-langkah yang terpadu, antara lain melalui kebijakan:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas dengan penerapan teknologi anjuran sesuai agroekosistem, penyiapan bibit unggul dan bantuan alsintan.
2. Pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung dan jalan produksi.
3. Penganekaragaman komoditas perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani kelompok tani melalui pelatihan dan pendampingan

5. Peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan dengan penerapan teknologi tepat guna.
6. Peningkatan akses pasar melalui kemiteraan, promosi dan pameran pada berbagai event.
7. Peningkatan kinerja dan integritas aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Secara umum untuk urusan peternakan terbagi menjadi ternak unggas dan ternak non unggas, rincian jenis ternak di Lampung Barat sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.105.

Produksi Ternak (Dalam Ekor)

NAMA TERNAK	TAHUN PRODUKSI (dalam Ekor)		
	2019	2020	2021*)
Sapi potong Lokal	1.054	935	946
Kerbau	-	11	14
Kambing	1.795	2.625	2.975



NAMA TERNAK	TAHUN PRODUKSI (dalam Ekor)		
	2019	2020	2021*)
Domba	-	18	21
Ayam Buras	2.274.957	3.221.260	3.221.400
Ayam Ras Petelur Pejantan	-	-	94.948.256
Ayam ras Pedaging	-	5.383.500	-
Itik	44.009	41.176	41.340
Itik Manila	16.672	2.135	2.280
Puyuh	699	15.000	16.000
Kelinci	2.297	2.477	2.535

NAMA TERNAK	TAHUN PRODUKSI (dalam Ekor)		
	2019	2020	2021*)
Puyuh	77	1.650,00	1.760,00
Kelinci	1.436,00	1.548,13	1.584,38

Jika dibandingkan capaian produksi ternak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, peningkatan jumlah produksi terutama pada ternak ayam buras, ternak kambing, dan ternak puyuh. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan tingkat kemudahan dalam pengembangannya. Upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan urusan peternakan ditempuh antara lain melalui upaya peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi sarana dan prasarana peternakan bagi para peternak.

Tabel 2.106.  
Produksi Ternak (Dalam Kg)

NAMA TERNAK	TAHUN PRODUKSI (dalam Ekor)		
	2019	2020	2021*)
Sapi potong Lokal	237.788,00	226.286,25	228.948,44
Kerbau	-	2.294,09	2.919,76
Kambing	30.820,00	41.310,94	46.819,06
Domba	-	201,83	235,46
Ayam Buras	2.154.257,00	2.480.370,20	2.480.478,00
Ayam Ras Petelur Pejantan	-	-	93.998.773,44
Ayam ras Pedaging	-	6.312.692,10	-
Itik	50.698,00	43.028,92	43.200,30
Itik Manila	20.556,00	2.348,50	2.508,00

#### 4. Urusan Perdagangan

Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah urusan Perdagangan dan Perindustrian. Sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Barat, sekaligus menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut kami sajikan data Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat

Tabel 2.107.  
Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat

Rincian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB Adhb (miliar)	729.012,10	806.045,70	910.538,20	870.031,90	-
PDRB Adhk (miliar)	557.103,90	600.273,00	654.302,90	610.855,80	-
Distribusi terhadap Total PDRB Adhb (%)	11,92	12,23	12,83	12,19	-
Laju Pertumbuhan (%)	10,47	7,75	9,00	-6,64	-

Sumber: BPS Lampung Barat, 2021

Pada tabel diatas terlihat bahwa Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap perekonomian

Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif baik berdasarkan harga berlaku maupun harga



konstan, dengan kata lain terdapat trend positif aktivitas ekonomi sektor perdagangan. Berdasarkan data yang didapat dari BPS Lampung Barat transaksi paling dominan yang mendukung pertumbuhan kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kabupaten Lampung Barat adalah aktivitas perdagangan kendaraan bermotor roda dua. Selanjutnya jika dilihat dari persentase distribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2019, dengan laju pertumbuhan yang juga fluktuatif.

Akan tetapi pada tahun 2020 kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat mengalami kontraksi atau perlambatan pertumbuhan sebesar -6,64%. Kondisi ini merupakan dampak besar dari bencana non alam Pandemi Covid 19 yang sangat berdampak pada ekonomi dunia, ekonomi nasional

hingga perekonomian Kabupaten Lampung Barat. Kondisi pandemi covid 19 yang mengharuskan dilaksanakannya PPKM oleh Pemerintah, membuat iklim usaha menjadi tidak menguntungkan sehingga masyarakat lebih memilih menahan dananya untuk menghindari kerugian ekonomi lebih besar lagi.

Sementara untuk tahun 2021 hingga dokumen ini selesai disusun, data kontribusi Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat belum tersedia di Badan Pusat Statistik Lampung Barat atau sedang dalam tahap penghitungan.

Selanjutnya masih di sektor perdagangan, perkembangan usaha perdagangan di Kabupaten Lampung Barat bisa dilihat dari ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.108.  
Jumlah Sarana Perdagangan

Sarana Perdagangan	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
Sarana Perdagangan				
Jumlah Pasar Tradisional				
Jumlah Dikelola Pemerintah	10	10	10	Unit
Jumlah Bangunan Permanen	333	335	337	Unit
Jumlah Bangunan Semi Permanen	80	74	74	Unit
Jumlah Pasar Modern				
Pasar Swalayan/Supermarket/ Toserba	0	0	0	Unit
Minimarket	30	31	44	Unit
Pasar Perkulakan/Grosir	0	0	0	Unit
Pertokoan	2.722	2.777	5.100	Unit
Jumlah Rumah Potong Hewan	1	1	1	Unit

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Sarana Perdagangan merupakan penunjang dalam aktivitas perdagangan baik secara tradisional maupun pasar modern. Sarana Perdagangan terdiri dari sarana perdagangan yang dikelola pemerintah dan juga yang merupakan milik swasta. Sarana perdagangan milik pemerintah adalah pasar tradisional yang tersebar di 10 tempat di Kabupaten Lampung Barat. Pasar Tradisional di Lampung Barat saat ini masih menopang ekonomi di pedesaan terutama di daerah-daerah yang jauh dari

lokasi ibukota kabupaten. Sarana Perdagangan di pasar tradisional maupun yang berada diluar lokasi pasar tradisional dan dikelola pemerintah dari tahun 2019 mengalami fluktuasi, yakni ada penambahan bangunan permanen baik yang berasal dari rehabilitasi bangunan semi permanen yang ada ataupun bangunan baru.

Adapun pada pasar modern, tercatat bahwa di Kabupaten Lampung Barat terdapat tiga jenis pasar

modern yaitu minimarket, pertokoan dan rumah potong hewan. Secara kuantitatif jumlah pasar modern mengalami kenaikan kecuali rumah potong hewan, hal ini menunjukkan bahwa geliat usaha perdagangan di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan trend positif.

Selanjutnya untuk jenis usaha perdagangan di Kabupaten Lampung Barat terdapat beberapa jenis usaha yang dominan antara lain penjualan jasa makanan/minuman dan penjualan cenderamata. Perkembangan kedua Jenis tersebut bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.109.  
Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman

Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Jumlah Restoran	145	142	159	Buah
2. Jumlah Cafeteria/Cafe	2	2	2	Buah

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Tabel diatas menunjukkan ada pertumbuhan jumlah usaha makanan dan minuman di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021, meski ditahun sebelumnya terdapat penurunan jumlah restoran yakni sebesar -2,06%. Kenaikan sebesar 11,97% jumlah restoran pada tahun 2021 memiliki catatan tersendiri mengingat kondisi pandemi secara umum membuat pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kebijakan PPKM yang ditetapkan pemerintah yang membuat mobilitas masyarakat menurun, tetapi juga membuat pelaku usaha khususnya pelaku usaha kuliner beradaptasi dengan baik dimasa pandemi sehingga justru memunculkan habit baru di masyarakat yang meski banyak mengurangi aktivitas keluar rumah namun tingkat konsumsi makanan dan minuman justru meningkat ditambah layanan pembayaran dan pengantaran

sampai ditangan konsumen oleh para pelaku usaha.

Tabel 2.110.  
Jumlah Penjualan Cenderamata

Penjualan Cenderamata	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
1. Toko Cenderamata	2	2	2	Toko
2. Pedagang Cenderamata Non Toko	0	0	0	Orang

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Dari tabel diatas, berdasarkan data yang masuk di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan usaha penjualan cenderamata belum menunjukkan perkembangan, belum berbading lurus dengan pertumbuhan destinasi wisata di Kabupaten Lampung Barat. Kondisi ini memerlukan perhatian yang serius, mengingat salah satu dampak yang diharapkan muncul dengan perkembangan destinasi wisata adalah tumbuhnya UKM kerajinan atau cenderamata di sekitar lokasi wisata.

## 5. Urusan Perindustrian

Urusan Pilihan selanjutnya adalah urusan perindustrian, dimana perindustrian adalah salah satu sektor yang saat ini cukup banyak diminati pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Barat. Sampai dengan saat ini, Industri di Kabupaten Lampung Barat belum berbicara masalah Industri Pengolahan yang terklasifikasi Industri Menengah dan Besar, melainkan masih skala industri kecil. Adapun Sektor Perindustrian memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat sekitar 5.29% pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.20% dari tahun 2019, sebagai dampak bencana non alam Pandemi covid 19.

Tabel 2.111.  
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Kabupaten Lampung Barat  
Atas Dasar Harga Berlaku (AdHB) Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50.27	49.12	46.92	47.75	47.23
B.	Pertambangan dan Penggalian	2.51	2.57	2.71	2.61	2.43
C.	Industri Pengolahan	4.63	4.86	5.49	5.29	5.35
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	.01	.01	.01	.01	.01
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	.11	.11	.11	.12	.11
F.	Konstruksi	3.84	4.00	4.24	3.99	4.29
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.92	12.23	12.83	12.20	12.85
H.	Transportasi dan Pergudangan	2.66	2.69	2.73	2.63	2.58
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.30	1.35	1.42	1.35	1.29
J.	Informasi dan Komunikasi	2.92	2.97	3.01	3.22	3.18
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.93	1.88	1.82	1.86	1.95
L.	Real Estate	4.44	4.48	4.60	4.45	4.33
M.	Jasa Perusahaan	.19	.19	.19	.19	.18
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.43	6.53	6.60	6.80	6.81
O.	Jasa Pendidikan	4.12	4.20	4.33	4.50	4.47
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.40	1.40	1.41	1.55	1.56
Q.	Jasa lainnya	1.32	1.42	1.56	1.47	1.38
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Berdasarkan rincian tabel di atas, lapangan usaha industri pengolahan menunjukkan peningkatan kontribusi pada capaian PDRB Lampung Barat, dimulai di tahun 2017 sebesar 4.63% lalu meningkat menjadi 4.86% di tahun 2018 dan sebesar 5.49% di tahun 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 5.29% dan 5.35%. Kondisi ini disebabkan dampak dari pandemic *covid19* yang berdampak terhadap pertumbuhan industri pengolahan yang bukan saja terjadi pada sector industri kecil dan menengah namun juga memiliki dampak signifikan

terhadap perkembangan industri berskala besar. Meskipun pada tahun 2020 sektor industri pengolahan Lampung Barat mengalami penurunan namun di tahun 2021 terdapat peningkatan kinerja sector industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2021 sektor industri pengolahan telah kembali bergeliat dalam menggerakkan roda perekonomian Lampung Barat, di mana pada tahun 2020 sektor industri pengolahan mengalami kontraksi sebesar -5.04% dan pada tahun 2021 kembali tumbuh positif sebesar 5.36%.



Tabel 2.112.  
Jumlah Jenis Industri Kecil

Jenis Industri Kecil	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
I. Jenis Industri Kecil				
1. Industri Pengolahan Pangan				
1. Jumlah Unit Industri	336	357	382	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	1.808	1.963	2.112	Orang
3. Jumlah Produksi	620.200	681.390	823.330	Ton
4. Nilai Produksi	14.789.162	15.107.701	15.820.276	Rp.000
2. Industri Tekstil				
1. Jumlah Unit Industri	23	24	25	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	59	62	63	Orang
3. Jumlah Produksi	47.104	50.166	51.426	Buah
4. Nilai Produksi	795.066	2.365.066	2.435.066	Rp.000
3. Industri Pengolahan Kayu				
1. Jumlah Unit Industri	83	83	88	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	230	230	239	Orang
3. Jumlah Produksi	37.412	37.412	41.192	Unit
4. Nilai Produksi	7.467.034	7.467.037	7.7747.034	Rp.000
4. Industri Pengolahan Kertas				
1. Jumlah Unit Industri				Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja				Orang
3. Jumlah Produksi				Rim
4. Nilai Produksi				Rp.000
5. Industri Kimia Farmasi				
1. Jumlah Unit Industri	2	2	2	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	35	35	35	Orang
3. Jumlah Produksi	2.580	2.580	2.580	Kg
4. Nilai Produksi	105.000	105.000	105.000	Rp.000
6. Industri Pengolahan Karet				
1. Jumlah Unit Industri	18	18	18	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	33	33	33	Orang
3. Jumlah Produksi	6.777	6.777	6.777	Buah
4. Nilai Produksi	612.413	612.413	612.413	Rp.000
7. Industri Galian Bukan Logam				
1. Jumlah Unit Industri	28	28	28	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	78	78	78	Orang
3. Jumlah Produksi	2.121.916	2.121.916	2.121.916	Buah
4. Nilai Produksi	436.951	436.951	436.951	Rp.000
8. Industri Baja/ Pengolahan Logam				
1. Jumlah Unit Industri	12	13	13	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	24	26	26	Orang
3. Jumlah Produksi	5.844	6.324	6.324	Buah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

Jenis Industri Kecil	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Satuan
4. Nilai Produksi	794.000	894.000	894.000	Rp.000
9. Industri Peralatan				
1. Jumlah Unit Industri	9	9	9	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	37	37	37	Orang
3. Jumlah Produksi	1.591	1.591	1.591	Buah
4. Nilai Produksi	629.000	629.000	629.000	Rp.000
10. Industri Jasa				
1. Jumlah Unit Industri	121	122	122	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	386	388	388	Orang
3. Jumlah Produksi	169.055	170.255	170.255	Buah
4. Nilai Produksi	6.436.533	6.436.733	6.436.733	Rp.000
11. Industri Anyaman dari Bambu/Rotan				
1. Jumlah Unit Industri	62	63	63	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	190	192	192	Orang
3. Jumlah Produksi	23.336	23.516	23.516	Buah
4. Nilai Produksi	1.115.619	1.115.739	1.115.739	Rp.000
12. Industri Lainnya YTDL				
1. Jumlah Unit Industri	64	71	71	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	201	253	253	Orang
3. Jumlah Produksi	50.725	62.009	62.009	Buah
4. Nilai Produksi	4.188.021	4.341.242	4.341.242	Rp.000
<b>JUMLAH</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Satuan</b>
1. Jumlah Unit Industri	758	790	823	Unit
2. Jumlah Tenaga Kerja	3.081	3.297	3.460	Orang
3. Jumlah Produksi	3.086.540	3.163.936	3.312.716	Buah/Ton/Unit
4. Nilai Produksi	37.368.799	39.510.879	40.713.454	Rp.000

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Secara umum terdapat kenaikan Jumlah unit Industri dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2019 Jumlah Industri Kecil adalah 758 unit meningkat menjadi 790 unit di tahun 2020. Pada tahun 2021 Jumlah Industri Kecil di Kabupaten Lampung Barat adalah 823 unit, meningkat sebesar 4,1%. Kondisi ini terlihat sedikit kontradiktif dengan penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat yang mengalami penurunan sebagai dampak pandemi covid 19. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh menurunnya penjualan produk IKM, sehingga meskipun terjadi kenaikan pertumbuhan IKM sebesar 4,1% namun tidak lantas menaikkan

kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat.

Namun demikian, bagaimana kondisi pertumbuhan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Lampung Barat pada tahun 2021 belum bisa tergambar secara riil, mengingat PDRB Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 sampai dokumen ini disusun belum dirilis oleh BPS Lampung Barat.



6. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.113.

Kinerja Kelitbangan

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Jumlah Inovasi PD	61	156	271
2	Jumlah Kajian	5	0	2
3	Jumlah Rekomendasi	10	16	12

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Badan penelitian dan pengembangan dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut :

- Jumlah Inovasi Perangkat Daerah  
Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang telah diverifikasi pengembangannya pada tahun 2021 sejumlah 271 jenis, hal ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Inovasi daerah yang sudah diverifikasi, dilaporkan ke Badan Penelitian dan pengembangan Kemendagri melalui <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>. Bagi Pemerintah daerah yang berhasil menerapkan inovasi dan berdampak signifikan pada kemajuan daerah, maka Kemendagri akan memberikan reward/penghargaan dan insentif untuk memotivasi daerah dalam melaksanakan inovasi.

- Jumlah Kajian  
Kajian yang telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 berjumlah 7 (tujuh) kajian. Pada tahun 2020, kajian tidak dapat dilakukan mengingat pada tahun 2020 adalah awal pandemi Covid 2019. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga.

Balitbang saat ini belum memiliki Pegawai Fungsional Peneliti/Perekayasa sehingga untuk melaksanakan kajian masih mengandalkan Pihak Ketiga dengan cara Swakelola Tipe 2.

Untuk mencapai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Balitbang, rekomendasi yang dihasilkan berasal dari kajian, Focus Group Discussion (FGD) dan Rekomendasi Tenaga Ahli kelitbangan. Sehingga meskipun pada tahun 2020 tidak ada kajian, namun rekomendasi bisa dihasilkan dari

FGD dan hasil rekomendasi Tenaga Ahli Kelitbangan.

Kajian yang telah dilakukan dari tahun 2019 – 2021 adalah sebagai berikut :

- Kajian Model Pengembangan Agribisnis Kopi Berdaya Saing dan Berkelanjutan
- Design Penahan Longsor Dikabupaten Lampung Barat Berbasis Kearifan Lokal
- Analisis Pemetaan Data Potensi PAD Dari Opd Penghasil Di Kabupaten Lampung Barat
- Penguatan Kerjasama Kelitbangan Dalam Rangka Rencana Pembentukan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Khusus Kopi Di Kabupaten Lampung Barat
- Penguatan Konsep Kabupaten Lampung Barat Sebagai Kabupaten Berbasis Konservasi
- Kajian Pengembangan Tata Kelola Kopi Di Kabupaten Lampung Barat Melalui Kelembagaan
- Kajian Design Pengolahan Kualitas Air Minum di Kabupaten Lampung Barat

- Jumlah Rekomendasi  
Pada Tahun 2021, Rekomendasi Kelitbangan yang dihasilkan adalah 12 Rekomendasi. Total Rekomendasi dari tahun 2019 adalah 38 Rekomendasi. Rekomendasi Kelitbangan berasal dari Kajian, FGD dan Tenaga Ahli. 38 Rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

- Model Pengembangan Agribisnis Kopi Berdaya Saing dan Berkelanjutan
- Design Penahan Longsor Dikabupaten Lampung Barat Berbasis Kearifan Lokal
- Analisis Pemetaan Data Potensi PAD Dari Opd Penghasil Di Kabupaten Lampung Barat
- Penguatan Kerjasama Kelitbangan Dalam Rangka Rencana Pembentukan Program Studi Diluar Kampus Utama (Psdku) Khusus Kopi Di Kabupaten Lampung Barat
- Penguatan Konsep Kabupaten Lampung Barat Sebagai Kabupaten Berbasis Konservasi
- Rencana Aksi Kabupaten Literasi
- Pengelolaan Lamban Baca "Beguai Jejama"



- Strategi Penguatan Inovasi Daerah
- Strategi Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Lampung Barat
- Dokumen Induk Kabupaten Tangguh Bencana
- Pengembangan Kawasan Geopark Konservasi Suoh
- Perancangan Buku Panduan Wisata Kabupaten Lampung Barat
- Kabupaten Lampung Barat Menyusun Buku 100 Inovasi Lampung Barat Hebat, dimana isinya terdiri dari kumpulan Inovasi-Inovasi Yang dikumpulkan oleh seluruh OPD dan Kecamatan.
- Upaya Persiapan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Lampung Barat
- Kebijakan Pencegahan dan Penindakan Covid-19 di Kabupaten Lampung Barat
- Jalan Baru UMKM Kopi Lampung Barat di Masa Pandemi Covid-19
- Membumikan Pancasila, Membangun Ke Indonesiaan dan Memperbaharui Hukum Bersama Menuju Tatanan Normal Baru
- Potensi Pengembangan Sorgum Sebagai Sumber Pangan Alternatif di Kabupaten Lampung Barat
- Taman Indria Sebagai Model Pendidikan Anak di Kabupaten Lampung Barat
- Lamban Baca dan Gerakan Sosial ( Gerakan Literasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat)
- Menyusun Pedoman Peraturan Bupati tentang Penetapan Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana 2021 - 2030 yang akan menjadi acuan OPD dalam melaksanakan Komitmen Tangguh Bencana
- Menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lampung Barat dengan leading sektor BPBD
- Menyusun Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengerahan Logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Barat dengan leading sektor BPBD
- Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan komitmen Kabupaten Konservasi di tiap Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Balitbang
- OPD yang belum mempunyai replikasi di dalam Inovasi yang diusulkan atau disampaikan supaya di laksanakan dengan cara –cara yang sangat simple.
- Replikasi Inovasi telah dilakukan oleh OPD namun belum terdokumentasi dengan baik. Diharapkan tiap replikasi Inovasi oleh OPD terdokumentasi sebagai eviden dalam pelaporan IGA
- Pengembangan Tata Kelola Kopi Di Kabupaten Lampung Barat Melalui Kelembagaan
- Design Pengolahan Kualitas Air Minum di Kabupaten Lampung Barat
- Ketahanan Pangan Masyarakat
- Persiapan Rencana Kajian Integrasi Ternak Kambing dengan Tanaman Kopi
- Persiapan Rencana Model Kemitraan Konservasi di Kabupaten Lampung Barat
- Penyusunan Grand Design Zonasi Produk Unggulan Daerah Tiap Pekon Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata
- Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Pengembangan Kepariwisataannya khususnya pekon wisata
- Menguatkan peran Daerah menghadapi Covid-19 di Era New Normal
- Gagasan Pengembangan Kawasan Geopark Suoh
- Penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan budaya lokal di Kabupaten Lampung Barat
- Ketahanan Pangan dengan Inovasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan

## 7. Kantor Kesbang dan Politik

Tabel 2.114.  
Kinerja Kesbangpol

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Jumlah Kejadian Konflik SARA yang terjadi	4	3	3
2	Jumlah LSM	272	335	353
3	Jumlah Parpol	16	16	16



Pada tahun 2019 terdapat 4 (tiga) konflik yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Ke 3 potensi/gejala konflik tersebut antara lain :

- Keberadaan 43 bangunan liar termasuk di dalamnya 7 warung remang-remang/tempat hiburan di Pekon Puralaksana dan Kelurahan Fajar Bulan yang tidak berizin dan dijadikan sebagai tempat prostitusi. Pada tahun 2012 warung/tempat hiburan liar tersebut sempat mendapat protes dari warga masyarakat karena dianggap merusak moral dan mengganggu ketertiban. Hingga saat ini tindakan yang telah dilakukan Pemkab Lampung Barat baru sebatas melakukan pendataan bangunan dan pemilikinya. Dari hasil pendataan tersebut terdapat 24 orang WTS yang beroperasi.
- Masalah status tanah suka pura, masyarakat sukapura telah lama menempati tanah suka pura, dilain pihak pemerintah pusat yaitu Kementerian kehutanan menganggap tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga tidak bisa di eksplorasi, penyelesaian dari konflik ini Pemda dan masyarakat mengusulkan kepada Kementerian kehutanan agar menghapus sukapura sebagai daerah konservasi hutan lindung
- Pendirian rumah ibadah (Vihara) di Pemangku Bedeng, Pekon Padang Cahya, Kecamatan Bali Bukit. Masyarakat sekitar menolak untuk didirakannya rumah ibadah tersebut dengan alasan tidak da satupun masyarakat sekitar yang memeluk agama Konghucu/Budha , yang mau mendirikan Vihara bukan warga masyarakat Pekon Padang Cahya, Status tanah yang akan didirikan rumah ibadah tersebut tidak diketahui oleh aparat Pekon Keabsahannya. Perangkat Kecamatan dan Pekon akan menindaklanjuti pembangunan rumah ibadah asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/seluruh kriteria persyaratan terpenuhi.
- Konflik masalah kepemilikan pasar lama sekincau antara masyarakat, dan Pemda Lampung Barat. Pemda Lampung Barat meyakini bahwa eks pasar lama sekincau merupakan aset milik Pemda Lampung Barat dan Pemda bermaksud menjadikan eks pasae sekincau dialih fungsikan menjadi POM bahan bakar, sementara itu sebagian masyarakat meyakini jika eks pasar lama sekincau

merupakan milik mereka , karena tidak ada titik temu maka masyarakat menggugat kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan.

Kemudian pada tahun 2020 tinggal terdapat 3(tiga) konflik yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Masalah konflik Keberadaan 43 bangunan liar termasuk di dalamnya 7 warung remang-remang/tempat hiburan di Pekon Puralaksana dan Kelurahan Fajar Bulan yang tidak berizin dan dijadikan sebagai tempat prostitusi dapat diselesaikan dengan operasi yustisi yang melibatkan kerjsama antara oleh Satuan Pol.PP Lampung Barat dan Satuan Pol.PP Provinsi Lampung.

Diakhir Tahun 2021 masih terdapat 3 (tiga) konflik yang belum selesai dan sedang dicari jalan keluarnya yaitu Masalah status tanah suka pura, Pendirian rumah ibadah (Vihara) di Pemangku Bedeng Pekon Padang Cahya Kecamatan Bali Bukit. dan Konflik masalah kepemilikan pasar lama sekincau antara masyarakat dan Pemda Lampung Barat

#### Jumlah LSM

Jumlah LSM/Ormas di Lampung Barat dari tahun ketahun terus meningkat hal ini menunjukkan kesadaran berserikat dan berkumpul masyarakat Lampung Barat dari tahun ketahun terus bertambah. Kondisi ini bisa dilihat pada akhir tahun 2021 berjumlah 353 meningkat pesat dibanding tahun tahun 2019 yang berjumlah 272. Pada tahun 2021 ini Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- ORMAS dengan jumlah 195
- OKP dengan jumlah 17
- PROFESI dengan jumlah 38
- PAGUYUBAN dengan jumlah 43
- LSM dengan jumlah 64

#### Jumlah Parpol

Jumlah Partai politik yang mempunyai kepengurusan di Lampung Barat sebanyak 16 Partai Politik, ke 16 Partai Politik itu adalah (1) Partai NASDEM; (2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ; (3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS); (4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); (5) Partai Golongan Karya (GOLKAR); (6) Partai



Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA); (7) Partai Demokrat (PD); (8) Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 2 kursi; (9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP); (10) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); (11) Partai Solidaritas Indonesia (PSI); (12) Partai Bulan Bintang (PBB); (13) Partai Berkarya; (14) Partai Garuda; (15) Partai perindo; (16) Partai Hanura kursi. sementara yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sehingga mendapat bantuan keuangan adalah 10 partai politik. yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Kesepuluh partai politik tersebut antara lain : (1) Partai NASDEM dengan 1 kursi; (2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 1 kursi; (3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 2 kursi; (4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 11 kursi; (5) Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan 5 kursi; (6) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan 5 kursi; (7) Partai Demokrat (PD) dengan 6 kursi; (8) Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 1 kursi; (9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 2 kursi; (10) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan 1 kursi.



Aktivitas Mas,  
Lumbok Sembur

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tabel 2.115.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2019-2021

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHB Pengeluaran (Juta Rupiah)		
	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5587.88	5588.00	5799.82
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	206.14	199.72	212.62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1339.36	1331.18	1351.83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2677.40	2641.20	2866.88
5. Perubahan Inventori	10.56	14.81	17.76
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-2725.71	-2643.02	-2766.47
7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7095.65	7131.89	7482.44

Sumber : BPS Lampung Barat, Tahun 2021

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran selama periode tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi, terutama pada tahun 2020 dimana diakibatkan oleh adanya pandemi covid 19. Selanjutnya pada tahun 2021, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran bertambah sebesar Rp.350 juta lebih menjadi 7,48 miliar lebih.

Tabel 2.116.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2019-2021

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHK Pengeluaran (Juta Rupiah)		
	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	3.948,94	3.874,27	3.920,16
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	137,71	131,14	136,60
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	829,71	807,75	809,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.863,07	1.783,66	1.877,77
5. Perubahan Inventori	5,24	4,81	4,71
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.800,53	-1.675,34	-1.695,33
7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.984,13	4.926,30	5.053,32

Sumber : BPS Lampung Barat, Tahun 2022

Selain dinilai atas dasar harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau ADH berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran

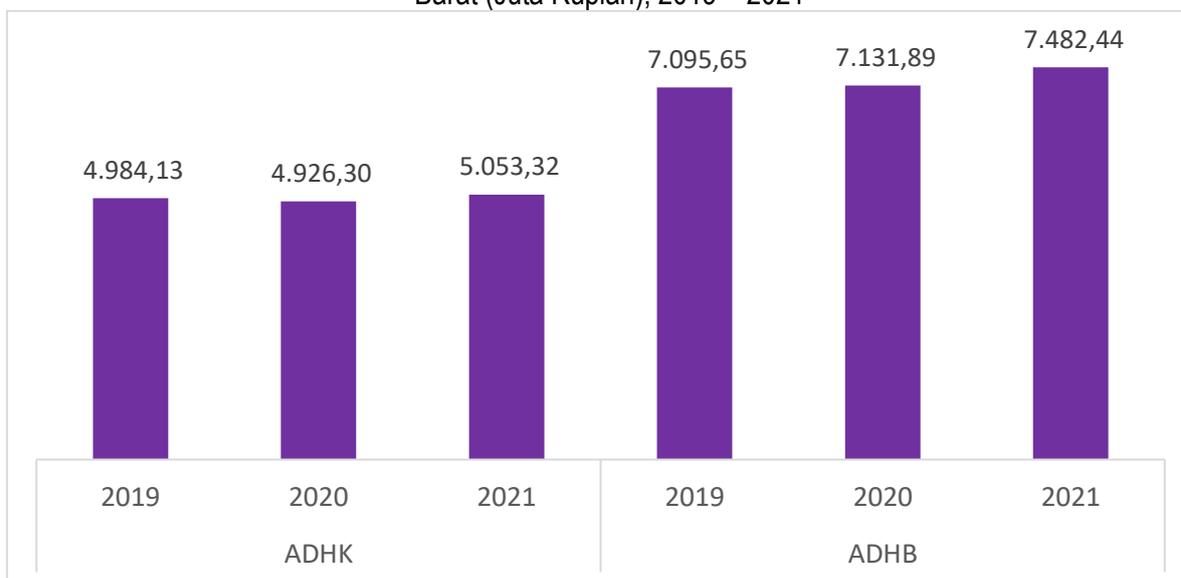
adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2019–2021, gambaran tentang perkembangan ekonomi Lampung Barat berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel di atas. Pada tahun 2021 hampir seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan menunjukkan peningkatan dari tahun 2020, kecuali

pada Net Ekspor Barang dan Jasa masih menunjukkan angka minus.

Dari gambar di bawah, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah diiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT(PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Gambar 2.11.  
Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat (Juta Rupiah), 2019 – 2021



Sumber : BPS Lampung Barat, Tahun 2022

Tabel 2.117.  
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat, 2019—2021

PDRB Pengeluaran	Distribusi PDRB ADHB pengeluaran (Persen)		
	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	78,75	78,35	77,51
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,91	2,80	2,84
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,88	18,67	18,07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	37,73	37,03	38,31
5. Perubahan Inventori	0,15	0,21	0,24
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-38,41	-37,06	-36,97
7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Lampung Barat, Tahun 2022

Tabel 2.118.  
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Barat,  
2019-2021

PDRB Pengeluaran	Laju PDRB ADHK Pengeluaran (Persen)		
	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4.640	-1.890	0.600
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9.970	-4.770	4.160
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.080	-2.650	0.210
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.300	-4.260	5.280
5. Perubahan Inventori	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-
7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.180	-1.160	2.580

Sumber : BPS Lampung Barat, Tahun 2022

#### 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi jalan kabupaten Lampung Barat dengan total panjang 724 km dalam dimana jalan dalam kondisi baik sampai tahun 2021 sebesar 66,10 persen. Sedangkan panjang jalan desa 382,46 km, jalan desa kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 2,65 persen pada tahun 2021. Dan untuk target jalan mantap pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,01 persen.

#### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Berdasarkan data investasi di Lampung Barat, diketahui bahwa jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 sebanyak 282 investor dengan jumlah investasi sebesar Rp.112.921.542.189 dengan jumlah usaha sebanyak 282 perusahaan.

#### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih dari Kementerian Dalam Negeri semester I, tahun 2021, penduduk Kabupaten Lampung Barat pada tercatat sebanyak 307.294 jiwa (159.552 laki-laki dan 147.742 perempuan). Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Balik Bukit yaitu 42.159 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Lumbok Seminung 8.357 jiwa.



## 2.5 Evaluasi RPJMD 2017-2022

Pencapaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah di tampilkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU disusun berdasarkan misi Kepala Daerah dengan menentukan Indikator Kinerja bagi

tiap sasaran misi. Berikut disampaikan Capaian dari Kinerja Utama Daerah tahun 2018 s.d 2021 dan target dari akhir Periode Akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017 – 2022 :

Tabel 2.119.  
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Periode RPJMD Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
<b>I</b>	<b>MISI I</b>											
1	Persentase jalan dengan kondisi mantap (%)	51,21%	55,50%	<b>60,42%</b>	62,00%	<b>62,18%</b>	68,00%	<b>63,43%</b>	74,00%	<b>68,10%</b>	80,00%	-
2	Persentase jembatan dengan kondisi mantap (%)	72,22%	75,22%	<b>76,67%</b>	78,22%	<b>78,33%</b>	81,22%	<b>81,33%</b>	84,22%	<b>81,34%</b>	87,22%	-
3	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi (%)	30,88%	32,35%	<b>32,35%</b>	33,82%	<b>34,35%</b>	35,29%	<b>35,86%</b>	36,76%	<b>36,76%</b>	38,24%	-
4	Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet (%)	97,79%	97,79%	<b>68,36%</b>	97,79%	<b>97,79%</b>	97,79%	<b>98,58%</b>	97,79%	<b>98,58%</b>	97,79%	-
5	Persentase desa yang dialiri listrik (Persen)	82,35%	86,03%	<b>93,38%</b>	89,71%	<b>98,53%</b>	93,38%	<b>98,53%</b>	97,06%	<b>98,53%</b>	100%	-
6	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	42,00%	45,00%	<b>47,10%</b>	49,00%	<b>49,10%</b>	53,00%	<b>53,10%</b>	56,00%	<b>55,68</b>	60,00%	-
7	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	9,06%	15,28%	<b>5,26%</b>	25,93%	<b>78,27%</b>	36,66%	<b>82,19%</b>	47,40%	<b>49,2%</b>	58,13%	-
8	Persentase Perumahan	90,91%	92,30%	<b>91,37%</b>	93,27%	<b>92,86%</b>	94,25%	<b>94,70%</b>	95,22%	<b>98,58%</b>	96,20%	-



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Periode RPJMD Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	Layak huni (Persen)											
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57,16	60,35	<b>65,58</b>	61,28	<b>68,82</b>	62,98	<b>71,94</b>	63,57	<b>65,99</b>	64,12	-
10	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW (%)	80,00%	100%	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>	100%	<b>93,30%</b>	100%	<b>100%</b>	100%	-
11	Persentase desa tangguh bencana (Persen)	1,47%	4,41%	<b>1,47%</b>	8,82%	<b>3,67%</b>	13,23%	<b>7,35%</b>	17,64%	<b>11,76%</b>	22,05%	-
12	respon time tanggap bencana (Jam)	1x24 jam	1x24 jam	<b>1x24 jam</b>	1x24 jam	-						
	<b>MISI II</b>											
1	Usia harapan hidup (Tahun)	66,64	66,94	<b>66,86</b>	67,24	<b>66,86</b>	67,54	<b>67,58</b>	67,84	<b>67,65</b>	68,14	-
2	angka kematian ibu (Per 10.000 Kelahiran Hidup)	105/1000 kelahiran hidup	149	<b>88,67</b>	139	<b>51,8</b>	130	<b>72,1</b>	121	<b>145,6</b>	110	-
3	angka kematian bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	1,6/1000 KH	4,7	<b>3,01</b>	4,5	<b>3,6</b>	4,3	<b>2,9</b>	4,1	<b>4,55</b>	3,9	-
4	Persentase kasus gizi buruk yang ditangani	100%	100%	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>	100%	-
	Angka Partisipasi Kasar (APK)											
5	- SD (Persen)	111,83	111,84	<b>113,41</b>	111,87	<b>98,68</b>	111,89	<b>107,90</b>	111,91	<b>108,86</b>	111,93	-
6	- SMP (Persen)	99,31	99,33	<b>82,63</b>	99,53	<b>101,42</b>	99,73	<b>87,40</b>	99,93	<b>85,84</b>	99,95	-
	Angka Partisipasi Murni (APM)											
7	- SD (Persen)	100	100	<b>100</b>	100	<b>85,55</b>	100	<b>99,39</b>	100	<b>99,41</b>	100	-
8	- SMP (Persen)	91,8	91,82	<b>77,54</b>	91,87	<b>76,39</b>	91,89	<b>79,36</b>	91,94	<b>78,99</b>	91,99	-
9	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,28	7,3	<b>7,33</b>	7,35	<b>7,60</b>	7,37	<b>8,06</b>	7,42	<b>8,07</b>	7,44	-



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Periode RPJMD Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
10	Angka harapan lama sekolah (Tahun)	12,17	12,27	<b>12,19</b>	12,29	<b>12,24</b>	12,31	<b>12,25</b>	12,33	<b>12,26</b>	12,35	-
11	Angka melanjutkan sekolah (Persen)	90,1	90,35	<b>89,26</b>	90,6	<b>89,26</b>	90,75	<b>91,24</b>	90,83	<b>100%</b>	90,85	-
	Nilai rata Ujian Nasional (UN)											
12	- SD (Poin)	209,91	209,96	<b>209,91</b>	210,01	<b>220,15</b>	210,11	<b>0</b>	210,21	<b>0</b>	210,31	-
13	- SMP (Poin)	235,81	235,91	<b>235,81</b>	236,01	<b>213,89</b>	236,11	<b>0</b>	236,21	<b>0</b>	236,31	-
14	Persentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan	1,74%	1,99%	<b>1,39%</b>	2,24%	<b>3,97%</b>	2,49%	<b>1,22%</b>	2,74%	<b>2,74%</b>	2,99%	-
15	pendapatan perkapita (Rp)	19.080.000	20.917.404	<b>20.620.000</b>	22.931.750	<b>23.170.000</b>	25.140.078	<b>23.412.341</b>	27.561.067	<b>24.710.000</b>	30.215.198	-
16	Jumlah Pemuda yang berprestasi (Orang)	20	25	<b>25</b>	30	<b>30</b>	35	<b>6</b>	40	<b>160</b>	45	-
17	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi (Persen)	50%	55%	<b>50%</b>	60%	<b>60%</b>	65%	<b>17,65%</b>	70%	<b>33%</b>	75%	-
18	laju pertumbuhan penduduk (Persen)	01.17%	01.16%	<b>0,95%</b>	01.14%	<b>0,98%</b>	01.12%	<b>0,93%</b>	01.02%	<b>0,98%</b>	0,96%	-
19	Angka Kelahiran Total (%)	2.55%	2.51%	<b>2,37%</b>	2.44%	<b>2,39%</b>	2.38%	<b>2,39%</b>	2.27%	<b>2,39%</b>	2.26%	-
20	Skor pola pangan harapan (Poin)	87,5	88,4	<b>89,9</b>	89,1	<b>89,4</b>	90	<b>91,62</b>	91,1	<b>91,16</b>	92,4	-
	<b>MISI III</b>											
1	Produk Domestik Regional	2.767.567	2.985.690	<b>2.344.192</b>	3.197.847	<b>3.192.131</b>	3.410.004	<b>3.210.755</b>	3.622.160	-	3.834.317	-



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Periode RPJMD Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Juta Rupiah)											
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Perikanan (Juta Rupiah)	125.064	137.058	<b>158.141</b>	150.202	<b>160.070</b>	164.606	<b>165.673</b>	180.392	-	197.691	-
3	Rata rata lama tinggal (Hari)	1	1,5	<b>1,5</b>	2	<b>2</b>	2	<b>3</b>	2,5	<b>2</b>	3	-
4	Jumlah Kunjungan wisatawan (Orang)	16.449	16.778	<b>17.027</b>	17.114	<b>110.285</b>	17.456	<b>292.698</b>	17.805	<b>153.414</b>	18.161	-
5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri (Juta Rupiah)	245.242	247.694	<b>283.349</b>	250.171	<b>364.662</b>	252.673	<b>351.349</b>	255.200	<b>250.460</b>	257.752	-
6	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan (Juta Rupiah)	643.154	649.586	<b>731.676</b>	656.081	<b>948.405</b>	662.642	<b>870.031</b>	669.269	<b>665.110</b>	675.961	-
7	Nilai investasi (Rupiah)	3.167.204.246	3.325.564.458	<b>25.947.491.049</b>	3.491.842.681	<b>142.671.854.207</b>	3.666.434.815	<b>113.483.975.551</b>	3.849.756.556	<b>58.351.234.885</b>	4.042.244.384	-
8	Jumlah koperasi yang Sehat (Unit)	0	3	<b>4</b>	6	<b>17</b>	9	<b>22</b>	12	<b>27</b>	15	-
9	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Persen)	-13,65%	2,00%	<b>4%</b>	4,00%	<b>9,94%</b>	6,00%	<b>67,72%</b>	8,00%	<b>14,08%</b>	10,00%	-



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Periode RPJMD Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	<b>MISI IV</b>											
1	indeks reformasi birokrasi (Predikat)	-	-	-	C	CC	C	CC	C	CC	C	-
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)	B	B	B	B	B	BB	B	BB	B	BB	-
3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Predikat)	-	-	-	C	C	C	B	C	B	C	-
5	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Predikat)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi	-	Sangat Tinggi	-				
6	Persentase desa tertinggal (Persen)	29,00%	19,84%	14,50%	9,92%	10,68%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	-
	<b>MISI V</b>											
1	Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2	Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
3	Persentase Kasus Kekerasan Dalam Rumah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal Periode RPJMD Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	Tangga (KDRT) yang ditangani (Persen)											
4	Indeks pembangunan gender (Poin)	91.54.	91.60	<b>92,47</b>	91.64	<b>92,47</b>	91.70	<b>92,55</b>	91.74	-	91.80	-
5	indeks pemberdayaan gender (Poin)	49.16.	50.02.	<b>60,47</b>	51.02	<b>63,84</b>	52.02.	<b>68,21</b>	53.02.	-	54.02	-
6	Angka Kemiskinan (Persen)	14,32%	14,00%	<b>13,54%</b>	13,75%	<b>12,92%</b>	13,00%	<b>12,52%</b>	12,50%	<b>12,82%</b>	12,00%	-
7	indeks gini (Poin)	0,36	0,34	<b>0,28</b>	0,32	<b>0,314</b>	0,3	<b>0,296</b>	0,28	<b>0,295</b>	0,26	-
8	tingkat pengangguran terbuka (Persen)	0,96%	0,90%	<b>2,72%</b>	0,85%	<b>1,66%</b>	0,80%	<b>2,13%</b>	0,75%	<b>2,83%</b>	0,71%	-

Aktivitas Mas,  
Lumbok Senun



Pendidikan Mantap



## BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

#### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

##### A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 5 Tahun terakhir (2017-2021) mengalami peningkatan pada tahun ke-2 dan ke-3, tetapi pada tahun ke-4 dan ke-5 mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu tersebut adalah sebesar minus 1,53 persen. Pos pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 11,92 persen, sedangkan Dana Transfer

tumbuh rata-rata sebesar minus 0,21 persen dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dengan pertumbuhan minus 18,05 persen.

Ditinjau dari kontribusi masing-masing pos pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2017 s.d. 2021, Pendapatan Pos Dana Transfer merupakan pos pendapatan dengan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 78,50 persen. Sementara itu, pos PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 5,53 persen. Untuk pos Lain-Lain Pendapatan Daerah memberikan kontribusi sebesar 15,97 persen.

Tabel 3.1.  
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017–2021

No	Uraian	Realisasi tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.069.132.043.140</b>	<b>1.124.189.349.605</b>	<b>1.122.307.632.189</b>	<b>1.011.011.754.760</b>	<b>1.007.051.382.975</b>	-1,33%
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>46.789.226.369</b>	<b>50.471.541.309</b>	<b>65.267.416.665</b>	<b>61.219.465.454</b>	<b>71.432.343.905</b>	11,92%
1.1.1	Pajak Daerah	10.144.981.620	11.617.377.709	13.376.645.930	11.794.800.883	13.052.929.433	7,12%
1.1.2	Retribusi Daerah	1.887.059.285	2.014.962.790	2.227.953.290	3.018.063.766	3.449.143.716	16,77%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	3.213.618.614	3.409.190.603	4.431.364.496	4.809.979.700	5.923.153.837	16,94%
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	31.543.566.851	33.430.010.207	45.231.452.948	41.596.621.105	49.007.116.919	12,77%



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Uraian	Realisasi tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
<b>1.2</b>	<b>DANA TRANSFER</b>	<b>932.965.864.531</b>	<b>854.830.511.647</b>	<b>791.712.917.260</b>	<b>707.243.876.702</b>	<b>899.997.134.370</b>	0,21%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	29.580.799.339	25.691.277.900	16.206.254.867	18.130.197.914	21.899.946.244	-4,35%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	519.160.196.000	521.743.958.000	543.777.950.000	497.587.974.000	491.712.483.000	-1,24%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	224.328.822.017	307.395.275.747	231.728.712.393	191.525.704.788	173.188.817.153	-3,63%
1.2.4	Dana Alokasi Desa/Pekon	103.628.820.000				126.378.047.000	21,95%
1.2.5	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	56.267.227.175				55.206.420.973	-1,89%
1.2.6	Dana Insentif Daerah (DID)					31.611.420.000	100,00%
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>89.381.952.240</b>	<b>218.887.296.649</b>	<b>265.327.298.264</b>	<b>242.548.412.604</b>	<b>35.621.904.700</b>	18,05%
1.3.1	Hibah	89.381.952.240	48.916.520.000	67.463.454.000	54.391.888.000	35.621.904.700	-15,31%
1.3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		57.487.255.649	70.674.988.287	62.140.456.604		2,72%
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		112.483.521.000	127.188.855.977	126.016.068.000		3,04%

Sumber : LKPD Pemda

## B. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, belanja daerah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu lima Tahun terakhir (2017-2021) pada tahun ke-2 dan ke-4 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun ke-3 dan ke-5 mengalami peningkatan. Rata-rata penurunan belanja daerah selama kurun waktu 2017-2021 adalah sebesar minus 2,39

persen. Ditinjau dari masing-masing pos belanja utamanya, tingkat perkembangan masing-masing pos belanja daerah cukup berfluktuatif. Belanja operasi rata-rata mengalami pertumbuhan 4,14%, belanja modal mengalami penurunan rata-rata minus 21,49%, belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan rata-rata 20,74%, sedangkan belanja transfer dan bantuan keuangan mengalami pertumbuhan rata-rata 1,46%



Tabel 3.2.  
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2021

No	Uraian	Realisasi tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.122.380.535.135</b>	<b>1.109.753.247.080</b>	<b>1.126.018.591.759</b>	<b>984.638.003.140</b>	<b>1.010.908.270.007</b>	-2,39%
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>611.641.338.932</b>	<b>648.682.438.845</b>	<b>719.603.649.242</b>	<b>636.827.545.344</b>	<b>707.284.185.431</b>	4,14%
2.1.1	Belanja Pegawai	374.085.523.129	399.941.557.413	415.872.475.122	424.325.254.536	399.747.370.644	1,78%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	216.129.629.666	236.063.494.332	287.300.408.320	198.758.705.808	281.314.280.638	10,41%
2.1.3	Belanja Bunga		-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi		509.850.600	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	21.326.186.137	12.017.536.500	16.180.765.800	13.493.585.000	22.251.495.549	9,82%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	150.000.000	250.000.000	250.000.000	3.971.038.600	401,27%
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>348.669.021.805</b>	<b>290.210.246.282</b>	<b>220.878.333.554</b>	<b>140.869.506.620</b>	<b>132.283.188.276</b>	-20,74%
2.2.1	Belanja Modal	348.669.021.805	290.210.246.282	220.878.333.554	140.869.506.620	132.283.188.276	-20,74%
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.121.077.915</b>	<b>1.453.972.240</b>	<b>844.780.000</b>	<b>22.108.088.093</b>	<b>2.220.535.100</b>	603,72%
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.121.077.915	1.453.972.240	844.780.000	22.108.088.093	2.220.535.100	603,72%
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>160.949.096.483</b>	<b>169.406.589.712</b>	<b>184.691.828.963</b>	<b>184.832.863.083</b>	<b>169.120.361.200</b>	1,46%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	1.077.477.100	1.107.019.500	1.231.816.000	1.317.346.400	1.830.761.000	14,98%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	159.871.619.383	168.299.570.212	183.460.012.963	183.515.516.683	167.289.600.200	1,37%

Sumber: LKPD Pemda



### C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ialah transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan

kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu Tahun 2017-2021 selalu mengalami surplus. Peningkatan terhadap surplus pembiayaan tersebut sebagai akibat dari peningkatan penerimaan pembiayaan dan kecenderungan penurunan pengeluaran pembiayaan yang terjadi selama kurun waktu tersebut.

Tabel 3.3.  
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2021

No	Uraian	Realisasi tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>80.835.274.347</b>	<b>26.076.853.953</b>	<b>38.962.956.478</b>	<b>31.251.996.908</b>	<b>75.133.432.710</b>	25,57%
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>83.235.274.347</b>	<b>27.576.853.953</b>	<b>40.512.956.478</b>	<b>35.251.996.908</b>	<b>77.278.865.778</b>	21,57%
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	83.235.274.347	27.576.853.953	40.512.956.478	35.251.996.908	57.625.748.528	7,63%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-				19.653.117.250	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah						
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan						
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.550.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.145.433.068</b>	19,38%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan						
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.400.000.000	1.500.000.000	1.550.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	18,47%
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-				145.433.068	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah						



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Uraian	Realisasi tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>83.235.274.347</b>	<b>27.576.853.953</b>	<b>40.512.956.478</b>	<b>35.251.996.908</b>	<b>77.278.865.778</b>	21,57%
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.550.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.145.433.068</b>	19,38%

Sumber: LKPD Pemda

Tabel 3.4.  
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.069.132.043.140	1.124.189.349.605	1.122.307.632.189	1.011.011.754.760	1.007.051.382.975
2	Belanja Daerah	1.122.380.535.135	1.109.753.247.080	1.126.018.591.759	984.638.003.140	1.010.908.270.007
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.400.000.000	1.500.000.000	1.550.000.000	4.000.000.000	2.145.433.068
	Defisit riil	(55.648.491.994)	12.936.102.525	(5.260.959.571)	22.373.751.620	(6.002.320.100)

Sumber: LKPD Pemda

Tabel 3.5.  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	149,57%	49,56%	72,80%	63,35%	103,55%
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,32%
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: LKPD Pemda

Aktifitas Mas,  
Lumbok Sembu





Tabel 3.6.  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	% dari SiLPA								
1	Jumlah SiLPA	7.586.782.353	100%	0.512.956.478	100%	5.251.996.908	100%	7.625.748.528	100%	1.276.545.678	100%
2	Pelampauan penerimaan PAD										
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan										
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah										
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya										
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan										
7	Kegiatan lanjutan										

Sumber: LKPD Pemda

Tabel 3.7.  
Proyeksi APBD Tahun 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.660.779.843
4.1.01	Pajak Daerah	13.038.206.178
4.1.02	Retribusi Daerah	2.289.310.896
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.623.153.836
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.710.108.933
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	961.380.266.819
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	885.434.520.817
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.945.746.002
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	Jumlah Pendapatan	1.035.041.046.662
5	BELANJA	
5,1	BELANJA OPERASI	753.345.910.113
5.1.01	Belanja Pegawai	439.557.838.884
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.861.840.345
5.1.03	Belanja Bunga	3.964.805.812
5.1.05	Belanja Hibah	21.052.070.072
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.909.355.000
5,2	BELANJA MODAL	181.964.428.161
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.576.048.390
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.205.687.150
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.245.247.146



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.700.899.025
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.236.546.450
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.839.003.972
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.839.003.972
5,4	BELANJA TRANSFER	172.386.788.800
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.532.751.800
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	170.854.037.000
	Jumlah Belanja	1.112.536.131.046
	Total Surplus/(Defisit)	-77.495.084.384
6	PEMBIAYAAN	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	90.462.469.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.850.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	58.612.469.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	90.462.469.000
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.967.384.616
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.967.384.616
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.967.384.616
	Pembiayaan Netto	77.495.084.384
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

### 3.1.2. Neraca Daerah

#### A. Perkembangan Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada periode tertentu. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sebagaimana mestinya, jumlah aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat selalu mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017-2020.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2017-2021 cenderung mengalami rata-rata pertumbuhan yaitu sebesar 29,27 persen. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Secara keseluruhan, ekuitas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2017-2020 mengalami fluktuasi setiap Tahunnya. Rata-rata perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2017-2020 adalah sebesar 10,25 persen.

Tabel 3.8.  
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	<b>ASET</b>					
2	<b>ASET LANCAR</b>					
3	Kas di Kas Daerah	26.984,08	39.940,09	33.314,52	56.618,02	28,06
4	Kas di Bendahara Penerimaan	19,32	18,63	4,17	-	(100,00)



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5,82	-	6,18	12,28	28,26
6	Kas di BLUD	139,56	102,90	1.112,15	776,08	77,16
7	Kas Lainnya	676,49	417,24	1.839,46	472,46	(11,21)
8	Piutang Pajak Daerah	692,60	40,58	22,23	59,73	(55,19)
9	Piutang Retribusi	9,00	16,73	10,04	7,18	(7,17)
10	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	-	-	1.109,15	222.912,76
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.262,33	5.336,85	6.065,49	3.047,94	(2,39)
12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	-	-	2.349,16	-	(100,00)
13	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	29.092,40	30.991,29	21.866,54	19.243,39	(12,93)
14	Penyisihan Piutang Pendapatan	(884,22)	(270,85)	(5.683,36)	(722,94)	(6,40)
15	Beban Jasa Dibayar Dimuka	22,04	20,29	56,50	13,91	(14,27)
16	Beban Lainnya	-	91,31	-	-	(100,00)
17	Persediaan Bahan Pakai Habis	413,12	333,07	1.261,99	1.653,22	58,74
18	Persediaan Bahan/Material	6.488,91	8.372,61	8.737,86	6.956,55	2,28
19	Persediaan Barang Lainnya	165,34	307,37	2.057,42	3.543,50	177,76
<b>20</b>	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>67.086,77</b>	<b>85.718,11</b>	<b>73.020,37</b>	<b>92.790,48</b>	<b>11,33</b>
<b>21</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					<b>0,00</b>
22	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	0,00
23	Dana Bergulir	610,72	485,23	471,64	397,96	(13,38)
24	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	0,00
<b>25</b>	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>	<b>610,72</b>	<b>485,23</b>	<b>471,64</b>	<b>397,96</b>	<b>(13,38)</b>
26	Investasi Permanen	-	-	-	-	0,00
27	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	32.694,38	32.169,93	33.896,39	38.753,11	5,97
<b>28</b>	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>32.694,38</b>	<b>32.169,93</b>	<b>33.896,39</b>	<b>38.753,11</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>33.305,11</b>	<b>32.655,16</b>	<b>34.368,03</b>	<b>39.151,07</b>	<b>5,67</b>
<b>30</b>	<b>ASET TETAP</b>					<b>0,00</b>



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
31	Tanah	126.056,99	141.630,58	264.118,08	495.630,95	57,81
32	Peralatan dan Mesin	283.673,20	317.801,16	354.265,40	398.222,63	11,87
33	Gedung dan Bangunan	605.372,00	699.042,89	764.550,59	801.720,77	49,18
34	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.479.773,91	1.635.887,86	1.791.532,90	1.845.191,90	7,72
35	Aset Tetap Lainnya	39.786,22	46.782,66	54.126,06	63.634,26	16,96
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.744,35	10.493,29	13.747,57	10.390,19	2,28
37	Akumulasi Penyusutan	(816.414,08)	(944.652,93)	(1.095.916,39)	(1.243.823,98)	14,98
38	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.727.992,60</b>	<b>1.906.985,51</b>	<b>2.146.424,22</b>	<b>2.370.966,72</b>	<b>11,06</b>
39	<b>ASET LAINNYA</b>					
40	Aset Tidak Berwujud	728,49	752,95	482,79	407,46	(17,57)
41	Aset Lain-lain	138.999,64	147.944,11	132.063,90	132.061,65	(1,70)
42	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>139.728,13</b>	<b>148.697,06</b>	<b>132.546,69</b>	<b>132.469,11</b>	<b>(1,70)</b>
43	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.968.112,60</b>	<b>2.174.055,84</b>	<b>2.386.359,30</b>	<b>2.635.377,38</b>	<b>10,25</b>
44						<b>0,00</b>
45	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					<b>0,00</b>
46	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	173,71	30,71	90,04	217,80	7,72
47	Utang Bunga	-	-	-	-	0,00
48	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	-	210,38	232,88	70.596,40
49	Utang Belanja	3.956,86	6.968,28	7.354,11	9.225,55	32,57
50	Utang Jangka Pendek Lainnya	60,00	-	1,20	-	(100,00)
51	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>4.190,57</b>	<b>6.998,99</b>	<b>7.655,72</b>	<b>9.676,23</b>	<b>32,19</b>
52	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					<b>0,00</b>
53	Utang Dalam Negeri	-				0,00
54	Utang Jangka Panjang Lainnya	431,56	529,38	302,09	302,09	(11,21)
55	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>431,56</b>	<b>529,38</b>	<b>302,09</b>	<b>302,09</b>	<b>(11,21)</b>
56	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>4.622,12</b>	<b>7.528,37</b>	<b>7.957,81</b>	<b>9.978,32</b>	<b>29,27</b>
57	<b>EKUITAS</b>					<b>0,00</b>
58	EKUITAS					0,00
59	Ekuitas	1.963.490,48	2.166.527,47	2.378.401,49	2.625.399,06	10,25
60	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.963.490,48</b>	<b>2.166.527,47</b>	<b>2.378.401,49</b>	<b>2.625.399,06</b>	<b>10,25</b>
61	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.968.112,60</b>	<b>2.174.055,84</b>	<b>2.386.359,30</b>	<b>2.635.377,38</b>	<b>10,25</b>

Sumber: BKPD Lampung Barat, 2022

## B. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

### 1. Rasio Cair (*quick ratio*)

Rasio cair menggambarkan kemampuan daerah untuk menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar di luar persediaan yang ada. Secara umum, rasio di atas 1 menunjukkan hasil yang baik, sedangkan rasio di bawah 1 menunjukkan hasil sebaliknya. Perkembangan rasio cair Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2017-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada Tahun 2017, rasio cair menunjukkan angka sebesar 1.432,25%, berubah menjadi 1.095,95% di Tahun 2018, 796,31% di Tahun 2019, 833,35% di Tahun 2020, dan ....% di Tahun 2021.

### 2. Rasio Kewajiban Terhadap Total Aset

Rasio Kewajiban terhadap Total Aset menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat membiayai pembangunan dengan kemampuan sendiri. Rasio yang semakin kecil menunjukkan hasil yang baik, artinya semakin sedikit dana yang berasal dari hutang untuk pembiayaan daerah. Perkembangan rasio kewajiban terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2017-2020 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pada Tahun 2017 menunjukkan angka 0,23%, Tahun 2018 sebesar 0,35%, Tahun 2019 sebesar 0,33, Tahun 2020 sebesar 0,38%.

## C. Analisis Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu cara untuk mengukur tingkat solvabilitas pemerintah adalah dengan mengukur rasio kewajiban terhadap ekuitas. Perkembangan rasio kewajiban terhadap ekuitas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2017-2020 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pada Tahun 2017 rasio ini sebesar

0,24%, Tahun 2018 sebesar 0,35, Tahun 2019 sebesar 0,33, pada Tahun 2020 sebesar 0,38.

## 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan Umum Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah :

- Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- Berkoordinasi dengan baik kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung guna mendapatkan program/kegiatan melalui dana APBD Provinsi dan dana Pusat untuk membiayai belanja daerah.
- Meningkatkan pelayanan perizinan khususnya perizinan penanaman modal dengan menyederhanakan proses perizinan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku.

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Dari segi penerimaan, pembiayaan diarahkan pada pengamanan sisa perhitungan anggaran Tahun yang lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah. Selain itu, juga dilakukan penerimaan dari hasil pinjaman daerah, guna meningkatkan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat;
- Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, pemerintah kabupaten telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah
- Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.



### 3.3. Kerangka Pendanaan

#### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja

##### a) Proyeksi Pendapatan

Tabel 3.9.  
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

No	Uraian	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1.449.538.568.379	1.402.474.800.573	1.458.148.806.803	1.488.375.773.797
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.341.372.062	83.221.789.631	87.767.571.794	92.973.404.471
4.1.1	Pajak Daerah	13.823.090.796	14.857.399.541	15.326.479.660	16.210.814.426
4.1.2	Retribusi Daerah	2.498.177.200	2.623.079.780	2.755.301.500	2.895.654.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.020.543.066	7.441.775.650	7.888.282.189	8.361.579.120
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	54.999.561.000	58.299.534.660	61.797.508.445	65.505.356.925
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.371.197.196.317	1.319.253.010.942	1.370.381.235.009	1.395.402.369.326
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.290.694.705.617	1.233.920.370.800	1.279.928.636.469	1.299.522.614.871
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.502.490.700	85.332.640.142	90.452.598.540	95.879.754.455
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				

Sumber: Lampung Barat

Fktor yang mempengaruhi peningkatan PAD adalah :

1. Regulasi.
2. Potensi pajak.
3. Ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan.

##### b) Proyeksi Belanja

Tabel 3.10.  
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

No	Uraian	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
5	BELANJA DAERAH	1.444.224.568.379	1.398.277.800.573	1.454.268.806.803	1.506.375.773.797
5.1	BELANJA OPERASI	977.946.370.919	946.833.844.644	984.747.755.365	1.020.031.616.606
5.1.1	Belanja Pegawai	570.606.394.188	552.453.040.425	574.574.825.964	595.162.045.708
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	372.386.034.031	360.538.891.271	374.975.890.341	388.411.409.449
5.1.3	Belanja Bunga	5.146.862.023	4.983.119.016	5.182.657.225	5.368.353.671
5.1.5	Belanja Hibah	27.328.475.871	26.459.043.816	27.518.538.922	28.504.537.929
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.478.604.806	2.399.750.116	2.495.842.913	2.585.269.849
5.2	BELANJA MODAL	236.214.798.232	228.699.826.721	237.857.615.980	246.380.138.699



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Uraian	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.586.318.359	42.199.656.968	43.889.450.838	45.462.025.424
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.385.048.146	55.559.391.984	57.784.147.509	59.854.574.003
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.833.949.949	124.735.208.165	129.729.959.433	134.378.229.878
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.804.274.799	4.651.430.910	4.837.687.387	5.011.023.442
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.605.206.980	1.554.138.695	1.616.370.813	1.674.285.952
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.281.691.199	6.081.844.573	6.325.378.867	6.552.019.435
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.281.691.199	6.081.844.573	6.325.378.867	6.552.019.435
5.4	BELANJA TRANSFER	223.781.708.029	216.662.284.635	225.338.056.591	233.411.999.057
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.989.722.172	1.926.420.865	2.003.560.216	2.075.348.489
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	221.791.985.857	214.735.863.770	223.334.496.374	231.336.650.568

c) **Proyeksi Pembiayaan**

Tabel 3.11.  
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

No	Uraian	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(5.314.000.000)	(4.197.000.000)	(3.880.000.000)	18.000.000.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.314.000.000	24.197.000.000	23.880.000.000	2.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.314.000.000	22.197.000.000	21.880.000.000	

d) **Proyeksi Surplus/Defisit**

Tabel 3.12.  
Proyeksi Defisit Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

No	Uraian	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-



### 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

**Kebijakan Umum optimalisasi pendapatan daerah untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 adalah :**

- Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- Berkoordinasi dengan baik kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung guna mendapatkan program/kegiatan melalui dana APBD Provinsi dan dana Pusat untuk membiayai belanja daerah.
- Meningkatkan pelayanan perizinan khususnya perizinan penanaman modal dengan menyederhanakan proses perizinan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku
- Penggunaan digitalisasi pembayaran Pajak-pajak dalam mempermudah pelayanan masyarakat

Kapasitas kemampuan keuangan daerah merupakan total dana yang diperkirakan dapat tersedia untuk membiayai program/kegiatan pembangunan (pagu indikatif) sesuai urutan prioritas. Kebijakan alokasi anggaran kedalam prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 2018-2022 adalah sebagai berikut:

#### Prioritas I

Dialokasikan untuk mendanai belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

#### Prioritas II

Dialokasikan untuk mendanai belanja dan pengeluaran sebagai berikut:

- a. Program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada Tahun rencana. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misidaerah.
- b. Program prioritas ditingkat PD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan PD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
- c. Secara garis besar Prioritas II dialokasikan untuk mendanai Urusan Pilihan, Urusan Penunjang dan Urusan Pendukung.

#### Prioritas III

Dialokasikan untuk mendanai belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Tabel 3.13.

Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

No	Uraian	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	PENDAPATAN DAERAH	1.449.538.568.379	1.402.474.800.573	1.458.148.806.803	1.488.375.773.797
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	Jumlah	1.469.538.568.379	1.422.474.800.573	1.478.148.806.803	1.508.375.773.797



Tabel 3.14.

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Proyeksi			
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.469.538.568.379	1.422.474.800.573	1.478.148.806.803	1.508.375.773.797
1	Prioritas I	1.142.699.693.401	1.106.103.339.825	1.149.394.935.716	1.172.899.147.623
2	Prioritas II	188.785.568.577	182.739.480.127	189.891.690.452	193.774.824.432
3	Prioritas III	138.053.306.401	133.631.980.621	138.862.180.635	141.701.801.741



Aktifitas Mas,  
Lumbok Semu

## BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada: (1) evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2017-2022, (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau (3) evaluasi terhadap beberapa urusan yang berpengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, berdasarkan kriteria berikut:

1. cakupan masalah yang luas;
2. permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan berdampak negatif;
3. memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

- Masih rendahnya pendapatan perkapita tahun 2021 sebesar Rp.24.610.000
- Pertumbuhan ekonomi terjadi perlambatan menjadi 2,58 pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi covid19.
- Meningkatnya jumlah pengangguran pada tahun 2021 menjadi 2,83%
- Masih tingginya angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 12,82%
- Rendahnya harapan lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 12,26 tahun.
- Rendahnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 8,07 tahun.
- Usia Harapan Hidup tahun 2021 masih di angka 67,65 tahun
- Masih rendahnya kondisi jalan mantap, pada tahun 2021 sebesar 66,10%.
- Masih banyaknya rumah tidak layak huni pada tahun 2021 sebanyak 6.294 unit
- Banyaknya jumlah kejadian bencana tahun 2021 sebanyak 77 bencana
- Belum Maksimalnya indeks RB Lampung Barat Tahun 2020 sebesar 55,06 poin



- Belum maksimalnya nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 67,15 poin.
- Masih rendahnya indeks SPBE pada tahun 2021 sebesar 1,91 poin.
- Belum maksimalnya tingkat kepuasan masyarakat, tahun 2021 IKM sebesar 77,25 poin

Sedangkan jika dijabarkan sesuai dengan urusan pemerintahan, maka permasalahan dapat diuraikan berikut ini.

1. Urusan pemerintahan bidang pendidikan

- Rendahnya harapan lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 12,26 tahun.
- Rendahnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 8,07 tahun

2. Urusan pemerintahan bidang kesehatan

- Usia Harapan Hidup tahun 2021 masih di angka 67,65 tahun.
- Masih tingginya angka kematian ibu pada tahun 2021 sebesar 145,6/100.000 KH
- Masih tingginya angka kematian bayi pada tahun 2021 sebesar 4,55/1.000 KH
- Belum tercapainya target stunting, pada tahun 2021 sebesar 22,7%.

3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

- Masih rendahnya kondisi jalan mantap, pada tahun 2021 sebesar 66,10%.
- Masih tingginya idle capacity yaitu 151,9 liter/detik.

4. Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman

- Masih banyaknya rumah tidak layak huni pada tahun 2021 sebanyak 6.294 unit.
- Masih Luas Kawasan Permukiman Kumuh pada tahun 2021 seluas 15,498 Ha.

5. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

- Banyaknya jumlah kejadian bencana tahun 2021 sebanyak 77 bencana.
- Banyaknya pelanggaran kasus ketertiban, ketentraman dan keindahan pada tahun 2021 sebanyak 2.231 kasus.

6. Urusan pemerintahan bidang sosial

- Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat 39.360 jiwa.
- Tingginya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, sehingga menjadi lokus kemiskinan ekstrem dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 16.770 jiwa (5,38%).
- Masih tingginya angka wanita rawan sosial ekonomi di Lampung Barat pada tahun 221 sebanyak 915 orang.
- Masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Pada tahun 2021 total penyandang disabilitas sebanyak 665 orang.

7. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

- Meningkatnya jumlah pengangguran pada tahun 2021 menjadi 2,83%.

8. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- adanya peningkatan jumlah kekerasan dari tahun 2020 , dari 4 kasus menjadi 8 kasus di tahun 2021
- kurangnya pengetahuan kewirausahaan pada wanita yang berdampak pada penghasilan pada wanita

9. Urusan pemerintahan bidang pangan

- Menurunnya Angka Kecukupan Energi pada tahun 2021 menjadi 91,16 poin.

10. Urusan pemerintahan bidang pertanian

- Masih terdapat 2 kasus sengketa tanah yang belum diselesaikan.

11. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup

- Terdapat 145 industri kecil dan menengah yang belum memiliki pengolahan limbah.

12. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- Masih belum maksimalnya Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2021 sebesar 80%.
- Pelayanan online masih menggunakan media sosial Whats App, sehingga hanya beberapa operator saja yang dapat



- melakukan pelayanan online, mengakibatkan pelayanan online kurang maksimal.
13. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
    - Masih rendahnya Persentase Pekon yang Menyampaikan Dokumen APBPekon yang Sesuai Pedoman pada tahun 2021 sebesar 65%.
    - Masih rendahnya Persentase Pekon yang Menyampaikan Dokumen APBPekon yang Sesuai Pedoman pada tahun 2021 sebesar 65%.
    - Masih rendahnya Persentase Pekon yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban yang Sesuai Pedoman Dan Tepat Waktu pada tahun 2021 sebesar 75%.
  14. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
    - tingginya kelahiran pada wanita kelompok umur 15-19 tahun ( 30 per 1000 kelahiran )
    - Masih rendahnya angka usia kwain pertama pada tahun 2021 rata-rata pada usia 19 tahun.
    - Masih rendahnya Persentase Peserta KB Mandiri dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2021 sebesar 39%.
  15. Urusan pemerintahan bidang perhubungan
    - Tidak tersedianya Angkutan Penumpang Pedesaan
    - Pelayanan uji kendaraan bermotor di lampung Barat masih tipe C
    - Masih kurangnya personil yang melakukan Rekayasa pengaturan lalu lintas disaat kegiatan pemda
    - Banyaknya kegiatan tersebut membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
    - Kurang /Minimnya Rambu - rambu penunjuk arah pada jalan
    - Kurang tersedianya tempat tunggu penumpang
    - Tingginya mobilitas anak sekolah pada waktu masuk dan pulang sekolah
  - Tidak tersedianya Angkutan Penumpang Pedesaan
  - Pelayanan uji kendaraan bermotor di lampung Barat masih tipe C
  - Masih kurangnya personil yang melakukan Rekayasa pengaturan lalu lintas disaat kegiatan pemda
  - Banyaknya kegiatan tersebut membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
16. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
    - Terbatasnya Insfrastruktur TIK dan sarana Prasarana Publikasi
    - Belum adanya Regulasi Pengembangan E Government dan Master Plan Informasi Teknologi (IT)
    - Terbatasnya Insfrastruktur TIK dan sarana Prasarana Publikasi
    - Belum Optialnya Desiminasi Informasi dan terbatasnya SDM di Bidang Aplikasi Informatika
    - Terbatasnya Insfrastruktur TIK dan sarana Prasarana Publikasi
    - Belum Optialnya Desiminasi Informasi
    - Terbatasnya Insfrastruktur TIK dan sarana Prasarana Publikasi
  17. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
    - Masih sedikitnya jumlah koperasi sehat pada tahun 2021 sebanyak 27 koperasi atau 32,09%.
    - Masih rendahnya Persentase UMKM yang mengakses permodalan pada tahun 2021 sebesar 45,37%.
  18. Urusan pemerintahan bidang penanaman modal
    - Menurunnya Jumlah Investor PMDN/PMA pada tahun 2021 menjadi 282 investor.
    - Menurunnya Nilai Investasi PMDN/PMA pada tahun 2021 sebesar Rp.112 milyar lebih.



19. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
  - Masih rendahnya Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi pada tahun 2021 sebanyak 6 cabang.
20. Urusan pemerintahan bidang statistik
  - Sumber Data masih bergantung pada data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS
21. Urusan pemerintahan bidang persandian
  - Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah belum terlaksana secara maksimal sesuai amanah Undang-undang
22. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan
  - Menurunnya jumlah pengunjung ke situs budaya pada tahun 2021 sebesar 12.500 orang.
23. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan
  - Masih sedikitnya judul buku di perpustakaan umum, pada tahun 2021 sebanyak 30.841 judul.
  - Masih rendahnya Jumlah pemustaka ke perpustakaan umum pada tahun 2021 sebanyak 7.154 orang.
  - Masih rendahnya jumlah anggota perpustakaan umum pada tahun 2021 sebanyak 6.868 orang.
24. Urusan pemerintahan bidang kearsipan
  - Belum tersedianya perangkat elektronik berupa aplikasi digitalisasi arsip
25. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
  - Menurunnya volume dan nilai ekspor pada tahun 2021 volume export 5.366,24 ton.
  - Masih rendahnya keuntungan pembudidaya air tawar pada tahun 2021 sebesar Rp. 117.544.650.000
26. Urusan pemerintahan bidang pariwisata
  - Menurunnya jumlah kunjungan wisata pada tahun 2021 sebanyak 55 448 wisatawan.
  - Belum maksimalnya SDM pariwisata (Pokdarwis). Tahun 2022 jumlah destinasi yang ada Pokdarwis sebanyak 37 Destinasi Pariwisata.
27. Urusan pemerintahan bidang pertanian
  - Pertumbuhan ekonomi terjadi kontraksi 1,14% pada tahun 2020.
  - Masih rendahnya pendapatan perkapita tahun 2020 sebesar Rp.23.410.000
  - Menurunnya jumlah produksi padi pada tahun 2021 sebesar -18,13%.
  - Menurunnya Jumlah produksi sayuran per tahun pada tahun 2021 sebesar -23,20%.
28. Urusan pemerintahan bidang perdagangan
  - Menurunnya kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat
  - Kondisi tidak stabilnya harga barang kebutuhan pokok maupun harga komoditas hasil pertanian
29. Urusan pemerintahan bidang perindustrian
  - Menurunnya kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat

#### 4.2. ISU STRATEGIS

Isu Strategis Kabupaten Lampung Barat RPD 2023-2026 adalah sebagai berikut :

#### **Bidang Ekonomi**

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian Peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian

Sektor pertanian masih merupakan penyedia lapangan pekerjaan terbesar dan penyumbang PDRB kedua tertinggi setelah industri pengolahan. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Lampung Barat tetap perlu mengutamakan sektor pertanian untuk mendukung pembangunan sektor lainnya. Industri pertanian dapat mendorong terciptanya pertumbuhan yang berkualitas melalui peningkatan investasi dan sebagai cara yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Strategi yang dapat dilakukan adalah perubahan orientasi pembangunan pertanian yang bernilai



rendah (low value added) ke yang bernilai tinggi (high value added). Tantangan pembangunan nilai tambah sektor industri pertanian ke depan adalah bagaimana memproduksi hasil-hasil pertanian yang lebih banyak, lebih berkualitas, dan lebih berkelanjutan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumber daya alam komoditas dunia seperti : kopi, lada, sayur mayur dan hortikultura, ikan. Beberapa produk tersebut harus diproses secara berkelanjutan dalam kegiatan penciptaan nilai. Penguatan rantai nilai produk unggulan dilakukan dengan aktivitas operasi, logistik, pemasaran dan penjualan, jasa, aktivitas pendukung, pengadaan, dan pengembangan teknologi.

Namun tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten belum meningkat terutama kesejahteraan petani. Terkadang petani masih terikat Kontrak Farming kepada pengumpul. Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mengendalikan sistem distribusi tata niaga tersebut, mulai dari petani sampai dengan konsumen dan bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk menjadikan komoditas andalan kabupaten menjadi referensi harga dunia.

## 2. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;

Kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya tiga penyebab, diantaranya yaitu Rendahnya Taraf Pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang. Rendahnya Derajat Kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Terbatasnya Lapangan Kerja. Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada

harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. Secara khusus penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat akan berfokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem yang pelaksanaannya merujuk langsung pada wilayah-wilayah dengan kemiskinan ekstrem yang tinggi.

## 3. Penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi;

Pembangunan dan pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya sektor UKM harus menjadi komitmen nasional demi masa depan bangsa. Peran sektor UKM di era reformasi cukup mempunyai posisi yang strategis. Selain sebagai sektor yang paling tahan dilanda krisis juga mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup besar diluar sektor formal. Keberadaan sektor ini yang tidak terikat pada rumitnya sistem birokrasi memungkinkan bagi siapa saja untuk berusaha disektor ini. Apalagi kalau ditunjang dengan berbagai keahlian dan ketrampilan khusus, maka sektor UKM akan sangat menjajikan keuntungan yang besar, lebih-lebih bila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang canggih.

Selanjutnya dari data yang ada, bahwa perkembangan sektor UKM dari tahun ke tahun menunjukkan tren adanya kenaikan baik dari jenis usaha yang ditekuni maupun kualitas usahanya. Dengan kondisi ini bila dikembangkan diseluruh lapisan masyarakat kita, maka tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak bekerja, kecuali bagi mereka yang sejak awal memang dasarnya pemalas. Paradigma yang kurang bagus ini tampaknya harus dihapus dan tidak sesuai lagi dengan kehidupan modern dengan prinsip time is money .

Adanya investasi dalam masyarakat pertamanya akan memberikan dan menambah kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah. Bertambahnya pendapatan akan memperbesar konsumsi masyarakat, sehingga para pengusaha akan terdorong untuk memperbesar produksinya



dengan memperluas perusahaanya, baik dengan menambah materialnya, tenaga kerjanya dan faktor-faktor produksi lainnya .

Dalam perencanaan penyerapan tenaga kerja, bahwa dengan melalui penambahan modal dalam setiap aktifitas pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan penyediaan lapangan kerja secara total. Perubahan atau peningkatan investasi tentunya akan diikuti atau diimbangi dengan penambahan tenaga kerja, dengan demikian setiap penambahan investasi tentu akan mengubah kuantitas tenaga kerja.

4. Kurang didorongnya pengembangan kewirausahaan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal;

Mengembangkan kewirausahaan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing, sedangkan pengembangan kewirausahaan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan. Mengembangkan kewirausahaan untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

### **Bidang Sumberdaya Manusia**

1. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan;

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satu ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan secara perspektif jarak dan keterjangkauan layanan. Di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2020, teridentifikasi masih ada beberapa

layanan pendidikan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Seperti cakupan akses layanan PAUD dan pendidikan dasar belum mampu tercapai secara optimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya : aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana dan non fisik seperti sosial, budaya dan kapasitas finansial. Untuk itu, perlu adanya perwujudan aksesibilitas dan cakupan akses layanan bidang pendidikan, agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2. Aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;

Upaya meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan prioritas utama dalam pembangunan kesehatan. Tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu, membutuhkan ketersediaan sumber daya (petugas kesehatan yang profesional, sarana dan prasarana pendukung dan pembiayaan kesehatan) dan standar pelayanan.

Kabupaten Lampung Barat masih kekurangan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi dan belum terdistribusi secara merata. Faktor pembiayaan seringkali menjadi penghambat masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas walaupun sudah ada asuransi kesehatan.

### **Bidang Infrastruktur**

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian;

Alih fungsi lahan pertanian mempunyai pengaruh besar terhadap produksi bahan pangan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan masalah serius dan strategis yang harus dihadapi dalam kemantapan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ini. Jika tidak dikendalikan akan berdampak pada produksi bahan pangan yang ada di Kabupaten Lampung Barat akan terganggu.

Langkah yang tepat untuk mengantisipasi laju alih fungsi lahan ini adalah dengan



meningkatkan luas tanam lahan pertanian, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya lahan pertanian kaitannya dengan keberlanjutan kebutuhan pangan penduduk serta adanya penjaminan/ perlindungan lahan dari pemerintah.

## 2. Tapal Batas Kabupaten dan kecamatan

Tapal batas dengan Kabupaten tetangga perlu untuk diselesaikan agar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak terjadi kendala.

## 3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang di Provinsi Kepulauan Lampung Barat, yang mempunyai potensi berkembang karena posisi geografisnya yang sangat strategis. Untuk itu, perlu peningkatan dalam mendukung posisi geografis tersebut dengan pembangunan infrastruktur yang progresif agar dapat terintegrasi dengan baik semua sektor pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, perumahan dan kawasan permukiman dan pelayanan dasar masyarakat diperlukan suatu sistem jaringan penghubung antar wilayah.

## 4. Ketersediaan air baku;

Pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada pertumbuhan sarana penyediaan air minum yang ada dan ketersediaan airnya sangat terbatas. Penggundulan hutan telah tidak terkendali sehingga semakin mengganggu ketersediaan air baku. Sedangkan sumber air baku terutama air permukaan mengalami pencemaran yang semakin meningkat akibat domestik, industri dan pertanian. Sehingga ketersediaan air baku semakin tidak bisa dijamin, baik kuantitas dan kualitas.

Air baku di wilayah Kabupaten Lampung Barat sebenarnya tersedia dengan cukup, tetapi terancam keberadaannya akibat pengelolaan yang buruk, baik oleh pencemaran maupun kerusakan alam yang menyebabkan

terhambatnya konservasi air. disamping itu ada beberapa wilayah air baku sulit diperoleh karena kondisi alamnya sehingga masyarakat harus mengandalkan air hujan atau air permukaan yang tidak sehat.

## 5. Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman;

Kondisi perumahan rakyat di Kabupaten Lampung Barat sudah tidak tertanggulangi lagi ketika angka kekurangan rumah terus bertambah setiap tahun. Diperparah urbanisasi yang cepat masih terus diiringi dengan bertambahnya permukiman kumuh. Program perumahan umumnya sudah ada tetapi kapasitasnya masih sangat terbatas sehingga masih menyisakan sebagian besar kelompok masyarakat yang tidak mampu menjangkau rumah sederhana atau bahkan pengeluaran rumah tangganya habis hanya untuk kebutuhan makan. Kondisi ini hanya membawa masyarakat hidup di lingkungan yang tidak sehat dan dipenuhi penyakit sosial, miskin, tidak produktif.

Penyediaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak bisa dilakukan hanya dengan cara konvensional seperti selama ini terjadi. Penanganan permukiman kumuh selain menyediakan sarana dan prasarana fisik juga harus mengupayakan adanya pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat. Hal itu selain untuk peningkatan kapasitas masyarakat, juga menyiapkan masyarakat terhadap perubahan kondisi sosial lingkungan. Sehingga, upaya penyediaan sarana dan prasarana yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, terpelihara dengan baik dan berkelanjutan.

## 6. Lingkungan hidup;

Fungsi ekologis suatu kawasan sangat penting dalam memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas air tanah, mengurangi polusi udara, konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Menurunnya fungsi ekologis di Kabupaten Lampung Barat ditandai dengan meningkatnya pencemaran tanah, air dan udara oleh sampah dan limbah kimia, menyusutnya tutupan hutan, berkurangnya daerah resapan air dan



tangkapan air, alih fungsi lahan pertanian dan meningkatnya bencana lingkungan hidup seperti banjir dan kekeringan.

Di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2020, masih sulit untuk mengakomodir 20% RTH Publik dari 30% RTH dari total luas wilayah Kabupaten Lampung Barat. Meskipun Kabupaten Lampung Barat telah mendapat penghargaan Adipura, namun tuntutan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup terutama dalam penanganan sampah harus menjadi perhatian penting bagi pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.

#### 7. Pengendalian pemanfaatan ruang;

Pengendalian penataan ruang merupakan salah satu bagian penting dalam tata ruang, akan tetapi seringkali di dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Salah satu permasalahan terhadap pengendalian penataan ruang adalah belum seluruh wilayah/daerah memiliki peraturan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah terlebih hanya beberapa wilayah/daerah yang memiliki peraturan terkait Rencana Detail Tata Ruang. Sementara pengendalian penataan ruang dapat dilakukan apabila sudah ditetapkan RTRW di dalam peraturan daerah. Belum tersedianya RTRW yang update maupun belum disusunnya RDTR seringkali menjadi kesempatan pihak-pihak tertentu untuk mengajukan permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pengembangan usaha/industry yang sebenarnya apabila dikaji merupakan kawasan hijau/kawasan lindung. Kondisi inilah yang menjadikan terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan daya dukung lingkungan, atau terjadinya ketidaksesuaian antara kemampuan tanah dengan penggunaan tanah yang berujung pada degradasi/rusaknya lingkungan.

#### 8. Kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana

Prioritas nasional penanggulangan bencana juga masih memerlukan kerja keras untuk 136 kabupaten/kota yang menjadi sasaran

penurunan indeks rawan bencana Indonesia (IRBI) dari berbagai pihak baik Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Proses penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Undang-undang Penanggulangan Bencana) masih memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya: belum terwujudnya regulasi turunan undang-undang penanggulangan bencana, belum optimalnya dukungan anggaran bencana, lambatnya mekanisme proses dana penanggulangan bencana lambatnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana, dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait.

Masyarakat masih kurang paham dengan bencana. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya mitigasi bencana. Sistem peringatan dini hingga budaya mitigasi belum menjangkau seluruh masyarakat, bahkan di lingkungan aparat pemerintah. Masih kurangnya mitigasi bencana dapat dilihat dari kurangnya upaya Pemerintah mengurangi risiko bencana, baik pembangunan fisik maupun penyadaran masyarakat melalui sosialisasi terus menerus dan berkelanjutan tentang bencana menyebabkan informasi kebencanaan belum tertanam. Kurangnya upaya mitigasi bencana ini tidak dapat dibiarkan, mengingat Indonesia berpotensi mengalami berbagai jenis bencana alam yang membawa korban jiwa.

#### Bidang Pemerintahan

1. Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik;

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus lebih serius dalam melaksanakan program reformasi birokrasi. Setiap aparat di Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat harus merubah pola pikir dan budaya pikir yang lebih seperti mentalitas, pelanggaran hukum, pemborosan anggaran, pelayanan publik yang kurang cepat, tepat dan profesional, penyalahgunaan wewenang, e-Government belum berjalan lancar, menuju tata pemerintahan yang baik demi terwujudnya



pemerintahan yang bersih, jujur, bebas KKN, transparan dan akuntabel.

2. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat.

Kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa belum mendukung dalam upaya mewujudkan otonomi desa. Hal itu disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa itu dari aspek sumber daya manusia, anggaran, kebijakan dan struktur birokrasi.

Pola penguatan kelembagaan Pemerintahan Desa dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas pada aparatur, peningkatan peran aparatur dan peningkatan pembangunan yang partisipatif. Selain itu, aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penguatan kelembagaan Pemerintahan Desa itu dapat dilihat dalam bagan berikut ini;

### **Bidang Trantibum**

1. Ketertiban umum, tata kehidupan sosial, keagamaan dan pemberdayaan budaya lokal

Untuk mewujudkan ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkokoh kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Implementasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, peningkatan upaya penegakan perda, peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel, perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan peningkatan promosi seni budaya.

Masih ada potensi terjadinya konflik kemasyarakatan seperti konflik antar umat beragama yang kadang masih terjadi dimasyarakat serta . Di Kabupaten Lampung Barat dalam penciptaan kerukunan dalam sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama dipandang sangat harmonis tetapi ada hal-hal tertentu yang masih ada beberapa perbedaan dari cara pandang, sehingga isu kerukunan umat beragama ini masih butuh perhatian.

Tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, namun demikian pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok yang mengalami ketertinggalan dalam proses pembangunan tersebut, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaat. Salah satu hal yang menyebabkan ketertinggalan dari beberapa kelompok tersebut adalah masih belum terciptanya kondisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pembangunan seringkali mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya dan agama.

Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indek Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.





## BAB V

# TUJUAN DAN SASARAN

RPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 disusun tanpa adanya visi dan misi dikarenakan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 tidak dipimpin oleh Kepala Daerah definitif hasil pemilu, tetapi dijabat oleh penjabat Kepala Daerah.

Penentuan Tujuan dan Sasaran RPD tidak terlepas dari Visi Misi RPJMN, Visi Misi RPJMD Provinsi Lampung dan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025.

Tinjauan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah :  
Visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Dengan Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sedangkan tinjauan terhadap Visi Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :

Visi **“Rakyat Lampung Berjaya”**

Dengan Misi :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Selanjutnya tinjauan terhadap RPJPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2005-2025 adalah :

Visi **“Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi yang Sejahtera 2025”**

Dengan misi yaitu :

- Misi I : Memacu Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi:
- Misi II : Menumbuhkan Perekonomian yang Tinggi, Merata, dan Berkelanjutan.
- Misi III : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance).
- Misi IV : Mengembangkan wilayah dan infrastruktur yang merata sesuai dengan



kebutuhan lokal dengan memperhatikan daerah rawan bencana serta mengedepankan aspek-aspek konservasi sumberdaya alam

Misi V : Membangun kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, partisipatif, menjunjung tinggi supremasi hukum serta adat dan budaya

Selanjutnya sasaran pokok dan arah kebijakan pada RPJPD tahap ke 4 (2021 – 2025) yaitu :

RPJMD keempat ditujukan untuk mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat makin mantap yang tercermin pada tingkat pendidikan yang tinggi dan derajat kesehatan yang baik serta terwujudnya rasa nyaman. Sekolah tersebar merata dan berklasifikasi nasional bahkan banyak yang berklasifikasi internasional. Pelayanan kesehatan dapat dinikmati secara terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kehidupan sosial semakin dinamis dan stabil yang mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreatifitas dan seni budaya. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada pelaksanaan RPJM keempat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM), diharapkan sudah mencapai nilai lebih dari 76.

Perekonomian daerah makin kokoh dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian bersama-sama sektor lainnya secara berimbang, terutama industri pengolahan dan pariwisata. Sebagai Kabupaten Konservasi, Lampung Barat secara lebih mantap akan mampu melestarikan keanekaragaman hayati yang menjadi keunikan daerah. Sumberdaya alam dapat dikelola dengan baik dan menjadi kekuatan dalam menjaga momentum kemajuan ekonomi.

Pemerintahan makin dipercaya masyarakat karena memiliki kinerja yang baik dan bersih. Birokrasi mengedepankan pelayanan publik secara prima yang didukung oleh manajemen pemerintahan yang baik, aparatur yang berkualitas, berdisiplin, dan profesional. Penegakan hukum makin mantap dengan perangkat aturan yang handal dan aparatur penegak hukum yang berwibawa serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Dalam menjaga momentum kemajuan maka banyak hal yang sudah dibangun pada tiga tahap sebelumnya harus juga disempurnakan sejalan dengan kemajuan yang dicapai, agar dapat dijaga kelangsungannya sesuai dengan konsep kabupaten konservasi. Pengembangan konsep pembangunan kabupaten konservasi merupakan suatu hal yang bersifat baru dan masih menimbulkan banyak pertanyaan. Oleh karena itu, keberhasilan Kabupaten Lampung Barat pada RPJMD keempat dalam mengurangi sifat tidak saling menenggang (*trade off*) antara pembangunan ekonomi dan konservasi sumberdaya alam, akan menjadi suatu model pembangunan berkelanjutan yang monumental. Model pembangunan tersebut tidak hanya akan menjadi landasan bagi pembangunan pada jangka panjang Kabupaten Lampung Barat berikutnya, namun juga akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia bahkan secara internasional.

Sasaran pokok, indikator dan target pembangunan pada Tahap Lima Tahun ke-4 adalah sebagai berikut.

1. Tingginya taraf pendidikan masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk setiap jenjang pendidikan. Indikatornya ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah yang menjalani pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Target APM SD pada tahap ini adalah 99,0%, SMP dan sederajat 85,0%, dan SMA dan sederajat 75,0%.
2. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang semakin mantap. Indikator dan targetnya ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup mencapai 75 tahun, angka Kematian Bayi 12/1000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian Ibu mencapai 80/100.000 kelahiran hidup.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai angka minimal 76,67.
4. Tercapainya pemantapan alokasi anggaran penunjang kesehatan keluarga miskin, jaminan pangan serta kualitas gizi masyarakat yang tinggi. Indikator capaian adalah alokasi anggaran yang semakin mantap, dengan target peningkatan anggaran minimal 100% dibandingkan anggaran pada awal tahapan pembangunan.
5. Stabilitasnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di bawah 1,5% dan meningkatnya



- kualitas keluarga kecil sehat dan mandiri di seluruh pekon.
6. Tercapainya stabilitas kualitas tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, anak, dan sumberdaya keluarga serta pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Indikator peningkatan jumlah perempuan partisipan pembangunan serta jumlah perempuan terampil dan kreatif ditargetkan mencapai peningkatan masing-masing sebesar 100% secara proporsional dibanding jumlah perempuan yang sama di awal tahapan pembangunan. Sementara target peningkatan jumlah perempuan paham gender dan perlindungan perempuan-anak mencapai minimal 90% dari jumlah penduduk perempuan.
  7. Tercapainya pemantapan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga. Indikator dan target capaian adalah semakin besarnya partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan berbagai bidang, termasuk bidang sosial, ekonomi, keagamaan, bencana alam dan lingkungan hidup, politik lokal, ekonomi kerakyatan, serta capaian prestasi olahraga yang berkelanjutan untuk level provinsi, nasional, dan internasional.
  8. Tercapainya pemantapan kualitas masyarakat bermoral dan agamis dengan indikator terintegrasinya seluruh kegiatan kemasyarakatan dengan budaya religius. Target capaian adalah seluruh penduduk aktif dalam kegiatan pengembangan keagamaan dan pemantapan moral.
  9. Tercapainya pemantapan sarana prasarana olahraga dan seni budaya dengan indikator peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana-sarana olahraga standar internasional dan gedung serba guna, serta peningkatan sarana olahraga dan seni di pekon-pekon.
  10. Tercapainya kelengkapan sarana prasarana keagamaan berkualitas tinggi yang dapat mendorong peningkatan kualitas aktivitas keagamaan. Indikator dan target capaian adalah seluruh rumah ibadah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap serta dimanfaatkan secara intensif.
  11. Mantap dan berkembangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan hutan lindung serta pengendalian bencana, indikator capaian adalah seluruh penduduk memiliki wawasan dan keterampilan pengelolaan SDA dan potensi hutan lindung secara berkelanjutan, dan seluruh masyarakat memiliki wawasan pengetahuan serta keterampilan tanggap bencana dan rehabilitasi pasca bencana.
  12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan even-even olahraga dan seni dalam ruang lingkup yang lebih luas, dengan orientasi prestasi.
  13. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi mencapai angka di atas angka 6,0%, meningkatnya pendapatan per kapita penduduk mencapai angka di atas Rp. 15.000.000,00 atas dasar harga berlaku.
  14. Tingginya kesejahteraan masyarakat. Indikator dan target capaian adalah jumlah rumah tangga miskin paling tinggi 10% dari jumlah seluruh rumah tangga.
  15. Kokohnya struktur ekonomi daerah berbasis pertanian. Capaian ditunjukkan melalui tingginya nilai produksi pertanian dan perdagangan komoditas pertanian. Target capaian nilai produksi pertanian meningkat 100% secara proporsional dari awal tahap pembangunan (Pembangunan Tahap 1)
  16. Berkembangnya pengelolaan sumberdaya mineral dan energi yang diindikasikan dengan bertambahnya jumlah investasi pengelolaan yang bervariasi, serta meningkatnya nilai riil dalam kontribusi terhadap PDRB daerah. Target capaian kontribusi terhadap PDRB minimal mengalami peningkatan 90% dari nilai kontribusi sektor yang sama pada awal tahapan pembangunan (Pembangunan Tahap 1)
  17. Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja diindikasikan dengan semakin tingginya jumlah tenaga berpengetahuan dan terampil siap pakai yang berasal dari seluruh pekon di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
  18. Tercapainya kemantapan lapangan kerja sektor UKM, koperasi, dan industri berbasis agro dengan indikator menurunnya jumlah pengangguran. Target capaian penurunan hingga 100% dari persentase pengangguran



- terhadap jumlah penduduk di awal tahapan pembangunan.
19. Tercapainya pematapan sistem pengembangan dan penyaluran tenaga kerja berkualitas dengan indikator dan target capaian jumlah tenaga kerja terampil terdidik mencapai 100% tenaga pencari kerja, berikut penyaluran tenaga kerja sebesar 100%.
  20. Tercapainya pematapan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, diindikasikan dengan tingginya tingkat pendidikan, keterampilan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pemerintahan. Target capaian pemenuhan sarana prasarana pemerintahan mencapai 100% dari kebutuhan.
  21. Tercapainya kemantapan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi yang mendukung efektivitas kerja pemerintahan, diindikasikan dengan semakin lengkapnya perangkat komunikasi dan informasi. Target capaian kelengkapan perangkat komunikasi informasi untuk seluruh lembaga/kantor milik pemerintah, termasuk kantor desa/pekon.
  22. Tingginya efektivitas kerja lembaga legislatif, diindikasikan dengan semakin tingginya output kerja legislasi, perencanaan, supervisi, dan pengawasan DPRD. Target capaian minimal 100% prolegda terpenuhi.
  23. Berkembangnya sektor pariwisata terutama wisata alam hutan, pegunungan dan danau, wisata budaya, dan lanjutan rintisan wisata kuliner, diindikasikan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang semakin bertambah dan nilai investas yang semakin meningkat. Target capaian jumlah kunjungan wisatawan meningkat paling sedikit rata-rata 100% dari angka pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap 3. Target capaian jumlah investasi memberikan kontribusi peningkatan sebesar minimal 25% dari total investasi di daerah.
  24. Tercapainya pematapan efektivitas aplikasi perencanaan tataruang daerah yang diindikasikan dengan berlakunya Perda tentang RTRW Kabupaten Lampung Barat serta dokumen-dokumen turunannya.
  25. Mantapnya perkembangan usaha kecil, menengah dan koperasi berbasis agrobisnis yang diindikasikan dengan semakin tinggi jumlah dan kualitas UKM dan koperasi, serta jumlah omzet usahanya mencapai peningkatan di atas 100% dari kondisi pada awal RPJPD. Target capaian jumlah UKM dan koperasi berkualitas minimal bertambah sebesar 75% dari periode pembangunan jangka panjang tahap 1.
  26. Terlaksananya pembangunan infrastruktur wilayah yang diindikasikan dengan kondisi jalan dan jembatan yang mantap 90% di seluruh kecamatan.
  27. Pematapan fungsi infrastruktur pengairan penunjang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan di wilayah sentra-sentra produksi. Target capaian mencakup 100% wilayah sentra produksi.
  28. Pematapan pengembangan Kawasan Kebun Raya Liwa sebagai pusat pelestarian keanekaragaman hayati yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya program pengembangan fisik, sosial dan ekonomi. Target capaian bergulirnya alokasi dana penunjang operasional kawasan untuk pengembangan program-program bidang fisik, sosial dan ekonomi.
  29. Tingginya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pemerintahan, diindikasikan dengan bertambah lengkapnya sarana kerja, gedung dan mobilitas kerja aparatur pemerintah. Target kuantitatif seluruh kebutuhan pengembangan sarana prasarana terpenuhi.
  30. Terpenuhinya sarana prasarana transportasi air berkualitas di wilayah sungai dan danau diindikasikan dengan semakin berkualitasnya pembangunan dermaga transportasi dan tangkap di seluruh kawasan potensial.
  31. Berkualitasnya kondisi jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi di sebagian besar wilayah pekon diindikasikan dengan target capaian jangkauan seluruh pekon.
  32. Semakin berkembangnya program pengembangan tenaga panas bumi dengan indikator bertambahnya investasi pembangunan perangkat eksplorasi dan eksploitasi, dan capaian output riil serta perolehan PAD.



33. Pemanfaatan perangkat mitigasi bencana yang modern dan berkualitas di seluruh wilayah rawan bencana. Target pemenuhan untuk seluruh wilayah rawan bencana 100%.
34. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyusunan produk-produk hukum aplikatif terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan aset-aset daerah, peningkatan ekonomi daerah, pemukiman dan perkotaan, sosial kemasyarakatan, serta lingkungan hidup. Target capaian pada 100% bidang pembangunan.
35. Tercapainya pemantapan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang diindikasikan dengan semakin tingginya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan di seluruh pekon.
36. Minimnya jumlah kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba, perdagangan anak, penyakit masyarakat dan tindak-tindak pidana dengan trend penurunan setiap tahun. Target capaian penurunan rata-rata 90% jumlah kejahatan setiap tahun.
37. Pemantapan lembaga politik dan kemasyarakatan yang menunjang stabilitas sosial demokrasi. Indikator utama adalah kondisi kehidupan bermasyarakat yang kondusif serta tidak terjadinya konflik-konflik horizontal di seluruh wilayah. Pelaksanaan agenda-agenda pemilu berlangsung kondusif. 100% agenda demokrasi berlangsung dengan baik dan damai.
38. Tingginya peran serta lembaga-lembaga adat dan budaya dalam mendorong pembangunan daerah yang aspiratif, diindikasikan dengan semakin efektifnya komunikasi pembangunan yang didukung dengan tindak nyata masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di seluruh wilayah pekon.
39. Tingginya efektivitas dan kinerja aparat hukum dalam rangka menunjang kepastian dan penegakan hukum untuk berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan daerah.
40. Semakin mantapnya sistem birokrasi yang didukung oleh profesionalisme aparatur yang tinggi serta anti KKN. Target capaian 100% aparatur berkualitas dan profesional.
41. Terciptanya iklim investasi yang mantap sebagai tulang punggung perkembangan ekonomi daerah. Indikator bertambahnya jumlah dan berkembangnya investasi sektor-sektor agroindustri, pariwisata, perdagangan, serta pertambangan dan energi.
42. Minimnya jumlah lahan nonproduktif dan tingginya nilai ekonomi lahan. Indikator dan target capaian maksimal 10% lahan nonproduktif tersisa.
43. Tingginya kuantitas hasil ekonomi sektor-sektor andalan (pertanian, perdagangan, pariwisata, pertambangan dan energi) yang memberikan kontribusi PAD yang tinggi. Target capaian peningkatan rata-rata PAD minimal 90% dari tahapan pembangunan jangka panjang sebelumnya.
44. Terlaksananya pemantapan pengelolaan wilayah Kabupaten Konservasi dengan intensifikasi perolehan PAD yang bersumber dari pemanfaatan kawasan. Indikator dan target sasaran mencakup pelaksanaan kerjasama baik regional, nasional maupun internasional dengan pihak-pihak pemetik manfaat.

### 5.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Hal ini karena jika visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis



daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran untuk mencapai rumusan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Tabel 5.1  
Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025

No	Visi RPJPD	Misi RPJPD	No Misi RPJPD	Analisa Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan
1	Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi yang Sejahtera 2025	Menumbuhkan perekonomian yang tinggi, merata, dan berkelanjutan	2	terwujudnya perekonomian yang tinggi, merata dan berkelanjutan	Upaya mendorong pertumbuhan sektor pertanian, terutama sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan perlu ditingkatkan	Peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian Peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
2	Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi yang Sejahtera 2025	Memacu pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	1	Tingkat pendidikan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 diproyeksikan struktur penduduk didominasi masyarakat yang telah mampu menyelesaikan tingkat pendidikan menengah, dengan angka partisipasi murni untuk SD 99%, SLTP 85%, dan SLTA 75%, sehingga indeks pengetahuan masyarakat dapat mencapai nilai 84	Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan, yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat penting untuk secara kontinyu dan simultan disediakan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya	Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan dan Kesehatan	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Visi RPJPD	Misi RPJPD	No Misi RPJPD	Analisa Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan
3	Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi yang Sejahtera 2025	Mengembangkan wilayah dan infrastruktur yang merata sesuai kebutuhan lokal dengan memperhatikan daerah rawan bencana serta mengedepankan aspek-aspek konservasi sumberdaya alam	4	Terlaksananya pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan, memperhatikan aspek-aspek konservasi alam, serta pencegahan dan penanggulangan bencana	Pembangunan infrastruktur wilayah berwawasan lingkungan, memperhatikan aspek-aspek konservasi alam dan penanggulangan bencana	Kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana
4	Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi yang Sejahtera 2025	Menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance)	3	terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik	Peningkatan kapasitas (capacity bulding) aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui pendidikan dan latihan penjenjangan	Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan
5	Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi yang Sejahtera 2025	Membangun kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, partisipatif, menjunjung tinggi supremasi hukum serta adat dan budaya	5	Peran serta masyarakat dalam mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban mengalami peningkatan	Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam mewujudkan pembangunan partisipatif seperti program pembinaan kelembagaan sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat, pemantapan dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan pekan (desa), serta pengembangan kerjasama dan pembinaan terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) di wilayah Kabupaten Lampung Barat	Ketertiban umum, tata kehidupan sosial, keagamaan dan pemberdayaan budaya lokal	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai



Tabel 5.2  
Formulasi dan Sumberdata Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Sumber data	Data Awal Tahun 2021	Prakiraan Capaian Tahun 2022
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Laju pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi tahun n - pertumbuhan ekonomi tahun n)/pertumbuhan ekonomi tahun n) x 100%	BPS	2,58%	4,6% - 5,3%
		Meningkatnya Pendapatan Perkapita	pendapatan perkapita	PDRB / jumlah penduduk	BPS	24.618.877	25.630.803
			Gini Rasio	$GR = 1 - \sum f_i(Y_i + Y_i - 1)$	BPS	0,295)*	0,277
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)	BPS	12,82%	12,59%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	BPS	2,83%	1,60%
2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		indeks pembangunan manusia (IPM)	rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran	BPS	67,90	68,37
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran	BPS	67,90	68,37
3	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana		Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	Rata-rata capaian jalan mantap, Luas Layanan Irigasi, Sarana dan Prasarana Lingkungan, Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang , Lahan Yang disertifikasi	Dinas PU PR	-	-
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Dinas LH	65,99	65,36
			Indeks Resiko Bencana		BNPB	-	-



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Sumber data	Data Awal Tahun 2021	Prakiraan Capaian Tahun 2022
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	Rata-rata capaian jalan mantap, Luas Layanan Irigasi, Sarana dan Prasarana Lingkungan, Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang , Lahan Yang disertifikasi	Dinas PU PR	-	-
		Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH_Kabupaten = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKL)	Dinas LH	65,99	65,36
		Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	Jumlah jenis bencana yang mungkin terjadi dikali (Jumlah desa rawan bencana / Jumlah Desa Tangguh Bencana)	BNPB	-	-
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan		Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi RB	Kemenpan RB	55,06 )*	56
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Hasil Evaluasi RB	Kemenpan RB	55,06 )*	56,00
			Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi RB	Kemenpan RB	67,15 )*	70,01
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Sekretariat Daerah	-	-
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai		Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	Rata-rata aspek toleransi, aspek kesetaraan, dan aspek kerjasama	Sekretariat Daerah dan Badan Kesbangpol	-	-
		Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	Rata-rata aspek toleransi, aspek kesetaraan, dan aspek kerjasama	Sekretariat Daerah dan Badan Kesbangpol	-	-



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Sumber data	Data Awal Tahun 2021	Prakiraan Capaian Tahun 2022
		Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	Jumlah WBTB daerah yang tersertifikasi / Jumlah seluruh WBTB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-
			Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	Jumlah objek cagar budaya peringkat kabupaten / jumlah seluruh objek cagar budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

Tabel 5.3  
Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun				PD Penanggung-Jawab
				2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Laju pertumbuhan ekonomi	5%	5,10%	5,20%	5,30%	Bappeda
		Meningkatnya Pendapatan Perkapita	pendapatan perkapita	26.786.367	28.020.689	29.339.780	30.750.169	Bappeda
			Gini Rasio	0,269	0,261	0,253	0,245	Bappeda
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	12,37%	12,16%	11,94%	11,73%	Dinas Sosial
			Tingkat Pengangguran Terbuka	2,60%	2,50%	2,40%	2,3%	Sekretariat Daerah
2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		indeks pembangunan manusia (IPM)	68,95	69,52	70,15	70,77	Bappeda
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,95	69,52	70,15	70,77	Bappeda



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun				PD Penanggung-Jawab
				2023	2024	2025	2026	
3	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana		Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	69,02	70,16	71,50	72,64	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99	66,61	67,23	67,86	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Resiko Bencana	162,21	158,93	155,66	152,38	BPBD
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	69,02	70,16	71,50	72,64	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
		Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99	66,61	67,23	67,86	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	162,210	158,930	155,660	152,380	BPBD
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan		Nilai Reformasi Birokrasi	57,05	58,05	59,05	60,05	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	57,05	58,05	59,05	60,05	Sekretariat Daerah
			Nilai SAKIP	70,25	70,50	70,75	71,01	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik	2,51	2,55	2,6	2,65	Sekretariat Daerah
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat		Indeks Kerukunan	84,10	84,15	84,20	84,25	Sekretariat Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun				PD Penanggung-Jawab
				2023	2024	2025	2026	
	yang agamis, berbudaya, aman dan damai		Hidup umat beragama					
		Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	84,10	84,15	84,20	84,25	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	13,30	15,50	17,70	20,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	2,40	6,40	10,40	14,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 5.4

Sandingan Sasaran pokok, indikator dan target pembangunan pada Tahap Lima Tahun ke-4 RPJPD Lampung Barat dengan Target RPD

No	Sasaran pokok, indikator dan target pembangunan pada Tahap Lima Tahun ke-4 RPJPD Lampung Barat	Target RPD Tahun 2026	
1.	Tingginya taraf pendidikan masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk setiap jenjang pendidikan. Indikatornya ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah yang menjalani pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Target APM SD pada tahap ini adalah 99,0%, SMP dan sederajat 85,0%, dan SMA dan sederajat 75,0%.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,77
2.	Tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang semakin mantap. Indikator dan targetnya ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup mencapai 75 tahun, angka Kematian Bayi 12/1000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian Ibu mencapai 80/100.000 kelahiran hidup.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,77
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai angka minimal 76,67.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,77
4.	Tercapainya pemantapan alokasi anggaran penunjang kesehatan keluarga miskin, jaminan pangan serta kualitas gizi masyarakat yang tinggi. Indikator capaian adalah alokasi anggaran yang semakin mantap, dengan target peningkatan anggaran minimal 100% dibandingkan anggaran pada awal tahapan pembangunan.	-	-
5.	Stabilnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di bawah 1,5% dan meningkatnya kualitas keluarga kecil sehat dan mandiri di seluruh pekan.	-	-



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Sasaran pokok, indikator dan target pembangunan pada Tahap Lima Tahun ke-4 RPJPD Lampung Barat	Target RPD Tahun 2026	
6.	Tercapainya stabilitas kualitas tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, anak, dan sumberdaya keluarga serta pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Indikator peningkatan jumlah perempuan partisipan pembangunan serta jumlah perempuan terampil dan kreatif ditargetkan mencapai peningkatan masing-masing sebesar 100% secara proporsional dibanding jumlah perempuan yang sama di awal tahapan pembangunan. Sementara target peningkatan jumlah perempuan paham gender dan perlindungan perempuan-anak mencapai minimal 90% dari jumlah penduduk perempuan.	-	-
7.	Tercapainya pemantapan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga. Indikator dan target capaian adalah semakin besarnya partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan berbagai bidang, termasuk bidang sosial, ekonomi, keagamaan, bencana alam dan lingkungan hidup, politik lokal, ekonomi kerakyatan, serta capaian prestasi olahraga yang berkelanjutan untuk level provinsi, nasional, dan internasional.	-	-
8.	Tercapainya pemantapan kualitas masyarakat bermoral dan agamis dengan indikator terintegrasinya seluruh kegiatan kemasyarakatan dengan budaya religius. Target capaian adalah seluruh penduduk aktif dalam kegiatan pengembangan keagamaan dan pemantapan moral.	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	84,25
9.	Tercapainya pemantapan sarana prasarana olahraga dan seni budaya dengan indikator peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana-sarana olahraga standar internasional dan gedung serba guna, serta peningkatan sarana olahraga dan seni di pekon-pekon.	-	-
10.	Tercapainya kelengkapan sarana prasarana keagamaan berkualitas tinggi yang dapat mendorong peningkatan kualitas aktivitas keagamaan. Indikator dan target capaian adalah seluruh rumah ibadah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap serta dimanfaatkan secara intensif.	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	84,25
11.	Mantap dan berkembangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan hutan lindung serta pengendalian bencana, indikator capaian adalah seluruh penduduk memiliki wawasan dan keterampilan pengelolaan SDA dan potensi hutan lindung secara berkelanjutan, dan seluruh masyarakat memiliki wawasan pengetahuan serta keterampilan tanggap bencana dan rehabilitasi pasca bencana.	-	-
12.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan even-even olahraga dan seni dalam ruang lingkup yang lebih luas, dengan orientasi prestasi.	-	-
13.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi mencapai angka di atas angka 6,0%, meningkatnya pendapatan per kapita penduduk mencapai angka di atas Rp. 15.000.000,00 atas dasar harga berlaku.	Laju pertumbuhan ekonomi	5,30%
14.	Tingginya kesejahteraan masyarakat. Indikator dan target capaian adalah jumlah rumah tangga miskin paling tinggi 10% dari jumlah seluruh rumah tangga.	Angka Kemiskinan	11,73%
15.	Kokohnya struktur ekonomi daerah berbasis pertanian. Capaian ditunjukkan melalui tingginya nilai produksi pertanian dan perdagangan komoditas pertanian. Target capaian nilai produksi pertanian meningkat 100% secara proporsional dari awal tahap pembangunan (Pembangunan Tahap 1)	-	-



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Sasaran pokok, indikator dan target pembangunan pada Tahap Lima Tahun ke-4 RPJPD Lampung Barat	Target RPD Tahun 2026	
16.	Berkembangnya pengelolaan sumberdaya mineral dan energi yang diindikasikan dengan bertambahnya jumlah investasi pengelolaan yang bervariasi, serta meningkatnya nilai riil dalam kontribusi terhadap PDRB daerah. Target capaian kontribusi terhadap PDRB minimal mengalami peningkatan 90% dari nilai kontribusi sektor yang sama pada awal tahapan pembangunan (Pembangunan Tahap 1)	-	-
17.	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja diindikasikan dengan semakin tingginya jumlah tenaga berpendidikan dan terampil siap pakai yang berasal dari seluruh pekon di wilayah Kabupaten Lampung Barat.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,30%
18.	Tercapainya kemantapan lapangan kerja sektor UKM, koperasi, dan industri berbasis agro dengan indikator menurunnya jumlah pengangguran. Target capaian penurunan hingga 100% dari persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk di awal tahapan pembangunan.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,30%
19.	Tercapainya pemantapan sistem pengembangan dan penyaluran tenaga kerja berkualitas dengan indikator dan target capaian jumlah tenaga kerja terampil terdidik mencapai 100% tenaga pencari kerja, berikut penyaluran tenaga kerja sebesar 100%.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,30%
20.	Tercapainya pemantapan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, diindikasikan dengan tingginya tingkat pendidikan, keterampilan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pemerintahan. Target capaian pemenuhan sarana prasarana pemerintahan mencapai 100% dari kebutuhan.	-	-
21.	Tercapainya kemantapan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi yang mendukung efektivitas kerja pemerintahan, diindikasikan dengan semakin lengkapnya perangkat komunikasi dan informasi. Target capaian kelengkapan perangkat komunikasi informasi untuk seluruh lembaga/kantor milik pemerintah, termasuk kantor desa/pekon.	-	-
22.	Tingginya efektivitas kerja lembaga legislatif, diindikasikan dengan semakin tingginya output kerja legislasi, perencanaan, supervisi, dan pengawasan DPRD. Target capaian minimal 100% prolegda terpenuhi.	-	-
23.	Berkembangnya sektor pariwisata terutama wisata alam hutan, pegunungan dan danau, wisata budaya, dan lanjutan rintisan wisata kuliner, diindikasikan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang semakin bertambah dan nilai investasi yang semakin meningkat. Target capaian jumlah kunjungan wisatawan meningkat paling sedikit rata-rata 100% dari angka pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap 3. Target capaian jumlah investasi memberikan kontribusi peningkatan sebesar minimal 25% dari total investasi di daerah.	-	-
24.	Tercapainya pemantapan efektivitas aplikasi perencanaan tata ruang daerah yang diindikasikan dengan berlakunya Perda tentang RTRW Kabupaten Lampung Barat serta dokumen-dokumen turunannya.	-	-
25.	Mantapnya perkembangan usaha kecil, menengah dan koperasi berbasis agribisnis yang diindikasikan dengan semakin tinggi jumlah dan kualitas UKM dan koperasi, serta jumlah omzet usahanya mencapai peningkatan di atas 100% dari kondisi pada awal RPJPD. Target capaian jumlah UKM dan koperasi berkualitas minimal bertambah sebesar 75% dari periode pembangunan jangka panjang tahap 1.	-	-



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Sasaran pokok, indikator dan target pembangunan pada Tahap Lima Tahun ke-4 RPJPD Lampung Barat	Target RPD Tahun 2026	
26.	Terlaksananya pembangunan infrastruktur wilayah yang diindikasikan dengan kondisi jalan dan jembatan yang mantap 90% di seluruh kecamatan.	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	72,64
27.	Pemantapan fungsi infrastruktur pengairan penunjang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan di wilayah sentra-sentra produksi. Target capaian mencakup 100% wilayah sentra produksi.	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	72,64
28.	Pemantapan pengembangan Kawasan Kebun Raya Liwa sebagai pusat pelestarian keanekaragaman hayati yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya program pengembangan fisik, sosial dan ekonomi. Target capaian bergulirnya alokasi dana penunjang operasional kawasan untuk pengembangan program-program bidang fisik, sosial dan ekonomi.	-	-
29.	Tingginya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pemerintahan, diindikasikan dengan bertambah lengkapnya sarana kerja, gedung dan mobilitas kerja aparatur pemerintah. Target kuantitatif seluruh kebutuhan pengembangan sarana prasarana terpenuhi.	-	-
30.	Terpenuhinya sarana prasarana transportasi air berkualitas di wilayah sungai dan danau diindikasikan dengan semakin berkualitasnya pembangunan dermaga transportasi dan tangkap di seluruh kawasan potensial.	-	-
31.	Berkualitasnya kondisi jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi di sebagian besar wilayah pekon diindikasikan dengan target capaian jangkauan seluruh pekon.	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	72,64
32.	Semakin berkembangnya program pengembangan tenaga panas bumi dengan indikator bertambahnya investasi pembangunan perangkat eksplorasi dan eksploitasi, dan capaian output riil serta perolehan PAD.	-	-
33.	Pemanfaatan perangkat mitigasi bencana yang modern dan berkualitas di seluruh wilayah rawan bencana. Target pemenuhan untuk seluruh wilayah rawan bencana 100%.	Indeks Resiko Bencana	152,380
34.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyusunan produk-produk hukum aplikatif terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan aset-aset daerah, peningkatan ekonomi daerah, pemukiman dan perkotaan, sosial kemasyarakatan, serta lingkungan hidup. Target capaian pada 100% bidang pembangunan.	-	-
35.	Tercapainya pemantapan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang diindikasikan dengan semakin tingginya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan di seluruh pekon.	-	-
36.	Minimnya jumlah kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba, perdagangan anak, penyakit masyarakat dan tindak-tanduk pidana dengan trend penurunan setiap tahun. Target capaian penurunan rata-rata 90% jumlah kejahatan setiap tahun.	-	-
37.	Pemantapan lembaga politik dan kemasyarakatan yang menunjang stabilitas sosial demokrasi. Indikator utama adalah kondisi kehidupan bermasyarakat yang kondusif serta tidak terjadinya konflik-konflik horizontal di seluruh wilayah. Pelaksanaan agenda-agenda pemilu berlangsung kondusif. 100% agenda demokrasi berlangsung dengan baik dan damai.	-	-
38.	Tingginya peran serta lembaga-lembaga adat dan budaya dalam mendorong pembangunan daerah yang aspiratif, diindikasikan dengan semakin efektifnya komunikasi pembangunan yang didukung dengan tindak nyata masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di seluruh wilayah pekon.	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	20



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Sasaran pokok, indikator dan target pembangunan pada Tahap Lima Tahun ke-4 RPJPD Lampung Barat	Target RPD Tahun 2026	
39.	Tingginya efektivitas dan kinerja aparat hukum dalam rangka menunjang kepastian dan penegakan hukum untuk berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan daerah.	-	-
40.	Semakin mantapnya sistem birokrasi yang didukung oleh profesionalisme aparatur yang tinggi serta anti KKN. Target capaian 100% aparatur berkualitas dan profesional.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	60,05
41.	Terciptanya iklim investasi yang mantap sebagai tulang punggung perkembangan ekonomi daerah. Indikator bertambahnya jumlah dan berkembangnya investasi sektor-sektor agroindustri, pariwisata, perdagangan, serta pertambangan dan energi.	-	-
42.	Minimnya jumlah lahan nonproduktif dan tingginya nilai ekonomi lahan. Indikator dan target capaian maksimal 10% lahan nonproduktif tersisa.	-	-
43.	Tingginya kuantitas hasil ekonomi sektor-sektor andalan (pertanian, perdagangan, pariwisata, pertambangan dan energi) yang memberikan kontribusi PAD yang tinggi. Target capaian peningkatan rata-rata PAD minimal 90% dari tahapan pembangunan jangka panjang sebelumnya.	-	-
44.	Terlaksananya pemantapan pengelolaan wilayah Kabupaten Konservasi dengan intensifikasi perolehan PAD yang bersumber dari pemanfaatan kawasan. Indikator dan target sasaran mencakup pelaksanaan kerjasama baik regional, nasional maupun internasional dengan pihak-pihak pemetik manfaat.	-	-





RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

Logical Frame Work (Pohon Kinerja) RPD

Masyarakat Kabupaten Lampung Barat Sejahtera												
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		SDM yang Berkualitas				Infrastruktur yang Berkualitas dan (dengan memperhatikan) Kelestarian Lingkungan Hidup dan aspek kebencanaan				Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan		Lingkungan Sosial yang Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan
Peningkatan Pendapatan Perkapita	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Kualitas Kesehatan	Kualitas Pendidikan	pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Kualitas Pemuda dan Olahraga	Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur	Kualitas Infrastruktur Perhubungan	Kelestarian LH	Kualitas Penanganan dan Pengelolaan Kebencanaan	Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat agamis, berbudaya, aman dan damai
Nilai Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Kualitas Pelayanan fasilitas Kesehatan	Mutu dan Akses Pendidikan Dasar	PP dan PA	Kualitas Pemuda	Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan & Jembatan	Keselamatan dan Pelayanan Perhubungan	Kualitas Udara	Kapasitas Penanggulangan Bencana	Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Kualitas Pelayanan Publik	Penurunan Potensi Konflik
Nilai Produksi Sektor Industri	Kualitas Penanganan dan Pemberdayaan PMKS	Kemandirian Hidup Sehat	Minat Baca dan Literasi	Pengarusutamaan Gender	Kualitas Olahraga Daerah	Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Irigasi		Kualitas Air	Kesadaran Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Bencana	Pengawasan	Kualitas Data Kependudukan	Peningkatan transtib
Koperasi Berkualitas dan UMKM Mandiri	Penanganan daerah rawan pangan			Pemenuhan hak anak & perlindungan khusus		Pengendalian Banjir		Kualitas Tutupan Vegetasi dan RTH		Perencanaan Pembangunan	Kualitas Pelayanan Adminduk	Perlindungan Masyarakat
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan						Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang		Kebersihan Lingkungan		Kapasitas SDM Aparatur	Kualitas Pelayanan Perizinan	Pelestarian Cagar budaya
Pertumbuhan Industri Sektor Pariwisata						Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Dasar Perumahan dan Permukiman		Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca		Pengelolaan Keuangan dan Aset		Kelembagaan Seni Tradisi
Investasi Daerah						Penyelesaian Aset Tanah Negara				DPRD		Pelestarian warisan budaya
Kemandirian Keuangan										Pemerintahan Desa		Kerukunan Antar Umat Beragama
										Komunikasi dan Informasi Publik		
										Pemanfaatan Teknologi Informasi		



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026**

**Cascading RPD dan Renstra Perangkat Daerah**

<b>Tujuan</b>	<b>Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</b>											
<b>Indikator</b>	<b>Laju pertumbuhan ekonomi</b>											
<b>Sasaran</b>	<b>Meningkatnya Pendapatan Perkapita</b>								<b>Menurunnya Tingkat Kemiskinan</b>			
<b>Indikator</b>	pendapatan perkapita								Angka Kemiskinan			
	Gini Rasio								Tingkat Pengangguran Terbuka			
<b>Tujuan OPD</b>	Meningkatnya Nilai Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Nilai Produksi Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan	Meningkatnya Kontribusi Subsektor Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pendapatan Perkapita			Meningkatnya Industri Sektor Pariwisata	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DAERAH	Meningkatnya Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya PMKS Mandiri	Meningkatnya ketahanan pangan
<b>Indikator</b>	Nilai Produksi Tanaman Pangan	Nilai Produksi Perkebunan (*juta rupiah)	Nilai Produksi Perikanan	% Koperasi yang Sehat			Rata-rata Lama Tinggal	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja	% PMKS yang mandiri	Indeks ketahanan pangan
	Nilai Produksi Hortikultura	Nilai Produksi Peternakan (*juta rupiah)		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM			Jumlah Kunjungan Wisatawan					
				PDRB Sektor Perdagangan								
<b>Sasaran OPD</b>	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Perikanan	MENINGKATNYA PDRB SEKTOR PERDAGANGAN	MENINGKATNYA PDRB SEKTOR INDUSTRI	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya penduduk angkatan kerja yang bekerja	Meningkatnya PMKS yang Berdaya	Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan
<b>Indikator</b>	Produksi Tanaman Pangan	Produksi Perkebunan	Persentase peningkatan Produksi Perikanan	PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Industri	% Koperasi yang Sehat	Rata-rata Lama Tinggal	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Persentase Peningkatan PAD	Persentase peningkatan penduduk angkatan kerja yang bekerja	% Peningkatan PMKS yang berdaya	% Daerah Rawan Pangan
	Produksi Hortikultura	Produksi Peternakan				Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	Jumlah Kunjungan Wisatawan					
						% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi						
	Dinas TPH	DISBUNAK	Perikanan	KOPERINDAG	KOPERINDAG	KOPERINDAG	Porawisata	DPMPPTSP		SETDAKAB	DINSOS	Ketahanan Pangan





# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

<b>Tujuan RPD</b>	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat						
Indikator	indeks pembangunan manusia (IPM)						
<b>Sasaran RPD</b>	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing						
Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						
<b>Tujuan Renstra</b>	Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan	Terwujudnya Budaya Gemar Membaca Masyarakat		Terwujudnya pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan Pertumbuhan Pemuda Prestasi	
Indikator	Usia Harapan Hidup	Rata-rata lama sekolah Harapan Lama Sekolah	Indeks Kegemaran Membaca (rujukan : PERATURAN PERPUSNAS NO 7 TAHUN 2020)		Total Fertility Rate IPG IPA	Persentase Peningkatan pemuda yang berprestasi -	
<b>Sasaran OPD</b>	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Meningkatnya Kegamaran Membaca Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Meningkatnya Kepesertaan KB Pada PUS	Meningkatnya pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Pertumbuhan Prestasi Pemuda dan Olahraga
Indikator	Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Persentase Stunting pada Balita (SGI atau EPPGBM?)	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD) Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Sekolah dasar)	Indeks Kegemaran Membaca (rujukan : PERATURAN PERPUSNAS NO 7 TAHUN 2020) Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Presentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persentase Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Jumlah pemuda yang berprestasi Jumlah Atlit yang berprestasi -
OPD	Dinas Kesehatan	DINAS PENDIDIKAN	PERPUSTAKAAN	PERPUSTAKAAN	Dinas PPKBPPPA	Dinas PPKBPPPA	DISPORAPAR





**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026**

Tujuan	<b>Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana</b>										
Indikator	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Resiko Bencana										
Sasaran	<b>Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah</b>					<b>Meningkatnya kesiapsiagaan bencana</b>			<b>Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</b>		
Indikator	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah					Indeks Resiko Bencana			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
Tujuan OPD	<b>Meningkatnya Layanan Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanahan</b>					Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran	<b>Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</b>		
Indikator	Persentase Jalan Mantap	Persentase Luas Layanan Irigasi	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Lahan Yang disertifikasi	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	Indeks Resiko Bencana	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Kondisi yang membahayakan manusia	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
Sasaran OPD	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan
Indikator	Persentase Jalan Mantap	Persentase Luas Layanan Irigasi	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Lahan Yang disertifikasi	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	Persentase kejadian kedaruratan bencana yang tertangani	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan kondisi yang membahayakan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Persentase Jumlah Sampah Tertangani
							Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	Persentase Jumlah Sampah Tekurangi
							Jumlah Desa Tangguh Bencana			Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	
	PUPR					DISHUB	BPBD	SatpolPP	DINAS LH		





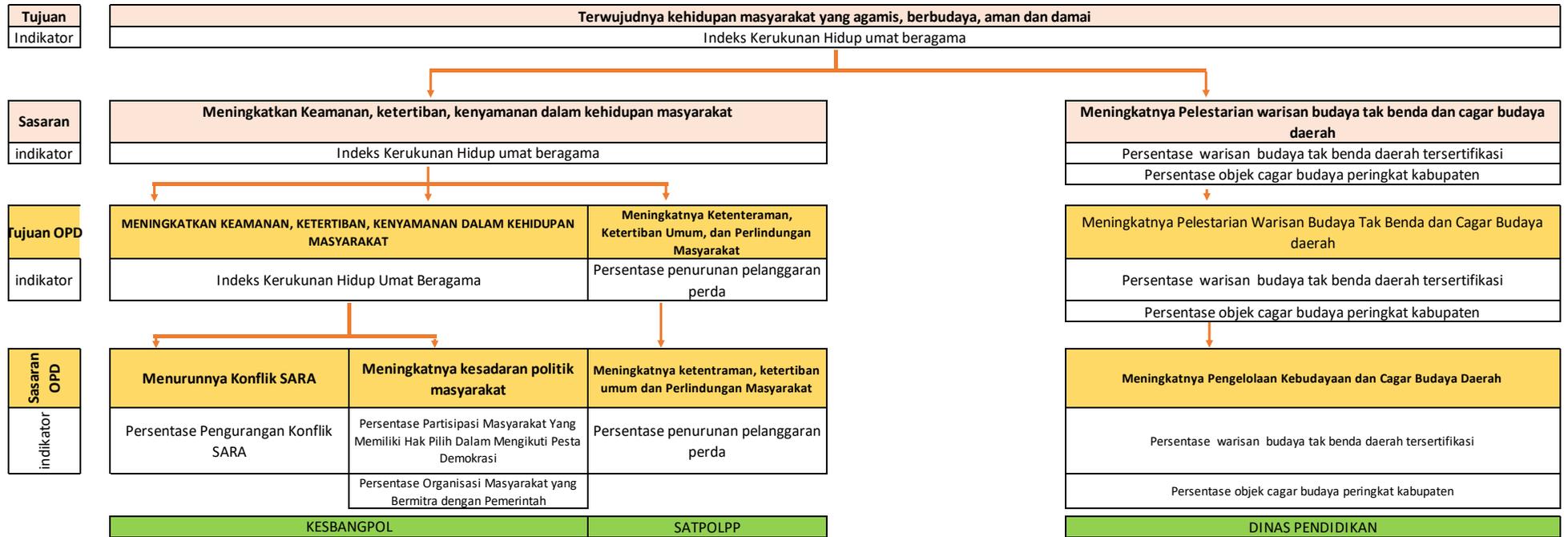
# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

Tujuan RPD	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan											
Indikator	Nilai Reformasi Birokrasi											
Sasaran RPD	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan								Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
Indikator	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)								Indeks Pelayanan Publik			
	Nilai SAKIP								Indeks Pelayanan Publik			
Tujuan OPD	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Terwujudnya Profesionalisme ASN	MENINGKATNYA KUALITAS PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	Terwujudnya dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Desa	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sektor perizinan penanaman modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	
Indikator	Indeks Inovasi Daerah	Level Kapabilitas APIP	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Indeks Profesionalitas Aparatur	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	% Desa Mandiri	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	
		Maturitas SPIP	Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP									
Sasaran OPD	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Publik	Meningkatnya Layanan Pemerintah Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan
Indikator	Persentase pemanfaatan hasil kelibangan	Level Kapabilitas APIP	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Indeks Profesionalitas Aparatur	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	% Desa Mandiri	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase peningkatan stakeholder yang mendapatkan hak akses data
	Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan Inovasi Daerah	Maturitas SPIP	Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Admnduk, Perizinan, Perhubungan, RSUD			
	BALITBANGDA	Inspektorat	Bappeda	BKPSDM	BPKD	Set DPRD	DPMP, Kecamatan	KOMINFO	SETDAKAB	DPMPTSP,	DUKCAPIL	





**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026**





## BAB VI

# STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan ini selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini berfokus pada Kekuatan (Strength), Kelemahaan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan tantangan atau ancaman (threat) secara bersama-sama. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola (manageable, controllable) di Kabupaten Lampung Barat, yang termasuk didalam lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan (Strengt and Weakness). Sedangkan dalam lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan (uncontrollable), yang meliputi peluang dan ancaman (Opportunity dan thereath).

### 6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan

pembangunan daerah (strategy focused management) di mana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (added value) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Untuk mencapai suatu sasaran pembangunan, rumusan strategi diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya strategi yang dipilih akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan dijadikan dasar Prioritas Pembangunan Tahunan.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam

perencanaan pembangunan daerah (strategyfocussed management). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT. Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

### **1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.**

Tujuan ini memiliki makna mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata, dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat disektor pertanian dan perikanan, meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor industri pengolahan, meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor Pariwisata, meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor Perdagangan.

Untuk mewujudkan upaya tersebut, penting untuk dilakukan peningkatan produktifitas sektor pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, peningkatan produktifitas sektor perikanan, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, peningkatan daya saing sektor industri, pengembangan usaha industri kreatif, optimalisasi pengelolaan destinasi

wisata, penumbuhan dan pematapan kemandirian wisata desa, penguatan pemasaran wisata, pengendalian indeks perubahan harga, penguatan fungsi pasar tradisional, peningkatan koperasi dan UMKM yang kompetitif dan pengarusutamaan produk UMKM lokal.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Perkapita dengan indikator sebagai berikut Pendapatan Perkapita dan Rasio Gini dilakukan melalui strategi Peningkatan Produktifitas sektor Pertanian meliputi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan, Peningkatan Produktifitas sektor Perikanan, dan Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Perkapita dengan indikator Pendapatan Perkapita Sektor Industri dapat dilakukan melalui strategi Peningkatan daya saing sektor industri pengolahan, dan Pengembangan usaha industri kreatif.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut disektor pariwisata yaitu Meningkatnya Industri Sektor Pariwisata dengan indikator jumlah Kunjungan Wisatawan dan rata-rata lama tinggal dilakukan melalui strategi Optimalisasi pengelolaan dan infrastruktur objek wisata, Penumbuhan dan pematapan kemandirian wisata desa, dan Penguatan pemasaran wisata.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Perdagangan dengan indikator Nilai PDRB Sektor Perdagangan dilakukan melalui strategi Penguatan fungsi pasar tradisional, Pengendalian indeks perubahan harga, Peningkatan UMKM yang kompetitif, Pengarusutamaan produk UMKM lokal, dan Penumbuhan koperasi berbasis produk UMKM lokal.

## 2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Bagaimana mewujudkan kualitas hidup masyarakat adalah tujuan pembangunan daerah, melalui Meningkatkan Mutu dan Akses Pendidikan Dasar, dan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat serta Meningkatkan Minat Baca dan Literasi, Meningkatkan Kualitas Pemuda, dan Meningkatkan Kualitas Olahraga.

Sehingga penting upaya peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM), peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM), peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan, peningkatan jaminan pelayanan dan kepesertaan keluarga berencana, peningkatan kewirausahaan pemuda, peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi / nasional.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat dengan indikator Rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah dilakukan melalui strategi Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal, dan Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup dilakukan melalui strategi Peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan, dan Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan.

## 3. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana.

Tujuan ini bermakna meningkatkan konektivitas antar wilayah, dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan

permukiman yang mantap, meningkatnya kesesuaian pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang, meningkatnya sistem jaringan/konektivitas perhubungan, dan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan dengan tetap memperhatikan aspek kebencanaan.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah dengan indikator Indeks layanan infrastruktur daerah melalui strategi Peningkatan Infrastruktur wilayah yang mantap dan Percepatan Infrastruktur permukiman yang layak dan Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK).

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dapat dilakukan melalui strategi melalui strategi pemantauan dan pengendalian kualitas air dan kualitas udara serta penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana dilakukan melalui strategi Peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, dan Penanggulangan Bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel.

## 4. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan.

Makna yang terkandung dalam tujuan ini adalah bagaimana mewujudkan aparatur birokrasi yang profesional, dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen kinerja, meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah untuk mendukung prioritas nasional yaitu tata kelola birokrasi efektif dan efisien; dan pemberantasan korupsi.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Publik Berkualitas dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui strategi Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Strategi Penyediaan layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten dapat dilakukan melalui strategi Peningkatan Manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mencapai meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Meningkatnya Kinerja Laporan Keuangan yaitu Opini BPK terhadap LKPD dilakukan melalui strategi Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah dan Peningkatan pendapatan asli daerah.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator indeks Profesionalitas Aparatur Negara dilakukan melalui strategi Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penerapan Sistem Merit.

#### **5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai.**

Tujuan ini mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat, mewujudkan ketertiban

umum, meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, dengan sasaran meningkatnya kerukunan beragama, meningkatnya kerukunan hidup masyarakat, dan meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan. Dalam mencapai tujuan ini, penting dilakukan upaya peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, peningkatan upaya penegakan perda, Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan peningkatan promosi seni budaya.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Keamanan, kertiban, kenyamanan, kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dilakukan melalui strategi Peningkatan pencegahan dan fasilitasi penanganan konflik, Penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, dan Peningkatan upaya penegakan perda.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan dengan indikator Persentase Cagar Budaya (Tangible dan Intangible) dilestarikan dilakukan melalui strategi perlindungan dan pemanfaatan seni budaya, dan peningkatan promosi seni budaya.

Tabel 6.1  
Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan		Sasaran	Strategi
Tujuan 1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Sasaran 1.1 Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Peningkatan Produktifitas sektor Pertanian meliputi tanaman pangan holtikultura, perkebunan dan peternakan,
			Peningkatan Produktifitas sektor Perikanan
			Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.
			Peningkatan daya saing sektor industri pengolahan, dan Pengembangan usaha industri kreatif.
			Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata,
			Penumbuhan dan pematapan kemandirian wisata desa,
			Penguatan fungsi pasar tradisional,
			Pengendalian indeks perubahan harga,
			Peningkatan UMKM yang kompetitif,
			Pengarusutamaan produk UMKM lokal, dan
			Penumbuhan koperasi berbasis produk UMKM lokal dan Penguatan pemasaran wisata.
			Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
			Optimalisasi kontribusi pendapatan yang bersumber dari BUMD
			Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan
Sasaran 1.2	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan,	
		Peningkatan kualitas pelayanan sosial bagi PMKS,	
		Peningkatan kompetensi dan kualifikasi angkatan kerja,	
		Peningkatan investasi untuk perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.	



Tujuan		Sasaran		Strategi
				Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat
				Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan.
				Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan
				Bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi.
				Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya
				Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
				Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan
Tujuan 2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Sasaran 2.1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal, dan Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.
				Peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan, dan Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan
				Peningkatan jaminan pelayanan dan kepesertaan keluarga berencana
				Peningkatan kewirausahaan pemuda
				Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi / nasional
Tujuan 3	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana	Sasaran 3.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Peningkatan Infrastruktur wilayah yang mantap dan Percepatan Infrastruktur pemukiman yang layak
				Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta



Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan
		Meningkatkan akses sanitasi dan air minum
		Meningkatkan kapasitas saluran drainase
		Meningkatkan keselamatan berlalulintas.
		Meningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/wilayah perbatasan kota/kabupaten.
		Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku
		Meningkatkan ketersediaan lahan
	Sasaran 3.2 Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Pemantauan dan pengendalian kualitas air dan kualitas udara
		Pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
		Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK).
		Meningkatkan pengurangan sampah
		Meningkatkan penanganan sampah
		Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
	Sasaran 3.3 Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, dan
		Penanggulangan Bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel.
Tujuan 4 Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal.
		Penyediaan layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
	Sasaran 4.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan Manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Tujuan		Sasaran	Strategi
			Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
			Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.
			Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
			Meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
			Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penerapan Sistem Merit.
			Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa.
			Peningkatan Kualitas Inovasi Daerah dan kualitas Penelitian dan Pengembangan.
			Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
			Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
			Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
Tujuan 5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai	Sasaran 5.1 Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota
			Peningkatan pencegahan dan fasilitasi penanganan konflik.
			Peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama,
			Penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga.
			Peningkatan kesadaran politik masyarakat.
			Peningkatan upaya penegakan perda.
			Peningkatan Pengarusutamaan Gender
			Peningkatan Pemenuhan hak anak-anak dan perlindungan khusus.



Tujuan	Sasaran	Strategi
	Sasaran 5.2 Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan
		Peningkatan promosi seni budaya

## 6.2 Arah Kebijakan

Tabel 6.2  
Arah Kebijakan

SASARAN PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1.1 Sasaran 1.2	Peningkatan Ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (SDA dan SDM) dan kearifan lokal.			
Sasaran 2.1				
Sasaran 3.1 Sasaran 3.2 Sasaran 3.3	Pemantapan infrastruktur, sarana dan prasarana utilitas pada kawasan strategis dan kawasan budidaya			
Sasaran 4.1 Sasaran 4.2	Pemanfaatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan efektifitas tata kelola keuangan daerah			
Sasaran 5.1 Sasaran 5.2	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dan berbudaya			

## 6.3 Program Prioritas

Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2023-2026  
Kabupaten Lampung Barat

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Tujuan 1													
	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas													
	Sasaran 1													
	Meningkatnya Pendapatan Perkapita													
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Koperindag	77,91%	77,92%	3.928.199.900	77,93%	4.288.019.890	77,94%	4.716.821.879	77,95%	5.188.504.067	77,95%	18.121.545.736	Dinas Koperindag
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	30,30%	33,00%	100.000.000	34,00%	110.000.000	35,00%	121.000.000	36,00%	133.100.000	36,00%	464.100.000	Dinas Koperindag
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	0,00%	2,00%	45.000.000	2,00%	49.500.000	2,00%	54.500.000	2,00%	59.895.000	8,00%	208.895.000	Dinas Koperindag
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	6,06%	9,00%	80.000.000	12,00%	88.000.000	15,00%	96.800.000	18,00%	106.480.000	18,00%	371.280.000	Dinas Koperindag
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM terfasilitasi	10,00%	3,00%	602.000.000	6,00%	662.200.000	9,00%	728.420.000	12,00%	801.262.000	12,00%	2.793.882.000	Dinas Koperindag
-	-	Persentase wirausaha pemula	0,45%	0,75%	-	1,00%	-	1,25%	-	1,50%	-	1,50%	-	0
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	11,69%	20,00%	595.000.000	40,00%	654.500.000	60,00%	719.950.000	80,00%	791.945.000	80,00%	2.761.395.000	Dinas Koperindag
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	0,14%	3,00%	550.000.000	3,00%	535.000.000	3,00%	590.000.000	3,00%	625.000.000	3,00%	2.300.000.000	Dinas Koperindag
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	% Alat UTPP tertera sah	11,71%	3,99%	238.500.000	5,07%	270.250.000	6,15%	306.117.000	7,20%	248.235.125	22,46%	1.063.102.125	Dinas Koperindag
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	3,28%	4,40%	360.000.000	5,70%	410.000.000	6,90%	465.000.000	8,10%	530.000.000	25,10%	1.765.000.000	Dinas Koperindag
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	16,02%	4,00%	3.000.000.000	4,00%	3.300.000.000	4,00%	3.630.000.000	4,00%	3.993.000.000	16,00%	13.923.000.000	Dinas Koperindag
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,00%	20,00%	300.000.000	20,00%	65.000.000	20,00%	435.000.000	20,00%	150.000.000	80,00%	950.000.000	DPMPPTSP
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	0,00%	10,00%	1.800.000.000	15,00%	2.080.000.000	20,00%	2.178.000.000	20,00%	2.505.800.000	20,00%	8.563.800.000	DPMPPTSP
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	75,00%	75,00%	345.997.000	85,00%	380.596.700	90,00%	418.656.370	100,00%	460.522.007	100,00%	1.605.772.077	DPMPPTSP

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPTSP	15 Sektor Usaha	100,00%	72.000.000	100,00%	74.000.000	100,00%	76.100.000	100,00%	78.305.000	100,00%	300.405.000	DPMPTSP
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perikanan	79,48%)*	79,78%	3.498.356.000	79,88%	3.891.696.000	79,98%	4.386.579.750	80,00%	4.946.459.438	80,00%	16.723.091.188	Dinas Perikanan
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	16,17%	1 %	577.000.000	2,00%	629.850.000	2,50%	727.835.000	3,00%	830.618.500	8,50%	2.765.303.500	Dinas Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	16,17 %	5 %	847.000.000	7,00%	889.350.000	9,00%	978.285.000	11,00%	1.076.113.500	32,00%	3.790.748.500	Dinas Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	10 %	7,00%	290.000.000	10 %	304.500.000	12,00%	334.950.000	15,00%	368.445.000	44,00%	1.297.895.000	Dinas Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	10 %	7,00%	560.000.000	10 %	588.000.000	12,00%	646.800.000	15,00%	711.480.000	44,00%	2.506.280.000	Dinas Perikanan
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	38,00%	39,00%	1.639.860.000	36,00%	1.879.290.490	34,00%	2.067.219.539	32%	2.273.941.493	32%	7.860.311.522	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi pariwisata yang dipromosikan	100,00%	25,00%	1.801.182.700	50,00%	3.362.228.320	75,00%	3.698.451.152	100,00%	4.068.296.267	100,00%	12.930.158.439	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekraf yang dibina	0,00%	25,00%	250.000.000	50,00%	521.500.000	75,00%	573.650.000	100,00%	631.015.000	100,00%	1.976.165.000	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00%	25,00%	478.750.000	50,00%	247.500.000	75,00%	272.250.000	100,00%	299.475.000	100,00%	1.297.975.000	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH	77,86%)*	77,96%	9.022.984.700	78,06%	9.926.704.800	78,16%	9.836.129.800	78,26%	9.837.509.800	78,26%	38.623.329.100	Dinas TPH
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	1,91%	1,04%	864.376.500	1,30%	1.036.082.500	1,33%	1.036.082.500	1,20%	1.036.082.500	4,87%	3.972.624.000	Dinas TPH
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	18,34%	4,00%	1.107.330.600	4,15%	1.163.785.000	4,30%	1.163.785.000	4,10%	1.163.785.000	16,55%	4.598.685.600	Dinas TPH
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan	203 Ha	100,00%	134.171.000	100,00%	150.000.000	100,00%	150.000.000	100,00%	150.000.000	100,00%	584.171.000	Dinas TPH
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut	337 KT	200 KT	1.521.137.000	200 KT	1.227.651.500	200 KT	1.227.651.500	200 KT	1.227.651.500	800 KT	5.204.091.500	Dinas TPH
		Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	0 KT	8 KT	-	8 KT	-	8 KT	-	8 KT	-	32 KT	-	
		Peningkatan kelas Madya ke Utama	0 KT	2 KT	-	2 KT	-	2 KT	-	2 KT	-	8 KT	-	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan	80,95%)*	81,00%	4.451.812.612	81,05%	4.896.993.873	81,10%	5.386.693.261	81,15%	5.925.362.587	81,15%	20.660.862.332	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	5,00%	5,00%	2.195.086.000	5,00%	2.414.594.600	5,00%	2.656.054.060	5,00%	2.921.659.466	20,00%	10.187.394.126	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	3,00%	3,00%	2.645.000.000	3,00%	2.349.500.000	3,00%	2.574.450.000	3,00%	2.821.895.000	12,00%	10.390.845.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit zoonosis	100,00%	100,00%	1.100.000.000	100,00%	1.210.000.000	100,00%	1.331.000.000	100,00%	1.464.100.000	100,00%	5.105.100.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT	17,60%	17,60%	150.000.000	17,60%	165.000.000	17,60%	181.500.000	17,60%	199.650.000	17,60%	696.150.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani terbina	20,00%	20,00%	800.000.000	20,00%	880.000.000	20,00%	968.000.000	20,00%	1.064.800.000	80,00%	3.712.800.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 105,11% - 100,86%	- 100% - 100%	2.625.216.900	- 100% - 100%	2.715.694.000	- 100% - 100%	2.856.637.100	- 100% - 100%	2.998.673.810	- 100% - 100%	11.196.221.810	BPKD
	Sasaran 2													
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan													
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	78,04%)*	78,75%	3.639.129.900	78,90%	3.764.324.000	78,95%	3.970.784.000	79,20%	4.136.402.000	79,20%	15.510.639.900	Dinas Sosial
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Aktif	11,54%	33,51	415.255.900	33,51	421.255.900	33,51	427.255.900	33,51	379.000.000	5,89%	1.642.767.700	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi	19,55	19,55	3.737.094.500	19,55	3.744.150.000	19,55	3.762.150.000	19,55	3.950.190.000	28,42%	15.193.584.500	Dinas Sosial
-		- Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	13,85	13,23	-	13,23	-	13,23	-	13,23	-	0,00%	-	-
-		- IKM	0,00%	B	-	B	-	B	-	B	-	0,00%	-	-
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid	100,00%	100,00%	1.966.150.800	100,00%	2.068.651.000	100,00%	2.180.951.000	100,00%	2.453.041.000	77,17%	8.668.793.800	Dinas Sosial
		- Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	70,24	70,24	-	70,24	-	70,24	-	70,24	-	0,00%	-	-
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100,00%	100,00%	637.000.000	100,00%	695.000.000	100,00%	757.000.000	100,00%	823.000.000	1x24 Jam	2.912.000.000	Dinas Sosial
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase komponen utama taman makam pahlawan	78,57	78,57	75.645.000	78,57	75.645.000	78,57	75.645.000	78,57	148.000.000	1 Unit	374.935.000	Dinas Sosial
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro yang disusun	0,00%	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	132.000.000	1 Dokumen	145.200.000	1 Dokumen	159.720.000	1 Dokumen	556.920.000	Sekretariat Daerah
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	0,00%	6,00%	476.743.200	10,00%	524.417.520	12,00%	576.859.272	15,00%	634.545.199	15,00%	2.212.565.191	Sekretariat Daerah

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar mendapat pekerjaan	0,00%	5,00%	121.457.500	10,00%	133.603.250	15,00%	146.963.575	20,00%	161.659.933	20,00%	563.684.258	Sekretariat Daerah
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan hubungan industrial	0,00%	5,00%	60.250.000	10,00%	66.275.000	15,00%	72.902.500	20,00%	80.192.750	20,00%	279.620.250	Sekretariat Daerah
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	79,18%)*	80,00%	3.694.500.000	80,00%	3.694.500.000	80,00%	3.694.500.000	80,00%	3.694.500.000	80,00%	14.778.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 02	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein	4000Kkal/ka p/hr dan 95 gr/kap/hr	2400Kkal/ka p/hr dan 69 gr/kap/hr	1.260.000.000	2400Kkal/ka p/hr dan 69 gr/kap/hr	1.260.000.000	2400Kkal/ka p/hr dan 69 gr/kap/hr	1.260.000.000	2400Kkal/ka p/hr dan 69 gr/kap/hr	1.260.000.000	2400Kkal/ka p/hr dan 69 gr/kap/hr	5.040.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	5 pekon	2 Pekon	480.000.000	2 Pekon	480.000.000	2 Pekon	480.000.000	3 Pekon	480.000.000	9 Pekon	1.920.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	83,1 Point	83,1 Point	3.140.000.000	83,60 Point	3.140.000.000	84,1 Point	3.140.000.000	84,6 Point	3.140.000.000	84,6 Point	12.560.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	99,89%	> 80 %	660.000.000	> 80 %	660.000.000	> 80 %	660.000.000	> 80 %	660.000.000	> 80 %	2.640.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Tujuan 2													
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat													
	Sasaran 3													
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing													
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,27%)*	80,28%	205.279.787.960	80,29%	215.287.609.031	80,30%	226.059.588.010	80,31%	237.268.805.509	80,31%	883.895.790.510	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19,37%	19,38%	107.483.762.900	19,56%	101.719.563.250	19,77%	104.759.741.593	20,16%	102.462.697.495	20,16%	416.425.765.237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	103,32%	102,29%	-	102,19%	-	101,17%	-	100,00%	-	100,00%	-	0
		- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	103,66%	102,63%	-	102,52%	-	101,50%	-	100,00%	-	100,00%	-	0
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan	1 Mata Pelajaran	2 Mata Pelajaran	409.021.000	2 Mata Pelajaran	439.021.000	2 Mata Pelajaran	474.021.000	3 Mata Pelajaran	514.021.000	3 Mata Pelajaran	1.836.084.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah sastra Liisan yang terlestarikan	-	2 Sastra	775.000.000	2 Sastra	900.000.000	3 Sastra	1.000.000.000	3 Sastra	1.050.000.000	10 Sastra	3.725.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	81,50	81,70	110.730.211.601	81,80	112.117.881.792	81,90	122.895.220.373	82,00	127.609.204.818	82,00	473.352.518.584	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPA Puskesmas	75,15	77,00	173.676.299.129	78,00	75.633.757.700	80,00	67.469.347.000	82,00	70.396.133.550	82,00	387.175.537.379	Dinas Kesehatan
-		- Persentase Puskesmas terakreditasi madya	93,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-		- Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUITE	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-
-		- Persentase Masyarakat memiliki JKN	61,17	70,00	-	72,00	-	75,00	-	80,00	-	80,00	-	-
-		- Persentase persalinan di fasyankes	94,00	95,00	-	96,00	-	97,00	-	98,00	-	98,00	-	-
-		- Prevalensi Balita Wasting	8,10	7,30	-	7,00	-	6,80	-	6,50	-	6,50	-	-
-		- Persentase capaian 5 pilar STBM	20,00	30,00	-	40,00	-	45,00	-	50,00	-	50,00	-	-
-		- Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular	77,37	78,00	-	80,00	-	82,00	-	85,00	-	85,00	-	-
-		- Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular	76,50	78,00	-	80,00	-	82,00	-	85,00	-	85,00	-	-
-		- Persentase Capaian IDL	94,10	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-
-		- Persentase Puskesmas melaksanakan SIK	0,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-
-		- Akreditasi RSUD AU Utama	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-
-		- Persentase Capaian SPA RSUD AU	56,19	58,00	-	60,00	-	62,00	-	65,00	-	65,00	-	-
-		- Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-
-		- BOR RSUD AU	29,00	40,00	-	45,00	-	50,00	-	60,00	-	60,00	-	-
-		- ALOS RSUD AU	4,00	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	-
-		-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standart	37,50%	60,00%	14.453.607.000	65,00%	14.679.477.000	70,00%	14.804.977.000	75,00%	14.884.977.000	75,00%	58.823.038.000	Dinas Kesehatan
-		- Persentase SDMK RSUD AU yang memenuhi standart	82,92%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	-
-		- Persentase Nakes RSUD AU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	0,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	-
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	75,00%	75,00%	348.000.000	80,00%	365.000.000	85,00%	397.000.000	90,00%	414.000.000	90,00%	1.524.000.000	Dinas Kesehatan
-		- Persentase Pemeriksaan Laik Hygine Sentra Produksi dan Distribusi Makanan dan minuman	0,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	-
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga berPHBS	23,88%	35,00%	2.866.345.000	40,00%	2.867.917.700	45,00%	2.869.647.670	50,00%	2.870.618.000	50,00%	11.474.528.370	Dinas Kesehatan
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79,58%)*	79,60%	3.284.630.750	79,61%	3.346.500.000	79,62%	4.439.700.000	79,63%	3.305.900.000	79,63%	14.376.730.750	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase Peningkatan Anggota Perpustakaan	25,00%	5,00%	2.466.533.780	5,00%	3.550.000.000	5,00%	3.360.000.000	5,00%	3.010.000.000	20,00%	12.386.533.780	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
-		- Presentase Sarana dan Prasarana Perpustakaan sesuai Standar	-	55,00%	-	65,00%	-	70,00%	-	85,00%	-	85,00%	-	-
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	25 Dokumen	5,00%	706.072.000	5,00%	795.000.000	5,00%	795.000.000	5,00%	695.000.000	20,00%	2.991.072.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	25 Dokumen	5 Arsip	280.000.000	5 Arsip	280.000.000	5 Arsip	280.000.000	5 Arsip	280.000.000	20 Arsip	1.120.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	79,02%)*	80,00%	3.985.976.000	80,00%	3.625.356.000	80,00%	3.658.456.000	80,00%	3.628.301.000	80,00%	14.898.089.000	Dinas PPKB PPPA
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% ARG pada APBD	0,00%	3,00%	333.031.000	3,5%	345.000.000	4,00%	355.000.000	4,5%	370.000.000	11,00%	1.403.031.000	Dinas PPKB PPPA
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir	0,00%	2,00%	508.906.500	1,5%	570.797.150	1,00%	627.876.865	0,8%	697.319.772	80,00%	2.404.900.287	Dinas PPKB PPPA
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	% keluarga berkualitas	0,00%	20,00%	454.945.500	30,00%	491.500.000	40,00%	540.650.000	50,00%	592.715.000	20,00%	2.079.810.500	Dinas PPKB PPPA
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	% data gender dan anak yang terupdate	0,00%	60,00%	60.000.000	70,00%	65.000.000	80,00%	70.000.000	90,00%	75.000.000	60,00%	270.000.000	Dinas PPKB PPPA
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terpenuhinya Hak-hak anak	Pratama	madya	565.000.000	madya	621.500.000	Nindya	680.650.000	Nindya	748.715.000	Nindya	2.615.865.000	Dinas PPKB PPPA
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	0,00%	60,00%	621.657.300	62,00%	683.793.330	64,00%	763.773.700	66,00%	840.160.870	66,00%	2.909.385.200	Dinas PPKB PPPA
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	% OPD yang menggunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan	0,00%	21,00%	927.000.000	27,00%	1.012.500.000	33,00%	1.107.500.000	38,00%	1.178.550.000	70,00%	4.225.550.000	Dinas PPKB PPPA
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif ( PA) MKJP	0,00%	25,00%	4.922.000.000	27,00%	5.349.200.000	28,00%	5.457.200.000	31,00%	5.977.920.000	40,00%	21.706.320.000	Dinas PPKB PPPA
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan Keluarga	0,00%	52,52%	2.238.690.380	54,00%	2.462.559.418	55,00%	2.708.815.360	57,00%	2.979.696.896	57,00%	10.389.762.054	Dinas PPKB PPPA
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	66,70 poin	67,02 poin	5.527.910.310	67,09 POIN	6.051.244.991	68,03 POIN	6.656.369.490	68,09 POIN	7.322.006.439	68,09 POIN	25.557.531.230	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Jumlah Pemuda berprestasi	160 orang	0	1.327.624.600	'0,19%	1.688.786.209	0,21%	1.857.664.830	0,24%	2.043.431.313	0,24%	6.917.506.952	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase jmlh Atlit berprestasi	2	3,14%	2.472.443.500	'3,04%	2.962.251.160	3,80%	3.258.476.276	'4,4%	3.584.323.904	'4,4%	12.277.494.840	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	Tujuan 3													
	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana													
	Sasaran 4													
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah													
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PU PR	79,69%)*	83,05%	7.966.009.650	83,25%	8.610.463.615	83,50%	9.320.109.977	83,75%	10.100.620.974	83,75%	35.997.204.216	Dinas PU PR
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	56,34%	0,92%	41.947.067.100	0,92%	41.917.067.100	0,92%	41.887.067.100	0,92%	41.887.067.100	3,66%	167.638.268.400	Dinas PU PR

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	87,00%	0,75%	3.600.000.000	0,75%	3.100.000.000	0,75%	3.100.000.000	0,75%	3.100.000.000	3,00%	12.900.000.000	Dinas PU PR
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah	92,94%	1,68%	6.000.000.000	1,68%	6.000.000.000	1,68%	6.000.000.000	1,68%	6.000.000.000	6,72%	24.000.000.000	Dinas PU PR
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Saluraan Drainase kondisi baik	0,00%	25,00%	2.100.000.000	50,00%	2.100.000.000	75,00%	2.100.000.000	100,00%	2.100.000.000	100,00%	8.400.000.000	Dinas PU PR
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00%	21,05%	18.511.000.000	45,61%	21.511.000.000	71,93%	23.011.000.000	100,00%	24.438.000.000	100,00%	87.471.000.000	Dinas PU PR
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	0,00%	25,00%	6.400.000.000	50,00%	6.400.000.000	100,00%	6.400.000.000	100,00%	6.400.000.000	100,00%	25.600.000.000	Dinas PU PR
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	62,00%	1,45%	64.633.833.880	1,45%	67.862.000.000	1,45%	71.252.000.000	1,45%	74.809.800.000	5,80%	278.557.633.880	Dinas PU PR
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	0,00%	100,00%	150.000.000	100,00%	150.000.000	100,00%	150.000.000	100,00%	150.000.000	100,00%	600.000.000	Dinas PU PR
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	0,00%	100,00%	575.000.000	100,00%	375.000.000	100,00%	125.000.000	100,00%	125.000.000	100,00%	1.200.000.000	Dinas PU PR
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	100,00%	25,00%	558.000.000	50,00%	565.900.000	75,00%	574.195.000	100,00%	582.904.750	100,00%	2.280.999.750	Dinas PU PR
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	98,57%	0,05%	4.600.000.000	0,55%	4.600.000.000	0,25%	4.600.000.000	0,25%	4.600.000.000	1,10%	18.400.000.000	Dinas PU PR
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kasus yang Tertangani	100,00%	100,00%	120.000.000	100,00%	90.000.000	100,00%	110.000.000	100,00%	110.000.000	100,00%	430.000.000	Dinas PU PR
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	100,00%	100,00%	700.000.000	100,00%	700.000.000	100,00%	700.000.000	100,00%	700.000.000	100,00%	2.800.000.000	Dinas PU PR
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Survei dan pemetaan Tanah kabupaten	100,00%	100,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	200.000.000	Dinas PU PR
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	100,00%	100,00%	1.130.000.000	100,00%	950.000.000	100,00%	900.000.000	100,00%	900.000.000	100,00%	3.880.000.000	Dinas PU PR
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	79,08%)*	79,87%	3.737.699.622	80,66%	4.215.515.684	81,45%	4.662.686.352	82,24%	5.060.093.888	82,24%	17.675.995.546	Dinas Perhubungan
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	7,00%	11,00%	716.179.979	12,00%	2.264.089.704	13,00%	1.861.571.262	15,00%	2.010.301.378	15,00%	6.852.142.323	Dinas Perhubungan
		- Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan	0,00%	3,00%	-	3,00%	-	3,00%	-	3,00%	-	3,00%	-	
		- Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	0,00%	95,00%	-	96,00%	-	98,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	
2 15 03	PENGLOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Dermaqa Sesuai Standar	0,00%	5,00%	13.113.000	10,00%	515.000.000	15,00%	26.311.300	20,00%	127.811.300	20,00%	682.235.600	Dinas Perhubungan

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Sasaran 5													
	Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup													
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	81,94%*	81,96%	15.453.140.200	81,97%	16.225.797.210	81,98%	17.037.087.071	81,99%	18.109.441.424	81,99%	66.825.465.905	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	100,00%	100,00%	1.450.000.000	100,00%	2.022.500.000	100,00%	1.102.500.000	100,00%	1.157.625.000	100,00%	5.732.625.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	60,00 Point	58,54 Point	1.480.000.000	58,64 Point	1.554.000.000	58,74 Point	1.631.700.000	58,84 Point	1.713.285.000	58,84 Point	6.378.985.000	Dinas Lingkungan Hidup
0	0	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,73 Point	84,04 Point	-	84,14 Point	-	84,24 Point	-	84,34 Point	-	84,34 Point	-	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	41,63 Point	45,38 Point	13.800.000.000	47,86 Point	14.490.000.000	50,34 Point	15.214.500.000	52,82 Point	15.975.225.000	52,82 Point	59.479.725.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	20,00%	20,00%	400.000.000	25,00%	420.000.000	30,00%	441.000.000	35,00%	463.050.000	35,00%	1.724.050.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang Izin Lingkungan	80,00%	80,00%	650.000.000	80,00%	682.500.000	80,00%	716.625.000	80,00%	752.456.250	80,00%	2.801.581.250	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	0,00%	1,00%	400.000.000	1,00%	420.000.000	2,00%	741.000.000	2,00%	778.050.000	2,00%	2.339.050.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100,00%	100,00%	700.000.000	100,00%	735.000.000	100,00%	771.750.000	100,00%	810.337.500	100,00%	3.017.087.500	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan	10 %	10 %	400.000.000	10 %	420.000.000	10 %	441.000.000	10 %	463.050.000	10 %	1.724.050.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun	43.939,92 Ton/Tahun	45.473,62 Ton/Tahun	15.000.000.000	45.746 Ton/Tahun	15.750.000.000	46.007,22 Ton/Tahun	16.537.500.000	46.467,29 Ton/Tahun	17.364.375.000	46.467,29 Ton/Tahun	64.651.875.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Sasaran 6													
	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana													
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPBD	81,45%*	82,00%	2.952.579.700	82,00%	3.103.097.370	82,00%	3.424.666.807	82,00%	3.614.393.188	82,00%	13.094.737.065	BPBD
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa tangguh dan persentase kejadian bencana ditangani	22,05% dan 100%	24,26% dan 100%	3.464.545.200	26,47% dan 100%	4.643.699.720	28,68% dan 100%	3.963.769.692	30,88% dan 100%	4.217.346.661	30,88% dan 100%	16.289.361.273	BPBD

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100,00%	100,00%	6.365.000.000	100,00%	6.710.000.000	100,00%	6.910.000.000	100,00%	7.165.000.000	100,00%	27.150.000.000	Satpol PP dan Damkar
	Tujuan 4													
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan													
	Sasaran 7													
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan													
5 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Balitbang	79,18%)*	79,25%	2.491.806.400	79,50%	2.458.567.500	79,75%	2.545.787.500	80,00%	2.509.287.500	80,00%	10.005.448.900	Balitbang
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	24 laporan	22 laporan	1.585.903.000	24 lapooran	1.680.493.300	24 lapooran	1.758.493.300	24 lapooran	1.836.993.300	94 laporan	6.861.882.900	Balitbang
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	78,67%)*	82,00%	6.828.374.200	82,50%	7.591.211.620	83,00%	8.350.332.782	83,50%	9.185.366.060	83,50%	31.955.284.662	Inspektorat Daerah
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	75,00%	83,00%	2.835.791.000	84,00%	3.119.370.100	85,00%	3.431.307.110	86,00%	3.774.437.821	86,00%	13.160.906.031	Inspektorat Daerah
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target bobot penilaian akuntabilitas kinerja dengan nilai A	82,75%	86,20%	377.590.000	93,10%	415.349.000	96,55%	456.883.900	100,00%	502.572.290	100,00%	1.752.395.190	Inspektorat Daerah
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,29%)*	82,79%	3.638.246.754	83,04%	4.002.071.429	83,29%	4.381.868.413	83,54%	4.820.055.254	83,54%	16.842.241.851	Bappeda
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD yang mencapai target kinerja	70,00%	70,00%	4.358.291.570	80,00%	4.233.856.827	90,00%	4.686.742.509	100,00%	4.476.416.761	100,00%	17.755.307.667	Bappeda
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	80,00%	85,00%	3.458.635.150	90,00%	3.607.933.535	95,00%	3.768.721.286	100,00%	3.945.593.484	100,00%	14.780.883.455	Bappeda
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM	78,67%)*	78,75%	2.560.847.900	78,77%	2.925.384.815	78,78%	3.195.502.596	78,80%	3.492.626.976	78,80%	12.174.362.287	BKPSDM
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	0,00%	60,00%	702.632.000	63,00%	1.377.141.000	65,00%	1.514.850.000	67,00%	1.666.329.000	67,00%	5.260.952.000	BKPSDM
		Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	0,00%	49,00%	1.456.519.982	51,00%	2.333.034.000	54,00%	2.566.335.000	56,00%	2.822.966.000	56,00%	9.178.854.982	BKPSDM

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	82,11%)*	83,25%	27.500.125.500	83,50%	27.648.688.000	83,75%	28.078.688.000	84,00%	28.513.688.000	82,19%	111.741.189.500	BPKD
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran - Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran - Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat - Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat - Persentase manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien - Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	189.968.220.512	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	192.990.981.000	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	196.258.063.000	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	199.563.498.000	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	778.780.762.512	BPKD
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100,00%	100,00%	2.382.763.000	100,00%	2.621.039.300	100,00%	2.883.143.230	100,00%	3.171.457.553	100,00%	11.058.403.083	BPKD
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	79,13%)*	80,00	25.445.481.370	80,50	30.743.250.000	80,75	28.480.500.000	81,00	29.826.092.600	81,00	114.495.323.970	Sekretariat DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	108,00%	100,00%	23.630.630.500	100,00%	26.670.562.500	100,00%	28.148.400.000	100,00%	30.771.316.250	100,00%	109.220.909.250	Sekretariat DPRD
		- Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	100,00%	100,00%	2.730.000.000	100,00%	3.067.951.000	100,00%	3.309.700.000	100,00%	3.567.792.000	100,00%	12.675.443.000	0
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PMP	78,97%)*	80,00%	4.046.594.260	80,00%	5.455.534.435	80,00%	5.455.534.435	80,00%	6.273.864.602	80,00%	21.231.527.732	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi Syarat penataan desa yang di tata	100,00%	100,00%	330.628.500	100,00%	380.222.775	100,00%	437.256.191	100,00%	502.844.620	100,00%	1.650.952.086	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Antar Pekon untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat	2,29%	2,29%	90.819.000	2,29%	104.441.850	2,29%	120.108.128	2,29%	138.124.347	2,29%	453.493.324	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon Tertib Administrasi	100,00%	100,00%	2.846.613.850	100,00%	3.273.605.928	100,00%	3.764.646.817	100,00%	4.329.343.839	100,00%	14.214.210.433	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	131 Pekon	131 Pekon	1.484.554.300	131 Pekon	1.707.237.445	131 Pekon	1.963.323.062	131 Pekon	2.257.821.521	131 Pekon	7.412.936.328	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya	-	75,00%	856.947.800	76,00%	856.947.800	77,00%	856.947.800	78,00%	856.947.800	78,00%	3.427.791.200	Kecamatan Sumberjaya
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	84.061.000	100,00%	84.061.000	100,00%	84.061.500	100,00%	84.061.500	100,00%	336.245.000	Kecamatan Sumberjaya

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0,00%	1 pekon mandiri	445.923.930	2 pekon mandiri	445.923.930	3 pekon mandiri	445.923.930	3 pekon mandiri	445.923.930	3 pekon mandiri	1.783.695.720	Kecamatan Sumberjaya
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0,00%	100,00%	77.186.000	100,00%	77.186.000	100,00%	77.186.000	100,00%	77.186.000	100,00%	308.744.000	Kecamatan Sumberjaya
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	37.350.600	100,00%	37.350.600	100,00%	37.350.600	100,00%	37.350.600	100,00%	149.402.400	Kecamatan Sumberjaya
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0,00%	100,00%	94.256.000	100,00%	94.256.000	100,00%	94.256.000	100,00%	94.256.000	100,00%	377.024.000	Kecamatan Sumberjaya
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Way Tenong	-	75,00%	947.446.300	76,00%	947.446.300	77,00%	947.446.300	78,00%	947.446.300	78,00%	3.789.785.200	Kec Way Tenong
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	Kec Way Tenong
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0,00%	1 pekon mandiri	427.166.200	1 pekon mandiri	427.166.200	1 pekon mandiri	427.166.200	1 pekon mandiri	427.166.200	4 pekon mandiri	1.708.664.800	Kec Way Tenong
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0,00%	25,00%	61.220.000	25,00%	61.220.000	25,00%	61.220.000	25,00%	61.220.000	100,00%	244.880.000	Kec Way Tenong
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	Kec Way Tenong
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0,00%	100,00%	7.610.000	100,00%	7.610.000	100,00%	7.610.000	100,00%	7.610.000	100,00%	30.440.000	Kec Way Tenong
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sekincau	-	75,00%	1.015.041.100	76,00%	1.015.041.100	77,00%	1.015.041.100	78,00%	1.015.041.100	78,00%	4.060.164.400	Kec Sekincau
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	86.040.000	100,00%	86.040.000	100,00%	86.040.000	100,00%	86.040.000	100,00%	344.160.000	Kec Sekincau
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	4 pekon mandiri	4 pekon mandiri	591.194.390	4 pekon mandiri	591.194.390	4 pekon mandiri	591.194.390	4 pekon mandiri	591.194.390	4 pekon mandiri	2.364.777.560	Kec Sekincau
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0,00%	100,00%	60.237.000	100,00%	60.237.000	100,00%	60.237.000	100,00%	60.237.000	100,00%	240.948.000	Kec Sekincau
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	60.237.000	100,00%	60.237.000	100,00%	60.237.000	100,00%	60.237.000	100,00%	240.948.000	Kec Sekincau
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0,00%	100,00%	101.382.900	100,00%	101.382.900	100,00%	101.382.900	100,00%	101.382.900	100,00%	405.531.600	Kec Sekincau

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Belalau	-	75,00%	595.152.100	76,00%	595.152.100	77,00%	595.152.100	78,00%	595.152.100	78,00%	2.380.608.400	Kec Belalau
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	27.220.900	100,00%	27.220.900	100,00%	27.220.900	100,00%	27.220.900	100,00%	108.883.600	Kec Belalau
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0,00%	1 pekon mandiri	29.979.800	1 pekon mandiri	29.979.800	1 pekon mandiri	29.979.800	1 pekon mandiri	29.979.800	4 pekon mandiri	119.919.200	Kec Belalau
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0,00%	25,00%	30.206.800	25,00%	30.206.800	25,00%	30.206.800	25,00%	30.206.800	100,00%	120.827.200	Kec Belalau
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	25.065.600	100,00%	25.065.600	100,00%	25.065.600	100,00%	25.065.600	100,00%	100.262.400	Kec Belalau
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0,00%	100,00%	29.849.800	100,00%	29.849.800	100,00%	29.849.800	100,00%	29.849.800	100,00%	119.399.200	Kec Belalau
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Brak	-	75,00%	683.350.000	76,00%	743.500.000	77,00%	796.000.000	78,00%	835.750.000	78,00%	3.058.600.000	Kec Batu Brak
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	30.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	37.500.000	100,00%	157.500.000	Kec Batu Brak
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0,00%	12 pekon mandiri	60.000.000	12 pekon mandiri	90.000.000	12 pekon mandiri	120.000.000	12 pekon mandiri	150.000.000	12 pekon mandiri	420.000.000	Kec Batu Brak
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0,00%	25,00%	30.000.000	25,00%	45.000.000	25,00%	60.000.000	25,00%	75.000.000	100,00%	210.000.000	Kec Batu Brak
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	15.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	25.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	90.000.000	Kec Batu Brak
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0,00%	100,00%	110.000.000	100,00%	166.000.000	100,00%	205.000.000	100,00%	244.000.000	100,00%	725.000.000	Kec Batu Brak
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Balik Bukit	-	75,00%	1.309.865.040	76,00%	1.356.565.040	77,00%	1.405.565.040	78,00%	1.463.565.040	78,00%	5.535.560.160	Kec Balik Bukit
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	43.300.000	100,00%	46.300.000	100,00%	49.300.000	100,00%	55.300.000	100,00%	194.200.000	Kec Balik Bukit
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0,00%	1 pekon mandiri	821.239.960	1 pekon mandiri	874.239.960	1 pekon mandiri	928.239.960	1 pekon mandiri	1.001.239.960	4 pekon mandiri	3.624.959.840	Kec Balik Bukit
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0,00%	25,00%	25.000.000	25,00%	28.000.000	25,00%	30.000.000	25,00%	34.000.000	100,00%	117.000.000	Kec Balik Bukit
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	20.000.000	100,00%	22.000.000	100,00%	24.000.000	100,00%	26.000.000	100,00%	92.000.000	Kec Balik Bukit

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0,00%	100,00%	55.000.000	100,00%	60.000.000	100,00%	63.000.000	100,00%	70.000.000	100,00%	248.000.000	Kec Balik Bukit
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sukau	-	75,00%	777.313.850	76,00%	893.910.928	77,00%	1.027.997.567	78,00%	1.182.197.202	78,00%	3.881.419.546	Kec Sukau
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	98,90%	100,00%	34.500.000	100,00%	39.675.000	100,00%	45.626.250	100,00%	52.470.188	100,00%	172.271.438	Kec Sukau
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	10 Pekon	10 Pekon	40.250.000	10 Pekon	46.287.500	10 Pekon	53.230.625	10 Pekon	61.215.219	10 Pekon	200.983.344	Kec Sukau
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0,00%	25,00%	40.250.000	25,00%	46.287.500	25,00%	53.230.625	25,00%	61.215.219	100,00%	200.983.344	Kec Sukau
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	99,20%	100,00%	34.500.000	100,00%	39.675.000	100,00%	45.626.250	100,00%	52.470.188	100,00%	172.271.438	Kec Sukau
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	99,90%	100,00%	69.000.000	100,00%	79.350.000	100,00%	91.252.500	100,00%	104.940.375	100,00%	344.542.875	Kec Sukau
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Suoh	-	75,00%	543.500.000	76,00%	591.960.000	77,00%	641.460.000	78,00%	679.960.000	78,00%	2.456.880.000	Kecamatan Suoh
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0,00%	25,00%	19.230.000	25,00%	20.000.000	25,00%	20.000.000	25,00%	30.000.000	100,00%	89.230.000	Kecamatan Suoh
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0,00%	7 pekon mandiri	27.110.000	7 pekon mandiri	30.000.000	7 pekon mandiri	30.000.000	7 pekon mandiri	40.000.000	7 pekon mandiri	127.110.000	Kecamatan Suoh
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0,00%	100,00%	-	100,00%	25.000.000	100,00%	35.000.000	100,00%	35.000.000	100,00%	95.000.000	Kecamatan Suoh
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	18.190.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	108.190.000	Kecamatan Suoh
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0,00%	100,00%	56.260.000	100,00%	65.000.000	100,00%	65.000.000	100,00%	65.000.000	100,00%	251.260.000	Kecamatan Suoh
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Gedung Surian	-	75,00%	556.512.755	76,00%	612.164.031	77,00%	673.380.434	78,00%	740.718.477	78,00%	2.582.775.696	Kec Gedung Surian
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	24.608.375	100,00%	27.069.213	100,00%	29.776.134	100,00%	32.753.747	100,00%	114.207.468	Kec Gedung Surian
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0,00%	1 pekon mandiri	44.193.314	2 pekon mandiri	48.612.645	3 pekon mandiri	53.473.910	3 pekon mandiri	58.821.301	3 pekon mandiri	205.101.170	Kec Gedung Surian

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0,00%	100,00%	31.924.640	100,00%	35.117.104	100,00%	38.628.814	100,00%	42.491.696	100,00%	148.162.254	Kec Gedung Surian
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	7.785.140	100,00%	8.563.654	100,00%	9.420.019	100,00%	10.362.021	100,00%	36.130.835	Kec Gedung Surian
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0,00%	100,00%	57.041.820	100,00%	62.746.002	100,00%	69.020.602	100,00%	75.922.662	100,00%	264.731.087	Kec Gedung Surian
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Kebun Tebu	-	75,00%	608.092.500	76,00%	608.092.500	77,00%	608.092.500	78,00%	608.092.500	78,00%	2.432.370.000	Kec Kebun Tebu
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	19.671.000	100,00%	19.671.000	100,00%	19.671.000	100,00%	19.671.000	100,00%	78.684.000	Kec Kebun Tebu
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0,00%	1 pekon mandiri	40.998.000	1 pekon mandiri	40.998.000	1 pekon mandiri	40.998.000	1 pekon mandiri	40.998.000	4 pekon mandiri	163.992.000	Kec Kebun Tebu
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0,00%	25,00%	39.649.000	25,00%	39.649.000	25,00%	39.649.000	25,00%	39.649.000	100,00%	158.596.000	Kec Kebun Tebu
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	29.302.000	100,00%	29.302.000	100,00%	29.302.000	100,00%	29.302.000	100,00%	117.208.000	Kec Kebun Tebu
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0,00%	100,00%	26.044.000	100,00%	26.044.000	100,00%	26.044.000	100,00%	26.044.000	100,00%	104.176.000	Kec Kebun Tebu
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Air Hitam	-	75,00%	660.292.500	76,00%	660.292.500	77,00%	660.292.500	78,00%	660.292.500	78,00%	2.641.170.000	Kec Air Hitam
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	Kec Air Hitam
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	Kec Air Hitam
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0,00%	25,00%	54.755.000	25,00%	54.755.000	25,00%	54.755.000	25,00%	54.755.000	100,00%	219.020.000	Kec Air Hitam
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	Kec Air Hitam
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0,00%	100,00%	46.042.600	100,00%	46.042.600	100,00%	46.042.600	100,00%	46.042.600	100,00%	184.170.400	Kec Air Hitam
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Pagar Dewa	-	75,00%	528.064.500	76,00%	528.064.500	77,00%	528.064.500	78,00%	528.064.500	78,00%	2.112.258.000	Kec Pagar Dewa

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	Kec Pagar Dewa
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0,00%	1 pekon mandiri	5.475.000	1 pekon mandiri	5.475.000	1 pekon mandiri	5.475.000	1 pekon mandiri	5.475.000	4 pekon mandiri	21.900.000	Kec Pagar Dewa
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0,00%	25,00%	68.600.000	25,00%	68.600.000	25,00%	68.600.000	25,00%	68.600.000	100,00%	274.400.000	Kec Pagar Dewa
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	Kec Pagar Dewa
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0,00%	100,00%	54.235.500	100,00%	54.235.500	100,00%	54.235.500	100,00%	54.235.500	100,00%	216.942.000	Kec Pagar Dewa
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Ketulis	-	75,00%	513.288.900	76,00%	513.288.900	77,00%	513.288.900	78,00%	513.288.900	78,00%	2.053.155.600	Kec Batu Ketulis
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	80.000.000	Kec Batu Ketulis
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0,00%	1 pekon mandiri	30.000.000	1 pekon mandiri	30.000.000	1 pekon mandiri	30.000.000	1 pekon mandiri	30.000.000	4 pekon mandiri	120.000.000	Kec Batu Ketulis
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0,00%	25,00%	24.930.000	25,00%	24.930.000	25,00%	24.930.000	25,00%	24.930.000	100,00%	99.720.000	Kec Batu Ketulis
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	80.000.000	Kec Batu Ketulis
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0,00%	100,00%	43.156.100	100,00%	43.156.100	100,00%	43.156.100	100,00%	43.156.100	100,00%	172.624.400	Kec Batu Ketulis
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec BNS	-	75,00%	581.250.000	76,00%	609.350.000	77,00%	637.950.000	78,00%	671.550.000	78,00%	2.500.100.000	Kec BNS
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	17.500.000	100,00%	19.500.000	100,00%	21.500.000	100,00%	22.500.000	100,00%	81.000.000	Kec BNS
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	0,00%	1 pekon mandiri	15.000.000	1 pekon mandiri	16.000.000	1 pekon mandiri	17.000.000	1 pekon mandiri	18.000.000	4 pekon mandiri	66.000.000	Kec BNS
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0,00%	25,00%	30.075.000	25,00%	32.075.000	25,00%	34.075.000	25,00%	34.075.000	100,00%	130.300.000	Kec BNS
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	10.000.000	100,00%	11.000.000	100,00%	12.000.000	100,00%	13.000.000	100,00%	46.000.000	Kec BNS
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0,00%	100,00%	28.175.000	100,00%	30.175.000	100,00%	32.175.000	100,00%	34.175.000	100,00%	124.700.000	Kec BNS

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Lumbok Seminung	-	75,00%	733.934.000	76,00%	753.934.000	77,00%	789.000.000	78,00%	809.000.000	78,00%	3.085.868.000	Kec Lumbok Seminung
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	38.521.500	100,00%	38.521.500	100,00%	38.521.500	100,00%	38.521.500	100,00%	154.086.000	Kec Lumbok Seminung
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pekon mandiri	5 Pekon	5 Pekon	15.000.000	2 Pekon	12.775.000	2 Pekon	12.775.000	2 Pekon	12.775.000	11 Pekon	53.325.000	Kec Lumbok Seminung
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25,00%	25,00%	25.500.000	25,00%	22.234.000	25,00%	22.234.000	25,00%	22.234.000	100,00%	92.202.000	Kec Lumbok Seminung
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	30.000.000	100,00%	35.750.000	100,00%	30.970.000	100,00%	35.000.000	100,00%	131.720.000	Kec Lumbok Seminung
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100,00%	1	55.000.000	100,00%	55.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000	100,00%	210.000.000	Kec Lumbok Seminung
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo	80,93%)*	81,18%	2.935.345.500	81,43%	2.935.345.500	81,43%	2.935.345.500	81,43%	2.935.345.500	81,43%	11.741.382.000	Dinas Kominfo
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	100%	60 Poin	5.885.897.755	65 poin	6.474.487.531	70 poin	7.121.936.284	70 poin	7.834.129.912	70 poin	27.316.451.481	Dinas Kominfo
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE	8 OPD	20,00%	2.519.704.876	40,00%	2.771.675.364	50,00%	3.176.307.181	60,00%	3.393.937.900	60,00%	11.861.625.321	Dinas Kominfo
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan	3 Data	36,00%	131.046.000	71,00%	155.000.000	85,00%	175.000.000	100,00%	185.000.000	100,00%	646.046.000	Dinas Kominfo
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan	5 Model	100,00%	590.315.275	100,00%	630.000.000	100,00%	665.000.000	100,00%	705.000.000	100,00%	2.590.315.275	Dinas Kominfo
	Sasaran 8													
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik													
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	82,00%)*	82,15%	4.296.881.000	82,20%	4.726.569.100	82,25%	5.199.226.010	82,30%	5.719.148.611	82,30%	19.941.824.721	Dinas Dukcapil
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	-	89,65%	2.045.799.500	89,95,00%	2.250.379.450	90,20%	2.475.417.395	90,70	2.722.959.135	90,70	9.494.555.480	Dinas Dukcapil
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	0,00%	0,97	538.023.000	0,98	591.825.300	0,99	651.007.830	1,00	716.108.613	1,00	2.496.964.743	Dinas Dukcapil
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	0,00%	40,00%	737.787.000	60,00%	811.565.700	80,00%	892.722.270	100%	981.994.497	100,00%	3.424.069.467	Dinas Dukcapil
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase profil kependudukan Kabupaten Lampung Barat	100,00%	100,00%	65.000.000	100,00%	71.500.000	100,00%	78.650.000	100,00%	86.515.000	100,00%	301.665.000	Dinas Dukcapil

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP	78,73%)*	78,80%	3.970.177.730	79,00%	4.133.614.007	79,50%	7.120.432.784	80,00%	7.319.730.713	80,00%	22.543.955.234	DPMPTSP
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	85,00%	100,00%	584.605.000	100,00%	533.066.400	100,00%	529.019.950	100,00%	637.259.240	100,00%	2.283.950.590	DPMPTSP
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	0,00%	78,74%	97.796.312.328	78,76%	97.849.929.449	78,78%	107.312.477.283	78,80%	107.239.436.299	78,80%	410.198.155.359	Sekretariat Daerah
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	17.674.505.300	100,00%	19.441.955.830	100,00%	21.386.151.413	100,00%	23.524.766.554	100,00%	82.027.379.097	Sekretariat Daerah
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	0,00%	3 Kebijakan	2.854.074.900	3 Kebijakan	3.139.483.010	3 Kebijakan	3.453.431.791	3 Kebijakan	3.798.775.850	3 Kebijakan	13.245.765.551	Sekretariat Daerah
	Tujuan 5													
	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai													
	Sasaran 9													
	Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat													
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar	79,60%)*	79,85%	13.179.000.000	80,00%	13.479.000.000	80,10%	14.179.000.000	80,20%	14.479.000.000	80,20%	55.316.000.000	Satpol PP dan Damkar
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	100,00%	100,00%	5.387.000.000	100,00%	5.440.000.000	100,00%	4.393.000.000	100,00%	4.442.000.000	100,00%	19.662.000.000	Satpol PP dan Damkar
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	75,24%)*	75,85%	2.568.652.000	76,05%	2.829.517.200	76,25%	3.115.968.920	76,45%	3.445.565.812	76,45%	11.959.703.932	Badan Kesbangpol
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	75,00%	80,00%	583.600.000	85,00%	641.960.000	90,00%	707.816.000	95,00%	781.897.600	95,00%	2.715.273.600	Badan Kesbangpol
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	68,00%	69,00%	1.514.708.000	70,00%	2.105.634.000	71,00%	1.738.212.500	72,00%	1.912.033.750	72,00%	7.270.588.250	Badan Kesbangpol
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	50,00%	55,00%	545.000.000	60,00%	599.500.000	65,00%	659.450.000	70,00%	725.395.000	70,00%	2.529.345.000	Badan Kesbangpol
75	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	70,00%	71,00%	1.545.000.000	72,00%	1.524.500.000	73,00%	1.566.950.000	74,00%	1.723.645.000	74,00%	6.360.095.000	Badan Kesbangpol

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja tujuan/impact/outcome	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	75,00%	100,00%	1.500.000.000	100,00%	1.650.000.000	100,00%	1.815.000.000	100,00%	1.996.500.000	100,00%	6.961.500.000	Badan Kesbangpol
	Sasaran 10													
	Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah													
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Dan ditetapkan sebagai WBTB	11 WBTB	12 WBTB	2.975.000.000	14 WBTB	3.400.000.000	16 WBTB	3.950.000.000	18 WBTB	4.300.000.000	18 WBTB	14.625.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan	22 Orang	50 Orang	1.575.000.000	70 Orang	1.850.000.000	75 Orang	2.050.000.000	75 Orang	2.250.000.000	75 Orang	7.725.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah terbinanya sumber daya manusia terhadap data dan informasi sejarah	60 Orang	60 Orang	400.000.000	75 Orang	540.000.000	75 Orang	625.000.000	75 Orang	625.000.000	75 Orang	2.190.000.000	0
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan	15 Cagar Budaya	19 Cagar Budaya	1.600.000.000	20 Cagar Budaya	1.600.000.000	20 Cagar Budaya	1.700.000.000	21 Cagar Budaya	1.800.000.000	22 Cagar Budaya	6.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





## Kopi Sebagai Produk Unggulan Daerah

Keberadaan Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu daerah penghasil biji kopi terbaik di Lampung, bahkan Indonesia tidak terbantahkan. Letak geografi didominasi perbukitan, hingga berada di daerah pada ketinggian 500-1.000 Mdpl, maka tak heran Lampung Barat dikenal dunia memiliki cita rasa khas pada tiap buah biji kopi dihasilkan. Bahkan itu menjadikan kabupaten setempat sebagai kawasan percontohan perkebunan nasional untuk penghasilan biji kopi.

Lampung Barat dikenal sebagai tanah subur menghasilkan biji kopi berkualitas dunia. Di ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut, daerah ini dikuasai perkebunan kopi luas kurang lebih 60 hektare dengan hasil panen hingga 100.000 ton per tahun. Perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat diketahui mampu menghasilkan 3 jenis biji kopi, dengan tingkat kualitas yang hampir merata. Pertama, kopi Arabika memiliki tingkat keasaman tinggi dan pahit yang samar, aroma dari kopi ini adalah buah, bunga, dan rempah.

Kedua, kopi Liberika dengan sisi keunikannya, lantaran memiliki aroma seperti buah nangka lengkap dengan kekentalan serta rasa pahitnya. Ketiga, kopi Robusta adalah biji kopi paling populer dari kabupaten setempat, karena punya rasa pahit dan aroma earthy dan nutty, menjadikan jenis kopi ini paling favorit.

Perkebunan kopi adalah tempat mata pencaharian utama masyarakat Lampung Barat. Kegigihan petani dalam menggali informasi tentang sistem penanaman kopi juga menjadi alasan mengapa kawasan perkebunan kopi di Lampung Barat menjadi paling unggulan di Tanah Air. Kawasan perkebunan kopi Lampung Barat ini bila dinobatkan sebagai contoh perkebunan kopi terbaik bagi Provinsi Lampung, bahkan di tingkat Nasional dalam hal peningkatan produksi dan mutu kopi.

Hasil panen perkebunan kopi di Lampung Barat dinilai baik dalam segi kualitas. Tidak hanya di dalam negeri, produk-produk kopi tersebut juga tersebar hingga mancanegara dengan angka ekspor cukup tinggi.

Mulai dari 91 juta dolar, nilai ekspor ini kian mendukung komoditas kopi di daerah Lampung Barat untuk terus meningkatkan mutu dan bertahan menjadi lumbung pendapat ekonomi. Harga kopi dari daerah Lampung Barat sangat bervariasi. Semakin tanaman tersebut dirawat secara baik, buah dipetik dengan tepat, serta proses penanganan maksimal, maka harga kopi tentunya akan tinggi.

Kopi robusta merupakan komoditas perkebunan yang sangat mendominasi di Kabupaten Lampung Barat dan menjadi salah satu produk unggulan serta merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Areal pertanaman kopi tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dan budidaya kopi robusta telah diusahakan secara turun temurun oleh masyarakat Lampung Barat. Selain komoditas kopi, komoditas aren juga merupakan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor B/336/KPTS/III.2/2014, tanggal 11 September 2014 tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat.

Produk Kopi Robusta Lampung Barat telah mendapat Sertifikasi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan nama "KOPI ROBUSTA LAMPUNG". Selain itu perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Kopi Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2016 tanggal 16 Januari 2016 sehingga menunjukkan keberadaan perkebunan kopi di Lampung Barat sangat menentukan eksistensi perkopian nasional.



Produksi kopi robusta merupakan komoditas terbesar yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 1.138 kg/ha/th. Peningkatan produksi dan produktivitas produk unggulan Kopi Robusta dilaksanakan melalui langkah-langkah yang terpadu, antara lain melalui kebijakan:

1. Peningkatan produksi dan produktifitas dengan penerapan teknologi anjuran sesuai agroekosistem, penyiapan bibit unggul dan bantuan alsintan.
2. Pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung dan jalan produksi.
3. Penganekaragaman komoditas perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani kelompok tani melalui pelatihan dan pendampingan
5. Peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan dengan penerapan teknologi tepat guna.
6. Peningkatan akses pasar melalui kemiteraan, promosi dan pameran pada berbagai event.

### **Pengelolaan Program Unggulan Daerah**

Proses pengelolaan program unggulan tersebut dimulai dari tahap perencanaan. Sudah barang tentu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun mulai dari RPD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang harus selaras dalam mengelola

program unggulan daerah tersebut dalam hal ini adalah pengelolaan Produk unggulan Kopi.

Terkait dengan pengelolaan produk unggulan kopi, RPD Lampung Barat sudah mengakomodir mulai dari sasaran, tujuan dan program-programnya. Tujuan pertama pada RPD adalah Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan sasaran Meningkatkan Pendapatan Perkapita, dengan indikator kinerjanya adalah pendapatan perkapita.

### **Alur Proses Perencanaan Pengelolaan Produk Unggulan**

Tahap awal dalam mekanisme perencanaan adalah menyusun penjenjangan kinerja dari level pemerintah Kabupaten sampai ke individu dengan memperhatikan kerangka berpikir logis (*logical framework*) sehingga dapat dipastikan keselarasan dan keterkaitan kinerja antar jenjang organisasi, serta kontribusi kinerja individu dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dan Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan melakukan evaluasi yang didasarkan pada capaian hasil program dan keterpaduan lintas program perangkat daerah, serta memastikan setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis sehingga program prioritas daerah relevan isu strategis daerah dan tergambar kolaborasi antar program (*cross-cutting*);



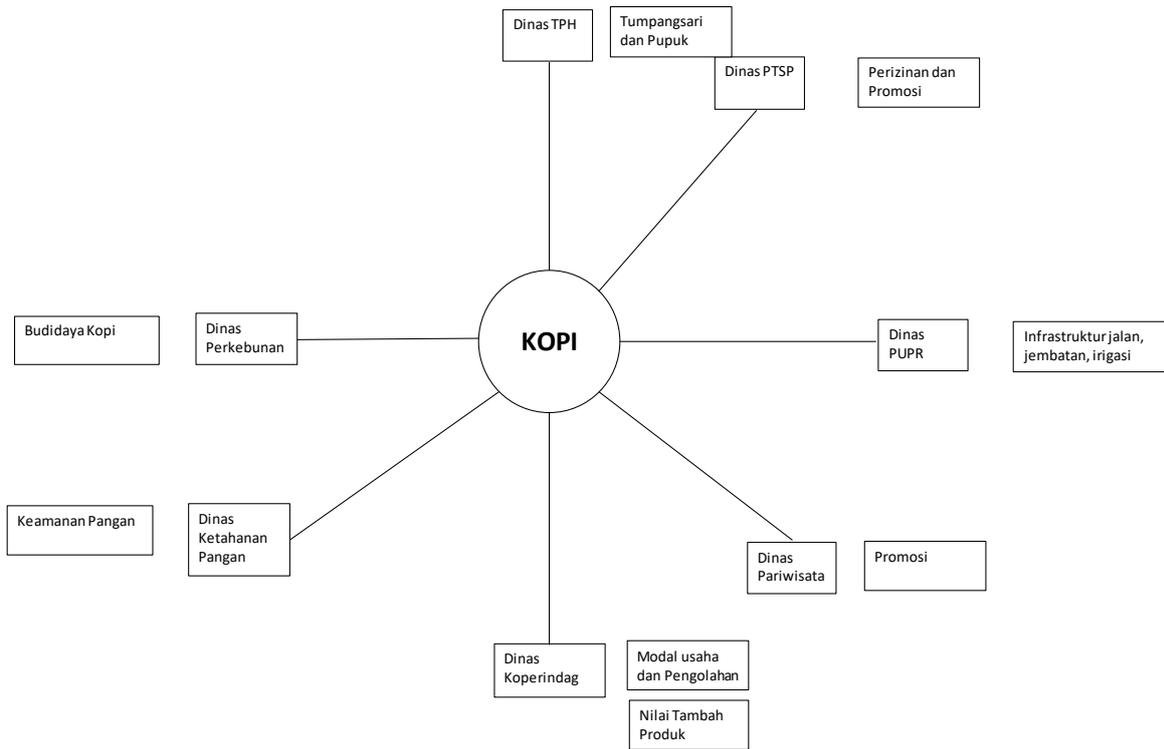


RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

<b>Program</b> PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN <b>Indikator :</b> Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian 5,00%   5,00%   5,00%   5,00% <b>Dinas Perkebunan dan Peternakan</b>	<b>Program</b> PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN <b>Indikator :</b> Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian 3,00%   3,00%   3,00%   3,00% <b>Dinas Perkebunan dan Peternakan</b>	<b>Program</b> PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER <b>Indikator :</b> Persentase pengendalian penyakit zoonosis 100%   100%   100%   100% <b>Dinas Perkebunan dan Peternakan</b>
<b>Program</b> PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN <b>Indikator :</b> Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap 1,45%   1,45%   1,45%   1,45% <b>Dinas PU PR</b>	<b>Sasaran RPD :</b> Meningkatkan Pendapatan Perkapita <b>Indikator :</b> pendapatan perkapita (rupiah/orang/tahun) 26.786.367   28.020.689   29.339.780   30.750.169 <b>Gini Rasio (poin)</b> 0,27   0,26   0,25   0,25	<b>Program</b> PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL <b>Indikator :</b> Persentase Peningkatan Minat Investasi 10,00%   15,00%   20,00%   20,00% <b>Dinas PM PTSP</b>
<b>Program</b> PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) <b>Indikator :</b> Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik 0,92%   0,92%   0,92%   0,92% <b>Dinas PU PR</b>	<b>Program</b> PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK <b>Indikator :</b> Indeks Keterbukaan Informasi Publik 60 Poin   65 Poin   70 Poin   70 Poin <b>Dinas Kominfo</b>	<b>Program</b> PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) <b>Indikator :</b> Persentase UMKM terfasilitasi 3,00%   6,00%   9,00%   12,00% <b>Dinas Koperasi</b>
<b>Program</b> PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN <b>Indikator :</b> Tingkat Keamanan Pangan > 80%   > 80%   > 80%   > 80% <b>Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>Program</b> PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL <b>Indikator :</b> Persentase Pelaku Ekraf yang 25,00%   50,00%   75,00%   100% <b>Dinas Pora Pariwisata</b>	



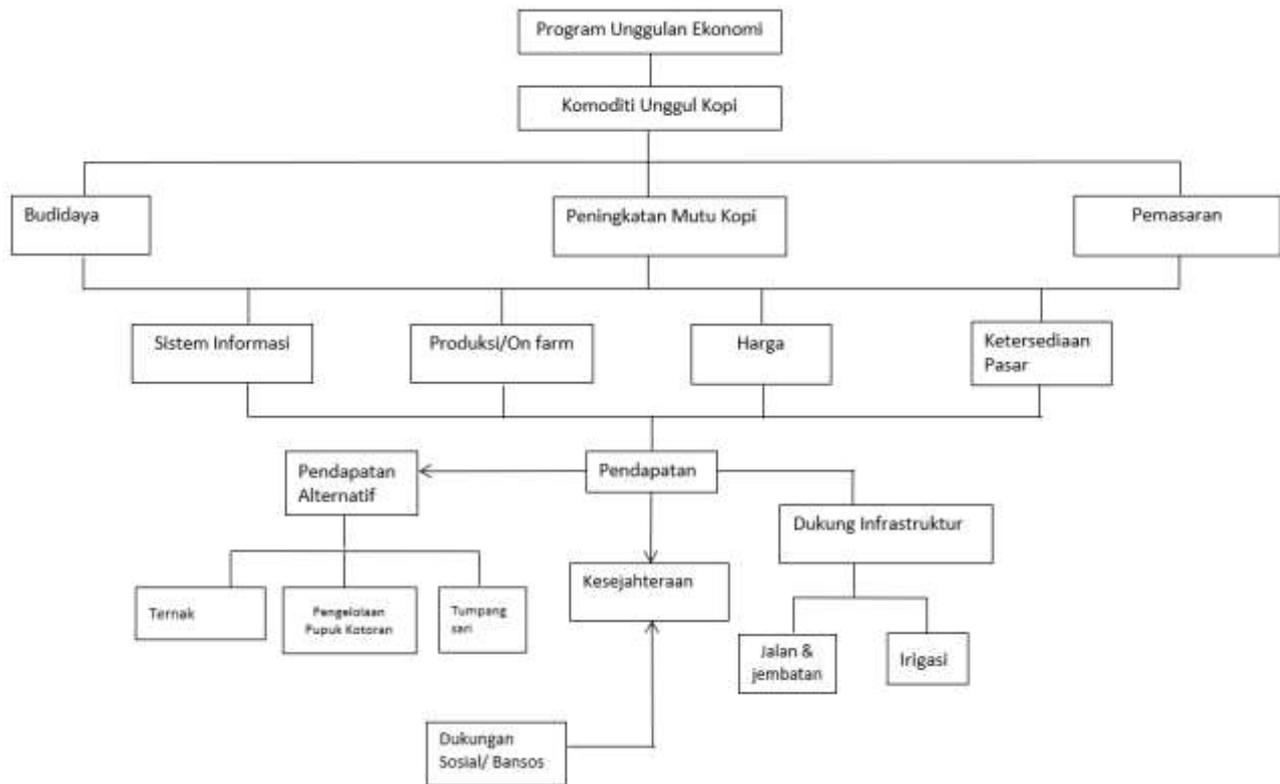
### Cross-cutting pengelolaan kopi



Upaya pengelolaan produk unggulan kopi perlu kolaborasi peran sektor dan instansi lain antara lain Dinas Ketahanan Pangan, berperan dalam penanganan keamanan pangan yang berasal dari kopi, Dinas PMPTSP berperan dalam mendukung kemudahan pengurusan perizinan usaha yang bergerak dalam perdagangan kopi baik biji kopi, maupun produk turunannya. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berperan strategis dalam pemenuhan infrastruktur pendukung di sentra-sentra perkebunan kopi dan sentra produksi olahan kopi, sedangkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berperan penting dalam promosi dan pemasaran kopi dan produk turunannya di pusat-pusat destinasi wisata dan kepada agen-agen tourisme, kemudian Dinas Koperasi, UMKM Perdagangan dan Pasar sangat berperan penting dalam pengembangan kelembagaan terutama di sektor UMKM, pemasaran produk baik di dalam dan luar daerah.



### Alur Strategi Pengelolaan Program Unggulan Kopi



Tiga hal yang menjadi titik strategis dalam pengulaan komoditi produk unggulan kopi adalah pertama Budidaya, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas melalui budidaya kopi yang baik dan memenuhi standar nasional dan internasional, peran budidaya ini menjadi tanggung jawab perangkat daerah sektor perkebunan yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan, kedua mutu komoditi kopi, disamping itu perangkat daerah ini juga bertanggung jawab dalam peningkatan mutu dan kualitas kopi yang dihasil yang memnuhi standard ekspor. Ketiga pemasaran, hal sangat penting karena produksi yang besar tetapi akses pemasaran yang masih terbatas sehingga akan sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Perangkat daerah yang memiliki peran dalam hal marketing ini adalah dinasi Koperasi, UMKM, perdagangan dan pasar dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Peran perangkat daerah cukup strategis karena bertugas untuk mengenalkan produk kopi di dalam maupun ke luar daerah.

Strategi budidaya kopi agar menghasilkan produksi dan produktivitas serta kulitas yang baik sangat memerlukan teknonolgi dan informasi sehingga diperlukan penyediaan teknologi dan teknis budidaya yang *up to date*.

Dalam rangka meningkatkan produksi kopi onfarm maka ketersediaan bibit berkualitas, pupuk dan sarana produksi lain cukup menentukan. Bibit sebagai komponen subsistem hulu, mutlak diperlukan terlepas dari penyediaannya yang dilakukan sendiri ataupun harus disediakan oleh pengusaha input pertanian lainnya. Keterkaitan antara subsistem hulu dengan onfarm dapat dilihat dari usaha petani dalam memenuhi kebutuhannya untuk memulai usaha berkebun yaitu dalam pengadaan bibit, pupuk dan alat-alat mesin.

Mutu komoditas kopi sangat mempengaruhi harga pasar, pasar ekspor merupakan tujuan utama dari produk kopi Indonesia yang sudah dikenal. Dengan kualitas yang baik dan berstandar maka akses pasar akan semakin mudah dan dikenal.



Salah satu permasalahan petani kopi adalah terkait pendapatan dimana kopi dapat dipanen satu tahun sekali, untuk itu harus ada solusi intervensi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani kopi dengan beberapa penghasilan alternatif antara lain budidaya kopi tumpang sari dengan tanaman sayuran dan integrasi kopi dengan budidaya ternak, baik ternak sapi, kambing maupun ayam. Dengan adanya sumber pendapat alternatif selain kopi tersebut maka kualitas kopi yang baik akan terjaga, dimana petani akan memanen kopi saat kopi benar-benar sudah merah dan layak panen.

Intervensi lain dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan adanya bantuan-bantuan sosial baik bantuan langsung masyarakat berupa kebutuhan sehari-hari maupun berupa bantuan permodalan.

Lokasi perkebunan kopi biasanya jauh dari tempat pemasaran maupun pemukiman untuk itu sangat

diperlukan ketersediaan infrastruktur jalan yang bisa mempermudah arus hasil panen kopi ke lokasi pemasaran maupun ke lokasi pengolahannya. Kolaborasi untuk penyediaan infrastruktur ini menjadi sangat penting.

Demikian, sekilas alur perencanaan pengelolaan Produk Unggulan Kopi di Kabupaten Lampung Barat. Kopi merupakan identitas Lampung Barat. Sebagai produk unggulan dan identitas maka pengelolaan kopi harus didukung dalam perencanaan yang matang.

Sinergitas dan kolaborasi antar sektor sangat perlu dan penting untuk diperhatikan mengingat Program ini tidaklah bisa hanya dijalankan oleh satu perangkat daerah. Perencanaan kinerja baik level pemerintah daerah maupun perangkat daerah sudah harus mendukung usana pengelolaan produk unggulan tersebut.





## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra perangkat daerah. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.1.



Tabel 7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2023-2026  
Kabupaten Lampung Barat

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan dasar</b>						<b>814.881.346.220</b>		<b>731.346.481.178</b>		<b>753.293.137.121</b>		<b>777.571.223.045</b>		<b>3.077.092.187.563</b>	
<b>1 01</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>						<b>313.947.571.860</b>		<b>318.346.193.281</b>		<b>332.293.350.602</b>		<b>341.295.524.004</b>		<b>1.305.882.639.747</b>	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,27%*	80,27%*	80,28%	205.279.787.960	80,29%	215.287.609.031	80,30%	226.059.588.010	80,31%	237.268.805.509	80,31%	883.895.790.510	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya mutu Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19,37%	19,37%	19,38%	107.483.762.900	19,56%	101.719.563.250	19,77%	104.759.741.593	20,16%	102.462.697.495	20,16%	416.425.765.237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	103,32%	103,32%	102,29%		102,19%		101,17%		100,00%		100,00%		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	103,66%	103,66%	102,63%		102,52%		101,50%		100,00%		100,00%		
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya pengetahuan guru tentang kurikulum muatan lokal	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan	1 Mata Pelajaran	1 Mata Pelajaran	2 Mata Pelajaran	409.021.000	2 Mata Pelajaran	439.021.000	2 Mata Pelajaran	474.021.000	3 Mata Pelajaran	514.021.000	3 Mata Pelajaran	1.836.084.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya pengembangan sastra lisan dilampung barat	Jumlah sastra Lisan yang terlestarikan	0	0	2 Sastra	775.000.000	2 Sastra	900.000.000	3 Sastra	1.000.000.000	3 Sastra	1.050.000.000	10 Sastra	3.725.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>1 02</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>						<b>302.074.462.730</b>		<b>205.664.034.192</b>		<b>208.436.192.043</b>		<b>216.174.933.368</b>		<b>932.349.622.333</b>	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan		81,5	81,7	110.730.211.601	81,8	112.117.881.792	81,9	122.895.220.373	82	127.609.204.818	82	473.352.518.584	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPA Puskesmas		75,15	77	173.676.299.129	78	75.633.757.700	80	67.469.347.000	82	70.396.133.550	82	387.175.537.379	Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas terakreditasi madya		93	100		100		100		100		100	-	
			Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISROUTE		100	100		100		100		100		100	-	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase Masyarakat memiliki JKN		61,17	70		72		75		80		80		-
			Persentase persalinan di fasyankes		94	95		96		97		98		98		-
			Prevalensi Balita Wasting		8,1	7,30		7		6,80		6,50		6,50		-
			Persentase capaian 5 pilar STBM		20	30		40		45		50		50		-
			Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular		77,37	78		80		82		85		85		-
			Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular		76,5	78		80		82		85		85		-
			Persentase Capaian IDL		94,1	100		100		100		100		100		-
			Persentase Puskesmas melaksanakan SIK		0	100		100		100		100		100		-
			Akreditasi RSUD AU Utama		100	100		100		100		100		100		-
			Persentase Capaian SPA RSUDAU		56,19	58		60		62		65		65		-
			Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara		100	100		100		100		100		100		-
			BOR RSUDAU		29	40		45		50		60		60		-
			ALOS RSUD AU		4	4		4		4		4		4		-
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standart		37,50%	60,00%	14.453.607.000	65,00%	14.679.477.000	70,00%	14.804.977.000	75,00%	14.884.977.000	75,00%	58.823.038.000	Dinas Kesehatan
			Persentase SDMK RSUDAU yang memenuhi standart		82,92%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		-
			Persentase Nakes RSUDAU yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya		0,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		-
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terlaksananya Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		75%	75%	348.000.000	80%	365.000.000	85%	397.000.000	90%	414.000.000	90%	1.524.000.000	Dinas Kesehatan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase Pemernksaan Laik Hygine Sentra Produksi dan Distribusi Makanan dan minuman		0%	100%		100%		100%		100%		100%		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga berPHBS		24%	35%	2.866.345.000	40%	2.867.917.700	45%	2.869.647.670	50%	2.870.618.000	50%	11.474.528.370	Dinas Kesehatan
<b>1 03</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>						<b>151.882.910.630</b>		<b>158.025.530.715</b>		<b>163.345.177.077</b>		<b>169.110.488.074</b>		<b>642.364.106.496</b>	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PU PR	79,69%*	79,69%*	83,05%	7.966.009.650	83,25%	8.610.463.615	83,50%	9.320.109.977	83,75%	10.100.620.974	83,75%	35.997.204.216	Dinas PU PR
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya panjang jaringan Irigasi berfungsi baik dan Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	55,7%	56,34%	0,915%	41.947.067.100	0,915%	41.917.067.100	0,915%	41.887.067.100	0,915%	41.887.067.100	3,66%	167.638.268.400	Dinas PU PR
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	meningkatnya pengguna layanan air bersih	Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	85,75%	87%	0,75%	3.600.000.000	0,75%	3.100.000.000	0,75%	3.100.000.000	0,75%	3.100.000.000	3,00%	12.900.000.000	Dinas PU PR
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	meningkatnya Rumah tangga yang memiliki Sanitasi atau sistem pengolahan air limbah	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah	92,94%	92,94%	1,68%	6.000.000.000	1,68%	6.000.000.000	1,68%	6.000.000.000	1,68%	6.000.000.000	6,72%	24.000.000.000	Dinas PU PR
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Saluran Drainase kondisi baik	Persentase Peningkatan Saluraan Drainase kondisi baik	0%	0%	25%	2.100.000.000	50%	2.100.000.000	75%	2.100.000.000	100%	2.100.000.000	100%	8.400.000.000	Dinas PU PR
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang memiliki sarana dan prasarana permukiman	Persentase Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	21,05%	18.511.000.000	45,61%	21.511.000.000	71,93%	23.011.000.000	100%	24.438.000.000	100%	87.471.000.000	Dinas PU PR
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya bangunan Gedung Pemerintah dengan kondisi baik	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	0%	0%	25,0%	6.400.000.000	50,00%	6.400.000.000	100%	6.400.000.000	100%	6.400.000.000	100%	25.600.000.000	Dinas PU PR
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya panjang ruas jalan dalam kondisi mantap	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	66,10%	62%	1,45%	64.633.833.880	1,45%	67.862.000.000	1,45%	71.252.000.000	1,45%	74.809.800.000	5,80%	278.557.633.880	Dinas PU PR

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kepatuhan Pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	100%	0%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	Dinas PU PR
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	0%	0%	100%	575.000.000	100%	375.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	1.200.000.000	Dinas PU PR
<b>1 04</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>						<b>5.158.000.000</b>		<b>5.165.900.000</b>		<b>5.174.195.000</b>		<b>5.182.904.750</b>		<b>20.680.999.750</b>	<b>Dinas PU PR</b>
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya penanganan Rumah korban bencana / Relokasi Program Pemerintah	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	100%	100%	25%	558.000.000	50%	565.900.000	75%	574.195.000	100%	582.904.750	100%	2.280.999.750	Dinas PU PR
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	98,57%	98,57%	0,05%	4.600.000.000	0,55%	4.600.000.000	0,25%	4.600.000.000	0,25%	4.600.000.000	1,10%	18.400.000.000	Dinas PU PR
<b>1 05</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>						<b>31.348.124.900</b>		<b>33.375.797.090</b>		<b>32.870.436.499</b>		<b>33.917.739.849</b>		<b>131.512.098.338</b>	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPBD	81,45%)*	81,45%)*	82,00%	2.952.579.700	82,00%	3.103.097.370	82,00%	3.424.666.807	82,00%	3.614.393.188	82,00%	13.094.737.065	BPBD
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat	Persentase desa tangguh dan persentase kejadian bencana ditangani	1,47%	22,05% dan 100%	24,26% dan 100%	3.464.545.200	26,47% dan 100%	4.643.699.720	28,68% dan 100%	3.963.769.692	30,88% dan 100%	4.217.346.661	30,88% dan 100%	16.289.361.273	BPBD
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar	79,60%)*	79,60%)*	79,85%	13.179.000.000	80,00%	13.479.000.000	80,10%	14.179.000.000	80,20%	14.479.000.000	80,20%	55.316.000.000	Satpol PP dan Damkar

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Keterlibatan umum serta Perindugan masyarakat Kabupaten Lampung Barat	Persentase Peningkatan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	100%	100%	100%	5.387.000.000	100%	5.440.000.000	100%	4.393.000.000	100%	4.442.000.000	100%	19.662.000.000	Satpol PP dan Damkar
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%	6.365.000.000	100%	6.710.000.000	100%	6.910.000.000	100%	7.165.000.000	100%	27.150.000.000	Satpol PP dan Damkar
<b>1 06</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>						<b>10.470.276.100</b>		<b>10.769.025.900</b>		<b>11.173.785.900</b>		<b>11.889.633.000</b>		<b>44.302.720.900</b>	
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	78,04%)*	78,04%)*	78,75%	3.639.129.900	78,90%	3.764.324.000	78,95%	3.970.784.000	79,20%	4.136.402.000	79,20%	15.510.639.900	Dinas Sosial
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang Aktif	11,54%	11,54%	33,51	415.255.900	33,51	421.255.900	33,51	427.255.900	33,51	379.000.000	5,89%	1.642.767.700	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi	19,55	19,55	19,55	3.737.094.500	19,55	3.744.150.000	19,55	3.762.150.000	19,55	3.950.190.000	28,42%	15.193.584.500	Dinas Sosial
			Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	13,85	13,85	13,23							13,23			
			IKM			B		B		B		B				
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid	100%	100%	100%	1.966.150.800	100%	2.068.651.000	100%	2.180.951.000	100%	2.453.041.000	77,17%	8.668.793.800	Dinas Sosial
			Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	70,24	70,24	70,24		70,24		70,24		70,24				
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100%	100%	100%	637.000.000	100%	695.000.000	100%	757.000.000	100%	823.000.000	1x24 Jam	2.912.000.000	Dinas Sosial

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Presentase komponen utama taman makam pahlawan	78,57	78,57	78,57	75.645.000	78,57	75.645.000	78,57	75.645.000	78,57	148.000.000	1 Unit	374.935.000	Dinas Sosial
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>						<b>143.818.494.567</b>		<b>157.689.574.000</b>		<b>169.650.020.938</b>		<b>179.342.755.938</b>		<b>650.500.845.443</b>	
<b>2 07</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>						<b>778.450.700</b>		<b>856.295.770</b>		<b>941.925.347</b>		<b>1.036.117.882</b>		<b>3.612.789.699</b>	
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro yang disusun			1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	132.000.000	1 Dokumen	145.200.000	1 Dokumen	159.720.000	1 Dokumen	556.920.000	Sekretariat Daerah
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja			6%	476.743.200	10%	524.417.520	12%	576.859.272	15%	634.545.199	15%	2.212.565.191	Sekretariat Daerah
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya pencari kerja yang terdaftar bekerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar mendapat pekerjaan			5%	121.457.500	10%	133.603.250	15%	146.963.575	20%	161.659.933	20%	563.684.258	Sekretariat Daerah
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya hubungan industrial	Persentase peningkatan hubungan industrial			5%	60.250.000	10%	66.275.000	15%	72.902.500	20%	80.192.750	20%	279.620.250	Sekretariat Daerah
<b>2 08</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>						<b>6.529.516.300</b>		<b>6.402.946.480</b>		<b>6.696.406.565</b>		<b>6.952.211.642</b>		<b>26.581.080.987</b>	
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	79,02%*	79,02%*	80,00%	3.985.976.000	80,00%	3.625.356.000	80,00%	3.658.456.000	80,00%	3.628.301.000	80,00%	14.898.089.000	Dinas PPKB PPPA
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		% ARG pada APBD			3,00%	333.031.000	3,5%	345.000.000	4,00%	355.000.000	4,5%	370.000.000	11,00%	1.403.031.000	Dinas PPKB PPPA
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO	prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir			2,00%	508.906.500	1,5%	570.797.150	1%	627.876.865	0,8%	697.319.772	80,00%	2.404.900.287	Dinas PPKB PPPA
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	meningkatkan kualitas keluarga agar mampu berperan dalam mengasuh, melindungi anak dan orang tua	% keluarga berkualitas	0	0	20%	454.945.500	30%	491.500.000	40%	540.650.000	50%	592.715.000	20%	2.079.810.500	Dinas PPKB PPPA

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya data gender anak yang terpilah	% data gender dan anak yang terupdate			60%	60.000.000	70%	65.000.000	80%	70.000.000	90%	75.000.000	60,00%	270.000.000	Dinas PPKB PPPA
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Terpenuhinya Hak-hak anak	Pratama	Pratama	madya	565.000.000	madya	621.500.000	Nindya	680.650.000	Nindya	748.715.000	Nindya	2.615.865.000	Dinas PPKB PPPA
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif			60,00%	621.657.300	62,00%	683.793.330	64,00%	763.773.700	66,00%	840.160.870	66,00%	2.909.385.200	Dinas PPKB PPPA
<b>2 09</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>						<b>9.234.500.000</b>		<b>9.234.500.000</b>		<b>9.234.500.000</b>		<b>9.234.500.000</b>		<b>36.938.000.000</b>	
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	79,18%*	79,18%*	80,00%	3.694.500.000	80,00%	3.694.500.000	80,00%	3.694.500.000	80,00%	3.694.500.000	80,00%	14.778.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 02	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Tingkat Ketersediaan energi dan protein	Angka Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein	4000Kkal/kap/hr dan 95 gr/kap/hr	4000Kkal/kap/hr dan 95 gr/kap/hr	2400Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	1.260.000.000	2400Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	1.260.000.000	2400Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	1.260.000.000	2400Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	1.260.000.000	2400Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	5.040.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya Peanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	5 Pekon	5 pekan	2 Pekon	480.000.000	2 Pekon	480.000.000	2 Pekon	480.000.000	3 Pekon	480.000.000	9 Pekon	1.920.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terwujudnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	Skor PPH Konsumsi	83,1 Point	83,1 Point	83,1 Point	3.140.000.000	83,60 Point	3.140.000.000	84,1 Point	3.140.000.000	84,6 Point	3.140.000.000	84,6 Point	12.560.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya keamanan pangan segar	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	99,89%	99,89%	> 80 %	660.000.000	> 80 %	660.000.000	> 80 %	660.000.000	> 80 %	660.000.000	> 80 %	2.640.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
<b>2 10</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>						<b>2.000.000.000</b>		<b>1.790.000.000</b>		<b>1.760.000.000</b>		<b>1.760.000.000</b>		<b>7.310.000.000</b>	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase Kasus yang Tertangani	100%	100%	100%	120.000.000	100%	90.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	430.000.000	Dinas PU PR
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	100%	100%	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	2.800.000.000	Dinas PU PR
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya Kegiatan Survei dan pemetaan tanah Kabupaten	Persentase Survei dan pemetaan Tanah kabupaten	100%	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	200.000.000	Dinas PU PR

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	100%	100%	100%	1.130.000.000	100%	950.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	3.880.000.000	Dinas PU PR
2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						49.733.140.200		52.719.797.210		54.634.662.071		57.586.895.174		214.674.494.655	
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah Dinas LH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	81,94%*	81,94%*	81,96%	15.453.140.200	81,97%	16.225.797.210	81,98%	17.037.087.071	81,99%	18.109.441.424	81,99%	66.825.465.905	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten	100%	100%	100%	1.450.000.000	100%	2.022.500.000	100%	1.102.500.000	100%	1.157.625.000	100%	5.732.625.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	60.00 Point	60.00 Point	58.54 Point	1.480.000.000	58.64 Point	1.554.000.000	58.74 Point	1.631.700.000	58.84 Point	1.713.285.000	58.84 Point	6.378.985.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.73 Point	84.73 Point	84.04 Point		84.14 Point		84.24 Point		84.34 Point		84.34 Point		Dinas Lingkungan Hidup
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan	41.63 Point	41.63 Point	45.38 Point	13.800.000.000	47.86 Point	14.490.000.000	50.34 Point	15.214.500.000	52.82 Point	15.975.225.000	52.82 Point	59.479.725.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terlaksananya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	20%	20%	20%	400.000.000	25%	420.000.000	30%	441.000.000	35%	463.050.000	35%	1.724.050.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang Izin Lingkungan	80%	80%	80%	650.000.000	80%	682.500.000	80%	716.625.000	80%	752.456.250	80%	2.801.581.250	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Persentase Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	0%	0%	1%	400.000.000	1%	420.000.000	2%	741.000.000	2%	778.050.000	2%	2.339.050.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya Edukasi dan Komunikasi di Bidang Lingkungan	Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	700.000.000	100%	735.000.000	100%	771.750.000	100%	810.337.500	100%	3.017.087.500	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tersedianya Penghargaan untuk Masyarakat yang Peduli Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan	10 %	10 %	10 %	400.000.000	10 %	420.000.000	10 %	441.000.000	10 %	463.050.000	10 %	1.724.050.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun	43.939,92 Ton/Tahun	43.939,92 Ton/Tahun	45.473,62 Ton/Tahun	15.000.000.000	45.746 Ton/Tahun	15.750.000.000	46.007,22 Ton/Tahun	16.537.500.000	46.467,29 Ton/Tahun	17.364.375.000	46.467,29 Ton/Tahun	64.651.875.000	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2 12</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>						<b>7.683.490.500</b>		<b>8.451.839.550</b>		<b>9.297.023.505</b>		<b>10.226.725.856</b>		<b>35.659.079.411</b>	
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	82,00%)*	82,00%)*	82,15%	4.296.881.000	82,20%	4.726.569.100	82,25%	5.199.226.010	82,30%	5.719.148.611	82,30%	19.941.824.721	Dinas Dukcapil
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	-	-	89,65%	2.045.799.500	89,95	2.250.379.450	90,20%	2.475.417.395	90,70	2.722.959.135	90,70	9.494.555.480	Dinas Dukcapil
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran			97,00%	538.023.000	98,00%	591.825.300	99,00%	651.007.830	100,00%	716.108.613	100,00%	2.496.964.743	Dinas Dukcapil
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya data kependudukan yang valid	Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan			40%	737.787.000	60%	811.565.700	80%	892.722.270	100%	981.994.497	100,00%	3.424.069.467	Dinas Dukcapil
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terseleenggaranya Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan Kabupaten Lampung Barat	100%	100%	100%	65.000.000	100%	71.500.000	100%	78.650.000	100%	86.515.000	100%	301.665.000	Dinas Dukcapil
<b>2 13</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>						<b>8.799.209.910</b>		<b>10.921.042.433</b>		<b>11.740.868.632</b>		<b>13.501.998.929</b>		<b>44.963.119.904</b>	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PMP	78,97%*	78,97%*	80,00%	4.046.594.260	80,00%	5.455.534.435	80,00%	5.455.534.435	80,00%	6.273.864.602	80,00%	21.231.527.732	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Penataan pekon	Persentase Desa yang memenuhi Syarat penataan desa yang di tata	100%	100%	100%	330.628.500	100%	380.222.775	100%	437.256.191	100%	502.844.620	100%	1.650.952.086	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya Kerjasama Antar Pekon Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Persentase Peningkatan Kerja Sama Antar Pekon untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat	2,29%	2,29%	2,29%	90.819.000	2,29%	104.441.850	2,29%	120.108.128	2,29%	138.124.347	2,29%	453.493.324	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Pekon Tertib Administrasi	100%	100%	100%	2.846.613.850	100%	3.273.605.928	100%	3.764.646.817	100%	4.329.343.839	100%	14.214.210.433	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	131 Pekon	131 Pekon	131 Pekon	1.484.554.300	131 Pekon	1.707.237.445	131 Pekon	1.963.323.062	131 Pekon	2.257.821.521	131 Pekon	7.412.936.328	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						8.087.690.380		8.824.259.418		9.273.515.360		10.136.166.896		36.321.632.054	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	meningkatkan pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan pembangunan kependudukan	% OPD yang menggunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan	0,00%	0,00%	21%	927.000.000	27%	1.012.500.000	33%	1.107.500.000	38%	1.178.550.000	70%	4.225.550.000	Dinas PPKB PPPA
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi	Persentase Peserta KB Aktif ( PA) MKJP % PUS yang tidak terlayani/Unmeet need % Pekon yang menjadi kampung KB			25,00%	4.922.000.000	27,00%	5.349.200.000	28,00%	5.457.200.000	31,00%	5.977.920.000	40,00%	21.706.320.000	Dinas PPKB PPPA
						17,00%		16,00%		14,00%		12,00%		10,00%		
						59%		72,79		87,5%		100%		100%		
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	memwujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera	Indeks pembangunan Keluarga			52,52%	2.238.690.380	54%	2.462.559.418	55%	2.708.815.360	57%	2.979.696.896	57%	10.389.762.054	Dinas PPKB PPPA
			Media Usia Kawin Pertama			19,5		20		20,5		21				

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 15	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>						<b>4.466.992.601</b>		<b>6.994.605.388</b>		<b>6.550.568.915</b>		<b>7.198.206.565</b>		<b>25.210.373.469</b>	
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	79,08%)*	79,08%)*	79,87%	3.737.699.622	80,66%	4.215.515.684	81,45%	4.662.686.352	82,24%	5.060.093.888	82,24%	17.675.995.546	Dinas Perhubungan
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Kendaraan Umum Layak Operasi, Ketaertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	7%	7%	11%	716.179.979	12%	2.264.089.704	13%	1.861.571.262	15%	2.010.301.378	15%	6.852.142.323	Dinas Perhubungan
			Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan			3%		3%		3%		3%		3%		
			Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar			95%		96%		98%		100%		100%		
2 15 03	PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Demaga	Persentase Sarana dan Prasarana Demaga Sesuai Standar	0%	0%	5%	13.113.000	10%	515.000.000	15%	26.311.300	20%	127.811.300	20%	682.235.600	Dinas Perhubungan
2 16	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika</b>						<b>11.340.948.131</b>		<b>12.181.508.395</b>		<b>13.233.588.965</b>		<b>14.163.413.311</b>		<b>50.919.458.802</b>	
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo	80,93%)*	80,93%)*	81,18%	2.935.345.500	81,43%	2.935.345.500	81,43%	2.935.345.500	81,43%	2.935.345.500	81,43%	11.741.382.000	Dinas Kominfo
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tercapainya Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	60 Poin	5.885.897.755	65 poin	6.474.487.531	70 poin	7.121.936.284	70 poin	7.834.129.912	70 poin	27.316.451.481	Dinas Kominfo
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tenwujudnya Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPBE	Prosentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE	11 OPD	8 OPD	20%	2.519.704.876	40%	2.771.675.364	50%	3.176.307.181	60%	3.393.937.900	60%	11.861.625.321	Dinas Kominfo
2 17	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah</b>						<b>4.755.199.900</b>		<b>5.197.719.890</b>		<b>5.717.541.879</b>		<b>6.289.241.067</b>		<b>21.959.702.736</b>	
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Koperindag	77,91%	77,91%	77,92%	3.928.199.900	77,93%	4.288.019.890	77,94%	4.716.821.879	77,95%	5.188.504.067	77,95%	18.121.545.736	Dinas Koperindag
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	30,30%	30,30%	33,00%	100.000.000	34,00%	110.000.000	35,00%	121.000.000	36,00%	133.100.000	36,00%	464.100.000	Dinas Koperindag

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas manjerial koperasi	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	0	0	2,00%	45.000.000	2,00%	49.500.000	2,00%	54.500.000	2,00%	59.895.000	8,00%	208.895.000	Dinas Koperindag
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Kesejahteraan anggota koperasi	Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	6,06%	6,06%	9,00%	80.000.000	12,00%	88.000.000	15,00%	96.800.000	18,00%	106.480.000	18,00%	371.280.000	Dinas Koperindag
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Kualitas Produk UMKM	Persentase UMKM terfasilitasi	10,00%	10,00%	3,00%	602.000.000	6,00%	662.200.000	9,00%	728.420.000	12,00%	801.262.000	12,00%	2.793.882.000	Dinas Koperindag
			Persentase wirausaha pemula	0,45%	0,45%	0,75%		1,00%		1,25%		1,50%		1,50%		
<b>2 18</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>						<b>7.072.779.730</b>		<b>7.266.277.107</b>		<b>10.757.209.104</b>		<b>11.151.616.960</b>		<b>36.247.882.901</b>	
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPSTSP	78,73%*	78,73%*	78,80%	3.970.177.730	79,00%	4.133.614.007	79,50%	7.120.432.784	80,00%	7.319.730.713	80,00%	22.543.955.234	DPMPSTSP
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	85,00%	85,00%	100,00%	584.605.000	100,00%	533.066.400	100,00%	529.019.950	100,00%	637.259.240	100,00%	2.283.950.590	DPMPSTSP
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersedianya Iklim Investasi yang kondusif	Persentase kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	20%	300.000.000	20%	65.000.000	20%	435.000.000	20%	150.000.000	80%	950.000.000	DPMPSTSP
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Minat Investasi PMDN/PMA	Persentase Peningkatan Minat Investasi	-	-	10%	1.800.000.000	15%	2.080.000.000	20%	2.178.000.000	20%	2.505.800.000	20%	8.563.800.000	DPMPSTSP
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya upaya pengendalian penanaman modal	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	75,00%	75,00%	75,00%	345.997.000	85,00%	380.596.700	90,00%	418.656.370	100,00%	460.522.007	100,00%	1.605.772.077	DPMPSTSP
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPSTSP	15 Sektor Usaha	15 Sektor Usaha	100%	72.000.000	100%	74.000.000	100%	76.100.000	100%	78.305.000	100%	300.405.000	DPMPSTSP

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
<b>2 19</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga</b>						<b>9.327.978.410</b>		<b>10.702.282.360</b>		<b>11.772.510.596</b>		<b>12.949.761.656</b>		<b>44.752.533.022</b>	
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	66.70 poin	66.70 poin	67.02 poin	5.527.910.310	67,09 POIN	6.051.244.991	68.03 POIN	6.656.369.490	68.09 POIN	7.322.006.439	68.09 POIN	25.557.531.230	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Pemuda berprestasi	Persentase Jumlah Pemuda berprestasi	160 orang	160 orang	0,17%	1.327.624.600	'0,19%	1.688.786.209	0,21%	1.857.664.830	0,24%	2.043.431.313	0,24%	6.917.506.952	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Atlit Berprestasi	Persentase jmlh Atlit berprestasi	178%	178%	3.14%	2.472.443.500	'3,04%	2.962.251.160	3,80%	3.258.476.276	'4,4%	3.584.323.904	'4,4%	12.277.494.840	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
<b>2 20</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>						<b>131.046.000</b>		<b>155.000.000</b>		<b>175.000.000</b>		<b>185.000.000</b>		<b>646.046.000</b>	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Data Statistik Daerah Kabupaten Lampung Barat	Prosentase Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan	3 Data	3 Data	36%	131.046.000	71%	155.000.000	85%	175.000.000	100%	185.000.000	100%	646.046.000	Dinas Kominfo
<b>2 21</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>						<b>590.315.275</b>		<b>630.000.000</b>		<b>665.000.000</b>		<b>705.000.000</b>		<b>2.590.315.275</b>	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi	prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan	5 Model	5 Model	100%	590.315.275	100%	630.000.000	100%	665.000.000	100%	705.000.000	100%	2.590.315.275	Dinas Kominfo
<b>2 22</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>						<b>6.550.000.000</b>		<b>7.390.000.000</b>		<b>8.325.000.000</b>		<b>8.975.000.000</b>		<b>31.240.000.000</b>	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pengembangan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Dan ditetapkan sebagai WBTB	9 WBTB	11 WBTB	12 WBTB	2.975.000.000	14 WBTB	3.400.000.000	16 WBTB	3.950.000.000	18 WBTB	4.300.000.000	18 WBTB	14.625.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang kesenian tradisional	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan	12 Orang	22 Orang	50 Orang	1.575.000.000	70 Orang	1.850.000.000	75 Orang	2.050.000.000	75 Orang	2.250.000.000	75 Orang	7.725.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya pengetahuan masyarakat lampung barat tentang informasi sejarah	Jumlah terbinanya sumber daya manusia terhadap data dan informasi sejarah	100 Orang	60 Orang	60 Orang	400.000.000	75 Orang	540.000.000	75 Orang	625.000.000	75 Orang	625.000.000	75 Orang	2.190.000.000	
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan dan dikelola	Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan	15 Cagar Budaya	15 Cagar Budaya	19 Cagar Budaya	1.600.000.000	20 Cagar Budaya	1.600.000.000	20 Cagar Budaya	1.700.000.000	21 Cagar Budaya	1.800.000.000	22 Cagar Budaya	6.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan						5.751.164.530		6.896.500.000		7.799.700.000		6.315.900.000		26.763.264.530	
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79,58%)*	79,58%)*	79,60%	3.284.630.750	79,61%	3.346.500.000	79,62%	4.439.700.000	79,63%	3.305.900.000	79,63%	14.376.730.750	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatkan Pembinaan Perpustakaan	Presentase Peningkatan Anggota Perpustakaan	25%	25%	5%	2.466.533.780	5%	3.550.000.000	5%	3.360.000.000	5%	3.010.000.000	20%	12.386.533.780	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Presentase Sarana dan Prasarana Perpustakaan sesuai Standar	-	-	55%	-	65%	-	70%	-	85%	-	85%	-	
2 24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan						986.072.000		1.075.000.000		1.075.000.000		975.000.000		4.111.072.000	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatkan Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	5%	706.072.000	5%	795.000.000	5%	795.000.000	5%	695.000.000	20%	2.991.072.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	5 Arsip	280.000.000	5 Arsip	280.000.000	5 Arsip	280.000.000	5 Arsip	280.000.000	20 Arsip	1.120.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Urusan Pilihan						38.677.547.112		42.903.977.083		45.908.433.562		49.206.520.176		176.696.477.932	
3 25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan						5.772.356.000		6.303.396.000		7.074.449.750		7.933.116.438		27.083.318.188	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perikanan	79,48%)*	79,48%)*	79,78%	3.498.356.000	79,88%	3.891.696.000	79,98%	4.386.579.750	80,00%	4.946.459.438	80,00%	16.723.091.188	Dinas Perikanan
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	16,17%	16,17%	1 %	577.000.000	2%	629.850.000	2,50%	727.835.000	3%	830.618.500	8,50%	2.765.303.500	Dinas Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	16,17 %	16,17 %	5 %	847.000.000	7%	889.350.000	9%	978.285.000	11%	1.076.113.500	32%	3.790.748.500	Dinas Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	10 %	10 %	7%	290.000.000	10 %	304.500.000	12%	334.950.000	15%	368.445.000	44%	1.297.895.000	Dinas Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	10 %	10 %	7%	560.000.000	10 %	588.000.000	12%	646.800.000	15%	711.480.000	44%	2.506.280.000	Dinas Perikanan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3 26	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>						<b>4.169.792.700</b>		<b>6.010.518.810</b>		<b>6.611.570.691</b>		<b>7.272.727.760</b>		<b>24.064.609.961</b>	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Kualitas Destinasi pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	38,00%	38,00%	39,00%	1.639.860.000	36,00%	1.879.290.490	34,00%	2.067.219.539	32,00%	2.273.941.493	32,00%	7.860.311.522	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persentase Destinasi pariwisata yang dipromosikan	100,00%	100,00%	25,00%	1.801.182.700	50,00%	3.362.228.320	75,00%	3.698.451.152	100,00%	4.068.296.267	100,00%	12.930.158.439	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif yg terdaftar Hak kekayaan Intelektualnya	Persentase Pelaku Ekraf yang dibina	0,00%	0,00%	25,00%	250.000.000	50,00%	521.500.000	75,00%	573.650.000	100,00%	631.015.000	100,00%	1.976.165.000	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kwalitas SDM Pelaku Pariwisata dan Ekraf	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00%	0,00%	25,00%	478.750.000	50,00%	247.500.000	75,00%	272.250.000	100,00%	299.475.000	100,00%	1.297.975.000	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
3 27	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>						<b>23.991.898.412</b>		<b>25.420.312.273</b>		<b>26.511.346.121</b>		<b>27.812.495.853</b>		<b>103.736.052.658</b>	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH	77,86%)*	77,86%)*	77,96%	9.022.984.700	78,06%	9.926.704.800	78,16%	9.836.129.800	78,26%	9.837.509.800	78,26%	38.623.329.100	Dinas TPH
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya penyediaan sarana pertanian	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	34,81%	1,91%	1,04%	864.376.500	1,30%	1.036.082.500	1,33%	1.036.082.500	1,20%	1.036.082.500	4,87%	3.972.624.000	Dinas TPH
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	102,50%	18,34%	4,00%	1.107.330.600	4,15%	1.163.785.000	4,30%	1.163.785.000	4,10%	1.163.785.000	16,55%	4.598.685.600	Dinas TPH
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terlaksananya pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan	800 Ha	203 Ha	100%	134.171.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	584.171.000	Dinas TPH
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian	Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut	944 KT	337 KT	200 KT	1.521.137.000	200 KT	1.227.651.500	200 KT	1.227.651.500	200 KT	1.227.651.500	800 KT	5.204.091.500	Dinas TPH
			Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	30 KT	0 KT	8 KT		8 KT		8 KT		8 KT		32 KT		
			Peningkatan kelas Madya ke Utama	0 KT	0 KT	2 KT		2 KT		2 KT		2 KT		8 KT		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan	80,95%)*	80,95%)*	81,00%	4.451.812.612	81,05%	4.896.993.873	81,10%	5.386.693.261	81,15%	5.925.362.587	81,15%	20.660.862.332	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya sarana pertanian	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	5%	5%	5%	2.195.086.000	5%	2.414.594.600	5%	2.656.054.060	5%	2.921.659.466	20%	10.187.394.126	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Prasarana pertanian	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	3%	3%	3%	2.645.000.000	3%	2.349.500.000	3%	2.574.450.000	3%	2.821.895.000	12%	10.390.845.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit zoonosis	100%	100%	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.464.100.000	100%	5.105.100.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian OPT	18%	18%	17,60%	150.000.000	17,60%	165.000.000	17,60%	181.500.000	17,60%	199.650.000	18%	696.150.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan petani terbina	20%	20%	20,00%	800.000.000	20,00%	880.000.000	20,00%	968.000.000	20,00%	1.064.800.000	80%	3.712.800.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3 30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						1.743.500.000		1.869.750.000		2.081.067.000		2.195.180.125		7.889.497.125	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	11,69%	11,69%	20,00%	595.000.000	40,00%	654.500.000	60,00%	719.950.000	80,00%	791.945.000	80,00%	2.761.395.000	Dinas Koperindag
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, dan Barang Penting	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	0,14%	0,14%	3,00%	550.000.000	3,00%	535.000.000	3,00%	590.000.000	3,00%	625.000.000	3,00%	2.300.000.000	Dinas Koperindag
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen	% Alat UTTP tertera sah	11,71%	11,71%	3,99%	238.500.000	5,07%	270.250.000	6,15%	306.117.000	7,20%	248.235.125	22,46%	1.063.102.125	Dinas Koperindag
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Penjualan Produk Koperasi dan UMKM	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	3,28%	3,28%	4,40%	360.000.000	5,70%	410.000.000	6,90%	465.000.000	8,10%	530.000.000	25,10%	1.765.000.000	Dinas Koperindag

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3 31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						3.000.000.000		3.300.000.000		3.630.000.000		3.993.000.000		13.923.000.000	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Pertumbuhan dan Omset IKM	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	16,02%	16,02%	4,00%	3.000.000.000	4,00%	3.300.000.000	4,00%	3.630.000.000	4,00%	3.993.000.000	16,00%	13.923.000.000	Dinas Koperindag
			Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	0,00%	0,00%	2%		2%		2%		2%		8%		
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						170.131.004.398		180.913.131.789		192.090.660.487		198.728.179.554		741.862.976.227	
	Sekretariat Daerah						118.324.892.528		120.431.368.289		132.152.060.487		134.562.978.704		505.471.300.007	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat Daerah			78,74%	97.796.312.328	78,76%	97.849.929.449	78,78%	107.312.477.283	78,80%	107.239.436.299	78,80%	410.198.155.359	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Kegiatan penunjang urusan Pemerintahan	Jumlah kegiatan penunjang urusan Pemerintahan yang dilaksanakan			7 Kegiatan		7 Kegiatan		7 Kegiatan		7 Kegiatan		7 Kegiatan		
		Terlaksananya Penataan Organisasi	Jumlah Kegiatan Penataan Organisasi			1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
		Terlaksananya Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan			100,00%	17.674.505.300	100,00%	19.441.955.830	100,00%	21.386.151.413	100,00%	23.524.766.554	100,00%	82.027.379.097	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan			5 Kebijakan		5 Kebijakan		5 Kebijakan		5 Kebijakan		5 Kebijakan		
		Tersedianya Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang disusun			875 Dokumen		874 Dokumen		874 Dokumen		874 Dokumen		874 Dokumen		
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan			3 Kebijakan	2.854.074.900	3 Kebijakan	3.139.483.010	3 Kebijakan	3.453.431.791	3 Kebijakan	3.798.775.850	3 Kebijakan	13.245.765.551	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Tepat Waktu dan Lengkap			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan			90,00%		95,00%		98,00%		100,00%		100,00%		
		Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan			3 Kebijakan		3 Kebijakan		3 Kebijakan		3 Kebijakan		3 Kebijakan		
	<b>Sekretariat DPRD</b>						<b>51.806.111.870</b>		<b>60.481.763.500</b>		<b>59.938.600.000</b>		<b>64.165.200.850</b>		<b>236.391.676.220</b>	
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	79,13%*	79,13%*	80,00	25.445.481.370	80,50	30.743.250.000	80,75	28.480.500.000	81,00	29.826.092.600	81,00	114.495.323.970	Sekretariat DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	108,00%	108,00%	100,00%	23.630.630.500	100,00%	26.670.562.500	100,00%	28.148.400.000	100,00%	30.771.316.250	100,00%	109.220.909.250	Sekretariat DPRD
		Terlaksananya Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%	2.730.000.000	100,00%	3.067.951.000	100,00%	3.309.700.000	100,00%	3.567.792.000	100,00%	12.675.443.000	
<b>5</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>						<b>242.729.208.668</b>		<b>248.594.884.706</b>		<b>254.494.831.934</b>		<b>259.817.585.638</b>		<b>1.005.636.510.947</b>	
	<b>Perencanaan</b>						<b>11.455.173.474</b>		<b>11.843.861.791</b>		<b>12.837.332.208</b>		<b>13.242.065.499</b>		<b>49.378.432.973</b>	
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda	82,29%*	82,29%*	82,79%	3.638.246.754	83,04%	4.002.071.429	83,29%	4.381.868.413	83,54%	4.820.055.254	83,54%	16.842.241.851	Bappeda
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase OPD yang mencapai target kinerja	70%	70%	70%	4.358.291.570	80%	4.233.856.827	90%	4.686.742.509	100%	4.476.416.761	100%	17.755.307.667	Bappeda
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	80%	80%	85%	3.458.635.150	90%	3.607.933.535	95%	3.768.721.286	100%	3.945.593.484	100%	14.780.883.455	Bappeda
			Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	80%	80%	85%		90%		95%		100%				

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp									
	<b>Keuangan</b>						<b>222.476.325.912</b>		<b>225.976.402.300</b>		<b>230.076.531.330</b>		<b>234.247.317.363</b>		<b>912.776.576.905</b>	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	82,11%)*	82,11%)*	83,25%	27.500.125.500	83,50%	27.648.688.000	83,75%	28.078.688.000	84,00%	28.513.688.000	82,19%	111.741.189.500	BPKD
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	- Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran - Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran - Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat - Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat - Persentase manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien - Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	189.968.220.512	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	192.990.981.000	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	196.258.063.000	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	199.563.498.000	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	778.780.762.512	BPKD
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	2.382.763.000	100%	2.621.039.300	100%	2.883.143.230	100%	3.171.457.553	100%	11.058.403.083	BPKD
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 105,11% - 100,86%	- 105,11% - 100,86%	- 100% - 100%	2.625.216.900	- 100% - 100%	2.715.694.000	- 100% - 100%	2.856.637.100	- 100% - 100%	2.998.673.810	- 100% - 100%	11.196.221.810	BPKD
	<b>Kepegawaian</b>						<b>4.719.999.882</b>		<b>6.635.559.815</b>		<b>7.276.687.596</b>		<b>7.981.921.976</b>		<b>26.614.169.269</b>	
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM	78,67%)*	78,67%)*	78,75%	2.560.847.900	78,77%	2.925.384.815	78,78%	3.195.502.596	78,80%	3.492.626.976	78,80%	12.174.362.287	BKPSDM
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	0%	0%	60%	702.632.000	63%	1.377.141.000	65%	1.514.850.000	67%	1.666.329.000	67%	5.260.952.000	BKPSDM

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	0%	0%	49%	1.456.519.982	51%	2.333.034.000	54%	2.566.335.000	56%	2.822.966.000	56%	9.178.854.982	BKPSDM
							4.077.709.400		4.139.060.800		4.304.280.800		4.346.280.800		16.867.331.800	
5 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Balitbang	79,18%)*	79,18%)*	79,25%	2.491.806.400	79,50%	2.458.567.500	79,75%	2.545.787.500	80,00%	2.509.287.500	80,00%	10.005.448.900	Balitbang
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dapat ditindaklanjuti	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	80 laporan	24 laporan	22 laporan	1.585.903.000	24 lapooran	1.680.493.300	24 lapooran	1.758.493.300	24 lapooran	1.836.993.300	94 laporan	6.861.882.900	Balitbang
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						10.041.755.200		11.125.930.720		12.238.523.792		13.462.376.171		46.868.585.883	
	Inspektorat Daerah						10.041.755.200		11.125.930.720		12.238.523.792		13.462.376.171		46.868.585.883	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	78,67%)*	78,67%)*	82,00%	6.828.374.200	82,50%	7.591.211.620	83,00%	8.350.332.782	83,50%	9.185.366.060	83,50%	31.955.284.662	Inspektorat Daerah
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	75,00%	75,00%	83,00%	2.835.791.000	84,00%	3.119.370.100	85,00%	3.431.307.110	86,00%	3.774.437.821	86,00%	13.160.906.031	Inspektorat Daerah
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target bobot penilaian akuntabilitas kinerja dengan nilai A	82,75%	82,75%	86,20%	377.590.000	93,10%	415.349.000	96,55%	456.883.900	100,00%	502.572.290	100,00%	1.752.395.190	Inspektorat Daerah
7	Unsur Wilayah						15.688.252.214		16.352.709.896		16.989.801.549		17.662.096.114		66.692.859.773	
	Kecamatan						15.688.252.214		16.352.709.896		16.989.801.549		17.662.096.114		66.692.859.773	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjaya	-	-	75,00%	856.947.800	76,00%	856.947.800	77,00%	856.947.800	78,00%	856.947.800	78,00%	3.427.791.200	Kecamatan Sumberjaya
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	84.061.000	100%	84.061.000	100%	84.061.500	100%	84.061.500	100%	336.245.000	Kecamatan Sumberjaya
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri			1 pekon mandiri	445.923.930	2 pekon mandiri	445.923.930	3 pekon mandiri	445.923.930	3 pekon mandiri	445.923.930	3 pekon mandiri	1.783.695.720	Kecamatan Sumberjaya

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	77.186.000	100%	77.186.000	100%	77.186.000	100%	77.186.000	100%	308.744.000	Kecamatan Sumberjaya
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	37.350.600	100%	37.350.600	100%	37.350.600	100%	37.350.600	100%	149.402.400	Kecamatan Sumberjaya
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	94.256.000	100%	94.256.000	100%	94.256.000	100%	94.256.000	100%	377.024.000	Kecamatan Sumberjaya
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Way Tenong	-	-	75,00%	947.446.300	76,00%	947.446.300	77,00%	947.446.300	78,00%	947.446.300	78,00%	3.789.785.200	Kec Way Tenong
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec Way Tenong
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri			1 pekon mandiri	427.166.200	1 pekon mandiri	427.166.200	1 pekon mandiri	427.166.200	1 pekon mandiri	427.166.200	4 pekon mandiri	1.708.664.800	Kec Way Tenong
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			25%	61.220.000	25%	61.220.000	25%	61.220.000	25%	61.220.000	100%	244.880.000	Kec Way Tenong
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec Way Tenong
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	7.610.000	100%	7.610.000	100%	7.610.000	100%	7.610.000	100%	30.440.000	Kec Way Tenong
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sekincau	-	-	75,00%	1.015.041.100	76,00%	1.015.041.100	77,00%	1.015.041.100	78,00%	1.015.041.100	78,00%	4.060.164.400	Kec Sekincau
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	86.040.000	100%	86.040.000	100%	86.040.000	100%	86.040.000	100%	344.160.000	Kec Sekincau

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri		4 pekon mandiri	4 pekon mandiri	591.194.390	4 pekon mandiri	591.194.390	4 pekon mandiri	591.194.390	4 pekon mandiri	591.194.390	4 pekon mandiri	2.364.777.560	Kec Sekincau
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	60.237.000	100%	60.237.000	100%	60.237.000	100%	60.237.000	100%	240.948.000	Kec Sekincau
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	60.237.000	100%	60.237.000	100%	60.237.000	100%	60.237.000	100%	240.948.000	Kec Sekincau
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	101.382.900	100%	101.382.900	100%	101.382.900	100%	101.382.900	100%	405.531.600	Kec Sekincau
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Belalau	-	-	75,00%	595.152.100	76,00%	595.152.100	77,00%	595.152.100	78,00%	595.152.100	78,00%	2.380.608.400	Kec Belalau
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	27.220.900	100%	27.220.900	100%	27.220.900	100%	27.220.900	100%	108.883.600	Kec Belalau
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri		1 pekon mandiri	29.979.800	1 pekon mandiri	29.979.800	1 pekon mandiri	29.979.800	1 pekon mandiri	29.979.800	4 pekon mandiri	119.919.200	Kec Belalau	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			25%	30.206.800	25%	30.206.800	25%	30.206.800	25%	30.206.800	100%	120.827.200	Kec Belalau
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	25.065.600	100%	25.065.600	100%	25.065.600	100%	25.065.600	100%	100.262.400	Kec Belalau
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	29.849.800	100%	29.849.800	100%	29.849.800	100%	29.849.800	100%	119.399.200	Kec Belalau
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Brak	-	-	75,00%	683.350.000	76,00%	743.500.000	77,00%	796.000.000	78,00%	835.750.000	78,00%	3.058.600.000	Kec Batu Brak

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	37.500.000	100%	157.500.000	Kec Batu Brak
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri			12 pekon mandiri	60.000.000	12 pekon mandiri	90.000.000	12 pekon mandiri	120.000.000	12 pekon mandiri	150.000.000	12 pekon mandiri	420.000.000	Kec Batu Brak
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			25%	30.000.000	25%	45.000.000	25%	60.000.000	25%	75.000.000	100%	210.000.000	Kec Batu Brak
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	90.000.000	Kec Batu Brak
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	110.000.000	100%	166.000.000	100%	205.000.000	100%	244.000.000	100%	725.000.000	Kec Batu Brak
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Baik Bukit	-	-	75,00%	1.309.865.040	76,00%	1.356.565.040	77,00%	1.405.565.040	78,00%	1.463.565.040	78,00%	5.535.560.160	Kec Baik Bukit
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	43.300.000	100%	46.300.000	100%	49.300.000	100%	55.300.000	100%	194.200.000	Kec Baik Bukit
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri			1 pekon mandiri	821.239.960	1 pekon mandiri	874.239.960	1 pekon mandiri	928.239.960	1 pekon mandiri	1.001.239.960	4 pekon mandiri	3.624.959.840	Kec Baik Bukit
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			25%	25.000.000	25%	28.000.000	25%	30.000.000	25%	34.000.000	100%	117.000.000	Kec Baik Bukit
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.000.000	100%	26.000.000	100%	92.000.000	Kec Baik Bukit
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	63.000.000	100%	70.000.000	100%	248.000.000	Kec Baik Bukit

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Sukau	-	-	75,00%	777.313.850	76,00%	893.910.928	77,00%	1.027.997.567	78,00%	1.182.197.202	78,00%	3.881.419.546	Kec Sukau
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100%	99%	100%	34.500.000	100%	39.675.000	100%	45.626.250	100%	52.470.188	100%	172.271.438	Kec Sukau
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri	10 Pekon	10 Pekon	10 Pekon	40.250.000	10 Pekon	46.287.500	10 Pekon	53.230.625	10 Pekon	61.215.219	10 Pekon	200.983.344	Kec Sukau
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	0%	0%	25%	40.250.000	25%	46.287.500	25%	53.230.625	25%	61.215.219	100%	200.983.344	Kec Sukau
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	99%	100%	34.500.000	100%	39.675.000	100%	45.626.250	100%	52.470.188	100%	172.271.438	Kec Sukau
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	69.000.000	100%	79.350.000	100%	91.252.500	100%	104.940.375	100%	344.542.875	Kec Sukau
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Suoh	-	-	75,00%	543.500.000	76,00%	591.960.000	77,00%	641.460.000	78,00%	679.960.000	78,00%	2.456.880.000	Kecamatan Suoh
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			25%	19.230.000	25%	20.000.000	25%	20.000.000	25%	30.000.000	100%	89.230.000	Kecamatan Suoh
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri			7 pekon mandiri	27.110.000	7 pekon mandiri	30.000.000	7 pekon mandiri	30.000.000	7 pekon mandiri	40.000.000	7 pekon mandiri	127.110.000	Kecamatan Suoh
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	-	100%	25.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	95.000.000	Kecamatan Suoh
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	18.190.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	108.190.000	Kecamatan Suoh
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	56.260.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	251.260.000	Kecamatan Suoh

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Gedung Surian	-	-	75,00%	556.512.755	76,00%	612.164.031	77,00%	673.380.434	78,00%	740.718.477	78,00%	2.582.775.696	Kec Gedung Surian
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	24.608.375	100%	27.069.213	100%	29.776.134	100%	32.753.747	100%	114.207.468	Kec Gedung Surian
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri			1 pekon mandiri	44.193.314	2 pekon mandiri	48.612.645	3 pekon mandiri	53.473.910	3 pekon mandiri	58.821.301	3 pekon mandiri	205.101.170	Kec Gedung Surian
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	31.924.640	100%	35.117.104	100%	38.628.814	100%	42.491.696	100%	148.162.254	Kec Gedung Surian
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	7.785.140	100%	8.563.654	100%	9.420.019	100%	10.362.021	100%	36.130.835	Kec Gedung Surian
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	57.041.820	100%	62.746.002	100%	69.020.602	100%	75.922.662	100%	264.731.087	Kec Gedung Surian
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Kebun Tebu	-	-	75,00%	608.092.500	76,00%	608.092.500	77,00%	608.092.500	78,00%	608.092.500	78,00%	2.432.370.000	Kec Kebun Tebu
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	19.671.000	100%	19.671.000	100%	19.671.000	100%	19.671.000	100%	78.684.000	Kec Kebun Tebu
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri			1 pekon mandiri	40.998.000	1 pekon mandiri	40.998.000	1 pekon mandiri	40.998.000	1 pekon mandiri	40.998.000	4 pekon mandiri	163.992.000	Kec Kebun Tebu
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			25%	39.649.000	25%	39.649.000	25%	39.649.000	25%	39.649.000	100%	158.596.000	Kec Kebun Tebu
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	29.302.000	100%	29.302.000	100%	29.302.000	100%	29.302.000	100%	117.208.000	Kec Kebun Tebu

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	26.044.000	100%	26.044.000	100%	26.044.000	100%	26.044.000	100%	104.176.000	Kec Kebun Tebu
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Air Hitam	-	-	75,00%	660.292.500	76,00%	660.292.500	77,00%	660.292.500	78,00%	660.292.500	78,00%	2.641.170.000	Kec Air Hitam
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec Air Hitam
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri			0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec Air Hitam
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			25%	54.755.000	25%	54.755.000	25%	54.755.000	25%	54.755.000	100%	219.020.000	Kec Air Hitam
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec Air Hitam
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	46.042.600	100%	46.042.600	100%	46.042.600	100%	46.042.600	100%	184.170.400	Kec Air Hitam
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Pagar Dewa	-	-	75,00%	528.064.500	76,00%	528.064.500	77,00%	528.064.500	78,00%	528.064.500	78,00%	2.112.258.000	Kec Pagar Dewa
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec Pagar Dewa
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri			1 pekon mandiri	5.475.000	1 pekon mandiri	5.475.000	1 pekon mandiri	5.475.000	1 pekon mandiri	5.475.000	4 pekon mandiri	21.900.000	Kec Pagar Dewa
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			25%	68.600.000	25%	68.600.000	25%	68.600.000	25%	68.600.000	100%	274.400.000	Kec Pagar Dewa

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec Pagar Dewa
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	54.235.500	100%	54.235.500	100%	54.235.500	100%	54.235.500	100%	216.942.000	Kec Pagar Dewa
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Batu Ketulis	-	-	75,00%	513.288.900	76,00%	513.288.900	77,00%	513.288.900	78,00%	513.288.900	78,00%	2.053.155.600	Kec Batu Ketulis
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000	Kec Batu Ketulis
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri			1 pekon mandiri	30.000.000	1 pekon mandiri	30.000.000	1 pekon mandiri	30.000.000	1 pekon mandiri	30.000.000	4 pekon mandiri	120.000.000	Kec Batu Ketulis
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			25%	24.930.000	25%	24.930.000	25%	24.930.000	25%	24.930.000	100%	99.720.000	Kec Batu Ketulis
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000	Kec Batu Ketulis
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	43.156.100	100%	43.156.100	100%	43.156.100	100%	43.156.100	100%	172.624.400	Kec Batu Ketulis
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec BNS	-	-	75,00%	581.250.000	76,00%	609.350.000	77,00%	637.950.000	78,00%	671.550.000	78,00%	2.500.100.000	Kec BNS
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	17.500.000	100%	19.500.000	100%	21.500.000	100%	22.500.000	100%	81.000.000	Kec BNS
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri			1 pekon mandiri	15.000.000	1 pekon mandiri	16.000.000	1 pekon mandiri	17.000.000	1 pekon mandiri	18.000.000	4 pekon mandiri	66.000.000	Kec BNS

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			25%	30.075.000	25%	32.075.000	25%	34.075.000	25%	34.075.000	100%	130.300.000	Kec BNS
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.000.000	100%	13.000.000	100%	46.000.000	Kec BNS
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	28.175.000	100%	30.175.000	100%	32.175.000	100%	34.175.000	100%	124.700.000	Kec BNS
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kec Lumbok Seminung	-	-	75,00%	733.934.000	76,00%	753.934.000	77,00%	789.000.000	78,00%	809.000.000	78,00%	3.085.868.000	Kec Lumbok Seminung
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100%	100%	100%	38.521.500	100%	38.521.500	100%	38.521.500	100%	38.521.500	100%	154.086.000	Kec Lumbok Seminung
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pekon mandiri	Jumlah pekon mandiri	5 Pekon	5 Pekon	5 Pekon	15.000.000	2 Pekon	12.775.000	2 Pekon	12.775.000	2 Pekon	12.775.000	11 Pekon	53.325.000	Kec Lumbok Seminung
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya kasus gangguan keamanan	Perentase penurunan kasus gangguan keamanan	25%	25%	25%	25.500.000	25%	22.234.000	25%	22.234.000	25%	22.234.000	100%	92.202.000	Kec Lumbok Seminung
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	30.000.000	100%	35.750.000	100%	30.970.000	100%	35.000.000	100%	131.720.000	Kec Lumbok Seminung
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	210.000.000	Kec Lumbok Seminung
8 01	Unsur Pemerintahan Umum						8.256.960.000		9.351.111.200		9.603.397.420		10.585.037.162		37.796.505.782	
	Kesatuan Bangsa Dan Politik						8.256.960.000		9.351.111.200		9.603.397.420		10.585.037.162		37.796.505.782	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	75,24%)*	75,24%)*	75,85%	2.568.652.000	76,05%	2.829.517.200	76,25%	3.115.968.920	76,45%	3.445.565.812	76,45%	11.959.703.932	Badan Kesbangpol

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s/d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya pemahaman idiologi dan wawasan kebangsaan masyarakat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap idiologi dan wawasan kebangsaan	75,00%	75,00%	80,00%	583.600.000	85,00%	641.960.000	90,00%	707.816.000	95,00%	781.897.600	95,00%	2.715.273.600	Badan Kesbangpol
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya peran Partai Politik dalam meningkatkan Etika dan Budaya Politik Partai Politik masyarakat	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	68,00%	68,00%	69,00%	1.514.708.000	70,00%	2.105.634.000	71,00%	1.738.212.500	72,00%	1.912.033.750	72,00%	7.270.588.250	Badan Kesbangpol
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	50,00%	50,00%	55,00%	545.000.000	60,00%	599.500.000	65,00%	659.450.000	70,00%	725.395.000	70,00%	2.529.345.000	Badan Kesbangpol
75	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	70,00%	70,00%	71,00%	1.545.000.000	72,00%	1.524.500.000	73,00%	1.566.950.000	74,00%	1.723.645.000	74,00%	6.360.095.000	Badan Kesbangpol
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya kewaspadaan aparaturnya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	75,00%	75,00%	100,00%	1.500.000.000	100,00%	1.650.000.000	100,00%	1.815.000.000	100,00%	1.996.500.000	100,00%	6.961.500.000	Badan Kesbangpol
TOTAL							1.444.224.568.379		1.398.277.800.573		1.454.268.806.803		1.506.375.773.797		5.803.146.949.552	



## BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome*.

Keterkaitan indikator makro antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 8.1  
Keterkaitan indikator makro

Indikator	Target RPJMN					Target RPJMD Provinsi					Target RPJMD Lampung Barat 2017-2022			Target RPD Lampung Barat 2023-2026	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.50	5.90	6.20	6.50	7.00	-1,67	2,5-3,5	3-4	3,5-4,5	4,5-5,5	5,40%-5,60%	5,60%-5,80%	5,80%-6,00%	5,00%	5,10%
Tingkat Kemiskinan (%)	11.56	11.27	10.35	9.68	9.20	11.1	12,76-12,4	12,4-11,9	11,9-11,4	11,4-10,9	13	12.5	12	12,37%	12,16%
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.80	3.60	3.40	3.00	2.70	3,85	4-4,5	4,3-4,4	4,0-4,3	3,8-4	0.8	0.75	0.71	2,60%	2,50%
Rasio Gini					0.360-0.474	-	0,310-0,334	0,308-0,324	0,302-0,319	0,293-0,314	0.3	0.28	0.26	0,269	0,261
Penurunan Emisi GRK (%)					27.3	-	6.74	6.915	7.066	7.29	-	-	-	-	-
Indeks Pembangunan Manusia					67,6-68,1	72,1	70,8	70,95	71,2	71,5	67,75	68,54	69,34	68,95	69,52



Hasil penetapan indikator kinerja pemerintah secara lengkap dituangkan dalam berikut ini :

Tabel 8.2  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	pendapatan perkapita	24.618.877	26.786.367	28.020.689	29.339.780	30.750.169
-	-	Gini Rasio	0,295 )*	0,269	0,261	0,253	0,245
2	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	12,82%	12,37%	12,16%	11,94%	11,73%
-	-	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,83%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%
3	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,90	68,95	69,52	70,15	70,77
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	-	69,02	70,16	71,50	72,64
5	Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99	65,99	66,61	67,23	67,86
6	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	163,85	162,21	158,93	155,66	152,38
7	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	55,06 )*	57,05	58,05	59,05	60,05
-	-	Nilai SAKIP	67,15 )*	70,25	70,5	70,75	71,01
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	-	2,51	2,55	2,60	2,65
9	Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	-	84,10	84,15	84,20	84,25



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun			
				2023	2024	2025	2026
	dalam kehidupan masyarakat						
10	Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	-	13,30	15,50	17,70	20,00
		Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	-	2,40	6,40	10,40	14,40

Ket)\* = Data Tahun 2020

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	pendapatan perkapita	24.618.877	26.786.367	28.020.689	29.339.780	30.750.169	30.750.169
1.2	Gini Rasio	0,295)*	0,269	0,261	0,253	0,245	0,245
1.3	Angka Kemiskinan	12,82%	12,37%	12,16%	11,94%	11,73%	11,73%
	<b>Kesejahteraan Masyarakat</b>						



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>						
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,90	68,95	69,52	70,15	70,77	70,77
<b>3</b>	<b>Seni Budaya dan Olahraga</b>						
3.1	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	-	13,30	15,50	17,70	20,00	20,00
3.2	Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	-	2,40	6,40	10,40	14,40	14,40
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
	<b>Pelayanan Urusan Wajib</b>						
	<b>Terkait Pelayanan Dasar</b>						
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
3.1	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	-	69,02	70,16	71,50	72,64	72,64
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>						
5.1	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	-	84,10	84,15	84,20	84,25	84,25
5.2	Indeks Resiko Bencana	163,850	162,210	158,930	155,660	152,380	152,380



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
	<b>Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>						
<b>1</b>	<b>tenaga kerja;</b>						
1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,83%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%	2,30%
<b>4</b>	<b>lingkungan hidup;</b>						
4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99	65,99	66,61	67,23	67,86	67,86
	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						
	<b>Kemampuan Ekonomi Daerah</b>						
<b>1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>						
1.1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	55,06 )*	57,05	58,05	59,05	60,05	60,05
1.2	Nilai SAKIP	67,15 )*	70,25	70,50	70,75	71,01	71,01
1.3	Indeks Pelayanan Publik	-	2,51	2,55	2,60	2,65	2,65

Ket )\* = Data Tahun 2020





## BAB IX PENUTUP

RPD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 4 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan.

Dokumen RPD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Lampung Barat periode Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat .

RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan perencanaan pembangunan 4 tahunan di Kabupaten Lampung Barat yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat . Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS